

341-15  
man  
u a

**KEBIJAKAN INVESTASI  
SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH  
DALAM ERA GLOBALISASI**  
(Suatu Studi di Propinsi Nusa Tenggara Barat)



**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH ;**

**ARIS MUNANDAR, SH  
NIM : B4A.001.009**

**DOSEN PEMBIMBING ;  
PROF. DR SRI REDJEKI HARTONO, SH**

**MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**


**KEBIJAKAN INVESTASI  
SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH  
DALAM ERA GLOBALISASI  
(Suatu Studi di Propinsi Nusa Tenggara Barat)**

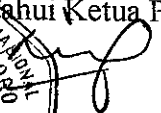

**Disusun Oleh:  
ARIS MUNANDAR, SH  
NIM: B4A 001009**

Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 13 Oktober 2003

Tesis ini telah diterima  
Sebagai Persyaratan untuk memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

  
**PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH**  
NIP : 130 354 857

Mengetahui Ketua Program,  
  
  
**PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH**  
NIP : 130 350 519

*"Bacalah. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.  
 Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.  
 "Bacalah. Dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah,  
 yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.  
 Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya"*  
**(Al Qur'an, Surat ke 96 : 1 – 5)**

*"Pelajarilah ilmu,  
 Barangsiapa mempelajarinya karena Allah, itu taqwa.  
 Menuntutnya, itu ibadah.  
 Mengulang-ulangnya, itu tasbih.  
 Membahasnya, itu jihad.  
 Mengajarkannya pada orang yang tidak tahu, itu sadakah.  
 Memberikannya kepada ahlinya, itu mendekatkan diri kepada Tuhan"*  
**(Abusy Syaikh Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil, Ilya Al- Ghozali, 1986)**

**Untuk:**  
*Kedua Orang Tua dan Mertua  
 Kekasihku Rina Widyana Z dan  
 Buah hatiku:  
 Winda Risna Yessiningrum  
 Arinaldi Dwi Ruliantara*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke khadirat Allah Subhanaahu Wata'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **"PENERAPAN KEBIJAKAN INVESTASI SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH DALAM ERA GLOBALISASI"**, guna memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Selain berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa penulis haturkan penghargaan dan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada :

1. Bapak H. Ahmad (Alm) dan Ibu Hj. Ruliah selaku orang tua penulis, yang telah melahirkan dan atas segala jerih-payahnya telah membesarkan, mendidik serta mengarahkan penulis untuk tetap meniti kehidupan pada jalan yang benar;
2. Istri penulis Rina Widyana Zubaedah beserta anak-anak penulis Winda Risna Yessiningrum dan Arinaldi Dwi Ruliantara atas segala pengorbanannya yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta telah merelakan kesempatan yang sangat berharga untuk tidak berkumpul bersama penulis selama dua tahun penulis menyelesaikan program Magister Hukum di Semarang;



3. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan bimbingan selama penyelesaian penulisan tesis;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Redjeki Hartono, SH selaku dosen pembimbing penulis yang penuh dengan rasa keikhlasan, kesabaran dan secara teliti telah membimbing penulis sehingga penulisan tesis ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya;
5. Bapak-bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini;
6. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram beserta jajaran pimpinannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum di UNDIP Semarang serta rekan-rekan kerja penulis yang selalu memberikan dorongan dan motivasi;
7. Bapak Ketua BKPMMD Propinsi Nusa Tenggara Barat yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di BKPMMD Propinsi NTB serta telah memberikan keterangan, data-data dan masukan berharga dalam penulisan tesis ini;
8. Rekan-rekan penulis di Progran Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP dan Bapak-bapak sesepuh Komplek Erlangga Semarang, di mana penulis bertempat tinggal selama menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum, yang selalu setia menemani dan memberikan masukan serta nasihat-nasihat

kepada penulis, dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara satu-persatu<sup>h</sup> yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tulisan ini. Semoga segala bantuan dan amal kebajikan yang telah penulis terima mendapat balasan dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis sangat menyadari bahwa karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang ada pada diri penulis, tentu tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menerima saran dan kritik demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya, penulis sangat berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memenuhi kebutuhan dalam praktek penanaman modal.

Semarang, Oktober 2003

Penulis

## ABSTRAKSI

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dampak kebijakan investasi setelah berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hal ini meliputi: (i) upaya untuk mengetahui, mengungkapkan dan mengkaji kebijakan penanaman modal di Indonesia, khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat; (ii) mengetahui penerapan perubahan kebijakan, mekanisme dan prosedur perizinan investasi (penanaman modal) di Nusa Tenggara Barat. Dari penelitian ini dapat diketahui tingkat perkembangan investasi dan kendala-kendala yang dihadapi di Nusa Tenggara Barat.

Metode penelitian didasarkan atas pendekatan normative dan pendekatan empirik. Pendekatan empirik digunakan dalam melihat hukum, tidak sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normative belaka. Penelitian diawali dengan menginventarisasi perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan investasi di Indonesia, baik yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan para pejabat yang mempunyai kompetensi atas kebijakan investasi serta para investor yang melakukan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, perubahan kebijakan investasi lebih ditekankan pada perubahan prosedur dan tata cara penanaman modal yakni dengan diterbitkannya KEPPRES No. 117 tahun 1999, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya SK MENINVES/Kepala BKPM No. 37 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan Surat Keputusan MENINVES/Kepala BKPM No. 38 tahun 1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Tujuan dari pelimpahan wewenang pemberian persetujuan, pemberian fasilitas dan perijinan penanaman modal kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi adalah untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan serta peningkatan efisiensi dalam kegiatan investasi.

Perubahan kebijakan investasi, terutama yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara perijinan telah memberi pengaruh positif pada tingkat perkembangan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Perubahan kebijakan prosedur dan tata cara penanaman modal, berpengaruh pada meningkatnya jumlah perusahaan yang melakukan investasi; meningkatnya rencana dan realisasi investasi serta rencana dan realisasi penggunaan tenaga kerja baik tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi di Propinsi NTB, disebabkan karena berbagai faktor: (1) Faktor internal dari investor, antara lain berupa a). kesulitan permodalan; b). investor tidak memiliki komitmen yang kuat untuk berinvestasi di daerah; c). investor kesulitan mendapatkan lahan strategis; d). sulit mendapatkan mitra usaha yang profesional di daerah. (2). Faktor infrastruktur: berupa kurangnya sarana dan prasarana pendukung (3). Faktor keamanan: masih kurang kondisinya keamanan dan kenyamanan (4). Faktor mental aparat negara, hal ini dapat dilihat pada kecenderungan terjadinya praktek-praktek KKN dan pungutan tidak resmi pada proses pengurusan perijinan investasi (5). Faktor pelayanan investasi yang masih bersifat sektoral.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu strategi yang perlu dipertimbangkan dalam mendorong iklim yang lebih kondusif bagi kegiatan investasi adalah penerapan prosedur pelayanan perizinan investasi yang dilakukan dengan pelayanan satu atap (*one stop service*). Hal ini ditujukan untuk memudahkan investor dan menyederhanakan system birokrasi dalam kegiatan investasi. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum menjalankan kewenangan pemerintahan dalam bidang investasi, agar lebih proaktif dalam menerjemahkan kebijakan investasi dengan mengimplementasikannya dalam bentuk peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## ABSTRACT

This research is aimed at to analyze the impact of investment policy after The National Government introduced the Act of regional Autonomy. This purposes covering: (i) some effort to know, to analyze, and to discribe the national policy of investment in Nusa Tenggara Barat; (ii) to know the implementation of new policy, mechanism, and procedure of invesment licence in Nusa Tenggara Barat. From this research, it can be understood that the rate of investment and handicapped or obstacles of invesment activities in Nusa Tenggara Barat.

This research method is based on the normative and empirical approaches. The empirical approach is used to analyze the law, not in frame of the law in book only. This research is started by inventarising the laws and government regulation that regulate investment policy in Indonesia, either using domestic or foreign direct investment facilities. Then, this research also conducted interview with staffs who have authority in investment policy in Nusa Tenggara Barat. The data are analyzed by qualitative analysis.

Since the regional autonomy has been introduced, the change of investment policy has been atressed into the change of procedure in investment that is based on the Presidential Decree No. 117 Year 1999, then, it is followed by the SK. MENINVES/Head of BKPM No. 37 Year 1999 on the delegated authority, providing license and facilities and license to implement the investment to Governor of Province and SK MENINVES/ Head of BKPM No. 38 Year 1999 on Guidance and Procedure of Investment that established in frame of domestic and foreign investment. The purpose of the SK MENINVES/ Head of BKPM No. 37 Year 1999 is to fulfill the need and demand and improving efficiency in investment activities.

The change of investment policy, particulary in procedure of license providing positive impact to: the rate of investment in Nusa Tenggara Barat Propince; the improving of the number of companies that invest in NTB; improving plan and realization of investment and the plan in optimizing of worker force either Indonesian worker and foreign worker. While, the obstacle in investment activities in province of Nusa Tenggara Barat, are caused by several factors: (1) Internal factor from investor, such as : a). difficulties in capital; b). investor hes not strong commitment to conduct investment in region; c). investor has difficulties in obtaining strategic land for busines; d). investor has difficulties in meeting profesional partner in region. (2) Infrastructure factor, such as the lack of supporting infrastructure; (3). Safety Factor, such as the stability problem, conducive and safe atmosphere in investment. (4). Factor of Apparatus' mental. This canbe seen from the tend of collusion, corruption, and nepotism and other manipulation practices in the process of investment licences; (5). Factor investment licences service tends to be fragmented and sectoral.

Based on the above result of research, it can be concluded that the one of strategies that need to be reconsidered in frame of improving conducive atmosphere for investment activities is application of procedure in one stop service system. It is aimed at simplifying the bearroucration system in investment. For regional government authority in the field of investment, so they should be more proactive in translating the investment policy by implementing them into the regional regulation based on the existing law.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAKSI</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
 <b>BAB. I PENDAHULUAN</b> .....	 1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kontribusi Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	16
F. Kerangka Berfikir.....	21
 <b>BAB. II TINJAUAN PUSTAKA: PENGARUH BERLAKUNYA</b> <b>OTONOMI DAERAH TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN</b> <b>INVESTASI</b>	
<b>A. Investasi di Indonesia</b>	
<b>1. Tinjauan Umum Investasi</b> .....	32
a. Pengertian Investasi .....	32
b. Tujuan Investasi .....	41
c. Bentuk-Bentuk Investasi .....	46
d. Kebijakan Dalam Investasi .....	57
e. Aspek Hukum Investasi .....	66
<b>2. Arti Penting Investasi Bagi Pembangunan di Indonesia</b>	
a. Sumber Modal Pembangunan .....	69
b. Penyediaan Lapangan Pekerjaan .....	77
c. Sarana Alih Teknologi .....	79
d. Peningkatan Pendapatan Nasional .....	83
e. Peningkatan Pendapatan Masyarakat .....	87
<b>3. Pengaturan Investasi di Indonesia</b> .....	88
a. Pengaturan Investasi Secara Nasional .....	88
b. Pengaturan Investasi di Tingkat Daerah .....	91

<b>B. Perubahan Kebijakan Investasi di Indonesia</b>	
<b>1. Arah Kebijakan Investasi</b>	93
a. Peningkatan Kegiatan Dunia Usaha	93
b. Penyederhanaan Pelayanan Kegiatan Investasi	98
c. Promosi Kegiatan Investasi	102
<b>2. Strategi Kebijakan Investasi di Indonesia</b>	105
a. Strategi Jangka Panjang	105
b. Strategi Jangka Menengah	107
c. Strategi Jangka Pendek	108
<b>3. Perubahan Kebijakan Investasi di Indonesia</b>	108
a. Kearah Perubahan Undang-Undang Investasi	108
b. Pemberdayaan Usaha kecil/Menengah	112
c. Lapangan Usaha Kegiatan Investasi	118
<b>4. Perubahan Kebijakan Investasi dalam Menghadapi Era Glabalisasi Ekonomi</b>	121
<b>C. Arti Penting Perubahan Kebijakan Investasi Setelah Berlakunya Otonomi Daerah</b>	
<b>1. Otonomi Daerah</b>	130
a. Pengertian dan Hakikat Otonomi Daerah	131
b. Tujuan Otonomi Daerah	138
c. Kebijakan Investasi Setelah Otonomi Daerah	139
<b>2. Arti Penting Perubahan Kebijakan Investasi Setelah Otonomi Daerah</b>	140
a. Sumber Modal Pembangunan Daerah	140
b. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Potensi Ekonomi Daerah	143
c. Peningkatan Sumber Daya Manusia	144
d. Peluang dan Kesempatan Berusaha di Daerah	145
<b>3. Manfaat Perubahan Kebijakan Investasi Setelah Otonomi Daerah</b>	147
a. Bagi Investor	147
b. Bagi Penerima Investasi	149
c. Bagi Masyarakat Luas	151

## **BAB. III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

<b>1. Perubahan Kebijakan Investasi di Indonesia</b>	<b>152</b>
<b>1.1. Perubahan Kebijakan Investasi Sebelum Otonomi Daerah</b>	<b>153</b>
a. Perubahan ketentuan Kepemilikan Saham dan Peralihan Saham Kepada Pihak Indonesia	153
b. Perubahan Ketentuan Batas Minimum Investasi Dalam Rangka PMA	157
<b>1.2. Perubahan Kebijakan Investasi Setelah Otonomi Berlaku Daerah</b>	<b>162</b>
a. Perubahan Prosedur dan Tata Cara Penanaman Modal dengan Fasilitas PMA/PMDN	162
b. Perubahan Tugas dan Fungsi BKPM	167
c. Perubahan Tugas dan Fungsi BKPMD	169
c. Perubahan Pokok-Pokok Organisasi Perwakilan RI	172
<b>2. Penerapan Perubahan Kebijakan Dalam Prosedur dan Tata Cara Perizinan Investasi (Penanaman Modal)</b>	<b>173</b>
<b>2.1. Prosedur dan Tata Cara Perizinan Investasi (Penanaman Modal) yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN</b>	<b>173</b>
a. Prosedur dan Tata Cara Mengajukan Perizinan Investasi (Penanaman Modal)	173
b. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Perizinan Investasi	177
c. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Perizinan Investasi PMA	180
d. Prosedur dan Tata Cara Khusus di Bidang Tertentu....	183
e. Prosedur dan Tata Cara Permohonan pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing	187
f. Prosedur dan Tata Cara Pendirian Perusahaan Penyertaan Modal	188
g. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Tetap	189
h. Prosedur dan Tata Cara Perluasan Penanaman Modal...	191
i. Prosedur dan Tata Cara Perubahan Investasi	193
j. Prosedur dan Tata Cara Persetujuan Izin Pelaksanaa Investasi (Penanaman Modal)	206
<b>2.2. Prosedur dan Tata Cara Perizinan Investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat</b>	<b>219</b>



a. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Perizinan (Penanaman Modal) di BKPM	219
b. Prosedur dan Tata Cara Perizinan Investasi (Penanaman Modal) di Wilayah Kapet Bima	239
<b>4. Pengaruh Perubahan Kebijakan Investasi Terhadap Perkembangan Investasi (Penanaman Modal)</b>	245
<b>4.2. Perkembangan Kegiatan Investasi (Penanaman Modal) di Propinsi NTB</b>	246
a. Perkembangan Investasi di Nusa Tenggara Barat Sebelum Berlakunya Otonomi Daerah	246
b. Perkembangan Investasi di NTB Setelah Berlaku Otonomi Daerah	251
<b>3.2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan Investasi di Propinsi NTB</b>	264
<b>B. Pembahasan</b>	
<b>1. Perubahan Kebijakan Investasi (Penanaman Modal) Di Indonesia</b>	267
1.1. Perubahan Kebijakan Investasi Sebelum Otonomi Daerah.	267
1.2. Perubahan Ketentuan Batas Minimum Investasi	274
<b>2. Penerapan Perubahan Kebijakan Investasi (Penanaman Modal) Terkait dengan Prosedur dan Tata Cara Perizin- an Investasi PMA/PMDN</b>	279
2.1. Penerapan Perubahan Kebijakan Investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat	279
2.2. Prosedur dan Tata Permohonan Perizinan Investasi PMA/PMDN	284
<b>3. Analisis Pengaruh Perubahan Kebijakan Investasi Terhadap Perkembangan Kegiatan Investasi di NTB</b>	317
<b>3.1. Tingkat perkembangan Investasi di Propinsi NTB</b>	317
a. Tingkat Perkembangan Investasi di NTB Sebelum Dan Setelah Berlaku Otonomi Daerah	317
b. Tingkat Perkembangan Investasi Menurut Sektor/ Bidang Usaha Perusahaan PMA/PMDN Sebelum Dan Setelah Berlaku Otonomi Daerah	321
c. Perkembangan Kegiatan Investasi di Propinsi NTB Setelah Berlaku Otonomi Daerah	329
<b>3.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Investasi di Nusa Tenggara Barat</b>	338

## **BAB IV: P E N U T U P**

<b>a. Kesimpulan .....</b>	<b>343</b>
<b>b. Sa r a n .....</b>	<b>347</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Perkembangan Investasi di Nusa Tenggara Barat Tahun 1998.....	247
Tabel 2 : Alokasi Investasi menurut Bidang Usaha Perusahaan PMDN / PMA di Nusa Tenggara Barat Tahun 1998.....	250
Tabel 3 : Perkembangan Investasi di Nusa Tenggara Barat Tahun 2001 .....	252
Tabel 4 : Alokasi Investasi menurut Bidang Usaha Perusahaan PMDN / PMA di Nusa Tenggara Barat Tahun 2001 .....	255
Tabel 5 : Jumlah Perusahaan PMDN/PMA di NTB Per Kabupaten/Kota s/d Desember 2002 .....	256
Tabel 6 : Perkembangan investasi di NTB tahun 2001.....	258
Tabel 7 : Alokasi Investasi Menurut Bidang Usaha Perusahaan PMDN/ PMA di NTB tahun 2002 .....	261
Tabel 8 : Jumlah Perusahaan PMDN/PMA di NTB Per Kabupaten/Kota s/d Desember tahun 2002 .....	262
Tabel 9 : Tingkat Perkembangan Investasi Sebelum dan Setelah di Berlakukannya Otonomi Daerah di NTB .....	321
Tabel 10 : Tingkat Perkembangan Investasi Menurut Bidang Usaha/Sektor Sebelum dan setelah Otonomi Daerah di NTB .....	329
Tabel 11 : Tingkat Perkembangan Investasi dari tahun 2001 s/d tahun 2002 di NTB .....	333
Tabel 12 : Tingkat Perkembangan Investasi Berdasarkan Bidang Usaha/ Sektor dari tahun 2001 s/d tahun 2002 di NTB.....	336

**DAFTAR SINGKATAN**

ADB	: Asia Developmen Bank
AFTA	: ASEAN Free Trade
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Limgkungan
APIT	: Angka pengenal Impor Terbatas
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKPMD	: Badan Koordinasi penanaman Modal Daerah
BPHN	: Badan pembinaan Hukum Nasional
BPM	: Badan Penanaman Modal
BPJN	: Badan Pertanahan Nasional
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
GATT	: General Agreemen on Tariff and Trade
IUT	: Izin Usaha Tetap
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
KAPET	: Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
NTB	: Nusa Tenggara Barat
KITAS	: Kartu Izin Tinggal Terbatas
KPWA	: Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing
Perum	: Perusahaan Umum
Perjan	: perusahaan Jawatan
PMA	: Penanaman Modal Asing

PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
RPTK	: Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
SPPMA	: Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing
SPPMDN	: Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri
UUG	: Undang Undang Gangguan
UUPMA	: Undang Undang Penanaman Modal Asing
UUPMDN	: Undang Undang Penanaman Modal Dalam Negeri
UUPM	: Undang Undang Tentang Pasar Modal
UUPT	: Undang Undang Perseroan Terbatas
VITAS	: Visa Tinggal Terbatas
WB	: Word Bank
WTO	: Word Trade Organization

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bersamaan dengan era reformasi, Bangsa Indonesia telah bertekad untuk melakukan perubahan-perubahan, yakni dengan jalan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan tidak terkecuali reformasi dalam bidang hukum.

Penyempurnaan tatanan kehidupan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 yakni dalam bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah serta pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pembangunan di bidang ekonomi, kebijakan pembangunan antara lain diarahkan pada; pengembangan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraria sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.<sup>1)</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Tap. MPR No. IV/MPR/1999 tentang *Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN)*

Selain itu, kebijakan pembangunan dalam bidang ekonomi diarahkan pula pada upaya mengembangkan kebijakan industri, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka akseptabilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah, melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan. Dalam bidang industri, perdagangan dan investasi; pembangunan dan pengembangannya diarahkan pada upaya melakukan secara pro-aktif dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor terutama dari sektor industri yang berbasis pada sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional.

Upaya yang harus dilakukan dan sekaligus menjadi beban pemerintah pasca pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan amanat reformasi adalah menyelesaikan berbagai macam persoalan baik dalam bidang ; politik, sosial-ekonomi dan tidak terkecuali persoalan dalam bidang hukum. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi dan keluar dari krisis yang bersifat multidimensi yang cenderung mengarah pada terjadinya dis-integrasi bangsa, adalah dengan mengundangkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Jika dikaji lebih jauh Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dikaitkan dengan sistem pemerintahan

berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu dalam rangka mewujudkan demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dari berbagai keanekaragaman daerah terutama dalam menghadapi perkembangan nasional, regional dan internasional serta dalam menghadapi persingan global.

Sistem Otonomi yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 adalah otonomi yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menitik beratkan pemberian Otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang didasarkan azas Desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada, tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peluang bagi masing-masing daerah untuk menentukan sendiri arah kehidupannya, di samping itu juga dapat menjadi tantangan tersendiri pula. Dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa pengaturan kewenangan



daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara macro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, dan standarisasi nasional.<sup>2)</sup>

Terkait dengan upaya pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di daerah, khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi terutama dalam upaya mengembangkan investasi, tidak dapat dilepaskan dari dampak globalisasi termasuk di dalamnya liberalisasi perdagangan dan investasi. Globalisasi ekonomi, ditandai oleh era liberalisasi, privatisasi dan deregulasi, sekaligus merupakan tiga unsur penggerak utama dari globalisasi. Leberalisasi dan aliran modal merupakan faktor terpenting yang mempercepat pencapaian tujuan global dan kesejahteraan dunia. Aliran modal ini terdiri dari tiga katagori utama, yakni : *pertama*, yang menyangkut aliran uang dan keuangan yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa (misalnya transaksi eksopr, impor dan pengeluaran wisatawan), *kedua*, penanaman modal asing langsung yang tidak hanya meliputi pengalihan modal, melainkan juga keterampilan manajemen dan teknologi; dan *ketiga*, investasi fortfolio (investasi tidak langsung) dalam berbagai transaksi finansial lainnya.<sup>3)</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat Ketentuan Pasal 7 Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>3</sup> Carunia Mulia Firdausi, *Indonesia Menapak Abad 21, Kajian Ekonomi Politik*, Jakarta, Millennium Publiser, 2000, hal : 4

Setelah Indonesia menandatangani perjanjian *World Trading Organization (WTO)* dan tergabung menjadi anggota, maka pemerintah Indonesia dituntut untuk memenuhi dan melaksanakan jadwal liberalisasi perdagangan dan investasi yang telah disepakati, yakni; *Asean Free Trade Area (AFTA)* di tingkat ASEAN yang pelaksanaannya telah dipercepat pada tahun 2003, dan pada tingkat APEC yang harus telah dilaksanakan pada tahun 2020.

Pengaruh globalisasi di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya investasi pada berbagai kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan transnasional/*Multi National Corporation* yang selanjutnya disingkat (TNC). Bahkan, merupakan suatu kenyataan bahwa perdagangan internasional makin tidak dapat dipisahkan dengan arus investasi. Dengan kata lain, perdagangan di Indonesia erat berkaitan dengan investasi oleh TNC. Selanjutnya, dampak globalisasi di Indonesia telah pula menimbulkan berbagai perkembangan yang dirasakan sangat cepat dalam bidang struktural. Perkembangan perekonomian nasional yang tadinya sangat erat dengan intervensi pemerintah dalam berbagai kebijakan ekonomi, kini telah berubah dengan lebih besar mengandalkan pada mekanisme pasar dan persaingan antar pelaku ekonomi.

Mengantisipasi persaingan dalam kegiatan di bidang investasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam bidang investasi melalui PP No. 20 tahun 1994 yang antara lain mencakup langkah-langkah penyederhaan dan penghapusan ketentuan-ketentuan pembatasan yang berkaitan dengan

kepemilikan, batas minimum investasi pengkajian kembali serta pengurangan cabang usaha yang termasuk dalam Daftar Negatif Infestasi (DNI).

Pemerintah secara konsekwen telah mengambil langkah-langkah lanjutan antara lain berupa pengendoran persyaratan lokasi industri dan pendelegasian kewenangan perijinan kepada BKPM untuk investasi dibawah US \$ 100 juta dan kepada pemerintah daerah Tingkat I untuk investasi kurang dari US \$ 10 juta. Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 1999, telah disetujui usulan Menteri Investasi mengenai pelimpahan wewenang persetujuan investasi bagi PMA dan PMDN kepada BKPM/BKPMMD tanpa batas dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu dalam mempromosikan investasi di luar negeri dilakukan pembaharuan pola pendelegasian perijinan dengan mengajukan aplikasi ke KBRI/Konjen setempat. Semua itu, tentu saja perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dampak negatif yang akan muncul.<sup>4)</sup>

Upaya untuk mempercepat pembangunan di daerah khususnya dalam bidang ekonomi, haruslah sesuai dan sejalan dengan Garis Garis Besar Haluan Negara dan prinsip-prinsip Otonomi Daerah sebagaimana telah digariskan dalam UU No. 22 tahun 1999, maka upaya-upaya yang harus dilakukan, adalah:

1. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif, sebagai negara maritim dan agraris sesuai

---

<sup>4</sup> Carunia Mulya Firdausi, *Ibid*, hal.24

kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama; pertanian dalam arti luas, kehutanan kelautan, pertambangan, parawisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.

2. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka akseptabilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi setiap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif, terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan menghapus segala hambatan.
3. Berkaitan dengan upaya-upaya tersebut, harus pula disertai dengan upaya mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian khususnya dalam kegiatan bidang investasi di daerah dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

Era perekonomian yang makin mengglobal dan berorientasi pasar, menimbulkan konsekwensi di mana batas antara pasar domestik dengan pasar internasional dan batas antara daerah yang langka sumber daya ekonominya dengan daerah yang surplus sumber daya ekonomi menjadi semakin tidak relevan. Persaingan kepentingan antara daerah-daerah menjadi semakin ketat, sehingga pertimbangan keunggulan komperatif akan bergeser menjadi pertimbangan keunggulan kompetitif. Dalam era ini kemandirian ekonomi nasional dan kemandirian daerah merupakan prasyarat utama untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain ataupun antara daerah yang satu dengan

daerah yang lainnya. Konsekwensi dari globalisasi adalah negara dan masyarakat harus siap berinteraksi dan bersaing, baik di lingkungan internasional maupun regional guna lebih mewujudkan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Bagi negara yang tidak siap berinteraksi dan bersaing akan tersingkir dan tertinggal dalam arus globalisasi, sehingga pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya kesenjangan yang semakin lebar antara negara yang miskin (pada umumnya negara-negara berkembang) dengan negara yang kuat/kaya (dalam hal ini umumnya negara-negara maju)

Dalam mengantisipasi era globalisasi tersebut, persoalan yang menjadi sangat penting dan tidak bisa diabaikan adalah bagaimana upaya membangun daerah dengan fokus pada pembangunan dalam bidang ekonomi, untuk membangun kawasan yang kompetitif dan efisien dalam rangka menyongsong pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah upaya meneruskan dan memantapkan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya otonomi daerah secara nyata dan mengantisipasi persaingan yang tidak lagi mengenal batas wilayah, batas waktu dan batas pelaku ekonomi. Dengan kata lain, bagaimana pemerintah daerah dapat dan mampu mengelola potensi wilayahnya, serta mampu menyelenggarakan otonomi daerah dengan dana pembangunan dan fasilitas yang tersedia.

Berkaitan dengan pemantapan otonomi daerah maka pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah bertugas menciptakan suasana

yang mendukung terbentuknya iklim yang produktif sekaligus selalu harus berupaya memelihara iklim dan suasana berusaha yang kondusif di daerah (wilayahnya).

Harus disadari bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan regional dan nasional, yang secara terus menerus dilakukan dalam rangka mempercepat upaya akselerasi pertumbuhan dan perkembangan wilayah melalui upaya-upaya penyediaan lapangan kerja; peningkatan produksi, peningkatan pendapatan yang akhirnya bermuara pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Berkaitan dengan hal tersebut, sistem otonomi yang diberlakukan berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 1999 adalah otonomi yang seluas-luasnya dan mengandung arti bahwa daerah berhak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kemandirian tersebut lebih lanjut mengandung pengertian bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum dalam bentuk perundang-undangan daerah.

Dalam konteks sistem perundang-undangan, kewenangan daerah untuk membuat peraturan perundang-undangan, tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan ataupun keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional, karena peraturan perundang-undangan di tingkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan kepentingan umum.

Dalam rumusan ketentuan Pasal 70 UU No. 22 Tahun 1999 dengan tegas disebutkan bahwa “Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”<sup>5)</sup>

Sungguh pun keberadaan suatu peraturan daerah lebih ditujukan kepada kepentingan masyarakat daerah setempat, namun bukan berarti peraturan daerah tersebut dapat dan boleh begitu saja mengabaikan kepentingan daerah yang lain, atau kepentingan nasional secara keseluruhan. Kemandirian daerah tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional dengan perkataan lain, kemandirian dan otonomi daerah bukan berarti kemerdekaan, melainkan kemandirian dalam kerangka dan ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jika diperhatikan lebih cermat, perjalanan otonomi daerah sekarang ini terdapat adanya kecenderungan suatu daerah hanya mementingkan daerahnya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan daerah lain, bahkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Kecenderungan tersebut dapat dilihat dari telah dikeluarkannya produk peraturan daerah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.<sup>6)</sup>

Selain itu, otonomi daerah mengandung arti bahwa daerah berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri serta kewenangan untuk mengatur tersebut memberikan hak kepada daerah untuk

---

<sup>5</sup> Lihat Undang Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>6</sup> Lihat, harian Kompas 10 September 2001

membuat keputusan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda). Namun dalam perkembangan praktek di lapangan, banyak muncul peraturan daerah yang bermasalah, sebagaimana disebutkan dalam hasil kajian dari Direktorat Jendral Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri terdapat 105 Perda mengenai retribusi dan pajak daerah yang bermasalah<sup>7</sup> )

Terkait dengan masalah investasi di daerah, perlu mendapat perhatian bahwa Peraturan Daerah mengenai investasi, harus pula dalam kerangka kepentingan investasi secara nasional dan kepentingan daerah lain. Berbagai prosedur dan persyaratan investasi yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah diharapkan tidak menjadi penghambat dan mahal nya biaya suatu investasi. Apabila pemerintah daerah tertentu membuat aturan-aturan investasi yang memberikan kemudahan-kemudahan atau fasilitas yang menjanjikan pada calon investor, hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi daerah lain untuk menarik investor menanamkan investasi di daerahnya karena tidak memberikan fasilitas dan kemudahan yang sama sebagaimana di daerah lain. Bahkan yang mungkin terjadi adalah pelarian investasi dari daerah yang kurang menjanjikan keuntungan, kepada daerah yang menguntungkan. Dengan demikian, betapa pentingnya pembuatan suatu peraturan daerah sejauh dan sedapat mungkin memperhatikan Peraturan Daerah lain.

Sejalan dengan era reformasi, pada dasarnya daerah mempunyai kesempatan dan peluang yang besar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah

---

<sup>7</sup> Harian Kompas 10 September 2001



adalah merupakan kesempatan untuk dapat menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah harus dapat dan mampu merumuskan sekaligus mentransformasikan kebijakan makro dari pemerintah pusat kedalam berbagai peraturan daerah sehingga benar-benar sesuai dengan aspirasi dan potensi masyarakat lokal di daerah yang bersangkutan. Dengan demikian daerah mempunyai peluang untuk merumuskan langkah-langkah pembangunannya dalam bentuk peraturan daerah, dengan catatan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Dalam suasana reformasi dan kondisi masyarakat yang sedang mengalami perubahan, sudah tentu pemahaman masyarakat masih sangat beragam, dalam kondisi demikian, peraturan perundangan-undangan akan lebih operasional dilaksanakan jika disertai dengan pedoman pelaksanaan yang jelas. Pedoman pelaksanaan harus selaras (diselaraskan) dengan kemampuan masyarakat dan disesuaikan dengan potensi, aspirasi serta kesiapan masyarakat. Dengan latar belakang dan potensi yang ada saat ini, daerah dapat melaksanakan pembangunan dan berupaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara lebih optimal. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan perubahan sikap, perubahan visi dari aparat birokrasi khususnya di daerah sebagai pendamping masyarakat. Perubahan visi yang diharapkan tersebut berupa pemahaman bahwa tugas pemerintah bukan lagi sebagai pendorong ekonomi, tetapi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi

Masih dalam kerangka pembangunan nasional, agenda pembangunan daerah yang mendesak antara lain adalah merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih bersifat operasional sehingga dapat mengarah pada peran serta aktif masyarakat yang lebih optimal khususnya berkaitan dengan tranformasi dan penjabaran kebijakan-kebijakan investasi di daerah. Sehubungan dengan hal itu, perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pembuatan kebijakan investasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan di daerah, tentunya bukan sekedar mengacu pada kepentingan daerah yang bersangkutan tetapi harus memperhatikan pula dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan berbagai persoalan sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perubahan kebijakan investasi (penanaman modal) setelah berlaku Otonomi Daerah di Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimanakah penerapan perubahan kebijakan investasi, terkait dengan prosedur perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMDN maupun PMA setelah berlakunya Otonomi Daerah di Nusa Tenggara Barat?
3. Bagaimanakah pengaruh perubahan kebijakan investasi terhadap perkembangan kegiatan investasi dan apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan investasi (penanaman modal) di Nusa Tenggara Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang menekankan pada penerapan kebijakan investasi setelah berlakunya otonomi daerah ini, bertujuan untuk :

1. Mengetahui, mengungkapkan dan mengkaji kebijakan investasi di Indonesia setelah berlakunya otonomi daerah, khususnya berkaitan dengan perubahan kebijakan investasi di Nusa Tenggara Barat setelah diterapkan otonomi daerah, apakah sudah sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan ketentuan-ketentuan investasi secara nasional;
2. Mengetahui penerapan dari perubahan kebijakan investasi, sekaligus guna mengetahui mekanisme dan prosedur perizinan investasi di Nusa Tenggara Barat setelah berlakunya otonomi daerah;
3. Memperoleh gambaran tentang manfaat diperoleh investor maupun calon investor yang akan menanamkan modalnya di Nusa Tenggara Barat melalui kebijakan investasi yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan daerah. Sehingga dari penelitian ini sekaligus dapat diketahui tingkat perkembangan investasi di Nusa Tenggara Barat serta kendala-kendala yang dihadapi.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademisi dan berguna untuk kepentingan bersifat praktis bagi para pelaku bisnis khususnya investor maupun calon investor yang akan menanamkan modalnya, baik menggunakan

fasilitas PMDN maupun fasilitas PMA setelah berlakunya otonomi daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat.

**a) Secara teoritis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk menambah khazanah keilmuan dan sebagai sumber informasi ilmiah bagi kalangan akademisi guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan investasi di Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan tentang investasi di Indonesia, khususnya di daerah berkaitan dengan kebijakan investasi serta implementasinya di lapangan.

**b) Secara praktis**

Hasil penelitian ini dirasakan akan sangat berguna bagi para pengambil kebijakan di daerah terkait dengan masalah investasi, karena sangat disadari bahwa dengan pelimpahan kewenangan kebijakan investasi setelah pelaksanaan otonomi daerah, persoalan-persoalan yang terkait dengan kebijakan yang meliputi proses formulasi, implementasi serta evaluasi kebijakan investasi bukanlah merupakan persoalan yang mudah. Melalui hasil penelitian ini, juga dapat diberikan gambaran terutama bagi investor dan calon investor tentang prosedur perizinan dalam investasi di Indonesia pada umumnya dan di Nusa Tenggara Barat khususnya, baik pada investasi yang menggunakan fasilitas PMDN maupun fasilitas PMA.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empirik. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum positif dengan mengkaji serta menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang investasi, sedangkan pendekatan empirik digunakan karena dalam melihat hukum tidak semata-mata sebagai seperangkat aturan-aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka. Akan tetapi hukum dapat dilihat di dalam masyarakat yang menggejala dan terpola dalam kehidupan masyarakat. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan tetap berlandaskan pada ketentuan-ketentuan normatif.

### **2. Obyek Penelitian**

Adapun objek yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan perundangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan investasi, terutama yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara investasi di Indonesia, baik yang menggunakan fasilitas PMA maupun fasilitas PMDN. Selain itu, objek penelitian ini berupa data-tata yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat dari instansi yang terkait dengan pembuatan maupun penerapan kebijakan investasi PMA maupun PMDN, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan perizinan investasi di

Propinsi Nusa Tenggara Barat sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi wilayah kajian dalam penelitian ini adalah di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan mengambil sampel wilayah di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan wilayah Kota Madya Mataram. Dipilihnya beberapa daerah kabupaten dan Kota tersebut di atas dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan data tentang kegiatan investasi mempunyai kecenderungan jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten lainnya yang ada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

### **4. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian hukum dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Setelah itu, barulah dilakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang yang dihadapi yang ada kaitannya dengan bidang tersebut.<sup>8)</sup>

Oleh karenanya penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dalam bidang investasi di Indonesia setelah berlakunya Otonomi Daerah, setelah itu dilakukan :

---

<sup>8</sup> Lihat makalah Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, disajikan dalam Penataran Penelitian Hukum Normatif pada Lembaga Penelitian UNAIR, 11 – 12 Juni 1997

1. Inventarisasi peraturan<sup>9)</sup> perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan investasi di Indonesia baik yang menggunakan fasilitas PMDN maupun PMA yang dikeluarkan dan berlaku sampai dengan berlakunya otonomi daerah, membandingkan kebijakan investasi dan implementasinya sebelum dan setelah diterapkan otonomi daerah.
2. Melakukan invetarisasi terhadap produk peraturan-perundangan di daerah, baik berupa Perda, Instruksi-instruksi Gubernur maupun Intruksi Bupati khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat yang terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang investasi.

Melakukan analisa terhadap peraturan perundangan dalam bidang investasi, khususnya yang terkait dengan mekanisme dan prosedur perizinan investasi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

3. Melakukan wawancara dengan para pejabat-pejabat yang mempunyai kompetensi dengan kebijakan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pada instansi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Propinsi Nusa Tenggara Barat yang dilakukan dalam bulan September 2002, dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penerapan kebijakan investasi baik investasi yang menggunakan fasilitas PMA maupun fasilitas PMDN di Nusa Tenggara Barat, sebelum diberlakukannya Otonomi Daerah maupun penerapan kebijakan investasi setelah diberlakukannya Otonomi Daerah. Selain

---

<sup>9)</sup>Menurut Ronny Hanitijo Sumitro, dalam bukunya *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimerti*, hal. 12, inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum tipe-tipe yang lain

dilakukan wawancara dengan para pejabat, wawancara dilakukan juga dengan para investor dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai keuntungan-keuntungan yang diperoleh para investor serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Melakukan analisa terhadap peraturan perundangan dalam bidang investasi, khususnya yang terkait dengan mekanisme dan prosedur perizinan investasi di wilayah Nusa Tenggara Barat.
5. Melakukan analisa terhadap hasil dokumentasi dan hasil wawancara dengan para pejabat yang menangani perizinan investasi baik yang menggunakan fasilitas PMA maupun PMDN di Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran perubahan kebijakan investasi serta penerapannya setelah berlakunya Otonomi Daerah.

## **5. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yang berupa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang terkait dengan investasi di daerah dalam hal ini pejabat BKPM, khususnya menyangkut implementasi kebijakan investasi, termasuk di dalamnya tentang prosedur dan tata cara serta fasilitas-fasilitas yang diberikan dalam berinvestasi setelah berlakunya otonomi daerah dan wawancara yang dilakukan dengan 12 (dua belas) orang investor yang dijadikan sebagai responden yang penentuannya dilakukan



secara purposive. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi dan penelusuran serta pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan investasi baik berupa perundang-undangan nasional maupun dalam bentuk produk perundangan di daerah, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.

## 6. Instrumen Penelitian

Guna memperoleh data-data yang diinginkan, maka dalam penelitian ini digunakan instrumen penelitian yang terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah berupa daftar pertanyaan, catatan-catatan lapangan dan rekaman tipe recorder.<sup>10)</sup>

## 7. Teknik Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif. Dari data-data yang telah dikumpulkan dan telah diperiksa tingkat keakuratannya, untuk selanjutnya diproses dengan langkah-langkah serta prosedur yang bersifat umum, yakni 1) reduksi data; 2) display data; dan 3) pengambilan kesimpulan dan verifikasi.<sup>11)</sup>

*Reduksi data:* data yang telah diperoleh di lapangan ditulis dan/atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut kemudian

<sup>10</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hal. 9

<sup>11</sup> S. Nasution, *I b i.d*, 1992, hal. 129

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.

*Display data* : data yang terkumpul dan telah direduksi selanjutnya dibuat dalam berbagai macam matrik, grafik, network dan chart agar dapat dikuasai.

*Mengambil kesimpulan dan Verifikasi* : data yang telah terkumpul, telah direduksi dan didisplay, kemudian diusahakan dicari maknanya. Untuk mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya kemudian dibuat dalam suatu kesimpulan.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Salah satu dari sepuluh item arah kebijakan pembangunan dalam bidang hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara adalah: Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.<sup>12)</sup>

Dalam suasana di mana masyarakat menghadapi perubahan sosial-ekonomi yang serba cepat, perhatian tidak lagi diarahkan pada seputar penggarapan hukum sebagai suatu peraturan yang logis dan konsisten, akan tetapi hukum lebih diperkaitkan dengan perubahan-perubahan sosial. Hukum lebih tampak bukan lagi sebagai perekam kebiasaan-kebiasaan yang telah terbentuk di dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, melainkan hukum diharapkan pula dapat menjadi pengungkap yang tepat dari kekuatan-kekuatan

---

<sup>12</sup> Tap. MPR No. IV/MPR/1999 tentang *Garis Besar Haluan Negara* (1999 – 2004)

baru yang timbul dan hendak membentuk masyarakat menurut tuntutan keadaan serta pandangan-pandangan yang baru. Di samping itu, perkembangan dan perubahan yang sangat besar akibat peranan teknologi dan industrialisasi menghendaki agar hukum melakukan adaptasi pada keadaan yang demikian itu. Akibatnya, hampir semua aspek dalam kehidupan, kita temui adanya peraturan-peraturan hukum (J.A.M Maarse : 157). Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum menjelajahi hampir semua bidang kehidupan manusia. Apabila kita meninjau dari prespektif perkembangan masyarakat dan negara, maka kita dapat mengatakan, bahkan kejadian masuknya hukum itu kedalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menjadi semakin meningkat bersamaan dengan makin meningkatnya peranan yang dimainkan oleh negara di dalam masyarakat.<sup>13)</sup>

Pada masyarakat yang sedang mengalami transformasi seperti Indonesia, dari masyarakat yang sebelumnya berbasis agraris (tradisional), menuju masyarakat industrialisasi (modern), sudah tentu nilai-nilai yang telah ada mengalami proses perubahan pula. Dengan demikian di dalam masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan, proses perubahan tidak hanya terjadi pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga terhadap nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dianut selalu terkait dengan sikap dan sifat dari orang-orang yang terlibat di dalam masyarakat yang sedang melakukan pembangunan.

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 15.

Pada masyarakat yang sedang membangun - seperti Indonesia -, perubahan-perubahan terhadap hukum akan berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, fungsi hukum disatu pihak dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar menjadi lebih baik, dan di lain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di masa lalu.<sup>14)</sup>

Hukum dalam pembangunan mempunyai 4 (empat) fungsi yaitu:<sup>15)</sup>

1. Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
2. Hukum sebagai sarana-sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai sarana penegakan keadilan;
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Esmi Warasih, dalam pidato pengukuhan nya mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat, memerlukan peran serta aktif dari masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pembentukan aturan-aturan hukum harus berpedoman pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat.<sup>16)</sup>

Seiring dengan perubahan-perubahan hukum dan perubahan masyarakat di Indonesia, tidak dapat terlepas dari pengaruh globalisasi dunia. Globalisasi

---

<sup>14</sup> Lili Rosyidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, C.V Remaja Karya, 1989, hal. 75

<sup>15</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN, BPHN, 1999 : 10

<sup>16</sup> Esmi Warasih Pujirahayu, *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*. Universitas Diponegoro, 2001 : 6)

menimbulkan suatu konsekuensi saling ketergantungan antara masyarakat di suatu negara dengan masyarakat di belahan bumi lainnya. Dapat dipastikan bahwa pada era globalisasi terlebih lagi pada masa yang akan datang, tidak ada suatu negara -termasuk Indonesia- akan mampu bertahan tanpa saling ketergantungan dengan bangsa-bangsa lain. Semua ini berarti dan menjadi konsekuensi bahwa sistem-sistem nilai; sistem politik, sosial-budaya, ekonomi tidak terkecuali sistem hukum suatu masyarakat (bangsa) akan saling mempengaruhi dan saling berbaur, seolah-olah dunia sudah tanpa batas dan batas negara sudah menjadi tidak relevan lagi.

Carunia Mulya Firdausy<sup>17)</sup> Globalisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai dunia tanpa batas (borderless). Globalisasi merupakan sebuah proses keterlibatan dan ketergantungan yang intensif antara negara-negara dengan masyarakatnya dalam berbagai kegiatan kehidupan tanpa batas, namun dengan adanya globalisasi tidak berarti bahwa setiap negara atau masyarakat menjadi satu dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya dan lain-lain.<sup>18)</sup>

---

<sup>17</sup> Carunia Mulya Firdausi, *Op.Cit.*, hal. 2

<sup>18</sup> Secara lengkap *the Group of Lisbon (1995 : 21)* dalam *Limits to Competition*, mendefinisikan "Globalization refers to the multiplicity of linkages and interconnections between the states and societies which make up the present world system. It describes the process by which events, decision, and activities in one part of the world come to have significant consequences for individuals and communities in quite distant parts of globe. Globalization has two distinct phenomena; scope (or stretching) and intensity (or deepening). On the one hand, it defines a set of processes which embrace most of the globe or which operate world wide; the concept therefore has spatial connotation. On the other hand, it also implies an intensification in the levels of interaction, interconnectedness or interdependence between the state and societies which constitute the world communities. Accordingly, alongside the stretching goes a deepening of global process..... Far from being an abstract concept, globalization articulates one of more familiar features of modern existence.....Of course, globalization does not mean that the world is becoming more politically united, economically interdependent or culturally homogeneous. Globalization is highly uneven in its scope and highly differentiatif in its consequence.. "

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa globalisasi akan menimbulkan saling ketergantungan dan membawa perubahan-perubahan. Pengaruh globalisasi akan berdampak pula pada perekonomian nasional baik bersifat eksternal maupun internal. Perubahan yang bersifat eksternal, dapat meliputi: perubahan dalam kebijakan perdagangan dan investasi internasional, sistem moneter internasional dan hubungan-hubungan ekonomi internasional. Dampak berikutnya yang akan timbul dengan adanya perubahan-perubahan di atas, dapat bersifat positif dan sebaliknya dapat pula bersifat negatif bagi pembangunan nasional khususnya dalam bidang ekonomi.

Memasuki era globalisasi sekarang ini, persoalan yang tidak boleh diabaikan adalah bagaimana bangsa Indonesia mensikapi dan mensiasati perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari globalisasi yang tidak mungkin dielakkan dalam perekonomian internasional. Semua ini sangat tergantung kepada kemampuan daya saing produk yang dihasilkan, kualitas sumber daya manusia, kemampuan adaptasi dan kebijakan pemerintah dalam memenuhi tuntutan global, namun sekaligus tidak merugikan kepentingan nasional.

Sebagaimana dikatakan oleh Taniguchi (1996), apabila faktor-faktor ini dimiliki oleh suatu perekonomian, maka walaupun globalisasi dapat menghasilkan berbagai perubahan perekonomian suatu negara, globalisasi dapat memberikan keuntungan bagi perekonomian itu sendiri. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak memiliki faktor-faktor ini maka globalisasi ekonomi akan menggilas perekonomian negara tersebut.<sup>19)</sup>

---

<sup>19</sup> Dikutip dari Carunia Mulia Firdausi, *,o.p. cit.*, hal. 7)

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur secara lahir bathin, materiil dan sepirituil. Untuk itu, diperlukan landasan dan konsep pembangunan ekonomi yang jelas guna tercapainya tujuan tersebut. Kebijakan pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu keputusan strategis mengenai upaya-upaya perencanaan dan mekanisme pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional.

Mengantisipasi globalisasi ekonomi - termasuk di dalamnya investasi dan perdagangan- setelah diterapkannya Otonomi Daerah, pemerintah telah mencoba melakukan perubahan-perubahan kebijakan khususnya di bidang investasi yang dilakukan melalui serangkaian reformasi kebijakan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan perubahan pola dan sekaligus pendelegasian perizinan investasi, yang sebelumnya dilaksanakan di tingkat pusat melalui Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

Dalam rangka meningkatkan investasi, antara lain diupayakan untuk mempermudah pemberian pelayanan perizinan investasi dengan memperbanyak pusat pelayanan pemberian persetujuan/perizinan investasi dengan melimpahkan kewenangan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Hal tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Meninves.Kepala BKPM No. 37/ SK/1999 tertanggal 6 Oktober 1999.<sup>20)</sup>

---

<sup>20</sup> I. G. Rai Wijaya, *Penanaman Modal, Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan dalam Rangka PMA dan PMDN*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 5

Suatu hal yang esensi dari suatu kebijakan adalah berupaya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya materiil dan manusia untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan rakyat. Kebijakan ekonomi harus disertai dengan konsep-konsep ekonomi positif namun dalam implementasinya harus disertai dengan konsep-konsep yang normatif dan pragmatis sesuai dengan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. Di samping itu proses kebijakan ekonomi sangat diperlukan untuk menentukan skala prioritas. Dengan segala keterbatasan yang ada, maka hal-hal yang penting harus didahulukan dari hal-hal yang kurang penting dalam suatu periode pembangunan. Pembangunan ekonomi harus dilakukan secara bertahap dan berjangka waktu serta perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi jangka pendek harus tetap terpadu dengan perencanaan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Kebijakan pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian. Kebijakan dalam pembangunan --termasuk pembangunan dalam bidang ekonomi--, merupakan suatu proses yang memegang peranan strategis, karena melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan dapat menentukan arah dan tujuan pembangunan yang hendak dicapai.

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip yang



dimaksudkan sebagai garis pedoman untuk usaha mencapai sasaran, garis haluan. Sehingga kebijakan investasi berarti rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana kegiatan investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh dan atau di suatu negara.

Kalau kebijakan dipandang sebagai suatu proses, maka pusat perhatian akan tertuju pada siklus kebijakan, meskipun tidak harus terjadi secara linier dan kaku. Pada umumnya siklus kebijakan meliputi: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi kebijakan.<sup>21)</sup>

Formulasi kebijakan (publik) adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karenanya, apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan yang telah dibuat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu perlu ada kehati-hatian yang lebih dari para pembuat kebijakan ketika akan melakukan formulasi suatu kebijakan publik.

Setelah dirumuskannya suatu kebijakan tidak dengan sendirinya akan terimplementasikan, artinya kebijakan negara perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak sebagaimana yang diharapkan. Namun, kebanyakan dari kita seringkali beranggapan bahwa setelah suatu kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya-pun akan mendekati seperti apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut.

---

<sup>21</sup> Nakamura & Smallwood 1980 :31; Parson, 1977 : 543, dikutip dari Fadilah Putra, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, 2000, hal. 78

Padahal sebenarnya, sifat dari kebijakan itu kompleks dan saling ketergantungan (*interdependensi*).

Sehubungan dengan pernyataan di atas, Pressman dan Wildavsky<sup>22</sup>) mengingatkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Bahkan Udoji (1981), dengan tegas mengatakan bahwa : *“the execution of policies is as important if not more important than policy-making, Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Salah satu tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya. Bahkan mungkin tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan (Jones 1996 : 193-294). Pemahaman lebih lanjut tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lineberry (1978 : 70) dengan mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) yang memberikan pernyataan bahwa *“ policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and group) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decision”* Pernyataan ini memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu, dan kelompok-kelompok

---

<sup>22</sup> Dikutip dari Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Nagara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal. 59

pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Pada bagian lain, Lineberry (1978 : 70, 71) juga menyatakan bahwa proses implementasi setidaknya-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut : (1) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; (2) penjabaran tujuan kedalam berbagai aturan pelaksana (*standart operating procedures/Sop*); (3) koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; (4) pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Lain lagi dengan pendapat Anderson (1979 : 92-93) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu : *“who is involved in policy implementation, the nature of the administrative poces, compliance with policy, and the effect of implementation on policy content and impact”* (siapa yang mengimplementasikan kebijakan, hakekat dari proses administrasi, kepatuhan (*kompliansi*) kepada kebijakan, dan efek atau dampak dari implementasi kebijakan).

Aspek lain yang penting dalam implementasi kebijakan menurut Anderson adalah kepatuhan. Yang dimaksud dengan kepatuhan di sini, yaitu perilaku yang taat hukum. Karena kebijakan selalu berdasarkan hukum atau peraturan tertentu, maka pelaksanaan kebijakan tersebut juga harus taat kepada hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan

administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.<sup>23)</sup>

Guna membantu memecahkan masalah, dalam penelitian ini akan digunakan paradigma post-positivist sebagai alat bantu. Paradigma adalah suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*a fundamental image a dicipline has of its subject matter*).<sup>24</sup>

Paradigma post-positivis memandang kebijakan publik itu sebagai suatu proses yang dinamik dan kompleks. Di mana pada masa seperti ini, di Indonesia akan banyak sekali pihak yang bertarung diarena kebijakan secara terbuka, melakukan bergaining dan tarik-menarik kepentingan. Sehingga perubahan kebijakan pun akan dapat terjadi kapan saja, dengan cara apa saja.<sup>25)</sup>

---

<sup>23</sup> Lihat Fadillah Putra, *o.p. cit.*, 2001, hal. 80 - 83

<sup>24</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, C.V Rajawali, Jakarta, 1992, hal 7.

<sup>25</sup> Lihat Fadillah Putra, *o.p cit*, 2001, hal 7 - 8

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM**  
**PENGARUH BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH**  
**TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN INVESTASI**  
**DI INDONESIA**

**A. INVESTASI DI INDONESIA**

**1. Tinjauan Umum Investasi**

**a. Pengertian Investasi**

Indonesia, adalah negara berkembang sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, senantiasa selalu berupaya secara terus - menerus melaksanakan pembangunan disegala bidang. Berbagai upaya dalam melaksanakan pembangunan dewasa ini, bukanlah merupakan tugas atau pun pekerjaan mudah dan sederhana. Bahkan sebaliknya, merupakan beban dan tanggung-jawab yang sangat berat. Selain kendala yang bersifat eksternal, yakni kondisi krisis ekonomi yang sedang melanda berbagai belahan dunia termasuk di Asia Tenggara, berbagai kendala yang bersifat internal turut serta memberikan kontribusi yang mempersulit upaya pembangunan di Indonesia. Kendala internal sebagai faktor penghambat dalam melaksanakan upaya pembangunan yang dimaksud, yakni belum pulihnya bangsa Indonesia dari kondisi krisis multidimensi yang dialami sejak tahun 1997 yang berawal dari krisis ekonomi. Namun, semua kendala baik yang bersifat

eksternal<sup>h</sup> maupun internal di atas tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan untuk berhenti melaksanakan pembangunan, justru haruslah dijadikan sebagai spirit dan sekaligus motifasi dalam melakukan pembangunan, jika ingin keluar dari berbagai kesulitan menuju masa depan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan amanat Garis Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004, dalam bagian pertimbangan, menyatakan : “Bahwa, krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia saat ini, perlu segera diatasi melalui reformasi di segala bidang, sehingga memungkinkan bangsa Indonesia bangkit kembali dan memperkuat kepercayaan diri atas kemampuannya”.

Pernyataan di atas, di samping memberikan arah dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, tersirat pula suatu filosofi bahwa, pada hakekatnya pembangunan yang dilakukan oleh suatu bangsa haruslah dilaksanakan berdasarkan kemampuan dan seluruh potensi bangsa yang bersangkutan, tidak terkecuali upaya-upaya pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia, haruslah didasarkan pada kemampuan dan seluruh potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.

Salah satu masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan adalah menjamin terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan yaitu dengan mengusahakan tersedianya dana yang memadai. Modal berupa dana yang bersumber dari tabungan pemerintah dan masyarakat (modal domestik) yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan memegang peranan

yang sangat penting, karena tanpa modal atau biaya yang memadai, jelas upaya pembangunan tidak mungkin dilaksanakan (kalaupun terlaksana tidak akan nencapai hasil yang baik). Sebagaimana dikatakan oleh Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti,<sup>26)</sup> “pembangunan suatu negara memerlukan dana investasi dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaannya diarahkan untuk berlandaskan kepada kemampuan diri sendiri, di samping memanfaatkan sumber lainnya sebagai pendukung. Sumber dari luar tidak mungkin selamanya diandalkan untuk pembangunan. Oleh karena itu perlu ada usaha yang sungguh sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang bersumber dari dalam, yaitu tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan penerimaan devisa”.

Selain itu, tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan nasional bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari seluruh komponen bangsa. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yakni dengan memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat dan dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam usaha pembangunan, terutama sekali dalam memobilisasi dana dan sekaligus melaksanakan investasi.

---

<sup>26</sup> Panji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Pasar Modal, Keberadaan dan Manfaatnya Bagi Pembangunan*, Reineka Cipta, Jakarta, 1992

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian 27) “ Di dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah tidak mungkin melaksanakannya sendiri tanpa melibatkan masyarakat luas, baik itu individu maupun pihak swasta nasional ataupun swasta asing. Demikian juga dalam investasi untuk membiayai kegiatan pembangunan, pemerintah tidak akan mampu menyediakan dana investasi sendiri tanpa ada keterlibatan masyarakat”.

Kegiatan investasi dalam dunia usaha dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di mana sahamnya dimiliki oleh pemerintah; Pihak swasta (swasta asing maupun swasta nasional) yang dilakukan baik secara perorangan maupun dengan suatu badan usaha; dapat juga dilakukan oleh suatu usaha dalam bentuk koperasi yang seluruh ataupun sebagian modalnya dimiliki oleh para anggota koperasi yang bersangkutan.

Kegiatan investasi mengandung pengertian yang luas, karena investasi dapat dilakukan secara langsung (*direct investmen*) maupun secara tidak langsung, yang lebih dikenal dengan (*portfolio investmen*). Sumantoro 28) mengemukakan: “Investasi adalah kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti

---

<sup>27</sup> Sondang P. Siagian, *Managemen Abad 21*, Bumi Askara, Jakarta, 1998, hal 83

<sup>28</sup> Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 15



pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut”

Terdapat perbedaan pengertian antara investasi secara tidak langsung (*portfolio investement*) yaitu biasanya dengan membeli instrumen-instrumen di pasar modal dengan investasi secara langsung (*direct investement*) yaitu biasanya yang bersangkutan ingin ikut menguasai dan menjalankan (mengelola) langsung investasi. Pada kasus investasi yang pertama (*portfolio investment*), para investor tidak tertarik dan tidak berkepentingan untuk menjalankan usaha dari perusahaan yang ia beli sahamnya, mereka lebih berkepentingan terhadap *dividen* dan *capital gain* dari sahan yang ia beli. Sedangkan pada kasus investasi yang kedua (*direct investmen*), investor yang bersangkutan ingin menguasai dan menjalankan langsung investasi dimaksud.

Berkaitan pokok pembahasan dalam penulisan ini, pengertian investasi, hanya ditujukan pada investasi yang dilakukan secara langsung (*direct investmen*), yang lazim disebut juga dengan istilah “**Penanaman Modal**”, meliputi investasi yang dilakukan dalam bentuk investasi asing yang biasa disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi nasional atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Marzuki Usman <sup>29</sup>) mengatakan: “Sejak pemerintah mendorong masyarakat (pengusaha) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, istilah yang berhubungan dengan penanaman modal itu semakin memasyarakat. Melalui Undang Undang PMA, kita mengenal “investor asing” yakni orang atau badan asing, yang menanamkan modalnya di Indonesia. Penanaman modal (investasi) yang dimaksud adalah melakukan penanaman modal secara langsung (*direct investment*) untuk mendirikan dan mengoperasikan perusahaan yang dapat memproduksi barang atau jasa yang diperlukan masyarakat. Orang atau badan yang melakukan penanaman modal itu disebut “investor” atau “pemodal”.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, investasi (penanaman modal) dapat dilakukan melalui investasi asing (Penanaman Modal Asing) dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dirasa sangat perlu untuk dijelaskan batasan pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dirumuskan pengertian modal asing, sebagai berikut : “Pengertian modal asing dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang Undang ini dan yang digunakan untuk

---

<sup>29</sup> Marzuki Usman dkk, *ABC Pasar Modal*, Kerjasama antara Institut Bankir Indonesia dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jakarta, 1995, hal : 31

menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.”

Sedangkan pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilihat pada Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968. Pasal 1 Undang Undang tersebut, menyatakan :

- (1). Yang dimaksud dalam Undang Undang ini dengan “Modal Dalam Negeri” ialah Bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional dan swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- (2). Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 menentukan :

Yang dimaksud dalam Undang Undang ini dengan “Penanaman. Modal Dalam Negeri” ialah : Penggunaan dari kekayaan seperti yang tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan kedua ketentuan pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa: yang dimaksud dengan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional dan swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang

disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut bukan merupakan modal asing. Jika dicermati lebih dalam, pengertian Penanaman Modal Asing yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968, maka akan tampak bahwa di satu sisi, pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri mengandung pengertian yang lebih luas dari pengertian Penanaman Modal Asing. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri yang tercantum dalam Undang Undang nomor 6 Tahun 1968 tidak hanya dilakukan secara langsung (*direct investmen*), tetapi dapat pula dilakukan secara tidak langsung dalam bentuk *portfolio investmen*.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sunaryati Hartono <sup>30</sup> menyatakan bahwa: apabila kita memperhatikan ketentuan UUPMA dan UUPMDN ternyata pengertian penanaman modal (investasi), lebih luas pengertian investasi yang ada dalam UUPMDN dibanding pengertian Investasi dalam UUPMA, dikarenakan dalam UUPMDN pengertian investasi termasuk di dalamnya "*portfolio investmen*" dalam arti penanaman modal yang tidak langsung menanggung resiko pun dianggap sebagai investor. Sedangkan di dalam UUPMA yang dimaksudkan dengan investasi hanyalah penanaman modal secara

---

<sup>30</sup> Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam PMA di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1972, hal 95

langsung atau “ *direct investmen* ” dalam arti penanam modal langsung menanggung resiko dari investasinya.

Lebih lanjutnya, dikatakannya <sup>31)</sup> bahwa, “Apabila kita melihat UUPMA, yang dimaksud dengan pengertian penanaman modal asing hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung artinya bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modalnya di Indonesia. Dengan kata lain, investasi asing yang diperbolehkan oleh UUPMA hanyalah “*direct investment*” yang bisa dipertentangkan dengan “*portfolio investment*” dimana investor hanya memiliki sejumlah saham dalam perusahaan tanpa mempunyai kekuasaan langsung dalam manajemen perusahaan”.

Di sisi lain Ismail Suny<sup>32)</sup> berpendapat bahwa” penanaman modal secara langsung seperti tertera dalam UUPMA dikaitkan dengan unsur “penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan” pembuat undang-undang bermaksud untuk memberikan kesempatan bagi investor agar dapat dengan leluasa mengusahakan dan menyelenggarakan pimpinan dalam perusahaan yang dijalankan di Indonesia dengan modal asingnya. Perusahaan yang dimaksudkan itu oleh UUPMA disebut dengan nama Perusahaan Modal Asing. Keuntungan bagi investor apabila diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan atas perusahaan

---

<sup>31)</sup> Sunarjati Hartono, Ibid hal 78

<sup>32)</sup> Ismail Suny, *Tinjauan atas UUPMA dan Kredit Luar Negeri*, hal 3

yang bersangkutan ialah bahwa investor dapat menentukan kebijaksanaan sendiri dalam menjalankan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan dari modal yang ditanamnya.

Sementara itu T. Mulya Lubis <sup>33</sup>) menjelaskan bahwa pengertian modal asing dalam UUPMA agaknya berat ke *equity* yakni suatu *fresh capital* yang datang dari luar negeri, meskipun diakui bahwa *equipment*, paten/teknologi baru juga masuk dalam modal asing. Keuntungan perusahaan yang tidak ditransfer akan tetapi diinvestasikan kembali juga masuk modal asing. *Loan* yang berasal dari luar negeri termasuk juga modal asing.

#### **b. Tujuan Investasi**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa kegiatan investasi dalam dunia usaha dapat dilakukan oleh beberapa pihak, yakni dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihak swasta (swasta asing maupun swasta nasional) bahkan dapat dilakukan oleh suatu badan usaha dalam bentuk koperasi yang seluruh ataupun sebagian modalnya dimiliki oleh para anggota koperasi yang bersangkutan. Selain itu, dibukanya peluang untuk melakukan kegiatan investasi oleh pemerintah adalah untuk menunjang usaha-usaha pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>33</sup> T. Mulya Lubis, *PMA dan UUPMA, Harapan dan Kenyataan, Sebuah Telaah Mengenai Kebijakan Penanaman Modal*, Dikutip dari buku *Hukum Ekonomi*, Sumantoro, hal 91 -93

Oleh karena itu, untuk mengetahui tujuan investasi haruslah dilihat dari berbagai kepentingan, yakni antara kepentingan investor dengan kepentingan pemerintah, yang mana antara kedua kepentingan tersebut jika dilihat dari motivasi dan tujuan yang ingin dicapai jelas akan berbeda antara satu dan lainnya. Di satu sisi, pemerintah mengharapkan dengan adanya investasi akan memberikan sumbangan yang tidak kecil artinya bagi kegiatan pembangunan yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sementara di sisi yang lain, investor menanamkan modalnya (investasi) di suatu negara didasarkan atas tujuan dan pertimbangan mereka, bahwa tingkat keuntungan yang akan diperoleh akan lebih besar dibandingkan dengan jika menginvestasikan dana/modalnya dalam bentuk tabungan di bank, ataupun jika menginvestasikan modalnya negerinya sendiri (untuk modal asing). Jika dilihat dari kepentingan pemerintah, jelas bahwa tujuan dari investasi tidak lain adalah untuk menunjang usaha-usaha dan kegiatan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan rakyat banyak.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ismail Saleh<sup>34</sup>) menyatakan bahwa “apabila kita mengundang para investor, maksudnya tidak lain untuk lebih membangun negara kita, memberikan kesejahteraan lahir batin dan memberikan kemakmuran kepada rakyat. Untuk itu

---

<sup>34</sup> Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hal 1

digunakan dua pendekatan dalam pelaksanaan investasi, yaitu pendekatan kepentingan nasional dan kepentingan ekonomi. Dua pendekatan tersebut harus disusun dalam satu jalur hukum yang serasi dan saling mendukung. Dengan pendekatan dari segi ekonomi bertujuan agar investasi, baik domestik maupun asing ikut membatu ekonomi Indonesia sesuai dengan Trilogi Pembangunan. Dilihat dari pendekatan kepentingan nasional, tujuan yang ingin dicapai dalam investasi ini tidak lain adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran lahir batin kepada negara”.

Sementara itu Sumantoro<sup>35</sup>) mengemukakan bahwa investasi mempunyai peranan dan sumbangan penting dalam pembangunan. Di dalam lingkup rencana pembangunan, pemerintah mengarahkan agar investasi mempunyai peranan dalam pembangunan. Sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan investasi tidak hanya berorientasi kepada motif mendapat keuntungan saja, melainkan juga diarahkan kepada pemenuhan tugas pembangunan pada umumnya. Untuk itu sebaiknya investasi diarahkan pada serangkaian pengaturan oleh pemerintah agar dapat berperan serta dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan menurut prioritas sebagaimana tercantum pada setiap rencana pembangunan, seperti:

- (1). Peningkatan produksi nasional/penggalian potensi-potensi ekonomi;
- (2). Penciptaan lapangan kerja;

---

<sup>35</sup> Sumantoro, *Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hal 112 - 113*



- (3). Peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan/pertisipasi rakyat dalam pembangunan/kegiatan ekonomi;
- (4). Pemerataan kegiatan pembangunan daerah.

Jika tujuan investasi dilihat dari sisi kepentingan investor, baik investasi dilakukan secara langsung (*direct invesment*) ataupun investasi yang tidak langsung (*portfolio investment*), maka akan nampak tujuan yang sangat berbeda, dimana pemerintah melalui kegiatan investasi bertujuan untuk mendukung usaha-usaha pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Sedangkan investor, dalam melakukan investasi lebih banyak didasarkan kepada pertimbangan dan orientasi yang bersifat ekonomis seperti, antara lain; kesempatan berusaha untuk memperoleh keuntungan, menanamkan modal dengan harapan memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari modal yang ditanamkan, berusaha untuk menjaga sekaligus menghindar dari kerugian yang disebabkan oleh merosotnya nilai uang.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh E.A Koetin<sup>36</sup>). Tiba pada suatu definisi yang mencoba menggambarkan tujuan investasi. Jika dikatakan bahwa Investasi adalah penggunaan uang untuk objek-objek tertentu dengan tujuan bahwa nilai objek tersebut selama jangka waktu investasi akan meningkat, paling tidak bertahan, dan selama jangka waktu itu pula akan memberikan hasil secara teratur. Jadi investasi yang

---

<sup>36</sup> E.A Koetin, *Analisis Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal : 16 – 17

dimaksudkan di sini adalah penanaman uang, dengan harapan (1) mendapatkan hasil dan (2) mendapatkan nilai tambah. Dengan demikian diharapkan dapat mengimbangi kemerosotan, erosi nilai uang atau tabungan yang kita miliki. Terlebih lagi jika kedua tujuan yang diharapkan tersebut dapat melampaui besarnya kemerosotan nilai uang.

Hampir sama dengan apa yang dikemukakan diatas mengenai tujuan investasi, Sumantoro<sup>37</sup>) menjelaskan tujuan dalam melakukan investasi adalah : Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Ini merupakan hakikat hidup yang senantiasa berupaya bagaimana meningkatkan taraf hidup dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang. Dengan melakukan investasi dalam bidang usaha yang produktif atau dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, dapat menghindarkan diri agar kekayaan/harta miliknya tidak merosot nilainya karena investasi.

Dorongan untuk memanfaatkan fasilitas dan kemudahan ekonomi dari pemerintah. Beberapa negara di dunia, banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas fiskal moneter dan beberapa kemudahan diberikan kepada masyarakat uang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha

---

<sup>37</sup> Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia Op.Cit.*, hal: 15

tertentu. Syahrir 38) mengemukakan alasan dan tujuan melakukan investasi, terutama ditujukan kepada investasi langsung (*direct investmen*), adalah sebagai berikut : “Pada dasarnya setiap bentuk investasi jangka panjang maupun jangka pendek, diukur keberhasilannya dari hasil yang harus lebih tinggi dari nilai investasinya. Dalam hal investasi di sektor-sektor ekonomi yang dilaksanakan dalam bentuk *direct investment* maka hasil investasi yang disebut *rate of return on investment* haruslah diperkirakan lebih tinggi dari nilai investasi yang bila didapat dari pinjaman bank, akan dihitung pula ongkos uang yang disebut bunga pembayaran hutang”.

#### c. Bentuk-bentuk Investasi

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa, investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal/uang, di satu sisi bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, dalam pengertian yang luas kegiatan investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti, menyimpan atau menabung uang di bank; membeli emas atau tanah/rumah; investasi di pasar modal; atau, melakukan investasi secara langsung pada bidang usaha tertentu.

Mengingat sangat luasnya bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh investor, maka investasi yang akan dibahas dalam tulisan

---

<sup>38</sup> Sjahrir, *Analisis Bursa Efek*, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

ini dibatasi pada investasi yang lebih ditekankan pada investasi dalam bentuk penanaman modal secara langsung (*direct investmen*)

▪ ***Portfolio investmen***

Merupakan salah satu bentuk investasi yang dilakukan secara tidak langsung, yakni dengan jalan membeli instrumen-instrumen, seperti; saham, obligasi di Pasar Modal dan/atau membeli surat-surat berharga yang lain di Pasar Uang. Instrumen pasar modal itu terbagi atas dua kelompok besar yaitu instrumen pemilikan (*equity*) seperti saham, dan instrumen hutang (*obligasi/bond*) seperti, obligasi perusahaan, obligasi langganan, obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham dan sebagainya.<sup>39)</sup>

Marzuki Usman,<sup>40)</sup> mengemukakan “Umumnya instrumen atau surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dapat dibedakan menjadi surat berharga yang bersifat hutang dan surat berharga yang bersifat pemilikan. Surat berharga yang bersifat hutang umumnya dikenal dengan nama obligasi, dan surat berharga yang bersifat pemilikan dinamakan saham. Lebih jauh lagi dapat didefinisikan bahwa obligasi adalah bukti pengakuan hutang dari perusahaan. Sedangkan saham adalah bukti pernyataan dalam perusahaan. Kebanyakan di bursa efek kedua macam surat berharga itulah yang diperdagangkan.

---

<sup>39</sup> Panji Anoraga, Ninik Widiyanti, *o.p. cit.* Hal 7

<sup>40</sup> Marzuki Usman, dkk, *o.p. cit.* Hal 61

Khususnya di pasar modal Indonesia ada pula surat berharga yang dinamakan securitas kredit, yang tiada lain adalah bukti pengakuan hutang jangka pendek, kurang dari tiga tahun. Dalam prakteknya, saham maupun obligasi dapat diperbanyak ragamnya. Artinya, saham dan obligasi itu terdapat dalam berbagai jenis, yang penggolongannya dapat ditentukan menurut kriteria, yang melekat pada masing-masing saham atau obligasi itu sendiri.

Di samping membeli instrumen dalam bentuk saham dan obligasi di pasar modal, investasi portfolio dapat juga dilakukan dengan membeli instrumen di pasar uang. Instrumen yang di perdagangkan di pasar uang, antara lain ialah surat-surat berharga pemerintah (*bill and notes*), sekuritas badan-badan pemerintah, sertifikat deposito, perjanjian imbal-beli, dan surat berharga perusahaan (*company commercial paper*).

Menurut Basjiruddin A. Sarida<sup>41</sup>) Pasar uang menyediakan berbagai fasilitas untuk memungkinkan pertukaran/pengalihan secara cepat dan dapat dipercaya, berbagai surat-surat hutang jangka pendek yang dipergunakan untuk membelanjai kebutuhan dunia usaha, pemerintah dan para konsumen. Pasar uang dapat dibedakan dalam arti yang sifat perdagangannya langsung (*direct and negotiated*) atau Pasar Uang bagi para nasabah (*customers money market*) dengan Pasar yang

---

<sup>41</sup> Dikutip dari Panji Anoraga dan Ninik Widiyati, *Pasar Modal : Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan*, hal 16

sifatnya terbuka bagi siapa saja (*impersonal*) atau Pasar Uang Terbuka (*open money market*).

▪ ***Direct Investor* (Penanaman Modal Secara Langsung)**

Secara garis besar, penanaman modal secara langsung (*direct investmen*) jika dilihat dari segi perizinan, dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu :

1. Investasi yang tidak menggunakan fasilitas; dan
2. Investasi yang menggunakan fasilitas.

Investasi atau penanaman modal yang tidak menggunakan fasilitas, sering juga disebut perusahaan non fasilitas atau non PMA/PMDN menurut Kepres No. 22 Tahun 1986 adalah perusahaan yang tidak tunduk dan tidak mendapatkan fasilitas berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 jo. Undang Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Perizinan dari perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas baik fasilitas PMA ataupun PMDN diterbitkan langsung oleh departemen/instansi teknis yang membidangi secara langsung, tanpa melalui jalur Badan Koordinasi Penanaman Modal.

T Mulya Lubis <sup>42</sup>) mengatakan ; Investasi (penanaman modal) yang menggunakan fasilitas, masih dapat digolongkan lagi kedalam : investasi (penanaman modal) yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi (penanaman modal) yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA), di mana kedua jenis fasilitas investasi (penanaman modal) tersebut mempunyai pengaturan masing-masing yang berbeda. Investasi yang menggunakan fasilitas PMDN diatur dengan UUPMDN dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan investasi (penanaman Modal) yang menggunakan fasilitas PMA diatur dengan UUPMA beserta peraturan pelaksanaannya.

#### **1. Bentuk Usaha Investasi yang Menggunakan Fasilitas PMDN**

Bentuk-bentuk usaha Penanaman Modal (investasi) yang menggunakan fasilitas PMDN dan Usaha penanaman modal yang menggunakan fasilitas PMDN, dapat berbentuk :

1. Perusahaan Perorangan (usaha dagang);
2. Firma (Fa);
3. Persekutuan Komanditer (C.V);
4. Perseroan Terbatas (PT);
5. BUMN/BUMD; dan
6. Koperasi.

Perusahaan dalam bentuk PT, Cv, Firma maupun usaha perorangan adalah bentuk-bentuk dari usaha swasta yang investasi atau modalnya

---

<sup>42</sup> T. Mulya Lubis, dikutip dari Sumantoro, *OP.Cit* Hal 99 mempertanyakan apakah masih tepat pemisahan UUPMA dengan UUPMDN, mengingat sering terjadi penyelundupan hukum dan semakin lama sulit membedakan PMA dengan PMDN karena majunya lalu lintas modal.

untuk keseluruhan atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh swasta. Perusahaan dalam bentuk BUMN atau BUMD seluruh modal atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah (negara), Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II. Sedangkan, koperasi seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh anggota koperasi yang bersangkutan.<sup>43)</sup>

## **2. Bentuk-bentuk usaha penanaman modal (investasi) yang menggunakan fasilitas PMA**

Setelah diundangkannya Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, maka sejak saat itu mulai mengalir arus modal asing masuk ke Indonesia. Kondisi ini disebabkan kerana pada masa awal Orde Baru pemerintah menghadapi kelangkaan modal dan sumber pembiayaan pembangunan, sehingga upaya yang ditempuh adalah melalui pinjaman luar negeri dan mengundang investasi asing ke Indonesia. Mudrajat Kuncoro<sup>44)</sup> mengemukakan “ selama periode yang diamati, Indonesia telah menjadi importir modal. Arus modal asing (*net capital inflows*) meningkat hampir 300 juta dolar AS pertahun pada akhir 1960-an hingga lebih dari 3 milyar dolar AS pada tahun 1984. Hanya terjadi satu kali arus modal keluar (*net capital outflows*) pada 1975 seiring dengan adanya krisis Pertamina”.

<sup>43</sup> Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 54 - 66

<sup>44</sup> Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPM, Yogyakarta, 2000, hal 218



Berdasarkan Undang Undang PMA, investasi yang menggunakan fasilitas PMA dapat dilakukan dalam bentuk Penanaman Modal Asing murni yang mana seluruh modal dimiliki dan berasal dari luar negeri (investor asing) dan dapat juga berbentuk Perusahaan Penanaman Modal Asing bekerja sama dengan perusahaan nasional yang sering dikenal dengan Perusahaan Patungan (*joint venture*). Selanjutnya, perusahaan penanaman modal asing baik yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing maupun yang berbentuk perusahaan patungan (*joint venture*), menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1967, harus berbentuk badan hukum yang tunduk pada hukum Indonesia dan mempunyai domisili di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sumantoro <sup>45</sup> “setiap PMA harus bisa dimonitor dan dikontrol oleh hukum Indonesia. Konsekwensi logis dari ini adalah mutlak PMA-PMA membentuk badan hukum Indonesia dan dengan demikian menjadi subyek hukum Indonesia. Domisili dengan demikian harus di Indonesia. Kewajiban membentuk badan hukum Indonesia tidak bisa ditawar lagi. Hal ini hendaknya lebih dijelaskan lagi bahwa badan hukum Indonesia itu adalah Perusahaan Terbatas”.

Selain Penanaman Modal Asing (PMA) murni sebagaimana

---

<sup>45</sup> Lihat, Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, *op. Cit*, hal 93

disebut di atas, terdapat perusahaan patungan (*joint venture*) antara modal asing dengan modal dalam negeri . Adapun bentuk-bentuk perusahaan patungan (*joint venture*) tersebut, adalah sebagai berikut:

**(a) Joint venture**

Dalam konteks ekonomi, pengertian *joint venture* adalah suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan persetujuan kerja sama dalam suatu kegiatan. Sering kali suatu *joint venture* dilakukan apabila perusahaan-perusahaan itu melalui teknologi yang saling melengkapi ingin menciptakan barang atau jasa yang akan saling memperkuat posisi masing-masing.<sup>46)</sup>

Sementara itu, di dalam Enseklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, *Joint venture* diartikan sebagai suatu persetujuan antara dua peserta atau lebih, yang mempersatukan sumber-sumber atau jasa-jasa, atau kedua-duanya, dalam suatu perusahaan tertentu dengan tanpa membentuk suatu persekutuan yang tersusun.<sup>47)</sup>

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa *joint venture* adalah suatu badan hukum (*legal entity*) yang berwujud suatu perserikatan (*in the nature of a partnership*) yang diperjanjikan dalam usaha bersama sebagai suatu transaksi khusus dalam mencari

---

<sup>46</sup> K.H Munansa, *Istilah Ekonomi dan Pasar Modal*, Media Cipta, Jakarta, 1993, hal 198

<sup>47</sup> A. Abdurrachman, *Enseklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke dua, 1992, hal 580

kemanfaatan bersama. Suatu kumpulan dari beberapa orang yang secara bersama-sama menjalankan usaha komersial. *Joint venture* memerlukan persamaan kepentingan dalam menjalankan pokok urusan, adanya hak-hak dan kewajiban untuk mengarahkan atau pengurusan dengan kebijaksanaan tertentu, yang dapat diubah melalui perjanjian, untuk memperoleh keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama-sama.<sup>48)</sup>

Dalam dunia dan masyarakat bisnis, istilah *joint venture* mempunyai arti yang tertentu. Dalam literatur kalangan *business admistration*, pengertian *joint venture* adalah suatu jenis usaha yang menggabungkan antara usaha domestik dengan usaha asing. Pengertian ini dilihat dari suatu konteks khusus, yakni aspek operasional yang menekankan pada usaha untuk mencapai tujuan berikut :

- mencoba untuk memanfaatkan modal yang berasal dari luar negeri;
- mencoba untuk memanfaatkan teknologi yang berasal dari luar negeri;
- mencoba untuk memanfaatkan kapasitas manajemen yang berasal dari luar negeri.

Untuk merangkum semua kegiatan tersebut, maka diciptakan suatu cara kerjasama, di mana kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan

---

<sup>48</sup> Lengkapnya dalam Black's Law Dictionary dinyatakan, *joint venture* adalah "A legal entity in the nature of partnership engaged in the joint venture prosecution of a particular transaction for mutual profit. An association of persons jointly undertaking some commercial enterprise. It requires a community of interest in the performance of the subject matter, a right to direct or govern the policy in connection therewith, and duty, which may be altered by agreement, to share both in profit losses."

keahlian dan kelebihannya.<sup>49)</sup> Dengan demikian, *joint venture* merupakan suatu kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang semata-mata didasarkan atas suatu perjanjian belaka. Kerja sama ini, dapat juga disebut *Contract of Cooperation*, yakni tidak membentuk suatu badan hukum yang baru sebagaimana *joint enterprise*.

Selain itu, bentuk dari kerja sama tersebut yang biasa disebut *nonequity joint venture*, dibagi lagi menjadi : *technical assistance*, *technical service contract*, *franchise and brand-use agreement*, serta *management contract*, bentuk-bentuk tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

- *Technical Service Agreement*; pada bentuk kerjasama ini, perusahaan nasional hanya membutuhkan skill atau metode kerja baru, misalnya suatu perusahaan nasional ingin memodernisasi pola dan struktur usahanya, maka untuk keperluan ini akan dipakai *technical service* perusahaan mitra asing, yang akan dibayar oleh perusahaan nasional dalam bentuk royalties atau pembayaran sejumlah uang tertentu yang diambil dari penjualan produk perusahaan yang bersangkutan.
- *Franchise and brand-use agreement*; suatu bentuk kerjasama yang akan dipakai apabila suatu perusahaan domestik atau perusahaan

---

<sup>49</sup> H.S Kartadjoemena, *Dunia Usaha dan Joint Venture Beberapa Catatan Mengenai Masalah Kebijaksanaan*, Makalah disampaikan pada seminar II PSHD-FHUI, Jakarta, 1995, hal 10

dalam negeri ingin memproduksi suatu barang yang telah mempunyai merek dan nama yang terkenal, seperti Coca cola, van Houten, Pierre Cardin, Mc Donald, Kentucky Fried Chicken dan sederetan merek dagang lainnya. Di Indonesia, kerjasama dalam bentuk franchise ini belum mempunyai aturan yang jelas, sebagaimana dikatakan oleh Munir Fuady<sup>50</sup> “ Di negara yang hukumnya tidak menentu, seperti Indonesia, lembaga *franchise* memang sering dipakai sebagai jalan masuk terhadap hal-hal yang tertutup buat PMA. Dasar hukum *franchise* ini sederhana saja, yakni sebagai kontrak yang dibuat secara sah, kekuatannya sama saja dengan undang-undang”.

- *Management contract*; Kerjasama bentuk ini, biasanya dipergunakan dalam pembuatan dan/atau pengelolaan hotel-hotel yang bertaraf internasional, misalnya Hilton Internasional Hotel, Hotel Indonesia yang pada awal permulaan menejemannya diserahkan pada Sheraton.

#### (b). *Joint Interprise*

*Joint interprise* ini merupakan penanaman modal asing yang berbentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional, di mana mereka membentuk perusahaan baru di Indonesia yang berbentuk PT yang berbadan hukum Indonesia. Pengelolaan perusahaan *joint interprise*

---

<sup>50</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis: Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 72

ini dikelola secara bersama-sama oleh kedua perusahaan tersebut dan resiko yang timbul ditanggung secara bersama-sama pula.

©. **Kontrak Karya (*Working Contract*)**

Bentuk kerjasama kontrak karya adalah suatu kerjasama yang dibuat antara dua pihak atau lebih dengan modal campuran antara modal asing dengan modal nasional. Bentuk ini terjadi apabila penanam modal asing (investor) terlebih dahulu membentuk suatu badan hukum Indonesia. Selanjutnya badan hukum yang baru ini, akan mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum Indonesia yang lain yang merupakan perusahaan dan modal nasional.<sup>51)</sup>

**d. Kebijakan dalam Bidang Investasi**

Perkembangan investasi (penanaman modal), khususnya Penanaman Modal Asing di Indonesia mengalami masa pasang-surut. Beberapa tahun sebelum diundangkannya Undang Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yakni pada tahun 1953 ketika pemerintahan kabinet Alisastro Amidjojo, pernah dibuat suatu Rancangan Undang Undang (RUU) Penanaman Modal Asing, tetapi RUU tersebut tidak mendapat pengesahan dan ditolak oleh parlemen dengan pertimbangan, jika disetujui menjadi undang-undang dapat menghambat dan mengganggu perkembangan masyarakat Indonesia.

---

<sup>51</sup> Amirizal, *Hukum Bisnis, Deregulasi Joint Venture di Indonesia, Teori dan Praktek*, Jembatan, Jakarta, 1996, hal 88

Berselang beberapa tahun kemudian, RUU yang pernah diajukan pada tahun 1953, dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan dibarengi dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat, diajukan kembali dan mendapatkan persetujuan. Sehingga, untuk pertama kalinya lahirlah sebuah Undang Undang Penanaman Modal Asing yaitu UU No. 78 Tahun 1958. Namun, Undang Undang Penanaman Modal Asing tersebut, ketika itu tidak dapat dilaksanakan secara efektif dengan alasan bahwa kehadiran PMA di Indonesia dianggap sebagai upaya eksploitasi terhadap rakyat Indonesia serta menghambat revolusi di Indonesia.

Kurun waktu setelah tahun 1965 terjadi krisis dan kemerosotan perekonomian. Secara umum, upaya pembangunan nasional mengalami banyak kendala, terutama ketiadaan modal pembangunan dibarengi dengan krisis ekonomi yang ditandai dengan tingkat inflasi sebesar 400 %. Menyadari akan situasi yang cukup sulit bahkan sangat kritis tersebut, maka pada tanggal 10 Januari 1967 diundangkanlah UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang setahun kemudian pada tanggal 3 Juli 1968, disusul dengan UU. No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kebijakan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing dimaksudkan untuk membantu upaya-upaya pembangunan yang ditekankan pada pembangunan ekonomi.

Pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi, berlandaskan pada suatu kebijakan yang didasarkan pada

kemampuan serta kekuatan bangsa Indonesia sendiri, yakni dengan memanfaatkan modal, teknologi dan keahlian dari luar negeri demi tercapainya tujuan pembangunan, tanpa mengakibatkan ketergantungan pada investasi asing.

Sejalan dengan ini, Sumantoro<sup>52</sup>) mengemukakan : Kebijaksanaan pemerintah menerbitkan UUPMA disertai pertimbangan agar dalam pembangunan, sumber-sumber dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk menutup kekurangan modal dalam negeri tanpa menimbulkan ketergantungan pada luar negeri. hadirnya modal, teknologi dan keahlian menejemen luar negeri tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan nasional dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan, pengalihan teknologi dan peningkatan produksi pada umumnya.

Jika diperhatikan, isi UU No. 1 Tahun 1967, sejak semula telah menganut prinsip liberalisasi, terutama berkaitan dengan kepemilikan saham. Pihak asing, dalam hal ini investor asing tidak dilarang memiliki seluruh saham perusahaan di mana mereka menanamkan modalnya. Investor asing hanya dilarang untuk menanamkan modalnya dalam usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti; pelabuhan, pelistrikan, air minum dan lain-lain. Di samping itu, pemerintah menentukan daftar skala prioritas bidang-bidang usaha bagi perusahaan yang dikelola oleh pihak swasta.

---

<sup>52</sup> Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Op. Cit, hal 178



Dalam perjalanannya, Penanaman Modal Asing mendapat tantangan dari berbagai kalangan. Kontra dan sentimen terhadap modal asing ditandai dengan terjadinya peristiwa “Malari”, sehingga beberapa saat kemudian pemerintah melalui BKPM mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan investor asing untuk mencari mitra (*partner*) usaha dalam negeri, jika hendak menanamkan modal di Indonesia. Artinya, pihak asing tidak bisa lagi memiliki 100% saham perusahaan. Investor asing harus mengalihkan saham kepada pengusaha dalam negeri, sehingga pihak asing hanya boleh memiliki saham sebanyak 49%.

Pada tanggal 29 Juli 1994 pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang dianggap sangat penting dan mendukung eksistensi PMA yakni Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA. Landasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini adalah untuk mengembangkan iklim usaha yang semakin mantap dan lebih menjamin kelangsungan PMA. Beberapa hal menarik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain adalah:

- PMA dapat dilakukan dalam bentuk patungan atau seluruh sahamnya (100%) dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing;
- Izin usaha diberikan untuk waktu 30 tahun terhitung sejak perusahaan mulai berproduksi secara komersial dan dapat diperpanjang lagi dengan syarat-syarat tertentu;
- Kegiatan usaha dapat dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Kegiatan usaha yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yaitu; pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api, pembangkit tenaga atom dan masmedia dapat dilakukan oleh perusahaan PMA patungan (*joint venture*).

Peraturan Pemerintah ini, oleh banyak kalangan dinilai sebagai suatu kebijakan yang bersifat ekspansif dan liberal karena sektor-sektor dan bidang usaha yang sebelumnya tertutup bagi PMA kini menjadi terbuka, di samping itu warga negara dan/atau badan hukum asing dapat memiliki 100 % saham perusahaan PMA serta melalui PMA investor dapat menanam modal dan berusaha pada bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, walaupun dilakukan dengan usaha patungan (*joint venture*).

Berkaitan dengan hal tersebut, Arief Ramelan Karseno<sup>53</sup>) menjelaskan : “Kebijakan yang paling memberikan pengaruh penting adalah Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 yang mengizinkan pihak asing menanamkan investasinya pada hampir seluruh jenis usaha di Indonesia termasuk prasarana dan barang-barang publik dengan hampir tidak ada batasan dalam hal kepemilikan. Indikator meningkatnya peranan investasi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah waktu itu, pada tahun 1996 investasi asing yang disetujui (dalam dolar) meningkat sebesar 10 persen, sedangkan investasi

---

<sup>53</sup> Arief Ramelan Karseno, Arti Adjie, *Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Kelembagaan di Indonesia*, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2001, hal 3

domestik yang disetujui juga menunjukkan peningkatan yang sama yakni sebesar 40 persen”

Selain itu, Carunia Mulya Firdausy<sup>54</sup>) mengemukakan :  
“Mengantisipasi persaingan dalam kegiatan dibidang investasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam bidang investasi, salah satunya melalui PP No. 20 tahun 1994 yang antara lain mencakup langkah-langkah penyederhaan dan penghapusan ketentuan-ketentuan pembatasan yang berkaitan dengan kepemilikan, batas minimum investasi pengkajian kembali serta pengurangan cabang usaha yang termasuk dalam Daftar Negatif Investasi”.

Pada periode tahun 1994 sampai pertengahan 1997, deregulasi yang dikeluarkan pemerintah lebih dikhususkan pada pemberian kesempatan yang lebih luas bagi penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment*). Pada periode ini mulai terlihat keterlibatan pihak asing dalam perekonomian baik di sektor swasta maupun pada sektor publik akibat dari keterbatasan pemerintah dalam menyediakan prasarana publik. Selama periode ini, kegiatan perekonomian Indonesia dibuka secara penuh bagi investor baik investor domestik maupun investor asing dengan tujuan untuk mencapai target investasi dan pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>54</sup> Carunia Mulya Firdausy, dikutip dari *Indonesia Menapak Abad 21 : Kajian Ekonomi Politik*, Op. Cit, hal 24

Selain kebijakan pemerintah berkaitan dengan langkah-langkah penyederhaan dan penghapusan ketentuan-ketentuan pembatasan atasi kepemilikan saham, perluasan cabang usaha dalam penanaman modal asing tersebut diatas, perlu juga untuk diperhatikan kebijakan pemerintah mengenai Tata Cara investasi (penanaman modal) - sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah-, yang diatur melalui Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1993, kemudian telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 115 tahun 1998 dan selanjutnya mengalami perubahan dengan Keputusan Presiden RI No. 117, merupakan perubahan kedua atas Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

Perubahan itu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal. Beberapa hal penting berkaitan dengan kebijakan pemerintah tersebut, meliputi :

1. Kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal. Untuk permohonan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah;
2. Untuk melaksanakan lebih lanjut pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksudkan diatas, Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD);

3. Tata cara penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dimaksud, diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sedangkan untuk penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing ditentukan, bahwa:

1. Kewenangan pemberian persetujuan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1967 dan telah diubah dengan Undang Undang No. 11 Tahun 1970 dilimpahkan oleh Menteri Negara/ Investasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Luar Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
2. Khusus kepada Gubernur Kepala Daerah diberikan pula pelimpahan wewenang pemberian izin pelaksanaan penanaman modal, sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani penanaman modal di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
3. Untuk pelaksanaan pelimpahan kewenangan lebih lanjut kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Luar Negeri menugaskan Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Sedang untuk pelaksanaan pelimpahan wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah, Gubernur Kepala Daerah Propinsi

menugaskan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD).<sup>55)</sup>

I.G. Rai Widjaya <sup>56)</sup> Dalam rangka meningkatkan investasi, antara lain diupayakan untuk mempermudah pemberian pelayanan perizinan investasi dengan memperbanyak pusat pelayanan pemberian persetujuan/perizinan investasi dengan melimpahkan kewenangan dari Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM kepada Gubernur Kepala Daerah. Hal tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 37/SK/1999 tertanggal 6 Oktober 1999 sekaligus mencabut berlakunya Keputusan Meninves/Kepala BKPN No. 21/SK/1998 tertanggal 28 Juli 1998.

Dalam keputusan Meninves/Kepala BKPM yang baru telah diatur beberapa hal, antara lain sebagai berikut : Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Meninves/Kepala BLKPM) melimpahkan kewenangan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, yaitu kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan penanaman modal yang dilaksanakan dalam rangka Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagaimana masing-masing telah diubah dengan Undang Undang No. 11 Tahun 1970 serta Undang Undang No. 12

---

<sup>55</sup> Mengenai Tata Cara persetujuan dan pemberian izin penanaman modal yang lebih lengkap, lihat Ketentuan Pasal 1A dan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan ke dua atas Keputusan Presiden Nomer 97 Tahun 1993.

<sup>56</sup> I.G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal, Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan dalam rangka PMA dan PMDN*, OP. Cit, hal 5.

Tahun 1970. Selanjutnya untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan ini, Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD). Persetujuan atas penanaman modal meliputi persetujuan atas Penanaman Modal baru, Perluasan dan Perubahan Penanaman Modal.<sup>57)</sup>

Pemerintah secara konsisten telah mengambil langkah langkah kebijakan dalam bidang investasi, antara lain berupa mempermudah persyaratan lokasi industri dan diikuti dengan pendelegasian kewenangan dalam hal perizinan kepada BKPM untuk investasi di bawah 100 juta US dolar dan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk investasi kurang dari 10 juta US dolar. Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 1999, telah disetujui usulan Menteri Investasi mengenai pelimpahan wewenang persetujuan investasi bagi PMA dan PMDN kepada BKPM/BKPMMD tanpa batas dalam rangka pelaksanaan Undang Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, untuk mempromosikan investasi di luar negeri dilakukan pembaharuan pola pendelegasian perizinan dengan mengajukan aplikasi ke KBRI/Konjen setempat.

#### **e. Aspek Hukum Investasi di Indonesia**

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan ekonomi nasional, mengakibatkan meningkat pula hubungan ekonomi diantara para pelaku

---

<sup>57</sup> Pelimpahan kewenangan dari Meninves/Kepala BKPM kepada Gubernur Kepala Daerah dapat dilihat dalam Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 37/SK/1999 tertanggal 6 Oktober 1999.

ekonomi, bahkan tidak menutup kemungkinan hubungan tersebut dapat melampaui batas-batas negara, yang berakibat akan masuknya aliran/arus modal dan teknologi asing dari suatu negara.

Pesatnya dinamika perekonomian nasional tersebut, akan memacu pula perkembangan di bidang hukum yang merupakan "*rule of the game*". Berbagai perangkat hukum yang mengatur kegiatan ekonomi selama ini, sebagaimana ditentukan di dalam KUH Perdata, KUH Dagang dan KHU Pidana – yang nota bene merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda – dirasakan sudah tidak mampu lagi mengakomodir perkembangan dan perubahan kegiatan ekonomi yang sangat cepat. Oleh karenanya, diperlukan penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi yang lebih modern.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, hukum investasi baik dalam arti luas atau investasi dalam arti yang lebih sempit (penanaman modal), merupakan salah satu bidang kajian hukum ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa, kegiatan-kegiatan Pasar Modal, Penanaman Modal Asing, tranfer teknologi, perusahaan multinasional, juga merupakan cakupan atau bagian dari hukum ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh Mr. Nugroho<sup>58</sup>) membahas mengenai PMA dan Pengaruhnya terhadap hukum ekonomi, yang mempunyai beberapa aspek, yaitu :

---

<sup>58</sup> Mr. Nugroho, *Penanaman Modal Asing dan Pengaruhnya terhadap Hukum Ekonomi*, dikutip dari Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, hal. 39



- Soal Prosedur PMA – pembatasan dan perlindungan;
- Soal bentuk perusahaan/soal persekutuan dan perseroan
- Soal lalu lintas modal;
- Soal lalu lintas barang;
- Soal lalu lintas orang;
- Soal tenaga kerja;
- Soal bentuk dan isi persetujuan;
- Soal penjaminan dan jaminannya;
- Soal penjajakan.

Salah satu ciri yang menonjol dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi/hukum ekonomi (modern) mencakup aspek yang luas. Jadi, tidak mencakup hanya pada aspek hukum yang bersifat swasta (perdata) saja, atau mencakup aspek hukum publik, sebagaimana pembagian hukum yang selama ini dianut dalam sistem hukum nasional – menurut beberapa ahli hukum sudah tidak relevan lagi dipertahankan –, melainkan hukum ekonomi (modern) meliputi aspek hukum yang lebih komprehensif, interdisipliner dan bahkan bersifat transnasional.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sunaryati Hartono<sup>59</sup> “Kalau metode penelitian dan penyajian mata kuliah hukum dagang (lama) bersifat perdata murni, maka hukum ekonomi Indonesia telah memerlukan metode penelitian dan penyajian yang interdisipliner dan transnasional. Interdisipliner, karena (1) Hukum ekonomi Indonesia tidak hanya bersifat hukum perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan Hukum Administrasi Negara, Hukum

---

<sup>59</sup> Sunaryati Hartono C.F.G., *Hukum tentang Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hal 60

Antarwewenang, Hukum Pidana, bahkan juga tidak mengabaikan Hukum Publik Internasional dan Hukum Perdata Internasional; dan (2) Hukum Internasional Ekonomi Indonesia memerlukan landasan pemikiran bidang-bidang non hukum, seperti filsafat, ekonomi, sosiologi, administrasi pembangunan, ilmu wilayah, ilmu lingkungan, dan bahkan futurologi”

Sementara itu Sri Redjeki Hartono<sup>60</sup>) berpendapat bahwa luasnya bidang kajian hukum ekonomi membuatnya mampu mengakomodasikan dua aspek hukum sekaligus sebagai satu kajian yang konperhensif. Dua aspek hukum itu meliputi aspek hukum publik dan aspek hukum perdata.

Sesuai dengan pandangan-pandangan para ahli hukum tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa hukum ekonomi mempunyai dimensi luas, mencakup baik aspek hukum publik dan sekaligus aspek hukum swasta. Oleh karena hukum investasi (penanaman modal) merupakan bagian dari bidang kajian hukum ekonomi, maka dapat dikatakan pula bahwa hukum investasi (penanaman modal) mempunyai aspek hukum yang bersifat luas dan konperhensif yakni mencakup aspek hukum privat dan mempunyai aspek hukum publik.

## **2. Arti Penting Investasi Bagi Pembangunan**

### **a. Investasi Sebagai Sumber Modal Pembangunan**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa, pembangunan

---

<sup>60</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mabdar Maju, Bandung, Hal 39

suatu negara tidak terkecuali pembangunan di Indonesia, baru dapat terlaksana jika didukung oleh dana (modal pembangunan) yang cukup dan memadai. Idialnya, modal pembangunan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan haruslah bersumber dari tabungan domestik baik bersumber dari tabungan pemerintah maupun tabungan masyarakat. Namun, karena minimnya biaya (modal) yang dimiliki oleh suatu negara – terutama negara-negara sedang berkembang -, maka sudah tentu upaya pembangunan tidak mungkin dapat terlaksana dan berlangsung sesuai dengan rencana dan tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan persoalan modal pembangunan tersebut, maka sangatlah tepat pendapat dari Sri Redjeki Hartono<sup>61</sup>) Pada hakekatnya modal adalah merupakan faktor utama bagi kelangsungan dan keberhasilan usaha pada umumnya. Kegiatan usaha dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh siapapun termasuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan modal. Modal merupakan faktor yang sangat penting artinya bagi setiap kegiatan usaha, karena modal merupakan sumber energi baik untuk kelangsungan, pengembangan maupun pertumbuhan usaha.

Kenyataan menunjukkan, bahwa sejak dimulainya Pembangunan Lima Tahun I (Pelita), pada awal masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintah mengalami kesulitan modal dan sumber pembiayaan pembangunan.

---

<sup>61</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi, I b i d*, hal 1

Tabungan dalam negeri (domestik) ketika itu sangat minim - tidak mungkin untuk ditingkatkan dalam waktu singkat-, sehingga jalan keluar yang ditempuh untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan adalah dengan mencari sumber dana yang berasal dari luar negeri, baik berupa bantuan luar negeri maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Sejak saat itu, mengalirlah dana bantuan dari luar negeri yang berupa pinjaman lunak (loan), hibah dan tidak ketinggalan masuk pula investasi asing ke Indonesia. Kenyataan ini dapat dikaitkan dengan teori Harrod dan Domar yang menyatakan bahwa untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki, maka suatu negara memerlukan sejumlah dana tertentu. Oleh karena dana tersebut tidak cukup tersedia di dalam negeri, maka kekurangannya harus dipenuhi dari luar negeri.<sup>62)</sup>

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumantoro<sup>63)</sup> falsafah yang mendasari kebijaksanaan pembangunan nasional pemerintah negara berkembang pada umumnya, termasuk Indonesia adalah mengusahakan pelaksanaan pembangunan itu dengan menggunakan sumber-sumber dalam negeri. Falsafah itu merupakan pencerminan cita-cita negara tersebut. Akan tetapi mengingat sumber biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan cukup besar, sedangkan sumber-sumber dalam negeri terbatas, maka ditempuh

---

<sup>62</sup> Dikutip dari Sukarna Wiranta, *Hutang Luar Negeri: Masalah dan Kecenderungannya, terangkum dalam Indonesia Menapak Abad 21 Kajian Ekonomi Politik*, Melenium Publisher, Pt. Dyatama Milenia, Jakarta, 2000, hal 27

<sup>63</sup> Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan Multi Nasional : Problem Politik, Hukum dan Ekonomi da'am Pembangunan Nasioan*, Hal 1

upaya untuk memperoleh sumber dari luar negeri seperti bantuan keuangan, bantuan teknologi, pinjaman modal, penanaman modal atau gabungan dari beberapa sumber tersebut.

Secara umum kegiatan investasi, khususnya investasi asing memegang peranan yang sangat strategis dan memberikan sumbangan yang cukup besar pada kelangsungan pembangunan di Indonesia. Melalui kegiatan investasi (baik PMA maupun PMDN), diharapkan akan memberikan pengaruh pada berbagai aspek; seperti, investasi dapat menggali ekonomi potensial yang ada menjadi ekonomi riil, meningkatkan produksi, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya melalui kegiatan investasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Namun, sangat perlu untuk diperhatikan bahwa pemanfaatan investasi sebagai sumber modal dalam pelaksanaan pembangunan, harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, sehingga dengan kehadiran investasi (terutama investasi asing) diharapkan tidak mengganggu jalannya pembangunan dan mengakibatkan kerugian bagi upaya pembangunan itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, investasi (penanaman modal) asing perlu dimanfaatkan secara maksimal tapi tidak terlepas dari filosofi yang mendasari penanaman modal asing sebagaimana tercantun dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya UUPMA, sebagai berikut :

- 1). Bahwa kekuatan ekonomi potensial yang dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa terdapat banyak diseluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan ekonomi riil, yang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi;
- 2). Bahwa Pancasila adalah landasan idiil dalam membina sistem ekonomi Indonesia dan yang senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijakan ekonomi;
- 3). Bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan organisasi dan manajemen;
- 4). Bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan pada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri;
- 5). Bahwa dalam pada itu, azas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan kesegaran untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi, dan *skill* yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri;
- 6). Bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta dengan digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri;
- 7). Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, disamping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing.

Jika diperhatikan pertimbangan dikeluarkannya UUPMA diatas, maka nampak suatu dasar filosofi yang dijadikan landasan dalam kebijakan investasi (penanaman modal), terutama Penanaman modal asing adalah karena keterbatasan modal pembangunan yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber dana domestik, maka modal asing perlu dimanfaatkan untuk mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil, disamping karena minimnya pengalaman dan teknologi dalam mengelola kekuatan ekonomi yang sangat potensial. Filosofi yang lain yang sangat perlu untuk

diperhatikan dalam pelaksanaan investasi (penanaman modal asing) yaitu, pemanfaatan modal asing harus benar-benar diabdikan untuk kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan pada luar negeri, sehingga posisi modal asing dalam pembangunan ekonomi hanyalah diperlukan sebagai faktor pendukung (komplementer) untuk melengkapi modal pembangunan.

Pada hakekatnya, tidak ada suatu negara yang melaksanakan pembangunan berharap akan selalu tergantung pada sumber dana dari luar, apakah dalam bentuk pinjaman luar negeri maupun investasi (penanaman modal) asing. Setiap negara tentu ingin dan berusaha melaksanakan pembangunan berdasarkan kekuatan sendiri dengan mengandalkan sumber dana dalam negeri (modal domestik). Namun, kenyataan menunjukkan bahwa dalam perkembangan dewasa ini sejalan dengan era globalisasi, sangat sulit bagi suatu negara untuk melepaskan diri dari pengaruh dan ketergantungan pada modal asing yang demikian kuat. Justru sebaliknya, tanpa bantuan dan modal asing (apakah dalam bentuk pinjaman maupun investasi asing) dapat diyakini bahwa, hampir tidak mungkin suatu negara dapat melaksanakan pembangunan – paling tidak dalam usaha mempercepat pembangunan – terutama bagi negara-negara sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia. Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah pinjaman luar negeri dari tahun ketahun dan masing-masing negara berkompetisi dengan menawarkan berbagai kemudahan

untuk meraih investasi asing. Keadaan dan kenyataan ini entah akan berlangsung sampai kapan, sehingga menimbulkan keragu-raguan dan pertanyaan sebagaimana diutarakan oleh Mudrajad Kuncoro<sup>64</sup>) Tidak berlebihan apabila ada yang mempertanyakan : Sampai kapan Indonesia akan bergantung pada dana dari luar negeri ? apakah bantuan luar negeri semata-mata hanya injeksi (sementara), atautkah sudah menjadi semacam infus (kebutuhan yang tidak bisa dihentikan untuk menjaga momentum pembangunan)?. Bagaimanakah dengan amanat GBHN yang menyatakan bahwa bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap dan bersifat sementara ?

Harus diakui bahwa, sumber dana dari luar negeri khususnya investasi (penanaman modal) asing memegang peranan yang cukup besar - jika kita segan mengatakan sangat besar – dalam pembangunan nasional. Namun, sumber dana dari luar tidak mungkin selamanya dapat diandalkan, meskipun kenyataannya sulit untuk melepaskan diri dari pengaruh dan ketergantungan pada modal asing. Oleh karena itu, perlu ada suatu upaya secara sungguh-sungguh dan terus-menerus untuk menggali sumber dana dalam negeri, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Panji Anoraga dan Nanik Widiyanti, <sup>65</sup>) “pembangunan suatu negara memerlukan

---

<sup>64</sup> Mudrajad Kuncoro, *Op. Cit.*, hal 227

<sup>65</sup> Panji Anoraga, Nanik Widiyanti, *Pasar Modal : Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan*, Renika Cipta, Jakarta, 1992, hal 1



dana investasi dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaannya diarahkan untuk berlandaskan kepada kemampuan diri sendiri, di samping memanfaatkan sumber lainnya sebagai pendukung. Sumber dari luar tidak mungkin selamanya diandalkan untuk pembangunan. Oleh karena itu perlu ada usaha yang sungguh sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang bersumber dari dalam, yaitu tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan penerimaan devisa”.

Peranan modal asing dalam pembangunan telah lama diperbincangkan oleh para ahli ekonomi pembangunan. Secara garis besar, pemikiran mereka sebagai berikut : Chenery dan Carter, 1973 :hal 459 66) Pertama, sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh NSB sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi (meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif).

Dengan demikian, melalui kegiatan investasi (penanaman modal) pada umumnya, dan khususnya investasi asing diharapkan dan akan berpengaruh

---

<sup>66</sup> Dikutip dari Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan; Teori Masalah dan Kebijakan*, Op. Cit., hal 212.

pada peningkatan produksi, penyediaan lapangan pekerjaan, pengalihan (transfer) teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen, yang pada gilirannya akan berpengaruh kepada keberhasilan pembangunan, selanjutnya akan berpengaruh pula pada kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka inilah investasi (penanaman modal) memegang peranan yang penting dan sangat strategis sebagai sumber dana (modal) pembangunan.

#### **b. Penyediaan Lapangan Pekerjaan**

Salah satu hal penting dan harus diperhatikan, terkait dengan pelaksanaan kegiatan investasi (PMA ataupun PMDN), haruslah sejalan dengan arah kebijakan serta tujuan pembangunan nasional. Jadi kegiatan investasi dilakukan tidak semata-mata dengan motivasi hanya untuk mencari atau mendapatkan keuntungan semata tetapi kegiatan investasi harus diarahkan untuk menunjang usaha-usaha pembangunan (agent pembangunan).

Sebagai salah satu faktor dalam pembangunan, investasi (penanaman modal) memegang peranan yang penting. Melalui kegiatan investasi diharapkan akan dapat meningkatkan produksi nasional, menggali ekonomi potensial menjadi ekonomi riil, meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan

pertisipasi masyarakat dalam pembangunan/kegiatan ekonomi, dan meningkatkan pemerataan pembangunan ke daerah.<sup>67)</sup>

Terkait dengan upaya meningkatkan produksi nasional dan dalam rangka menggali ekonomi potensial menjadi ekonomi riil, sudah tentu kegiatan investasi akan memberikan rangsangan bagi tumbuh dan berkembangnya dunia usaha (sektor riil) yang disertai dengan munculnya industri-industri baru, baik berskala besar, sedang dan industri kecil. Berkembangnya dunia usaha dan tumbuhnya industri-industri baru melalui kegiatan investasi harus diarahkan serta dikembangkan pada kegiatan usaha dan industri yang padat karya, sehingga dapat menyediakan lapangan kerja sekaligus menampung tenaga kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, Sumantoro<sup>68)</sup> mengemukakan: Investasi mempunyai arti penting pula di dalam penyerapan tenaga kerja, karena dengan adanya investasi baik nasional maupun asing, akan meningkatkan atau menghidupkan kembali sektor riil, dengan demikian juga akan menyerap tenaga kerja sehingga dengan adanya investasi ini akan membuka lapangan kerja baru serta mengurangi pengangguran. Supaya harapan pemerintah ini dapat terlaksana, maka untuk investasi asing diarahkan supaya dapat memberikan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, membuka

---

<sup>67</sup> Lihat *Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita IV)*

<sup>68</sup> Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan Multi Nasional, Op. Cit* Hal 8 - 9

lapangan kerja baru serta tidak mendorong kegiatan ekonomi yang padat modal yang dapat menyaingi kegiatan yang dilaksanakan secara padat karya.

Secara normatif, baik dalam UUPMDN maupun UUPMA diatur ketentuan mengenai Indonesianisasi tenaga kerja, artinya terdapat adanya suatu kewajiban bagi perusahaan Penanaman Modal Asing baik PMA murni maupun patungan untuk menggunakan sebanyak mungkin tenaga kerja lokal (warga negara Indonesia), kecuali untuk jenis pekerjaan dan jabatan tertentu yang tidak/belum dapat diisi dengan tenaga kerja warganegara Indonesia, diizinkan/diperbolehkan menggunakan tenaga kerja/tenaga ahli asing.<sup>69</sup>)

Tujuan diadakannya ketentuan Indonesianisasi tenaga kerja sebagai mana tersebut tidak lain adalah agar melalui kegiatan investasi, apakah dalam bentuk investasi asing atau investasi dalam negeri dapat memberikan atau menyediakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi warga negara Indonesia. Disinilah letak pentingnya arti investasi sebagai suatu kegiatan yang dapat membuka dan menyediakan lapangan pekerjaan.

### **c. Sarana Alih Teknologi**

Selain faktor modal, penguasaan terhadap teknologi memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan, terutama untuk menggali dan mewujudkan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil. Pada umumnya upaya pembangunan di negara-negara sedang berkembang,

---

<sup>69</sup> Lihat ketentuan pasal 9, 10, 11, 12 *UUPMA* dan ketentuan pasal 19, 20 *UUPMDN*

termasuk Indonesia tidak didukung oleh pengalaman dan penguasaan teknologi yang cukup memadai. Minimnya pengalaman dan penguasaan teknologi jelas menjadi suatu kendala bagi usaha pembangunan, pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga hasilnya pun tentu belum dapat diharapkan maksimal.

Erman Rajagukguk<sup>70</sup>) mengemukakan: Dalam pembangunan nasional yang menjadi titik berat adalah pembangunan di bidang ekonomi. Indonesia sendiri sebagai suatu negara memiliki banyak kekuatan ekonomi yang potensial dan tersebar di seluruh wilayahnya (yang merupakan keunggulan komparatif), tetapi karena beberapa faktor, antara lain ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi, maka kekuatan ekonomi potensial ini belum dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi riil.

Dewasa ini, teknologi sudah merupakan satu jenis komoditi internasional yang mahal dan langka.<sup>71</sup>) Kebijakan suatu negara, terutama negara-negara berkembang mengundang masuknya modal asing untuk mendorong pertumbuhan pembangunan (terutama di bidang ekonomi), akan membawa serta masuknya teknologi dari negara asal modal yang nota bene dimiliki/dikuasai oleh negara-negara maju.

---

<sup>70</sup> Erman Rajagukguk dkk, *Lihat Bahan Kuliah, Hukum Investasi*, Fak. Hukum, Universitas Indonesia, hal 41

<sup>71</sup> Baca Sumantoro, *Pengalihan Teknologi dalam Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Ekonomi, Hukum Ekonomi, Op. Cit*, Hal 120

Namun demikian, proses masuknya (pengalihan) teknologi ke suatu negara harus dilakukan secara terencana. Dari berbagai jenis teknologi yang tersedia, yakni teknologi maju/tinggi, teknologi menengah/media dan teknologi sederhana, harus dapat dimanfaatkan atau digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan yang senyatanya. Sebab jika tidak, maka pengalihan teknologi tersebut akan menjadi sia-sia, bahkan justru dapat menimbulkan kerugian bagi negara penerima teknologi.

Berkaitan dengan fungsi pengalihan teknologi tersebut, yang sangat diperlukan Indonesia adalah mengalihkan teknologi yang tepat guna dari negara asal teknologi, sehingga dapat mendukung pengembangan industrialisasi, baik berskala besar, menengah dan industri kecil. Di samping itu, sangat perlu untuk diperhatikan adalah penyesuaian antara teknologi yang akan dialihkan dengan tingkat teknologi yang telah ada dan keahlian yang tersedia serta potensi sumber daya yang mendukung.

Pada dasarnya pengalihan/pemindahan teknologi dapat dilakukan oleh pihak mana saja, apakah badan-badan swasta, badan negara atau badan-badan internasional. Pemindahan teknologi dapat dilakukan oleh seseorang/badan kepada orang/badan lain, baik di dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri ke dalam negeri. Setiap proses pemindahan teknologi, dilakukan dengan suatu perjanjian lisensi. Dalam pengertian, setiap pemegang hak atas teknologi berhak memberikan lisensi kepada setiap

orang atau badan lain untuk melaksanakan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dalam konteks PMA perjanjian lisensi merupakan dasar kerja sama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak asing kepada perusahaan-perusahaan penerima lisensi di Indonesia. Akibat belum adanya pengaturan oleh pemerintah dalam bidang ini maka masalah pemindahan teknologi yang berlangsung melalui proses PMA (dalam bentuk perjanjian-perjanjian lisensi) pada dasarnya masih merupakan masalah hubungan kontraktual antara para piha yang dalam prakteknya ditentukan oleh kemampuan berunding antara pihak pemberi lisensi dengan pihak penerima lisensi.<sup>72)</sup>

Pengaturan pengalihan teknologi dalam UUPMA, secara implisit termuat dalam Pasal 9 –Pasal 13. Di dalam ketentuan tersebut diatur tentang kebebasan menggunakan tenaga menejemen dan ahli asing sepanjang tenaga lokal belum tersedia, dan diatur pula mengenai kewajiban perusahaan asing tersebut untuk mengadakan pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja warga negara Indonesia, untuk nantinya menggantikan posisi tenaga kerja asing. Di sinilah letak aspek-aspek pengalihan teknologi dalam UUPMA. Sedangkan mengenai teknologi telah tercakup dalam pengertian modal asing, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 UUPMA, yang menyebutkan:

---

<sup>72</sup> Sumantoro, *Hukum Ekonomi, Op. Cit*, hal 119

“Modal asing tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer keluar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia”.

Jika melihat pada ketentuan UUPMA tersebut, maka pengalihan teknologi dapat dilakukan melalui investasi secara langsung dalam bentuk pengalihan barang modal. Pengalihan teknologi melalui kegiatan investasi tersebut, pada dasarnya berbeda dengan pengalihan teknologi melalui perjanjian lisensi.

Mengenai mekanisme dan bagaimana cara pengalihan teknologi melalui penanaman modal asing di Indonesia, belum diatur oleh suatu ketentuaan hukum yang jelas. T. Mulya Lubis <sup>73</sup>) menjelaskan: perlunya suatu kebijakan yang terpadu mengenai *transfer of technology*. Sebab selama ini kita sebetulnya terlalu banyak dirugikan oleh PMA-PMA yang selalu punya alasan untuk tidak menghibahkan teknologinya kepada kita. Kita harus punya kejelasan mengenai teknologi seperti apa yang kita inginkan, lalu atas dasar itu membuat serangkaian peraturan. Di sini campur tangan pemerintah akan sangat membantu dalam hubungan antara licensor dengan licensee .

#### **d. Peningkatan Pendapatan Nasional**

Sumber-sumber devisa negara (pendapatan nasional) secara umum

---

<sup>73</sup> T. Mulya Lubis, *Op. Cit*, hal 102



diperoleh dari hasil penjualan (ekspor) migas maupun komoditi yang berupa non-migas dan pendapatan negara yang diperoleh dari pajak. Pada awal pembangunan sekitar tahun 1974 bersamaan dengan terjadinya boom oil, penerimaan dari ekspor minyak dan gas sangat signifikan dan menjadi begitu dominan sebagai sumber penerimaan (devisa) negara. Sehingga dikatakan : Pada dasawarsa tahun 1970 an, ekspor migas merupakan sumber penerimaan devisa Indonesia, yang menyumbang hampir 80 persen dari penerimaan ekspor.<sup>74</sup> Peran minyak dan gas bumi sebagai sumber penerimaan negara berlangsung hanya sampai tahun 1981. Setelah tahun 1981, bersamaan dengan menurunnya harga minyak di pasaran dunia, penerimaan negara yang bersumber dari ekspor migas tidak lagi dapat diandalkan, sehingga diupayakan langkah-langkah baru untuk mencari dan menggali sumber penerimaan negara yang lain, selain pendapatan negara yang bersumber dari hasil ekspor minyak dan gas bumi.

Sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara di luar minyak dan gas bumi, dipandang perlu untuk mencari dan menggali sumber pendapatan negara dengan mengoptimalkan upaya pembangunan di segala bidang. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, adalah : Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan

---

<sup>74</sup> Mudrajat Kuncoro, *Op. Cit*, hal 215

teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.<sup>75)</sup>

Tidak ada cara untuk dapat mengembangkan potensi ekonomi nasional yang berorientasi global adalah dengan membuka kesempatan dan peluang yang seluas-luasnya bagi kegiatan investasi, baik dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan tidak terkecuali dengan mengundang investasi asing. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan dalam bidang ekonomi, yakni mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka akseptabilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan komparatif terutama berbasis keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.<sup>76)</sup>

Kegiatan investasi harus diarahkan dan diprioritaskan pada bidang-bidang usaha yang produktif, terutama pada sektor industri dan perdagangan yang berorientasi ekspor. Sehingga dari hasil ekspor tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan (devisa) negara. Terkait dengan

---

<sup>75</sup> Lihat Tap. MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 - 2004

<sup>76</sup> Lihat Tap. MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara 1999 - 2004

prioritas kegiatan investasi, Carunia Mulya Firdausi <sup>77</sup>) mengemukakan: Dalam hubungannya dengan kebijakan investasi, beberapa langkah berikut perlu dipertimbangkan baik dalam jangka pendek maupun panjang/menengah. Dalam jangka, pendek perlu dilakukan prioritas dalam investasi nasional. Dalam hal ini pemerintah antara lain harus mengaktifkan aset produksi yang kurang terdayagunakan yang masih mempunyai prospek disehatkan untuk melakukan/meningkatkan kegiatan produksi. Selain itu, perlu didorong investasi di bidang-bidang usaha/sektor yang terutama berciri meudaya gunakan sumberdaya domestik yang berorientasi ekspor, mempunyai sifat padat karya dan cepat menghasilkan serta memberikan efek dalam rangka penyehatan neraca pembayaran luar negeri (perolehan dan penghematan devisa).

Namun perlu untuk disadari bahwa, demikian pentingnya peranan investasi dalam pembangunan ekonomi, maka kegiatan-kegiatan investasi hendaknya harus dilakukan secara selektif dan dimanfaatkan hanya untuk sektor-sektor yang produktif saja. Sebab, jika kegiatan investasi tidak dilakukan secara selektif dan terarah, justru dapat menimbulkan dampak yang kurang baik dan kontra produktif bagi pembangunan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh Edy Suandi Hamid<sup>78</sup>) “ Jika investasi dari

22 <sup>77</sup> Carunia Mulya Firdausi, *Indonesia Menapak Abad 21, Kajian Ekonomi Politik, Op. Cit*, hal

<sup>78</sup> Edy Suandi Hamid, *Op. Cit*, hal 155

utang luar negeri ini benar-benar terarah pada sektor produktif dan dapat menghasilkan devisa pada masa yang akan datang, maka masalah pembayaran utang akan dapat diatasi. Namun jika kita mengulangi kesalahan pada masa lalu, maka sejarah akan kembali berulang, krisis ekonomi akan kembali terjadi”.

#### **e. Peningkatan Pendapatan Masyarakat**

Maksud dilakukannya suatu kegiatan investasi adalah untuk menggali dan mewujudkan sumber-sumber potensi ekonomi menjadi ekonomi riil, dan sekaligus untuk meningkatkan produksi. Oleh karena itu, melalui kegiatan investasi diharapkan akan memberikan dorongan bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan dunia usaha (sektor riil) di segala bidang/sektor, seperti; Perdagangan, Industri, Pertambangan, Pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata dan lain sebagainya.

Di dalam mengembangkan dunia usaha, tidak hanya ditujukan pada usaha berskala besar saja, tetapi lebih diarahkan kepada tumbuhnya usaha menengah dan usaha kecil. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif serta membuka peluang usaha yang seluas-luasnya. Melalui kegiatan dunia usaha, baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta terutama pada bidang usaha yang produktif serta mempunyai sifat

padat karya, akan memberikan pengaruh yang luas (*multi player efect*) pada berbagai segi kehidupan masyarakat. Bergairah dan berkembangnya kegiatan usaha, maka secara otomatis akan meningkatkan produktifitas masyarakat dan dapat menyediakan lapangan kerja dalam jumlah besar, sehingga pada gilirannya – secara langsung maupun tidak langsung – akan berpengaruh kepada meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan demikian, investasi yang dilakukan melalui pengembangan berbagai kegiatan usaha, memegang peranan yang penting dan memberikan sumbangan yang tidak kecil artinya bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

### **3. Pengaturan Investasi di Indonesia**

#### **a. Pengaturan Investasi Secara Nasional**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa, investasi mempunyai pengertian yang luas. Di samping investasi yang dilakukan secara langsung (*direct investment*), ada juga jenis investasi yang lain yaitu dalam bentuk portfolio invesment (investasi yang dilakukan dengan jalan pembelian surat berharga, baik di pasar modal maupun pasar uang). Di dalam tulisan ini hanya difokuskan pada investasi langsung (*direct invesment*) yang lazim disebut juga dengan Penanaman Modal.

Seluruh kegiatan investasi investasi/penanaman modal di Indonesia, harus berlandaskan pada peraturan-perundang-undangan. Di tingkat nasional, investasi/penanaman modal secara umum diatur dalam bentuk

undang-undang. Investasi/penanaman modal asing (PMA) diatur dengan Undang Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal asing, yang kemudian diubah dengan Undang Undang No. 11 Tahun 1970. Sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) diatur dalam Undang Undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1970.

Jika kita melihat ke belakang, sebelum diberlakukannya Undang Undang No. 1 Tahun 1967, pernah berlaku sebuah undang-undang yang juga mengatur tentang penanaman modal asing, yaitu Undang Undang No. 78 Tahun 1958 yang kemudian telah diubah dengan Undang Undang No. 15 Prp Tahun 1960 dan selanjutnya dicabut dengan Undang Undang No. 16 Tahun 1965, karena pada waktu itu, terdapat pandangan bahwa penanaman modal asing bertentangan dengan semangat revolusi.<sup>79)</sup>

Di dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang Undang No. 11 Tahun 1970, diatur mengenai pengertian modal asing, bentuk hukum, kedudukan dan daerah berusaha penanaman modal asing, bidang usaha modal asing, tenaga kerja, pemakaian tanah, kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain, jangka waktu penanaman modal asing, hak tranfer dan repatriasi,

---

<sup>79</sup> Ismail Suny, *Op. Cit*, hal 9-14

nasionalisasi dan kompensasi, serta kerjasama antara modal asing dan modal nasional.<sup>80)</sup>

Pelaksanaan lebih lanjut dari Undang Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) maupun Undang Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN), pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk perundang-undangan, dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Menteri (Kepmen) dan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Keseluruhan peraturan perundangan sebagai pelaksanaan dari UUPMA dan UUPMDN, mempunyai daya dan kekuatan berlaku sesuai dengan tingkatan dari masing-masing perundangan tersebut. Dalam pengertian bahwa peraturan yang tingkatannya berada di bawah, sesungguhnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi. Namun tidak jarang ditemukan, bahwa antara satu ketentuan dalam peraturan tertentu berbeda, bahkan bertentangan dengan ketentuan yang lebih tingkatannya lebih tinggi. Sebagaimana disinyalir oleh Adolf Warrow <sup>81)</sup> dengan mengemukakan "Selain itu PMA-PMA sebetulnya terikat pula dengan peraturan-peraturan yang akan dibuat seperti yang dapat dibaca dalam aplikasi PMA yang berbunyi; *other subsequent laws and*

<sup>80</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1999, hal 273 - 280

<sup>81</sup> Adolf Warrow, T. Mulya Lubis, *PMA dan UUPMA, Harapan dan Kenyataan*, dari buku Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Op. Cit, hal 91

*regulations coming into relevant to foreign invesment matters.* Yang menarik dan sering jadi perdebatan di sini adalah apa yang dimaksud dengan *other subsequent laws and regulations* ?. Sebab sering, “surat edaran” juga termasuk dalam ketentuan hukum yang mengikat. Begitu pula surat keputusan sidang kabinet. Bagaimana daya laku surat-surat ini terhadap PMA, apalagi jika surat-surat ini bertentangan dengan UUPMA”.

#### **b. Pengaturan Investasi di Tingkat Daerah**

Sebagai tindak lanjut kebijakan investasi secara nasional sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-undang, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden (KEPPRES), Keputusan Menteri dan Keputusan-keputusan lainnya, maka pengaturan kegiatan investasi di tingkat daerah dapat diatur di dalam perundang-undangan di daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Keputusan/Instruksi Gubernur ataupun Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD). Tetapi semua peraturan maupun keputusan tentang kegiatan investasi di daerah harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan investasi di tingkat nasional.

Dalam konteks sistem perundang-undangan, kewenangan daerah untuk membuat peraturan perundang-undangan, tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan ataupun keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional, karena peraturan perundang-undangan di tingkat daerah merupakan bagian yang tidak



terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan kepentingan umum. Dalam ketentuan Pasal 70 UU No. 22 Tahun 1999 dengan tegas disebutkan bahwa "Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi"<sup>82)</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, E. Koswara<sup>83)</sup> menegaskan: Pengaturan investasi di tingkat daerah harus mengacu pada peraturan/kebijakan-kebijakan investasi di tingkat nasional. Hal ini tetap dilaksanakan walaupun arah perekonomian Indonesia mengacu pada pengembangan perekonomian daerah apalagi dalam pelaksanaan otonomi daerah, namun harus kita ingat bahwa kewenangan otonomi daerah yang menuju kemandirian daerah di dalam negara kesatuan, tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonomi menurut kehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan.

---

<sup>82</sup> Lihat *Undang Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*

<sup>83</sup> Lihat *Makalah Otonomi Daerah yang berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat*.

## **B. PERUBAHAN KEBIJAKAN INVESTASI DI INDONESIA**

### **1. Arah Kebijakan Investasi Secara Nasional**

#### **a. Peningkatan Kegiatan Dunia Usaha**

Melalui perubahan kebijakan investasi di masa yang akan datang diharapkan dapat menciptakan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya dunia usaha serta membuka peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku ekonomi tanpa adanya perlakuan yang berbeda di antara para pelaku ekonomi.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yakni <sup>84</sup>): “Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka akseptabilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan”.

Kebijakan pembangunan ekonomi tersebut di atas dilandasi pada pengalaman masa lalu, dimana pendekatan yang diterapkan oleh pemerintah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan, dengan menetapkan sektor-sektor kegiatan

---

<sup>84</sup> Lihat Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang *Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004*, Arah Kebijakan dalam bidang Ekonomi, point 10.

ekonomi tertentu sebagai pusat pertumbuhan, yang pada gilirannya diharapkan dapat menjadi lokomotif atau penggerak bagi sektor-sektor lainnya.

Konsekwensi dari kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan melalui sub-sektor sub-sektor unggulan tertentu, dan kemudian diikuti dengan berkembangnya sistem kartel dan konglomerasi adalah terkonsentrasinya penguasaan pasar pada sekelompok pengusaha tertentu. Mereka mampu mengembangkan praktek-praktek oligopoli-oligopsoni, dengan mengintegrasikan secara vertikal seluruh aktivitas usahanya mulai dari hulu sampai hilir. Struktur ekonomi yang tercipta sebagai akibatnya adalah struktur ekonomi yang bercirikan adanya kesenjangan yang lebar antara industri besar dan industri kecil, dan tidak adanya keterlibatan yang berarti antara keduanya<sup>85</sup>)

Kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan usaha skala besar sebagai penggerak (*engine of growth*) sebagaimana diuraikan diatas, ternyata belum/tidak dapat menyelesaikan persoalan dasar ekonomi Indonesia. Kebijakan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan dengan mengembangkan sub-sektor industri berskala besar sebagai pusat pertumbuhan, ternyata tidak memberikan aspek pemerataan dan kesempatan

---

<sup>85</sup> Adi Sasono, *Memperkokoh Ekonomi Rakyat Menuju Indonesia Baru*, Sintesis IV, No. 29 Tahun 1999, hal 6

berusaha yang sama pada usaha kecil, bahkan sebaliknya, justru menempatkan sektor usaha (industri) kecil pada posisi yang sulit.

Didin S Damanhuri <sup>86</sup>) mengemukakan "bahwa dunia usaha kita dalam PJP I telah berlangsung dengan pesat, akan tetapi strukturnya belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya lapisan pengusaha besar yang amat kecil jumlahnya tetapi menguasai sebagian besar pasar dan aset nasional. Sedangkan lapisan pengusaha kecil sebagai dasar perekonomian rakyat dan meliputi bagian terbesar dari pengusaha, amat rentan dan hanya menguasai sebagian kecil pasar dan aset nasional. lapisan pengusaha menengah yang seharusnya merupakan tulang punggung perekonomian, ternyata pada PJP I jumlahnya sangat kecil dan kurang handal.

Lebih lanjut Masyhuri <sup>87</sup>) mengatakan "dominasi industri besar dalam perekonomian Indonesia tercermin pada angka-angka berikut. Misalnya, omset 10 konglomerat Indonesia mencapai 30 persen PDB. Omset 50 pengusaha yang tergabung dalam satu kelompok usaha mencapai 83 persen APBN. Sekitar 61,1 persen PDB dikuasai oleh 0,2 persen pengusaha. Sekitar 90 persen kredit yang dikucurkan bank swasta dipergunakan untuk membiayai usaha kelompok sendiri. (Kwan :1999). Ini hanya merupakan

---

<sup>86</sup> Didin S. Damhuri, *Ekonomi Politik Alternatif Agenda Reformasi abad 21*, hal 158

<sup>87</sup> Masyhuri, *Industri Kecil, Pemerataan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, dalam Indonesia Menapak Abad 21, Kajian Ekonomi Politik*, hal 177.

gambaran kecil dari terkonsentrasinya alokasi sumber perekonomian Indonesia pada sekelompok kecil pengusaha. Sekali lagi, pengusaha kecil dengan sendirinya terabaikan.

Belajar dari pengalaman sebagaimana dijelaskan di atas, maka kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia hendaknya jangan hanya ditekankan pada pengembangan sub-sektor industri besar dan usaha besar, tetapi harus juga berupaya untuk mengembangkan industri/usaha kecil. Kebijakan yang berkaitan dengan akses modal, tidak hanya dicurahkan pada sektor industri/usaha berskala besar saja – yang selama ini ditempatkan sebagai tumpuan pertumbuhan –, tetapi harus disalurkan juga pada industri/usaha berkala menengah dan industri/usaha kecil.

Restrukturisasi pembangunan ekonomi harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip serta memperhatikan aspek-aspek keadilan dan pemerataan terhadap penguasaan sumber-sumber ekonomi, sehingga dana pembangunan akan teralokasikan pada pengembangan sektor industri/usaha secara merata. Oleh karena itu, keberpihakan pemerintah terhadap pelaku ekonomi swasta nasional terutama kebijakan pemerintah yang memihak pada industri/usaha menengah dan kecil, harus tetap dipertahankan dan dikembangkan. Hal ini sesuai dengan usaha pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kepentingan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Sementara itu, pelaku ekonomi swasta nasional baik perusahaan PMDN maupun yang non PMA/PMDN terutama usaha kecil/tenengah

(UKM/Koperasi) terus didorong untuk meningkatkan manajemen, kemampuan teknologi, pemasaran dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebenarnya usaha pemerintah untuk mendorong partisipasi usaha kecil dan menengah dalam bidang penanaman modal juga sudah lama dimulai, sebagaimana diungkapkan oleh Ismail Saleh<sup>87</sup>) bahwa dalam bidang investasi kebijaksanaan dari BKPM pada tahun 1980 an telah mengarahkan penyertaan golongan ekonomi lemah termasuk koperasi, dan kebijakan tersebut ditegaskan dalam Daftar Skala Prioritas tahun 1980. Langkah tersebut dilakukan oleh BKPM untuk perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah dan koperasi, sekaligus sebagai upaya untuk lebih meningkatkan aspek pemerataan di tengah usaha-usaha mengembangkan pertumbuhan ekonomi.

Sesungguhnya, untuk menciptakan struktur ekonomi yang berkeadilan, pemerataan merupakan pendekatan yang paling tepat. Restrukturisasi penguasaan aset ekonomi dengan jalan memberikan kesempatan berusaha yang sama, merupakan persoalan yang tidak dapat dihindari. Restrukturisasi sama sekali tidak dalam pengertian mengambil kekayaan ekonomi dari pengusaha besar untuk dibagi-bagikan kepada pengusaha kecil, tetapi lebih merupakan suatu usaha untuk menciptakan

---

<sup>87</sup> Ismail Saleh, *O.p. Cit*, hal. 19

tatanan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi dengan deregulasi serta kebijakan yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak. Sehingga pengembangan kegiatan dunia usaha dengan jalan membuka dan memberikan kesempatan berusaha melalui kebijakan investasi sangat tepat serta relevan di dalam mewujudkan pemerataan terhadap akses-akses dan sumber-sumber ekonomi.

#### **b. Penyederhanaan Pelayanan Kegiatan Investasi**

Salah satu faktor penting di dalam menunjang keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi adalah melakukan deregulasi (penyederhanaan) pelayanan kegiatan ekonomi. Secara umum, tujuan dari deregulasi adalah untuk membantu kelancaran usaha dari para pelaku ekonomi, karena deregulasi dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi bagi para pelaku ekonomi.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi, sebagaimana dituangkan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara<sup>89</sup>) “Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidak sempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, pelayanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang”.

---

<sup>89</sup> Lihat Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang *Garis Garis Besar Haluan Negara*, Arah Kebijakan dalam bidang Hukum point. 3

Berkaitan dengan kegiatan investasi baik investasi asing maupun investasi dalam negeri, pemerintah telah pula mengambil beberapa langkah-langkah deregulasi (penyederhanaan) pelayanan kegiatan investasi melalui beberapa paket kebijakan (PK), yang tidak lain bertujuan untuk menarik minat investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Beberapa paket kebijakan tersebut adalah : Paket Kebijakan Mei 1986, mengenai penanaman modal di kawasan berikat, dan pemberian kemudahan tata niaga, serta pembebasan dan pengembalian bea masuk; Paket Kebijakan 24 Desember 1987, yang merupakan upaya lanjutan mengurangi berbagai hambatan non-tarif, selain beberapa penyederhanaan izin dan prosedur, seperti untuk mendirikan hotel; Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992, tentang persyaratan kepemilikan saham dalam perusahaan PMA; Paket Kebijakan 23 Oktober 1993, yang antara lain mencakup tata cara penanaman modal, persyaratan kepemilikan saham dalam perusahaan PMA dan perizinan; Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 yaitu tentang kepemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah secara terus-menerus melakukan penyempurnaan berkaitan dengan penyederhanaan pelayanan kegiatan investasi, tidak lain bertujuan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para calon investor/investor dalam melaksanakan kegiatan investasi di Indonesia.



Bentuk penyederhanaan pelayanan kegiatan investasi tersebut, di mana calon investor PMA bebas memilih untuk mengajukan aplikasi ke KBRI/Konjen di negara asal (*home country*) atau ke BKPM. Surat persetujuan prinsip (*priliminary approval*) dapat diterbitkan langsung oleh KBRI/Konjen atau BKPM tanpa batasan nilai investasi. Selain itu, calon investor PMDN dapat memilih untuk mengajukan aplikasi investasinya ke BKPM di tempat tujuan/lokasi proyek atau ke PKPM pusat dengan tidak ada pembatasan nilai investasi. Surat persetujuan PMDN diterbitkan oleh BKPM di tempat tujuan/lokasi proyek atau ke PKPM pusat.

Selain itu, pemerintah telah pula berupaya melakukan deregulasi berkaitan dengan pelayanan administrasi investasi dengan memperbaharui kebijakan tentang tata cara penanaman modal, dengan Kepres 117 tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Kepres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. Adapun dasar pertimbangan dari dikeluarkannya Kepres 117 tahun 1999, adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan perizinan investasi. Di dalam Kepres tersebut ditentukan bahwa kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan investasi untuk investasi dalam rangka PMDN, dapat dilimpahkan kepada Gubernur Kepala daerah Propinsi. Untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut, Gubernur kepala Daerah propinsi menugaskan kepada Ketua BKPM di daerah tersebut.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 Kepres No. 117 Tahun 1999

Sedangkan kewenangan pemberian persetujuan investasi dalam rangka PMA sebagaimana diatur dalam UUPMA, dilimpahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Khusus kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi diberikan pula wewenang pemberian perizinan pelaksanaan investasi, sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani investasi di Daerah Kabupaten dan di Daerah Kota.

Di samping Keppres No. 117 Tahun 1999, Pemerintah telah pula mengeluarkan Keppres No. 122 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keppres No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan BKPM. Adapun dasar pertimbangan dikeluarkannya Keppres tersebut adalah untuk lebih mempercepat peningkatan investasi serta pelayanan perizinan investasi di seluruh daerah di Indonesia.

Dengan demikian pengajuan permohonan dan pemberian izin investasi yang dulunya ditangani oleh BKPM pusat di Jakarta, sekarang untuk investasi PMDN berdasarkan pelimpahan wewenang dapat dilaksanakan oleh Gubernur dan oleh Gubernur dilimpahkan kepada BKPM. Sedangkan untuk investasi PMA, selain oleh BKPM, BKPM, pemberian izin dapat juga dilakukan oleh Perwakilan RI di luar negeri berdasarkan tugas yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri yang mendapat pelimpahan wewenang dari Meninves/Ketua BKPM.

### c. Upaya Promosi Kegiatan Investasi

Dalam era globalisasi dewasa ini, tidak ada suatu negara yang mampu melakukan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang ekonomi tanpa saling ketergantungan dengan negara lain. Arus modal yang berasal dari luar menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karenanya, arti penting kehadiran investor asing tidak mungkin dapat dihindari. Persoalan yang timbul adalah bagaimana upaya menarik minat para investor, terutama investor asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa, Indonesia memiliki beberapa keunggulan komparatif (*comparative advented*) dalam menarik investasi asing dibandingkan dengan negara-negara lain. Keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia tersebut, antara lain; berupa sumber kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk besar, dan tenaga kerja yang murah.

Sejalan dengan upaya meraih investasi asing dan menarik minat investor asing, pemerintah dan pelaku-pelaku ekonomi nasional harus mempersiapkan diri di dalam mensikapi dan mengantisipasi serta mensiasati berbagai perubahan yang terjadi, dengan jalan membuat berbagai kebijakan ekonomi agar mampu mengatasi berbagai persoalan yang timbul akibat dari globalisasi. Pemerintah tidak boleh lagi berpegang dan hanya mengandalkan pada keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia, terlebih lagi dalam menghadapi perekonomian dunia yang tidak menentu yang disertai dengan

bermunculannya negara-negara - yang selama ini mengisolasi diri, seperti negara-negara Eropa Timur, RRC, Vietman – muncul sebagai kompetitor baru dalam meraih investasi asing.

Mengantisipasi dan menghadapi persaingan ekonomi global tersebut, sejak beberapa tahun yang lalu pemerintah telah mengambil berbagai langkah dan upaya di dalam meraih investasi asing, sekaligus upaya menarik minat para investor luar negeri untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Langkah kebijakan yang diambil dalam rangka menarik investasi diantaranya adalah melakukan penyempurnaan kebijakan dalam bidang investasi, penyederhanaan pelayanan perizinan investasi, memperbanyak pusat-pusat pelayanan, serta memberikan kemudahan-kemudahan pada investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia berkaitan dengan perpajakan, dan lain sebagainya.

Selain mengandalkan pada keunggulan komparatif dan berbagai penyempurnaan kebijakan dan penyederhanaan pelayanan perizinan dalam bidang investasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, serta menawarkan kemudahan-kemudahan bagi para investor, dalam era globalisasi dan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka hal yang sangat penting dan patut diperhatikan adalah perlunya perubahan sikap mental dari aparat birokrasi pemerintah, yang selama ini dinilai sebagai salah satu penghambat pelaksanaan investasi di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Cristianto Wibisono<sup>90</sup>) mengungkapkan “Dimasa depan dan kondisi riil kita dalam menawarkan pelbagai daerah di Indonesia seperti Kawasan Indonesia Timur (KIT) yang masih kurang diminati, maka semakin dirasakan perlunya para pamong mengubah mentalnya dari birokrasi yang pasif dan ingin di servis, menjadi *intreprenuer* yang aktif menjual dan menjajakan potensi daerahnya dengan semangat wiraswasta kepada investor global, regional maupun nasional dan lokal. Cara berpikir memungut pungli dan rente ekonomi di depan atau sebelum investor masuk harus diubah, dengan menyediakan fasilitas agar investor berkiprah. Dengan adanya investor, maka ekonomi daerah akan bergerak, ada penyerapan tenaga kerja, ada nilai tambah, ada profit, ada pajak dan ada *multiplayer effect* untuk daerah tersebut”.

Lebih jauh dikemukakannya<sup>91</sup>) Memang nantinya pemerintah daerah terus menjadi ujung tombak dari segala macam kampanye investasi, kampanye menarik modal. Tetapi, kalau di Amerika itu, yang berebut mencari investor adalah Gubernur negara bagian, dan seluruh Gubernur negara bagian punya kantor perwakilan di Tokyo dan Taipei. Gubernurnya yang sowan ke investor di situ. Di sini khan terbalik, investor disuruh sowan ke Bupati dan Gubernur mungkin malah dibentak oleh Satpam. di sana malah

---

<sup>90</sup> Cristanto Wibisono, *Otonomi : Politik atau Ekonomi, dalam buku Otonomi Daerah : Peluang dan Tantangan*, Suara Pembaharuan, Jakarta, 2001 hal 65)

<sup>91</sup> Cristianto Wibisono, *I b i d*

dikasih karpet merah, dijemput Gubernur. Kasarnya Gubernur jual diri, tanam modal di Tenisia saja, jangan di Misionari, nanti saya kasih fasilitas ini.

Berbagai langkah kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah tersebut di atas, adalah merupakan upaya promosi di dalam meraih investasi asing dan sekaligus sebagai upaya menarik minat para investor, baik di dalam maupun luar negeri agar mau menanamkan investasinya di Indonesia, dan sekaligus melaksanakan amanat sebagaimana tercantum dalam Garis Garis Besar Haluan Negara<sup>92</sup>). "Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional".

## **2. Strategi Kebijakan Investasi Di Indonesia**

### **a. Strategi Jangka Pendek**

Berhubungan dengan kebijakan investasi, beberapa langkah dan strategi sangat perlu untuk dipertimbangkan. Dalam jangka pendek, perlu dilakukan skala prioritas dalam investasi nasional. Dalam hal ini, pemerintah antara lain harus mengaktifkan aset produksi yang belum didayagunakan yang masih mempunyai prospek disehatkan untuk melakukan/meningkatkan

---

<sup>92</sup> Lihat Tap. MPR No. IV/MPR/1999 tentang *Garis Garis Besar Haluan Negara*, Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi, poin 27

produksi. Selain itu perlu didorong investasi pada bidang-bidang usaha/sektor-sektor mengutamakan sumber daya domestik yang berorientasi ekspor dengan, mempunyai kaitan dengan pengadaan sembilan bahan pokok, mempunyai sifat padat karya, dan cepat menghasilkan serta memberikan efek kepada penyehatan pembayaran luar negeri (perolehan dan penghematan devisa), dengan mempertimbangkan daerah yang paling berat terkena dampak krisis.

Dalam jangka pendek, langkah yang perlu dilakukan adalah : (1). Pengembangan industri padat karya, seperti produksi tekstil, elektronika, industri kerajinan dan sejenisnya. Upaya pengembangan industri ini perlu dilakukan mengingat industri ini banyak menyerap tenaga kerja dan sekaligus dapat mengurangi tingkat pengangguran dan selama ini telah berkembang dengan cukup baik serta memberikan sumbangan yang tidak kecil pada perolehan devisa.

Selain itu, perbaikan dalam insentif kebijakan investasi perlu dilakukan. Hal antara lain mencakup; pemberian layanan administrasi dan layanan berusaha (bisnis) dengan lancar dan efisien, pengembangan sistem insentif investasi baik dalam bentuk tarif maupun non tarif, peningkatan efektivitas promosi investasi di dalam negeri maupun di luar negeri melalui berbagai pameran dan kunjungan ke negara calon investor. Hal lain yang tidak kalah pentingnya, adalah mengadakan program-program pengembangan sumber daya manusia, terutama difokuskan pada

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan koordinasi lintas sektoral dan fasilitator bagi investor dalam kegiatan investasi.

#### **b. Strategi Jangka Menengah**

Dalam jangka menengah, beberapa langkah-langkah dan strategi yang dapat dilakukan melalui pentahapan prioritas investasi berdasarkan sektor (seperti pengembangan industri primer, sekunder dan tersier), pengembangan prioritas investasi berdasarkan kondisi daerah (antara daerah tertinggal termasuk pengembangan kawasan Indonesia Bagian Timur dan daerah maju), pengembangan prioritas investasi berdasarkan institusi (program pemberdayaan dan peningkatan peran aktif masyarakat luas terutama para pelaku ekonomi (pemerintah, swasta dan koperasi) serta peningkatan kerjasama internasional di bidang investasi dalam rangka menarik investor secara selektif dan terarah.

Dalam jangka menengah langkah dan strategi yang perlu dilakukan adalah pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam (*resource-based industry*), khususnya agri-industri (*agro-based Industri*). Upaya ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Dengan demikian perolehan devisa dari hasil ekspor dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dan sekaligus dapat menghemat devisa.



### **c. Strategi Jangka Panjang**

Dalam jangka panjang, langkah-langkah yang perlu dilakukan berkaitan dengan kebijakan investasi di Indonesia adalah pengembangan industri yang berbasis teknologi dan pengetahuan (*knowledge-based industry*) secara bertahap. Upaya ini perlu dilakukan untuk mendapat nilai tambah yang tinggi melalui proses teknologi secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat teknologi yang ada. Selain itu, langkah langkah yang perlu dilakukan adalah deregulasi dan debirokratisasi dalam kegiatan investasi dan perdagangan.

## **3. Perubahan Kebijakan Investasi Di Indonesia**

### **a. Usaha Kearsah Perubahan Undang-Undang Investasi**

Sebagaimana diketahui, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan investasi di Indonesia yakni UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sampai dengan saat ini telah berumur 35 tahun. Latar belakang yang mendasari dikeluarkannya kedua undang-undang tersebut adalah untuk mendukung usaha-usaha pembangunan nasional yang pada saat itu – di awal pemerintahan Orde Baru -, pemerintah mengalami kesulitan dana untuk membiayai pembangunan. Modal yang bersumber dari dalam negeri berupa tabungan dan devisa negara ketika itu sangat terbatas, sehingga tidak ada jalan lain demi berlangsungnya pembangunan, pemerintah mengambil langkah dan kebijakan mengundang investasi asing.

berbagai keterbatasan dari sisi permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Kita menyadari bahwa kemampuan sumber dalam negeri baik dari segi penyediaan dana pembangunan, penguasaan teknologi, keterampilan, manajerial dan kemampuan untuk bersaing di pasar global masih sangat terbatas. Di samping itu, sarana dan prasarana ekonomi untuk menunjang perkembangan dan kegiatan investasi masih sangat terbatas dan belum memadai terutama di Kawasan Indonesia Bagian Timur. Padahal, pada saat yang bersamaan, target-target pembangunan seperti, pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekspor, peningkatan jumlah investasi dan lain sebagainya, harus tercapai.

Tantangan yang bersifat eksternal yang berasal dari luar negeri dalam era perekonomian yang semakin global, ditandai dengan persaingan dalam mengisi pangsa pasar dunia yang semakin ketat, jumlah modal yang tersedia semakin langka, sementara negara-negara yang memerlukan modal (modal asing) semakin banyak. Kondisi ini akan mengakibatkan persaingan di antara negara-negara berkembang maupun antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju dan di antara sesama negara maju itu sendiri. Bagi Indonesia, di dalam menarik modal asing, selain menghadapi persaingan di antara negara-negara sesama anggota ASEAN, juga akan menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan negara-negara Asia lainnya, seperti; RRC, Vietnam, Thailand, Korea, Taiwan, India dan negara-negara Asia Selatan lainnya.

Menghadapi perkembangan dan kondisi perekonomian dunia tersebut, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah peraturan-peraturan atau kebijaksanaan yang ada telah siap atau dapat mendukung terciptanya iklim berusaha yang menarik terutama dalam menghadapi tantangan dari dalam dan luar Indonesia di atas. Jawaban yang dapat diberikan secara sekaligus adalah bahwa peraturan atau kebijaksanaan yang ada sekarang ini belum sepenuhnya dapat membantu atau mendorong dunia usaha untuk dapat tumbuh dan berkembang serta bersaing di pasar global dunia <sup>94</sup>)

Seiring dengan perubahan dan perkembangan yang demikian cepat terutama perkembangan perekonomian dunia di era globalisasi, dirasakan perlu dilakukan upaya perubahan dan penyempurnaan peraturan perundangan dalam bidang ekonomi pada umumnya dan lebih khusus dalam bidang investasi yang selama ini berlaku, sehingga dapat menampung dan mengakomodir perkembangan ekonomi terutama dalam bidang investasi. Hal ini, sejalan dengan Arah kebijakan pembangunan dalam bidang hukum sebagaimana diamanatkan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara “mengenmbangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional”.<sup>95</sup>)

---

<sup>94</sup> Lihat Sambutan Pengarahan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Seminar Pelaksanaan PP. No. 20 Tahun 1994 dan SK MENINVES No. 15 Tahun 1994 serta Rencana Pembaharuan UU Penanaman Modal di Jakarta Tanggal 8 – 9 Desember 1994

<sup>95</sup> Lihat Tap MPR No. IV/MPR/1999 *Tantang Garis Garis Besar Haluan Negara 1999-2004*

T. Mulya Lubis.<sup>96</sup>) mengemukakan, tidak merupakan keraguan lagi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam banyak hal menyangkut PMA di Indonesia, karena tanpa adanya perubahan maka kita tetap berada dalam situasi tangan-tangan PMA yang semakin membesar, sementara PMDN secara perlahan porak poranda. Antara UUPMA dan UUPMDN perlu disatukan, mengingat bahwa sering terjadi penyelundupan hukum. Lagi pula semakin lama semakin sulit untuk membedakan antara PMA dan PMDN kerana majunya lalu lintas modal.

Pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal (investasi) dirasa sudah mendesak, mengingat pada saat ini ada beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk menjamin adanya kesamaan persepsi, penafsiran dan pengertian serta sekaligus untuk menampung beberapa kebijakan penanaman modal yang berlaku dan belum ditampung di dalam Undang Undang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal-hal yang dirasakan perlu diadakan penyempurnaan antara lain menyangkut aspek-aspek; pengertian penanaman modal; batas waktu berusaha; dan bidang-bidang usaha yang tertutup. Sedangkan hal-hal yang belum ditampung dalam Undang Undang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang Penanaman Modal Dalam Negeri antara lain, ketentuan-ketentuan berkaitan dengan: pemilikan saham; divestasi; lokasi proyek

---

<sup>96</sup> Lihat. T. Mulya Lubis, *PMA dan UUPMA Harapan dan Kenyataan, Sebuah Telaah Aengenai Kebijakan Penanaman Modal*, dalam Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, hal 99 - 103

insentif penanaman modal; perlakuan yang sama antara PMA dan PMDN; pengalihan saham kepada pihak Indonesia dan ketentuan yang lebih jelas mengenai kewajiban pengalihan teknologi (*transfer of technology*).

Mengantisipasi perkembangan dunia di abad 21, bersamaan dengan era liberalisasi perdagangan dan investasi tahun 2020, maka yang sangat dibutuhkan undang-undang penanaman modal (investasi) yang bersifat integrated dengan kriteria yang lebih jelas. Berkaitan dengan perubahan dan penyempurnaan undang-undang investasi sangat perlu dimasukkan materi-materi baru yang dapat mendukung sekaligus menciptakan iklim berusaha yang menarik di dalam negeri sekaligus dapat mengantisipasi perkembangan ekonomi di era globalisasi.

#### **b. Pemberdayaan Usaha Kecil/Menengah**

Misi pembangunan nasional adalah dalam rangka: Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.<sup>97</sup>

Sejalan dengan misi pembangunan diatas, maka kebijakan pembangunan khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi harus

---

<sup>97</sup> Tap. MPR No. IV/ 1999 Tentang *Garis Garis Besar Haluan Negara*, lihat Misi pembangunan

diarahkan untuk : Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha.<sup>98</sup>)

Sejak dilakukannya reformasi, secara politis lembaga legislatif telah mengeluarkan produk hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak eksekutif dalam pengembangan usaha kecil. Produk-produk hukum tersebut, diantaranya adalah : Ketetapan MPR nomor XVI/ 1990 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokratisasi Ekonomi, salah satu pertimbangan pokok dalam Ketetapan MPR tersebut adalah, bahwa “sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan pembangunan nasional, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional”.

Pasal 3 Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa “ dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang,

---

<sup>98</sup> Tap. MPR/No. IV/1999 Tentang *Garis Garis Besar Haluan Negara*, lihat arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan". Selanjutnya, dalam pasal lebih jauh disebutkan, bahwa "pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana". Lebih lanjut lagi, dalam pasal 5 dinyatakan, bahwa "usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara".

Selain Ketetapan MPR No. XVI Tahun 1998, perangkat hukum lain yang dapat dijadikan sebagai landasan pengembangan ekonomi kerakyatan (dalam hal ini usaha kecil dan menengah), adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sekurang-kurangnya ada tiga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, yakni : Pertama, telah tersedia perangkat hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan segala bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang jelas-jelas telah melahirkan berbagai bentuk ketimpangan ekonomi dan sosial dalam

masyarakat karena ketidak berdayaan ekonomi rakyat (usaha kecil dan menengah) dalam menghadapi persaingan dengan usaha besar yang dalam hal ini hanya dikuasai oleh sejumlah konglomerat. Kedua, dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, diharapkan akan terwujud iklim usaha yang kondusif (melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat) sehingga menjamin adanya usaha kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Ketiga, fondasi hukum yang kuat telah diletakkan dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi, yang memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Perangkat hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Dalam undang-undang tersebut ditentukan antara lain tentang perlunya keberpihakan pemerintah dalam pengembangan usaha kecil dalam berbagai bentuknya seperti; kemitraan, permodalan, pemasaran, teknologi, pencadangan usaha dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dapat dijadikan landasan hukum bagi pengembangan usaha kecil itu sendiri, yang selanjutnya dapat dijabarkan dalam bentuk strategi dan langkah-langkah kebijakan yang lebih konkrit.



Terkait dengan arah perubahan kebijakan investasi dalam rangka pemberdayaan usaha kecil dan usaha menengah, terdapat suatu ketentuan bagi investor yang akan menanamkan modalnya, khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN dalam bidang usaha tertentu disyaratkan untuk mengadakan kemitraan dengan usaha kecil. Bidang usaha yang dimaksud adalah bidang usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 b Keppres No. 99 Tahun 1998 adalah bidang-bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kemitraan sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan pasal tersebut, harus dilakukan secara tertulis.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 b Keppres No. 99 tahun 1998 diatas kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama menteri Negara Investasi Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No 22/ SK /1998 dan 07/SKB/M/VII/1998 28 Juli 1998 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil melalui Kemitraan dalam rangka Penanaman Modal. Tujuan pemberdayaan Usaha Kecil melalui kemitraan di bidang penanaman modal adalah untuk :

1. Meningkatkan peran serta usaha kecil di bidang penanaman modal dalam rangka pemerataan usaha dan kepemilikan aset produktif;
2. Mewujudkan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dalam memberdayakan Usaha Kecil melalui kemitraan dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan usaha secara vertikal dan secara horizontal

dengan melaksanakan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha menengah dan Usaha Besar

Pengertian hubungan kemitraan adalah kerjasama usaha yang saling menunjang dan menguntungkan dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan, antara usaha kecil/tenengah (UKM) dan usaha berskala besar (USB). Usaha bersama tersebut harus disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan dan saling memperkuat. Ruang lingkup kerjasama dalam hubungan kemitraan, dapat meliputi bantuan dan pemberdayaan (empowering) dalam bidang kewirausahaan, manajemen, teknologi, pengembangan prouk, pengendalian mutu, permodalan, informasi pasar, pemasaran dan lain sebagainya.

Hubungan kemitraan yang baik seharusnya mengandung unsur; *co-ownership*, *co-determination*, dan *co-responsibility*, sehingga hubungan kemitraan tersebut tidak menimbulkan ketergantungan UKM terhadap usaha besar mitra usahanya secara sepihak, tetapi justru mengarah kepada kemandirian dan pemberdayaan UKM. Dalam kemitraan harus dicegah terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan terbuka atau terselubung/diam-diam oleh usaha besar. Sebaiknya, UKM dimungkinkan untuk mendapatkan

kesempatan memiliki saham dari mitra usahanya, termasuk dalam jumlah mayoritas.<sup>99)</sup>

Salah satu unsur penting dari pola kemitraan yang membedakan dengan hubungan bisnis atau kerjasama biasa yaitu adanya unsur pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar terhadap pengusaha kecil unsur lain yang juga penting adalah adanya motif ekonomi atau bisnis yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dengan demikian, kemitraan itu tidak diarahkan pada kerjasama yang mengarah pada belas kasihan belaka, karena hal ini dapat menimbulkan ketergantungan dan menjadikan sifat manja pada pengusaha kecil, yang tidak sejalan dengan jiwa, semangat dan perilaku kewirausahaan yang hendak diciptakan dalam upaya pemberdayaan usaha kecil. Adapun konsep pemberdayaan sebagaimana telah dirumuskan dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha tangguh dan mandiri.

### **c. Lapangan Usaha Kegiatan Investasi**

Investasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan strategis

---

<sup>99</sup> Didin S. Damanhuri *Op. Cit*, hal 164, lihat juga Sanusi Bintang, hal 54 - 61

dalam menunjang usaha pembangunan nasional, khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi. Berbagai langkah dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna memacu perkembangan investasi (penanaman modal) di Indonesia, mulai sejak dikeluarkannya Undang Undang No. 1 tahun 1967. Kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi dalam bidang investasi. Salah satu kebijakan penting dalam berkaitan dengan kebijakan pemerintah tersebut adalah dikeluarkannya PP. No. 20 Tahun 1994, yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai suatu kebijakan yang sangat liberal dan berani, karena dalam Peraturan Pemerintah tersebut diperbolehkannya kepemilikan saham 100 persen oleh pihak asing.

Namun demikian, kegiatan investasi yang dilakukan – terutama investasi asing – tidak boleh merugikan kepentingan nasional. dalam penjelasan UUPMA<sup>100</sup>) dinyatakan dengan tegas bahwa walaupun Indonesia mengundang modal asing, namun kepentingan ekonomi nasional harus tetap diprioritaskan –dominasi modal asing harus dicegah -. Oleh karena itu, tidak semua lapangan usaha terbuka bagi modal asing; lapangan-lapangan usaha yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap tertutup bagi modal asing.

Guna melindungi kepentingan nasional, maka dalam pasal 6 UUPMA

---

<sup>100</sup> Lihat Penjelasan Undang Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

semua lapangan usaha terbuka bagi modal asing; lapangan-lapangan usaha yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap tertutup bagi modal asing.

Guna melindungi kepentingan nasional, maka dalam pasal 6 UUPMA mengatur tentang bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara pengusaha penuh, dan bidang-bidang usaha yang tertutup sama sekali bagi modal asing. Bidang-bidang usaha yang tertutup bagi modal asing secara pengusaha penuh yaitu bidang-bidang usaha yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, seperti; pelabuhan, pelabuhan, transmisi, serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan mas media. Istilah “tertutup bagi modal asing secara pengusaha penuh” dijelaskan oleh Pasal 2 PP No. 20 Tahun 1994 yaitu bahwa modal asing boleh masuk namun harus berpatungan dengan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Bidang-bidang usaha yang tertutup sama sekali bagi modal asing adalah bidang-bidang yang menduduki/memegang peranan penting dalam pertahanan negara, seperti produksi senjata, mesiu, bahan-bahan peledak dan peralatan perang. Di samping itu, untuk melindungi kepentingan nasional, berdasarkan Pasal 7 UUPMA, pemerintah masih dapat menetapkan negative list lain selain yang ditetapkan dalam Pasal 6 UUPMA tersebut di atas.

Penetapan *negative list* oleh pemerintah sangat bermanfaat demi kepentingan nasional. Artinya, diharapkan bahwa bidang-bidang yang tertutup bagi modal asing dapat ditangani atau dikuasai oleh modal nasional.

Daftar *negative list* harus disusun secara terinci dan disempurnakan setiap saat sesuai dengan kepentingan nasional. sekarang ini telah banyak perubahan dari apa yang tercantum dalam UUPMA, karena sudah semakin banyak sektor yang sudah dapat dilakukan oleh PMDN. Penyusunan *negative list* biasanya dibarengi dengan penyusunan Daftar Skala Prioritas (DSP) bagi PMA dan PMDN disesuaikan dengan kebutuhan.

Namun perlu diingat juga bahwa dengan adanya globalisasi ekonomi serta telah ikut sertanya Indonesia dalam penandatanganan-penandatanganan perjanjian perdagangan dunia (internasional), maka penetapan daftar negatif investasi oleh pemerintah harus dilakukan secara hati-hati, karena akan mengundang reaksi dari luar. Seperti halnya penetapan Keppres No. 96 Tahun 2000 yang menggantikan Keppres No. 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal, telah mendapat reaksi dari pelaku usaha internet di Indonesia, yang akhirnya Keppres tersebut diperbaharui dengan Keppres No. 118 Tahun 2000.<sup>100</sup>

#### **4. Perubahan Kebijakan Investasi dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi**

Di dalam abad 21 ini, perekonomian dunia semakin bersifat global.

---

<sup>100</sup> Lihat Kompas tanggal 18 Agustus Tahun 2000

menarik modal global (baca modal asing), selain menghadapi persaingan di antara negara-negara tetangga sesama anggota ASEAN, juga menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan negara-negara RRC, Vietnam, India dan beberapa negara Asia Selatan lainnya yang pada tahun-tahun terakhir telah bermunculan dan memikat untuk menarik penanaman modal asing.

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Indonesia mulai membuka diri terhadap investasi asing. Kebijakan tersebut mengindikasikan adanya liberalisasi

dan sekaligus sebagai upaya untuk menarik pemodal asing manca negara untuk menanamkan modalnya dan berusaha di Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai usaha dalam menggairahkan perekonomian nasional yang kondisinya sangat lesu meskipun pada saat itu, pemerintah dihadapkan pada pilihan delematis. Di satu sisi, kebijakan “pintu terbuka” tersebut diharapkan dapat menggairahkan perekonomian dengan mengalirnya modal, teknologi dari luar dan sekaligus dapat menyerap tenaga kerja. Sementara disisi lain, terdapat ancaman kemungkinan dominasi perekonomian oleh modal asing yang dalam hal ini dilakukan oleh Tnansnasional Cooperation (TNC) atau yang lazim dikenal dengan Perusahaan Multi Nasional (PMN).

Seiring dengan perjalanan waktu, ternyata pengaruh kuat dari globalisasi tidak dapat ditahan ataupun dielakkan, terutama berkaitan dengan masuknya arus modal yang dilakukan oleh TNC ke suatu negara. Carunia Mulya Firdausi

102) mengemukakan : Seiring dengan itu, globalisasi di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya investasi pada berbagai kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan transnasional (TNC). Bahkan perdagangan internasional makin mengikuti investasi. Dengan kata lain, perdagangan di Indonesia erat berkaitan dengan investasi oleh TNC. Selanjutnya, dampak globalisasi di Indonesia telah pula menimbulkan berbagai perkembangan sangat cepat dalam bidang struktural. Perkembangan perekonomian nasional yang tadinya sangat sarat dengan intervensi pemerintah dalam berbagai kebijakan ekonomi, kini telah berubah dengan pengendalian yang lebih besar pada mekanisme pasar dan persaingan, meskipun masih pada tingkat yang terbatas.

Indonesia sebagai salah satu negara yang turut serta dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pada tanggal 2 Nopember 1994 berdasarkan UU No.7 Tahun 1994 telah meratifikasi perjanjian pembentukan WTO yang dibentuk berdasarkan Keputusan Marrakesh pada tanggal 12-14 April 1994 tentang GATT(*General Agreement on Trade and Tariff*). Dengan demikian, ketentuan-ketentuan GATT sudah harus diberlakukan di Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan GATT di bidang investasi, yang lazim disebut "TRIMs" (*Trade Related Investment Measures*) yang antara lain menentukan bahwa negara-negara penanda tangan GATT harus sudah menghapuskan semua aturan-aturan investasi yang tidak sesuai dengan GATT.



Selain telah meratifikasi perjanjian WTO, Indonesia juga sebagai anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan Asia – Pasifik melalui peningkatan dan perluasan kegiatan perdagangan dan investasi yang mulai berlaku pada tahun 2020. Salah satu keputusan penting dari Pertemuan Tingkat Menteri APEC yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11 – 12 Nopember 1994 adalah telah disetujuinya 12 prinsip-prinsip Investasi yang tidak mengikat (*Non-binding Investment Principles*)<sup>103</sup>, yang meliputi :

- *Tranparancy* : Semua anggota menyediakan peraturan perundang-undangan, prosedur administrasi dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan investasi untuk umum secara transparan;
- *Non-discrimination Between Source Economic* : Setiap anggota akan memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor, tanpa membedakan asal negara yang bersangkutan;
- *National Treatment* : Kecuali yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan dalam negeri, setiap anggota tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap investor asing dibandingkan terhadap investor dalam negeri;

---

<sup>103</sup> R.P. Naoitupulu, *Hubungan GATT 1994, APEC dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994*, Makalah Seminar 2 Hari, Diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum, Jakarta 9 Desember 1994

- *Investment Incentives* : Setiap anggota tidak akan melonggarkan peraturan kesehatan, keselamatan dan lingkungan sebagai suatu insentif untuk menarik masuknya modal asing;
- *Expropriation and Compensation* : Setiap anggota tidak akan mengambil alih investasi atau tindakan sejenisnya terkecuali untuk kepentingan umum, sesuai dengan prinsip hukum Internasional dan segera memberikan kompensasi yang sesuai;
- *Performance Requirements* : Setiap anggota akan mengurangi penerapan persyaratan pelaksanaan investasi yang dapat menghambat atau membatasi peningkatan perdagangan dan investasi;
- *Repatriation and Convertibility* : Setiap anggota memberikan kebebasan atas transfer dana yang berhubungan dengan investasi asing seperti laba, deviden, royalti, pembayaran pinjaman dan likwidasi dalam bentuk mata uang yang dapat dipertukarkan (*Convertible*);
- *Settlement of Disputes* : Setiap anggota menyetujui suatu penyelesaian sengketa yang timbul pada investasi asing dengan cara konsultasi dan negosiasi antara penanam modal asing dengan pemerintah setempat dan dalam hal tidak ada penyelesaian maka ditempuh prosedur arbitrase yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa;
- *Entry and Sojourn of Personnel* : Setiap anggota mengizinkan tenaga kerja asing yang penting seperti teknisi dan tenaga manajerial yang digunakan

pada kegiatan investasi asing, dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- *Avoidance of Double Taxation* : Setiap anggota akan melakukan penghindara pajak berganda atas hasil kegiatan investasi asing;
- *Investor Behaviour* : Investor asing harus mematuhi semua undang-undang tentang ekonomi, peraturan, pedoman administrasi dan kebijaksanaan seperti yang diterapkan terhadap investor dalam negeri;
- *Removal of Barriers to Capital Export* : Setiap anggota setuju bahwa hambatan-hambatan baik berupa aturan maupun kelembagaan atas mengalirnya investasi keluar akan dikurangi.

Untuk mengantisipasi dan memenuhi tuntutan globalisasi dan regionalisasi, serta sekaligus untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia, Pemerintah secara terus-menerus telah mengevaluasi semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan investasi (penanaman modal), sehingga memenuhi ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku melalui langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi di sektor ekonomi, keuangan dan perbankan, antara lain melalui penurunan tingkat tarif, penghapusan tambahan non-tarif, dan penyederhanaan prosedur perizinan.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang investasi (penanaman modal) adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham yang didirikan dalam rangka PMA, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya SK. MENINVES/Ketua BKPM No. 15

Tahun 1994, di mana pemerintah memberikan kemudahan dan kebebasan yang lebih besar terhadap kegiatan penanaman modal, meliputi :

- a). Perusahaan PMA dapat berbentuk usaha patungan atau perusahaan PMA langsung yang berarti seluruh (100%) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing;
- b). Penjualan saham perusahaan PMA kepada pihak Indonesia berdasarkan kesepakatan;
- c). Bagi sembilan bidang usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu: pelabuhan; produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum; telekomunikasi; pelayaran; penerbangan; air minum; kereta api umum; pembangkit tenaga atom dan masmedia; perusahaan PMA yang dibentuk harus merupakan perusahaan patungan;
- d). Pembebasan batas minimal jumlah investasi yang ditanamkan;
- e). Persyaratan divestasi ditiadakan bagi perusahaan PMA, kecuali dalam jumlah atau persentase yang kecil;
- f). Perusahaan PMA yang patungan atau langsung yang telah mendapat izin sebagai badan hukum di Indonesia diperlakukan sebagai badan hukum Indonesia, sehingga diperkenankan mendirikan perusahaan baru sebagai perusahaan PMA dengan partner asing baru, atau menjadi perusahaan PMDN apabila 100% saham dimiliki oleh PMA tersebut atau ada peserta WNI atau badan hukum Indonesia;

g). Pembelian saham perusahaan nasional yang telah atau belum berproduksi komersial dapat dilakukan oleh perusahaan PMA yang telah berproduksi komersial, badan hukum asing dan/atau warga negara asing melalui pasar modal dalam negeri atau pemilikan langsung dan/atau pasar modal dalam negeri.

Izin usaha perusahaan PMA ditetapkan selama 30 (tigapuluh) tahun dimulai sejak perusahaan berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam izin usaha dan dapat diperbaharui sepanjang perusahaan masih tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.

Apabila diperhatikan isi persetujuan dalam TRIMs dan "*APEC Non-binding Investment Principles*" diatas, maka Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 sudah memenuhi dan mencakup hal-hal yang dituntut oleh "Persetujuan TRIMs dan *APEC Non-binding Investment Principles*" tersebut. Akibat dari dikeluarkannya PP No. 20 Tahun 1994, maka arus investasi asing dengan leluasa masuk ke Indonesia yang nota bene banyak dilakukan oleh *Transnasional Cooperation* (TNC).<sup>104</sup> Kebijakan ini dapat dikatakan sebagai kebijakan yang paling ekspansif, karena dimungkinkannya investor asing

---

<sup>104</sup> Faktor yang mendorong tumbuhnya TNC untuk melakukan ekspansi produksi ke luar negeri, adalah : Pertama, adanya hasrat untuk mengejar keuntungan global (*the pursuit of global profits*). Ini berdasarkan fakta bahwa TNC pada dasarnya adalah suatu perusahaan kapitalis. Kedua, adalah keinginan mencari dan memperoleh suplai bahan mentah; atau sering disebut *rawmaterial seeker*. Ketiga, adalah melayani pasar secara langsung (*market seeker*). Keempat, adalah meminimumkan biaya (*cost minimizer*). TNC jenis ini mencari dan melakukan investasi di luar negeri agar tetap kompetitif baik di negara asal maupun di luar negeri. Kelima, adalah berdasarkan jalur evolusi suatu TNC. Pendekatan evolusioner dalam melakukan ekspansi ke luar negeri adalah untuk meminimumkan resiko agar dapat beroperasi dalam lingkungan asing yang diliputi ketidakpastian.

untuk memiliki 100 persen saham perusahaan yang ditanamkan di Indonesia. Mudrajad Kuncoro<sup>105</sup>) mengemukakan dengan dikeluarkannya PP No 20/1994, implikasinya Indonesia semakin terbuka terhadap investasi asing, terutama investasi asing langsung (*foreign direct investment*), sebagian besar dilakukan oleh TNC.

Dengan upaya-upaya tersebut diatas, diharapkan perekonomian Indonesia akan menjadi lebih kompetitif sehingga dampak dari globalisasi akan memberikan keuntungan yang optimal bagi Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa kegiatan investasi asing terutama yang dilakukan oleh TNC telah memberikan pengaruh pada perekonomian global. Pengaruh yang ditimbulkan oleh investasi asing (TNC) dapat menimbulkan dampak positif sekaligus dapat menimbulkan dampak yang bersifat negatif terutama bagi negara penerima investasi. Oleh karena itu, dalam mengantisipasi pengaruh globalisasi investasi terutama yang dilakukan oleh TNC sangat tergantung pada; bagaimanakah suatu negara mengantisipasi sekaligus mensiasati masuknya pengaruh globalisasi khususnya kehadiran investasi modal asing tersebut.<sup>106</sup>)

---

<sup>105</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, Op. Cit., hal: 249

<sup>106</sup> Dalam konteks ini adalah menarik untuk menyimak kajian Anggito Abimanyu (1994) mengenai TNC di Indonesia, berdasarkan analisis data industri 1986 – 1991 dari Biro Statistik Pusat, ia menarik kesimpulan sebagai berikut : Pertama, peningkatan masuknya TNC ke Indonesia, terutama PMA penuh pada akhir 1980an, bukan merupakan industri unggulan, namun justru yang sudah buangan. Ini sejalan dengan dengan beberapa studi yang menyimpulkan telah terjadi relokasi industri dari 4 "Macan Asia" dan Jepang ke Indonesia (Wie, 1993). Kedua, kinerja TNC cenderung berorientasi pada pasar dalam negeri, meskipun produk yang dihasilkan memiliki keunggulan komparatif untuk ekspor. Secara implisit ini berarti jenis TNC yang masuk ke Indonesia banyak yang tergolong *market seeker*. Ketiga, TNC cenderung memanfaatkan tenaga kerja yang murah, kondisi upah murah adalah daya tarik utama masuknya TNC ke Indonesia.

## **C. ARTI PENTING PERUBAHAN INVESTASI SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH**

### **1. Otonomi Daerah**

Dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang Undang No. 25 tahun 1999 membawa perubahan besar dan sangat penting terutama berkaitan dengan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, yaitu dari pola pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi. Pola pemerintahan yang bersifat sentralistik yang selama ini berlaku akan semakin berkurang, sementara kewenangan dan tanggung jawab daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri semakin besar, oleh karenanya desentralisasi kekuasaan akan memegang peranan yang penting. Daerah-daerah akan semakin otonom dan independen dalam sebagian besar aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan. Daerah, yang selama ini hanya berfungsi sebagai pelaksana kegiatan pembangunan di daerah, akan meningkat fungsinya, tidak saja sebagai pelaksana pembangunan, melainkan juga sebagai perencana dan juga evaluator kegiatan pembangunan itu sendiri. Hal ini berpotensi untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam aktivitas pembangunan, karena program pembangunan di daerah haruslah disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### a. Pengertian dan Hakikat Otonomi Daerah

Menurut kamus Bahasa Indonesia:<sup>107</sup>) yang dimaksud dengan Otonomi Daerah, adalah hak, wewenang dan kewajibannya sendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum lebih jauh membahas tentang pengertian otonomi daerah, kiranya perlu untuk memahami hakekat atau makna filosofis dari prinsip keotonomian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas berkaitan dengan makna dan pengertian otonomi daerah. Pada tingkat terendah, otonomi mengacu pada individu sebagai perwujudan dari free will yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari Sang Pencipta. Free Will inilah yang memungkinkan individu-individu menjadi otonom (*otonomy of individual*) sehingga mereka bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada dalam dirinya secara optimal. Individu-individu yang otonom inilah yang selanjutnya membentuk komunitas yang otonom sehingga menuju kepada bangsa yang mandiri serta unggul dengan kemampuannya untuk mengaktualisasikan potensi keunikannya secara optimal. Sehingga, otonomi daerah adalah suatu keadaan

---

<sup>107</sup> Lihat Purwodarminto



yang memungkinkan daerah dapat dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.<sup>108)</sup>

Untuk mewujudkan otonomi daerah, sehingga daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya secara optimal, harus disertai dengan suatu proposisi bahwa pada dasarnya segala permasalahan yang berkaitan dengan identifikasi, perumusan dan pemecahannya di daerah seharusnya dan sepatutnya diserahkan kepada daerah, kecuali untuk urusan-urusan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri.

Jika mengacu pada makna filosofi dari otonomi daerah, sebagaimana dijelaskan tersebut. Di dalam pengertian otonomi daerah terkandung pula makna desentralisasi berupa penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Pratikno<sup>109)</sup> mengungkapkan; makna otonomi daerah terletak pada kewenangan untuk menentukan kebijaksanaan sendiri di tingkat daerah disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi masyarakat daerah.

Dalam banyak hal (Drucer: 1999), desentralisasi dan otonomi adalah dua kata yang saling bisa dipertukarkan. Otonomi berasal dari kata Yunani *autos* dan *nomos*. Kata pertama berarti “sendiri”, dan kata kedua berarti “perintah”. Otonomi bermakna “memerintah sendiri”. Dalam wacana

---

<sup>108</sup> Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, Editor Nurcahyo Mahanani, Erlangga, Jakarta, 2002 Hal: 176 - 177)

<sup>109</sup> Laporan Penelitian, *Perumusan Pola Hubungan Pusat-Daerah Dalam Rangka Realisasi Otonomi Daerah*, hal 15

administrasi publik daerah otonom sering disebut *local self government*. Daerah otonom praktis berbeda dengan “daerah” saja yang merupakan penerapan dari kebijakan yang dalam wacana administrasi publik disebut sebagai *local state government*.<sup>110)</sup>

Secara sederhana (Mawhood, 1987) mendefinisikan otonomi daerah sebagai *a freedom whict is assumed by local government in both making and implementing its own decisions*. Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang dan tanggung jawab daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (UU No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan di Daerah).

Berbeda dengan definisi otonomi daerah, definisi desentralisasi terlihat lebih bervariasi. Mawhood (1987 : 4) misalnya, mendefinisikan *desentralisasi* sebagai *the devolution of power from central to lacal governmmnt*. sementra Rondinelli dan Cheema (1983 : 18) mendefinisikan desentralisasi sebagai *the transfer of planning, decision making, or administrative authority from central government to ist field organisation, local administrative units, semi autonomous and parastatal organisation, local government, or non government organisation*. Undang Undang No. 5 Tahun 1974 mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari

---

<sup>110</sup> Dikutip dari *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Riant Nugroho, hal 46

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangganya.<sup>111)</sup>

Otonomi daerah sendiri dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>112)</sup> Di dalam Undang Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah <sup>113)</sup>, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terlepas dari adanya perbedaan penafsiran dalam mendefinisikan otonomi daerah dan desentralisasi, pada prinsipnya, antara dua konsep tersebut terdapat suatu interkoneksi linier. Desentralisasi dan otonomi daerah bagaikan dua sisi mata uang yang saling memberikan makna satu dengan lainnya. Lebih spesifik, mungkin tidak berlebihan bila dikatakan ada tidaknya otonomi daerah sangat ditentukan oleh seberapa jauh wewenang

---

<sup>111</sup> Syarif Hidayat, *Otonomi Daerah dalam Prespektif Prilaku Elit Lokal, dalam Indonesia Menapak Abud 21 Kajian Ekonomi Politik*, IPSK – LIPI, 2000, hal 73

<sup>112</sup> Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta, Sinar Harapan, 1999: 27

<sup>113</sup> Lihat Ketentuan Umum, huruf e dan huruf h.

telah di desentralisasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Itulah sebabnya, dalam studi pemerintahan daerah, para analis sering menggunakan istilah desentralisasi dan otonomi daerah secara bersamaan interchange.<sup>114)</sup>

Di dalam Undang Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang Undang No. 25 Tahun 1999, secara jelas dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti otonomi menjadi hal yang sangat penting bagi daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kota dan daerah kabupaten didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi mencakup pula kewenangan yang penuh dalam penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan dan evaluasi. Kondisi ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat agar menjadi semakin baik, pengembangan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka Negara kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam penjelasan umum Undang Undang No 22 Tahun 1999 di tegaskan bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan

---

<sup>114</sup> Syarif Hidayat, *Op. Cit.*, hal 74

pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak, maka dalam undang-undang ini pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada azas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan, yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa pertanggung-jawaban sebagai konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayananan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta

pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Inti pelaksanaan otonomi daerah menurut Ryaas Rasyid <sup>115</sup>) Terdapat perbedaan mendasar mengenai otonomi daerah yang diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1974 dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang Undang No. 22 Tahun 1999. Di dalam UU No. 5 Tahun 1974, otonomi daerah lebih merupakan pemberian kepada daerah oleh pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan pada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, sehingga di sini otonomi daerah merupakan kewajiban. Sedangkan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 adalah merupakan kewenangan dan hak bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.<sup>116</sup>) adalah terdapatnya keleluasaan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Dengan otonomi daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya sesuai dengan kepentingan dan potensi daerah.

---

<sup>115</sup> Ryaas Rasyid, *Prospek Otonomi Laua, dalam Otonomi atau Federasi*, Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaharuan dan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000

<sup>116</sup> E. Kosworo, *Perbandingan prinsip-prinsip UU No. 5 Tahun 1974 dengan UU No. 22 Tahun 1999*, dalam analisis CSIS Tahun XXI/2000, No. 1 hal 44 - 46

Perbedaan itu dapat kita pahami karena UU No. 5 Tahun 1974 berlaku pada saat konfigurasi hukum dan kekuasaan otoriter, dan tekanan pola hubungan kekuasaan pusat dan daerah bersifat sentralistik. Sedangkan UU No. 22 Tahun 1999 berlaku pada masa demokrasi dan pola hubungan kekuasaan pusat dan daerah menuju otonomi luas.<sup>117)</sup>

#### **b. Tujuan Otonomi Daerah**

Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah, tidak lain adalah untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cuna mencapai maksud tersebut diatas, Rudini <sup>118)</sup> mengemukakan : Tujuan pemberian otonomi sendiri adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk tercapainya tujuan tersebut (pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan), maka titik berat otonomi

---

<sup>117</sup> Mahfud M.D, *Op. Cit.* Hal 197

<sup>118</sup> Rudini, *Otonomi Daerah Sebagai Otonomi Nyata Dalam Prespektif Ekonomi dan Politik*, dalam: *buku Otonomi Daerah : Peluang dan Tantangan*, Suara Pembaharuan, Pustaka Sinar Harapan, jakarta, 2001, hal 45.

diletakkan di Dati II dengan pertimbangan bahwa Dati II lah yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut.

Sementara itu, Mariun<sup>119</sup>) menyatakan: Pada dasarnya diadakannya otonomi atau desentralisasi (wilayah) mempunyai alasan praktis yaitu: mempermudah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan jaiannya pemerintahan dalam suatu negara.

### c. Kebijakan Investasi Setelah Berlaku Otonomi Daerah

Di era otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah memegang peranan dalam pembangunan di daerah dan memenuhi kebutuhan daerah, maka sudah selayaknya pemerintah pusat hanya membuat aturan-aturan pokok, sedangkan kebijakan dan kewenangan (termasuk kebijakan dan kewenangan-kewenangan dalam bidang investasi) diserahkan/didelegasikan kepada daerah.

Kebijakan pemerintah dalam bidang investasi di era otonomi daerah di implementasikan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Meninves/Kepala Badan Koordinasi Penanaman

---

<sup>119</sup> Mariun, 1979 : 45; Toha 1985 : 27 – 31 *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi* hal : 53



Modal No. 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian

Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, serta Kepres No.38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

## **2. Arti Penting Perubahan Kebijakan Investasi Setelah Otonomi Daerah**

### **a. Sumber Modal Pembangunan Daerah**

Persoalan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah berkaitan dengan aspek pendanaan. Selama ini, daerah sangat tergantung pada dana bantuan dan sumbangan Pemerintah Pusat. Dengan berlakukannya otonomi daerah, yang berarti semakin besar keleluasaan daerah untuk mengurus daerahnya, menuntut pula tanggung jawab kemandirian dalam pendanaan atau pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu masalah pendanaan atau pembiayaan pembangunan di daerah seharusnya akan lebih banyak tergantung pada kemampuan daerah untuk mengoptimalkan pendapatannya, sehingga dari hasil pendapatan daerah diharapkan dapat mendukung berbagai program pembangunan sesuai dengan rencana program yang telah digariskan. Pembiayaan pembangunan di daerah tidak bisa lagi tergantung pada bantuan dan subsidi dari Pemerintah Pusat. Selama ini, pembiayaan pembangunan di daerah bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat sebagai pelaksanaan azas

dekonsentrasi dan bersumber dari Pemerintah Daerah, baik Tingkat I maupun Tingkat II sebagai pelaksanaan azas desentralisasi.

Sesuai dengan Undang Undang No. 5 Tahun 1999, dana bantuan dari Pemerintah Pusat tidak semuanya dihapuskan. Daerah masih akan menerima Dana Perimbangan yang terdiri dari bagian daerah yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta penerimaan yang diperoleh dari sumber daya alam; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK), disamping juga dana yang berasal dari pinjaman daerah

Berkaitan dengan keuangan atau anggaran daerah sebagaimana dikemukakan di atas, dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1999 ditentukan: Dana Perimbangan terdiri dari (a). Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) dan penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA); (b). Dana Alokasi Umum (DAU); dan (c). Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan formula yang ada, maka daerah yang kaya sumber daya alam akan banyak memperoleh tambahan penerimaan. Daerah yang secara akan lebih bergairah kegiatan ekonominya adalah daerah yang kaya sumber daya alamnya. Sebab, sesuai dengan undang-undang tersebut, daerah yang kaya sumber daya alam akan mendapat tambahan dana yang signifikan dari dana perimbangannya. Sebaliknya, daerah daerah yang miskin sumber daya

alamnya akan mengalami penurunan, sehingga perlu mencari alternatif untuk mengkonpensasi penurunan tersebut.<sup>120)</sup>

Upaya meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat diharapkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan, bukanlah merupakan tugas yang ringan, sebaliknya merupakan tugas yang sangat berat. Tetapi dalam era otonomi, masing-masing daerah mau tidak mau harus dapat memacu peningkatan pendapatan daerahnya demi terlaksananya program-program pembangunan daerah. Untuk mendukung semua itu, dibutuhkan adanya investasi yang lebih banya dari pihak swasta ke daerah. Hal itu akan dapat terwujud bilamana daerah bersifat proaktif menarik investor, baik dengan memberikan insentif tertentu, ataupun melalui penyediaan infrastruktur yang membuat pemilik modal mau menginvestasikan modalnya. Dengan banyaknya kegiatan investasi di daerah akan dapat memacu tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga akan berdampak tidak hanya pada penerimaan pajak retrebusi dan sebagainya, melainkan juga semakin terbuka lapangan pekerjaan. Meluasnya lapangan pekerjaan, bertarti akan menambah pendapatan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat pada gilirannya akan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mesyarakat di daerah dan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan daerah.

---

<sup>120</sup> Edi Suandi hamid, , *Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isyu-Isyu Ekonomi Politik Indonesia, Op. Cit*, hal 110.

Tumbuhnya minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah khususnya investasi yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan daerah. Terlebih lagi, jika para investor yang pada umumnya merupakan pengusaha menengah dan besar tersebut, mau mengadakan hubungan kemitraan dengan pengusaha kecil yang tersebar di berbagai daerah, tentu akan lebih mempercepat tumbuhnya dan berkembangnya sektor riil, sehingga dalam era otonomi ini, pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak lagi mengandalkan pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat.

**b. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Potensi Ekonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dengan peluang ini Pemerintah Daerah harus makin proaktif untuk mengoptimalkan potensi daerah, memanfaatkan sumber daya yang ada, menjalin kerjasama dengan masyarakat di wilayahnya, di luar wilayahnya, bahkan kalau mungkin ke luar negeri.

Otonomi Daerah merupakan suatu kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki, tidak terbatas hanya pada pengembangan potensi sumber daya manusia (*human resources*) tetapi tidak kalah penting adalah mengembangkan potensi sumber daya alam. Dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam, harus dilakukan dengan suatu perencanaan dan perhitungan yang secermat mungkin. Sebab, pemanfaatan

sumber daya alam yang terlalu berlebihan dapat mengarah kepada suatu tindakan eksploitatif yang pada gilirannya akan merugikan kepentingan daerah sendiri. Di samping pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, potensi ekonomi daerah merupakan suatu kekuatan yang perlu dikembangkan, sebagai suatu alternatif tawaran bagi suatu daerah untuk dapat bersaing dan berkompetisi dengan daerah lain dalam merebut pangsa pasar baik di dalam skala nasional, regional dan internasional, terlebih lagi di era globalisasi sekarang ini.

#### **c. Peningkatan Sumber daya Manusia**

Faktor manusia (sumber daya manusia) merupakan salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai maka kegiatan apapun yang dilakukan, tidak akan mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu isu yang kini banyak muncul dan semakin santer pada era otonomi daerah, adalah berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya manusia lokal. Isu yang sering menimbulkan friksi tersebut terutama untuk rekrutmen tenaga kerja untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah. Di satu sisi, masyarakat menghendaki bahwa perusahaan-perusahaan yang ada lebih memberikan prioritas pada tenaga kerja lokal. Di sisi lain perusahaan-perusahaan yang ada menilai bahwa sumber daya manusia lokal banyak

belum siap untuk mengisi lapangan pekerjaan yang ada, sementara tenaga kerja lokal banyak yang menganggur.<sup>121)</sup>

Masyarakat lokal di daerah seyogyanya diberikan kesempatan lebih luas untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan produksi yang dilaksanakan perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah. Jika penduduk lokal di daerah belum siap untuk mengisi pos-pos pekerjaan yang ada, maka Pemerintah Daerah dan perusahaan yang ada, seharusnya ikut membantu mempersiapkan tenaga kerja yang ada supaya siap untuk dipekerjakan. Memang harus diakui, adalah sulit bagi penduduk lokal jikalau suatu perusahaan mensyaratkan suatu pekerjaan, dimana tenaga kerjanya harus siap pakai. Yang kemungkinan banyak tersedia di daerah adalah tenaga kerja yang kurang terlatih dan perlu diupayakan peningkatan keterampilan secara terus menerus. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan Perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana untuk melatih tenaga kerja lokal tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Kalaupun ada konsep pemikiran tentang pengembangan sumber daya masyarakat lokal di daerah, bukanlah berarti menutup kesempatan bekerja bagi pendatang dari daerah lain.

#### **d. Peluang dan Kesempatan Berusaha di Daerah**

Diharapkan dengan masuknya investasi yang menggunakan fasilitas

---

<sup>121</sup> Edy Suandi Hamid, *Op. Cit*, hal 101

PMA dan PMDN, pemerintah daerah dapat mengarahkan atau mensyaratkan agar investor mengadakan kemitraan dengan usaha kecil yang berusaha di daerah tersebut.

Merupakan suatu kenyataan bahwa di daerah-daerah banyak terdapat usaha-usaha kecil yang berpotensi untuk dikembangkan. Tetapi, karena keterbatasan permodalan, skill, manajemen dan jaringan pemasaran, sehingga usaha-usaha kecil yang sangat potensial tersebut tidak dapat berkembang. Melalui kegiatan investasi terutama di daerah, diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pemberdayaan usaha kecil yaitu dengan melakukan investasi dengan pola kemitraan antara pengusaha menengah/besar dengan pengusaha kecil. Sehingga, melalui pola kemitraan usaha tersebut pada dilirannya akan menciptakan peluang berusaha di daerah.

Dengan demikian, terciptanya peluang berusaha di daerah juga akan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat (tenaga kerja) yang berada di daerah yang bersangkutan. Di samping itu dengan masuknya investasi ke daerah akan tercipta kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin berkecimpung dalam kegiatan bisnis, sehingga dengan masuknya para investor akan makin banyak pelaku ekonomi yang handal, baik untuk perusahaan yang berskala besar, menengah dan kecil, termasuk sektor informal.

### **3. Manfaat Perubahan Kebijakan Investasi Setelah Otonomi Daerah**

#### **a. Manfaat Bagi Investor**

Manfaat yang diperoleh investor dengan adanya perubahan (deregulasi) kebijakan investasi dengan berlakunya otonomi daerah dirasakan cukup besar. Perubahan kebijakan investasi dimaksud,

dirasakan, terutama setelah dikeluarkannya Kepres No. 117 Tahun 1999 Tentang Perubahan kedua atas Kepres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Meninves/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah.

Selanjutnya Gubernur Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan itu lebih lanjut kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD). Pelimpahan kewenangan itu dapat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang telah terbentuk badan yang mempunyai kewenangan dan bertugas untuk menangani masalah penanaman modal di daerah, dalam hal ini adalah Badan Koordinas Penanaman Modal Daerah (BKPMMD).

Sebelum diterapkannya deregulasi dan debirokratisasi dalam penanaman modal, terutama yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan persetujuan investasi dan perizinan kepada Gubernur Kepala Daerah



sebagaimana ditentukan dalam Kepres dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Meninves/Kepala BKPM tersebut diatas, untuk melakukan/melaksanakan suatu kegiatan investasi (penanaman modal), permononannya harus ditujukan kepada Meninves/Kepala BKPM. Selanjutnya jika permohonan investasi tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan, maka barulah suatu kegiatan investasi disetujui, dan persetujuan serta Fasilitas serta perizinannya pun harus dikeluarkan oleh Meninves /Kepala BKPM. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sumantoro : Pada masa yang lalu (Orde Baru), seorang investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dengan menggunakan fasilitas PMA dan/atau PMDN dia harus mengurus perizinan investasinya langsung ke BKPM, sedangkan BKPM hanya bertugas menampung dan memberikan penjelasan kepada calon investor tentang kemungkinan investasi di daerah, dan apabila calon investor tersebut mengajukan permohonan investasi lewat BKPM, maka kemudian BKPM meneruskan permohonan tersebut kepada BKPM Pusat setelah persyaratan teknis terpenuhi.<sup>122</sup>)

Tidak jarang ditemukan, dalam proses permohonan, persetujuan, pemberian fasilitas dan perizinan sebelum adanya pendelegasian kewenangan dari Meninves/Kepala BKPM kepada Gubernur Kepala Daerah, dirasakan cukup menyulitkan investor. Proses persetujuan dan perizinan

---

<sup>122</sup> Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal, Op. Cit*, Hal 5

investasi dirasakan terlalu birokratis dan berbelit-belit, sehingga proses permohonan, persetujuan dan perizinan investasi akan berpengaruh kepada kurangnya gairah dan minat para investor untuk menanamkan modal (investasinya) di suatu daerah.

Oleh karena itu, dengan adanya penyederhanaan (debirokratisasi) dalam proses permohonan, persetujuan dan perizinan penanaman modal, dirasakan mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi para calon investor, sehingga dengan penyederhanaan proses tersebut diharapkan akan menumbuhkan minat bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah.

#### **b. Bagi Penerima Investasi**

Salah satu pengaruh penting dari suatu kegiatan investasi diharapkan dapat menumbuhkan dan mengembangkan sektor riil serta membuka kesempatan berusaha yang selebar-lebarnya, baik dilakukan oleh pemerintah melalui usaha BUMN, pemerintah daerah melalui BUMD, kalangan swasta maupun koperasi. Dengan demikian, melalui perubahan kebijakan investasi sebagaimana telah dijelaskan di atas, akan mendatangkan manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagi daerah (penerima investasi) dalam rangka mengundang investasi dan membuka kesempatan berusaha di daerah sesuai dengan potensi dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Kehadiran dan keberadaan investasi mempunyai arti dan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan daerah terutama terkait dengan pembangunan dalam bidang ekonomi. Manfaat investasi dirasakan tidak hanya untuk kepentingan menumbuh-kembangkan dunia usaha di daerah. Melalui kegiatan investasi, akan sangat berguna bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah, terutama bagi daerah yang modal/pembiayaan pembangunan daerahnya sangat minim. Selain untuk mencukupi kebutuhan dana/pembiayaan pembangunan di daerah, tumbuhnya kegiatan investasi dan dunia usaha, sekaligus akan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya pendapatan daerah sudah tentu akan mendatangkan pengaruh yang positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kehadiran investasi di daerah yang berpengaruh kepada tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha, secara otomatis akan memberikan/membuka lapangan kerja baru bagi para pencari kerja, terlebih lagi dalam situasi akhir-akhir ini, dimana tingkat pengangguran sudah berada pada taraf yang mengkhawatirkan terutama di daerah. Sehingga dengan kehadiran investasi di daerah memberikan manfaat yang sangat berarti bagi daerah dalam menanggulangi masalah pengangguran. Cristianto Wibisono 122)

---

<sup>122</sup> Cristianto Wibisono, *Otonomi Daerah : Peluang dan Tantangan*, Op. Cit, hal 65

mengemukakan: Dengan adanya investor, maka ekonomi daerah akan bergerak, ada penyerapan tenaga kerja, ada nilai tambah, ada profit, ada pajak dan ada multiplier effect untuk daerah tersebut.

### **c. Bagi Masyarakat Luas**

Kemanfaatan dari suatu investasi, selain dirasakan oleh investor dan penerima investasi (dalam hal ini daerah tempat investasi), manfaat dari suatu kegiatan investasi dirasakan pula oleh masyarakat secara umum. Dengan banyaknya kegiatan investasi di daerah akan dapat menciptakan peluang berusaha selebar-lebarnya kepada masyarakat luas.

Berkembangnya berbagai bidang usaha terutama usaha menengah dan usaha kecil tentu akan memberikan pengaruh positif pada tingkat perekonomian dan tingkat produktifitas masyarakat pada umumnya. Sehingga dengan meningkatnya perekonomian dan produktivitas masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah di mana investasi ditanamkan. Dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, maka melalui kegiatan investasi sekaligus akan sangat membantu pemerintah khususnya di dalam rangka pengentasan kemiskinan di daerah.

### **BAB. III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah dilakukan penelitian melalui penelusuran berbagai peraturan-perundang-undangan yang mengatur tentang investasi (penanaman modal), maupun penelitian tentang penerapan perubahan kebijakan investasi (penanaman modal), khususnya berkaitan dengan prosedur dan tata cara investasi (penanaman modal) serta pengaruh perubahan kebijakan investasi terhadap tingkat perkembangan kegiatan investasi (penanaman modal) di Propinsi Nusa Tenggara Barat, maka dapat disajikan data hasil penelitian dan pembahasan, sebagai berikut:

### **A. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Perubahan Kebijakan Investasi (Penanaman Modal) di Indonesia**

Seiring dengan perkembangan dan kondisi perekonomian nasional, terutama perkembangan kegiatan penanaman modal di Indonesia, pemerintah telah mengambil berbagai langkah deregulasi, yakni secara terus-menerus melakukan perubahan dan penyempurnaan kebijakan terkait dengan kegiatan investasi (penanaman modal). Perubahan dan penyempurnaan kebijakan investasi (penanaman modal) tersebut, dimaksudkan untuk memenuhi/mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dan perkembangan kegiatan penanaman modal di Indonesia, sehingga dapat lebih memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional, terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini dan masa yang akan datang.

### **1.1. Perubahan Kebijakan Investasi (Penanaman Modal) Sebelum Berlaku Otonomi Daerah**

Beberapa perubahan penting dari kebijakan penanaman modal – terutama kebijakan penanaman modal asing -, yang terjadi sejak tahun 1970 an, diantaranya adalah terkait dengan ketentuan-ketentuan tentang kepemilikan saham dan pengalihan saham dari pihak asing kepada pihak Indonesia, serta ketentuan tentang batas minimum jumlah investasi.

#### **a. Perubahan Ketentuan Kepemilikan Saham dan Peralihan Saham kepada Pihak Indonesia.**

Berselang satu minggu setelah peristiwa Januari, berdasarkan Keputusan Sidang Kabinet tanggal 22 Januari tahun 1974 Pemerintah telah mengumumkan kebijaksanaan baru di bidang Penanaman Modal Asing (PMA) melalui Surat Edaran Badan Koordinasi Penanaman Modal No. b-1995/A/BKPM/X/1974 Tanggal 11 Oktober 1974, antara lain berisi:

1. Penanaman modal asing di Indonesia harus berbentuk *Joint Venture* dengan modal nasional;
2. Penyertaan modal baik dalam investasi yang lama maupun yang baru harus menjadi 51% di dalam jangka waktu 10 tahun;
3. Partner asing harus memenuhi ketentuan pengalihan tenaga kerja kepada karyawan-karyawan Indonesia;
4. Partisipasi pengusaha pribumi Indonesia baik dalam penanaman modal asing maupun modal dalam negeri harus bertambah besar.

Kebijakan yang mengharuskan komposisi kepemilikan saham dengan perbandingan 49% : 51% itu tidak dilaksanakan secara baik, kerana banyak terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh investor asing untuk mempertahankan kekuasaannya yakni dengan cara membuat *technical assistant agreement*.

Pada tanggal 6 Mei 1986 pemerintah mengeluarkan PP No. 24 tahun 1986 tentang jangka waktu ijin perusahaan PMA, yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. 12/SK/1986 oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang syarat-syarat pemilikan saham nasional. Keputusan ini antara lain mengatur tentang:

1. Perusahaan PMA harus berbentuk usaha patungan dengan penyertaan modal nasional sekurang-kurangnya 20% dari nilai saham perusahaan, dan menjadi 51% dalam waktu 10 tahun sejak dimulainya produksi komersial perusahaan;
2. Mengatur beberapa pengecualian bagi ketentuan PMA antara lain ketentuan nilai investasi sekurang-kurangnya 10.000.000,- US dollar di tempat-tempat tertentu investasi ditanamkan, sekurang-kurangnya 85% hasil produksi diperuntukkan bagi ekspor. Kepemilikan saham nasional sebesar 5% dan selama lima tahun ditingkatkan menjadi 20%, dan selama 10 tahun harus ditingkatkan menjadi 51%.

3. Perusahaan PMA dapat menginvestasikan kembali laba perusahaan atau dana pada perusahaan PMA nya atau mendirikan perusahaan baru atau membeli saham perusahaan lain di Indonesia

Tanggal 5 Mei 1986 dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 17 tahun 1986 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam perusahaan PMA untuk diberikan perlakuan yang sama seperti perusahaan PMDN. Dalam Keppres tersebut ditentukan bahwa perusahaan gabungan antara modal asing dan modal nasional yang tunduk pada UU No. 1 tahun 1967 dan berstatus perusahaan PMA adalah, apabila:

- a. Minimal 75% sahamnya dimiliki oleh negara atau swasta nasional; atau
- b. Minimum 51% sahamnya dijual melalui pasar modal; atau
- c. 51% sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional dan yang dijual melalui pasar modal, dengan ketentuan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual melalui pasar modal tersebut minimum 20% diberi perlakuan yang sama dengan perusahaan PMDN sebagai mana diatur dalam UU No. 6 Tahun 1968

Tanggal 22 Desember 1987 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1987 yang merupakan perubahan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1986 tentang syarat pemilikan saham nasional dalam perusahaan PMA untuk diberi



perlakuan yang sama seperti perusahaan PMDN. Dalam Keppres itu disebutkan bahwa bagi perusahaan PMA yang:

- a. Minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional; atau
- b. Minimal 45% sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional dengan syarat 20% dari jumlah seluruh saham dijual melalui pasar modal sebagai saham atas nama.

Diberikannya perlakuan yang sama pada PMA sebagaimana perusahaan yang dibentuk dalam rangka UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN dapat dilihat dari Kepres No 17 tahun 1986 yang telah diubah dengan Kepres No. 50 tahun 1987. Jika diperhatikan kedua kebijakan pemerintah tersebut, maka tampak bahwa ketentuan Keppres No. 50 tahun 1987 memperlonggar persyaratan kepemilikan saham nasional sebagaimana diatur dalam Keppres sebelumnya. Kebijakan ini diambil karena dirasakan kemudian bahwa keberadaan dan kemampuan modal asing masih sangat diperlukan terutama dalam bidang perdagangan (ekspor).

Tanggal 23 Desember 1987 dikeluarkanlah kebijakan yang berupa Keputusan Ketua BKPM No. 5/SK/1987 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam perusahaan PMA yang mencabut keputusan Ketua BKPM No. 12/SK/1986 yang pada prinsipnya memperlonggar syarat-syarat kepemilikan saham nasional

sebagaimana diatur dalam keputusan sebelumnya. Surat Keputusan tersebut berisi, antara lain:

1. Peningkatan saham nasional menjadi 51% dalam jangka waktu 15 tahun (yang sebelumnya dalam waktu 10 tahun);
2. Perusahaan PMA yang berlokasi di Kawasan Berikat dan mengekspor 100% hasil produksinya dapat diberikan dengan penyertaan modal nasional 50% atau lebih tanpa keharusan peningkatan saham nasional.
3. Perusahaan PMA yang sebagian besar hasil produksinya diekspor yaitu 65% (pada ketentuan sebelumnya sebesar 85 %) dan nilai investasinya 10.000.000,- US dollar serta berlokasi di daerah tertentu, maka ditentukan; peningkatan saham nasional sebesar 20% dalam jangka waktu 10 tahun (pada ketentuan sebelumnya 5 tahun) selanjutnya menjadi sebesar 51% dalam jangka waktu 20 tahun (pada ketentuan sebelumnya 10 tahun).

**b. Perubahan Ketentuan Tentang Batas Minimum Jumlah Investasi dalam Rangka Penanaman Modal Asing**

Pada tanggal 5 Mei 1989 pemerintah, dalam hal ini Ketua BKPM mengeluarkan Keputusan No. 09/SK/1989 tentang persyaratan investasi minimal PMA, di mana ditetapkan bahwa jumlah investasi dalam PMA minimal sebesar 250.000,- US dollar. Kemudian menyusul dikeluarkan SK Ketua 21/SK/1989 yang antara lain menetapkan bahwa :

1. Jumlah investasi dalam rangka PMA tidak boleh lebih kecil dari 1.000.000, US dollar;
2. Dengan persyaratan tertentu, jumlah investasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya 250.000,- US dollar.
3. Peserta Indonesia pada perusahaan PMA yang akan didirikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu - sebagaimana ditentukan dalam ayat (1)-, ditentukan bagi golongan ekonomi lemah dan koperasi.

Selanjutnya, pada tanggal 16 April 1992, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992 tentang persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan PMA, yang antara lain mengatur mengenai PMA di kawasan Indonesia Bagian Timur (IBT). Melalui ketentuan Peraturan Pemerintah ini, investor asing berhak menguasai 100% saham perusahaan/proyek setiap perusahaan PMA dengan modal disetor minimal 50.000.000,- US dollar, tanpa harus menyertakan mitra nasional. Peluang Indonesia memiliki saham baru diberikan pada tahun ke lima setelah produksi komersial dan itu pun hanya disyaratkan sebesar 5% dari saham proyek PMA dan selanjutnya ditingkatkan menjadi 20% pada tahun ke 20.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992, pada tanggal 6 Mei 1986 pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1986, yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya

Surat Keputusan No. 12/SK/1986 oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang syarat-syarat pemilikan saham nasional. Keputusan ini antara lain juga mengatur tentang: Beberapa pengecualian bagi ketentuan PMA antara lain ketentuan nilai investasi sekurang-kurangnya 10.000.000,- US dollar di tempat-tempat tertentu investasi ditanamkan, sekurang-kurangnya 85% hasil produksi diperuntukkan bagi ekspor. Kepemilikan saham nasional sebesar 5% dan selama lima tahun ditingkatkan menjadi 20%, dan selama 10 tahun harus ditingkatkan menjadi 51%.

Pada tahun yang sama yakni pada tanggal 28 Januari pemerintah mengeluarkan lagi kebijakan berupa Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1993 tentang perubahan PP Nomor 17 tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam perusahaan PMA. Peraturan Pemerintah ini hanya berupa penambahan dari peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu dengan menambah ketentuan adanya kerja sama dengan pemerintah Singapura berkaitan dengan kerjasama ekonomi dalam rangka pengembangan propinsi Riau.

Selanjutnya, pada tanggal 29 Juli 1994 pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang dianggap sangat penting dan mendukung eksistensi PMA yakni Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA. Landasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini adalah untuk mengembangkan iklim usaha yang

semakin mantap dan lebih menjamin kelangsungan Penanaman Modal Asing di Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham yang didirikan dalam rangka PMA, kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya SK. MENINVES/Ketua BKPM No. 15 Tahun 1994, di mana pemerintah memberikan kemudahan dan kebebasan yang lebih besar terhadap kegiatan penanaman modal. meliputi :

1. Perusahaan PMA dapat berbentuk usaha patungan atau perusahaan PMA langsung yang berarti seluruh (100%) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing;
2. Penjualan saham perusahaan PMA kepada pihak Indonesia berdasarkan kesepakatan;
3. Bagi sembilan bidang usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu: pelabuhan; produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum; telekomunikasi; pelayaran; penerbangan; air minum; kereta api umum; pembangkit tenaga atom dan masmedia; perusahaan PMA yang dibentuk harus merupakan perusahaan patungan;
4. Pembebasan batas minimal jumlah investasi yang ditanamkan;
5. Persyaratan divestasi ditiadakan bagi perusahaan PMA, kecuali dalam jumlah atau persentase yang kecil;

6. Perusahaan PMA yang patungan atau langsung yang telah mendapat izin sebagai Badan Hukum di Indonesia diperlakukan sebagai Badan Hukum Indonesia, sehingga diperkenankan mendirikan perusahaan baru sebagai perusahaan PMA dengan partner asing baru, atau menjadi perusahaan PMDN apabila 100% saham dimiliki oleh PMA tersebut atau ada peserta WNI atau Badan Hukum Indonesia;
7. Pembelian saham perusahaan nasional yang telah atau belum berproduksi komersial dapat dilakukan oleh perusahaan PMA yang telah berproduksi komersial, badan hukum asing dan/atau warga negara asing melalui pasar modal dalam negeri atau pemilikan langsung dan/atau pasar modal dalam negeri.
8. Izin usaha perusahaan PMA ditetapkan selama 30 (tiga puluh) tahun dimulai sejak perusahaan berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam izin usaha dan dapat diperbaharui sepanjang perusahaan masih tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.

Dengan demikian, sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994, tidak lagi terdapat pembatasan-pembatasan, baik menyangkut batas maksimum komposisi jumlah saham yang boleh dimiliki oleh pihak asing maupun pembatasan terhadap jumlah minimum maupun jumlah maksimum investasi. Berarti, dalam rangka

Penanaman Modal Asing (PMA), pihak asing dapat menanamkan modalnya berapapun jumlahnya.

## **1.2. Perubahan Kebijakan Investasi Setelah Berlaku Otonomi Daerah.**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan dalam bidang investasi (penanaman modal). Kebijakan pemerintah yang dirasakan sangat penting adalah berkaitan dengan pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan, fasilitas dan perizinan pelaksanaan kegiatan investasi (penanaman modal) baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, yang mana sebelumnya kewenangan pemberian persetujuan, pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi hanya dapat dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM.

Dengan terjadinya pelimpahan kewenangan tersebut, maka terjadi perubahan pula pada prosedur dan tata cara perizinan investasi terutama di Daerah.

### **a. Perubahan Prosedur dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 117 Tahun 1999**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Keppres ini adalah dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan perizinan investasi, untuk itu pemerintah memandang perlu menyempurnakan Keppres

tentang Tata Cara Penanaman Modal yang dikeluarkan sebelumnya yaitu Keppres No. 97 Tahun 1993 yang telah diubah sebelumnya dengan Keppres No. 115 tahun 1998. Beberapa hal pokok yang diatur dalam Keppres 117 adalah merubah beberapa ketentuan dalam Keppres No. 97 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 115 tahun 1998, yaitu mengenai:

- Kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal untuk permohonan investasi dalam rangka PMDN dapat dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
- Untuk melaksanakan lebih lanjut pelimpahan kewenangan tersebut, Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua BKPM;
- Tata cara investasi dalam rangka PMDN diatur lebih lanjut oleh Meninves/Kepala BKPM;
- Kewenangan pemberian persetujuan investasi dalam rangka PMA dilimpahkan Meninves/Kepala BKPM kepada Menteri Luar Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
- Sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani investasi di Kabupaten dan Daerah Kota, khusus kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi diberikan pula pelimpahan wewenang pemberian izin pelaksanaan penanaman modal;



- Untuk melaksanakan pelimpahan wewenang dalam rangka pemberian persetujuan investasi yang menggunakan fasilitas PMA dari Meninves, Menteri Luar Negeri menugaskan kepada Kepala Perwakilan RI dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua BKPM;
- Calon investor yang akan mengadakan usaha dalam rangka PMA diharapkan mempelajari terlebih dahulu Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi PMA dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM, BKPM atau Kantor Perwakilan RI;
- Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka dan ketentuan-ketentuan lainnya, calon investor mengajukan permohonan kepada Meninves Kepala/BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini dilaksanakan oleh Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal kepada calon investor yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip.
- Meninves/Kepala BKPM, atau Ketua BKPM, atau Kepala Perwakilan RI menyampaikan rekaman Surat Persetujuan PMA kepada instansi pemerintah terkait;
- Apabila investor telah memperoleh Surat Persetujuan (SP) PMA dan telah memenuhi persyaratan, maka:

- a. Meninves/Kepala BKPM, atau ketua BKPMD atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi mengeluarkan:
  - 1) Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT);
  - 2) Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya;
  - 3) Persetujuan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang (RPTKA) yang diperlukan sebagai dasar bagi Ketua BKPMD untuk menerbitkan Izin Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan;
  - 4) Izin Usaha Tetap atas nama menteri yang membidangi usaha tersebut sesuai dengan pelimpahan kewenangan.
- b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengeluarkan Izin Lokasi sesuai Rencana Tata Ruang;
- c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengeluarkan Hak Atas Tanah dan menerbitkan sertifikat tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Darah Kabupaten/Kota atau satuan Kerja Teknis atas nama Bupati/ Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, atau Kepala Dinas Pengawas Pembangunan Kota (P2K) untuk daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- e. Sekwilda Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan dan Kepala Kantor Ketertiban untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan izin Undang Undang Gangguan (UUG/HO).
- Kewajiban untuk memiliki izin UUG/HO tidak berlaku bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib memiliki AMDAL dan atau yang berlokasi di dalam Kawasan Indusri/Kawasan Berikat.
  - Setelah memperoleh Surat persetujuan Penanaman Modal dari Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi c.q. Ketua BKPM, Atau Kepala Perwakilan RI, investor dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan Daftar Induk Barang-barang Modal serta Bahan Baku dan Bahan penolong yang akan di impor kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi c.q. BKPM;
  - Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk Barang-Barang Modal serta Bahan Baku dan Bahan Penolong, Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi cq. Ketua BKPM mengeluarkan Keputusan Fasilitas/Keringanan Bea Masuk dan Pungutan Impor lainnya;

- Terhadap permohonan untuk perubahan atau rencana investasi yang telah memperoleh persetujuan, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, investor menyampaikannya kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi cq. Kepala BKPM, untuk mendapatkan persetujuan dengan mempergunakan tata cara yang telah ditetapkan oleh Meninves/Kepala BKPM;
- Investor yang telah memperoleh SPPMA dari Kepala Perwakilan RI, wajib mengajukan permohonan perizinan pelaksanaan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi di mana dia akan melakukan investasi, dalam hal ini Ketua BKPM.

**b. Perubahan Tentang Fungsi dan Tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1999**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Keppes ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, sehingga dipandang perlu mempermudah pelayanan investasi di daerah dan di luar negeri. Isi pokok dari Keppes ini yaitu merubah beberapa ketentuan dalam Keppres No. 33 tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa

kali diubah dan yang terakhir dengan Keppres No. 113 Tahun 1998, yaitu :

- Meninves/Kepala BKPM baik berdasarkan atas kewenangannya sendiri maupun atas dasar kewenangan yang dilimpahkan oleh menteri-menteri yang membina bidang usaha dan menteri lainnya, dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi dalam rangka PMA dan PMDN kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Pelimpahan wewenang tersebut berlaku, sepanjang belum dibentuknya instansi yang menangani penanaman modal di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dalam rangka pelimpahan wewenang ini, Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua BKPM, dengan menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta memperhatikan kesederhanaan, kemudahan dan kecepatan;
- Di samping dapat melimpahkan wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, Meninves/Kepala BKPM baik berdasarkan kewenangannya sendiri maupun atas dasar kewenangan yang dilimpahkan oleh menteri-menteri yang membina bidang usaha dan menteri lainnya dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan penanaman modal dalam rangka PMA yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip kepada Menteri Luar Negeri, dan Kemudian Menteri Luar

Negeri menugaskan kepada Kepala Perwakilan RI. Pelimpahan wewenang ini juga dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta memperhatikan kesederhanaan, kemudahan dan kecepatan.

**c. Perubahan Tentang Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 122 tahun 1999**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Keppres ini adalah dalam rangka untuk lebih mempercepat peningkatan investasi serta pelayanan perizinan investasi di seluruh daerah. Isi pokok dari Keppers ini yaitu merubah ketentuan yang terdapat dalam Keppers No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) yang sebelumnya telah diubah dengan Keppres No. 116 Tahun 1998 Tahun 1998, sehingga pada saat ini Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) mempunyai tugas:

1. Membantu Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan penanaman modal;
2. Memberikan persetujuan dan perizinan investasi dalam rangka PMDN dan PMA sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan oleh Meninves/Kepala BKPM;

3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan investasi di daerah.  
Kemudian untuk dapat menyelenggarakan tugas tersebut, maka BKPMD menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyusun rencana-rencana investasi di daerah yang dalam garis besarnya berisi: susunan; tujuan; prioritas; strategi dan promosi investasi;
  - b. Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan investasi di daerah;
  - c. Menilai dan mengevaluasi permohonan investasi dalam rangka PMDN dan PMA sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan mengenai investasi yang berlaku;
  - d. Untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Meninves/Kepala BKPM, menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dalam rangka PMDN dalam rangka PMDN dan PMA;
  - e. Untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Teknis yang bersangkutan untuk Meninves/Kepala BKPM, menerbitkan surat pemberian fasilitas dan perizinan pelaksanaan investasi dalam rangka PMDN dan PMA;

- f. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka penyelesaian perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan investasi;
- g. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan investasi di daerah untuk kepentingan penilaian, baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam proyek-proyek;
- h. Menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan penilaian/evaluasi permohonan investasi dalam rangka PMDN dan PMA, penerbitan SPPMDN dan SPPMA, menerbitkan Surat Pemberian Fasilitas dan Perizinan Investasi dalam rangka PMDN dan PMA, serta pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka penyelesaian perizinan investasi PMDN dan PMA.

Keppers No. 122 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Kepres No. 26 tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM), sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 116 Tahun 1998 ini hanya berlaku sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani investasi di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.



**d. Perubahan Tentang Pokok-Pokok Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 123 Tahun 1999**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Keppres ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pemberian perizinan di bidang investasi asing di Indonesia secara murah, mudah, cepat dan transparan, sehingga dipandang perlu memberikan kewenangan kepada Perwakilan Konsuler di luar negeri untuk mengeluarkan izin prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Isi pokok Keppres ini merubah ketentuan Keppes No. 51 Tahun 1976 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri. Perubahan tersebut mengenai tugas Perwakilan Konsuler.

Berdasarkan pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan investasi kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, maka bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dapat mengajukan aplikasi Penanaman Modal Asing kepada Perwakilan RI di luar negeri. Sebelum terjadinya perubahan dimaksud, aplikasi untuk Penanaman Modal Asing di ajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta atau melalui Ketua Badan Koordinasi penanaman Modal Daerah (BKPMMD).

## **2. Penerapan Perubahan Kebijakan Investasi Terkait dengan Prosedur dan Tata Cara Perizinan Investasi (Penanaman Modal)**

Dengan telah dilimpahkannya kewenangan pemberian persetujuan, fasilitas dan perizinan pelaksanaan investasi dari Meninves/Kepala BKPM kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, maka akan memberikan pengaruh kepada perubahan Prosedur dan Tata Cara Perizinan investasi (penanaman modal) terutama untuk investasi yang dilakukan di daerah

### **2.1. Prosedur dan Tata Cara Perizinan Investasi yang Menggunakan Fasilitas PMA dan PMDN**

Berkaitan dengan Prosedur dan Tata Cara Perizinan investasi (penanaman modal) baik yang menggunakan fasilitas PMA maupun PMDN, dapat dipaparkan beberapa hal sebagai berikut:

#### **a. Kewajiban-Kewajiban Investor Di Dalam Permohonan Perizinan Penanaman Modal yang Menggunakan Fasilitas PMDN dan PMA**

- Calon investor yang akan melakukan kegiatan investasi dalam rangka PMDN wajib mengajukan permohonan investasi, kepada:
  - (a) Meninves/Kepala BKPM (sekarang BPM&PBUMN); atau
  - (b) Ketua BKPM setempat, di mana dia akan menanamkan investasinya.
- Calon investor yang akan melakukan kegiatan investasi dengan fasilitas PMA, wajib mengajukan permohonan investasi, kepada:
  - (a). Meninves/Kepala BKPM; atau
  - (b). Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri; atau

(c). Ketua BKPMMD setempat.

- Surat persetujuan PMDN dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi cq Ketua BKPMMD setempat. Sedangkan surat persetujuan untuk PMA dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, atau Menteri Luar Negeri cq Kepala Perwakilan RI setempat atau oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi cq. Ketua BKPMMD setempat.
- Setelah investor memperoleh Surat Persetujuan (SP) baik untuk investor PMDN maupun PMA, mereka wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Pelaksanaan Penanaman Modal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan investasi. permohonan tersebut diajukan kepada:
  - a. Meninves/Kepala BKPM, bagi investor yang memperoleh persetujuan investasi dari Meninves/Kepala BKPM atau Menteri Luar Negeri dalam hal ini Kepala Perwakilan RI setempat.
  - b. Ketua BKPMMD setempat, bagi yang memperoleh persetujuan investasi dari Ketua BKPMMD setempat.
- Bagi proyek-proyek investasi yang berlokasi di wilayah KAPET, permohonan izin persetujuan dan pelaksanaan investasi diajukan kepada Badan Pengelola KAPET setempat.
- Surat Persetujuan (SP) baik PMA maupun PMDN akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak

tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata baik dalam bentuk kegiatan administrasi maupun dalam bentuk kegiatan fisik.

- Kegiatan nyata dalam bentuk kegiatan administrasi, yaitu kegiatan yang memperoleh izin, berupa:
  - a. Izin lokasi atau perizinan sewa gudang khusus bidang jasa atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP) khusus untuk bidang usaha pertambangan;
  - b. Rekening bank atas nama perusahaan PMA (khusus bagi PMA baru); dan
  - c. Surat Persetujuan Pabean Barang Modal, dan/atau
  - d. Angka Pengenalan Impor Terbatas (APIT); dan/atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja bagi yang menggunakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWAP); dan atau
  - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
  - f. Izin HO/TUUG;
  - g. Akta Pendirian Perusahaan untuk perusahaan penyertaan modal.
- Kegiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk :

- a. Bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25 % dari luas yang tercantum dalam surat persetujuan; atau
  - b. Bidang usaha jasa atau jasa penyertaan modal (holding), pada umumnya telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25% dari yang tercantum dalam surat persetujuan, atau ruang perkantoran/gudang.
- Dalam mengajukan investasi baik PMA maupun PMDN, calon investor harus berpedoman pada:
    - a. Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal;
    - b. Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan;
    - c. Ketentuan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.
  - Persetujuan fasilitas dan izin pelaksanaan investasi yang dikeluarkan Meninves/Kepala BKPM atau BKPMMD terdiri dari :
    - a. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Fasilitas Perpajakan atau Pengimporan barang Modal;
    - b. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atau Pengimporan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan produksi selama 2 (dua) tahun berdasarkan kapasitas terpasang;

- c. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah untuk usaha industri tertentu;
- d. Angka Pengenalan Impor Terbatas (APIT);
- e. Keputusan Tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (RPTK)
- f. Keputusan tentang Izin Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
- g. Izin Usaha Tetap (IUT), Izin Usaha Perluasan dan Pembaharuan IUT;
- Izin Pelaksanaan Investasi yang dikeluarkan oleh Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - a. Izin Lokasi;
  - b. Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO);
  - c. Izin Mendirikan bangunan (IMB).

Untuk proyek-proyek yang berlokasi di wilayah KAPET semua perizinannya dikeluarkan oleh Badan Pengelola KAPET yang bersangkutan.

**b. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Investasi Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

1. Permohonan Investasi baru dalam rangka PMDN dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Comanditer Vennotschsp (CV), Firma (Fa), Badan Usaha Koperasi, BUMN, BUMD, atau Perorangan.

2. Permohonan tersebut diajukan, kepada:
  - a. Meninves/Kepala BKPM;
  - b. Ketua BKPMD setempat
3. Apabila permohonan investasi tersebut berlokasi di dua propinsi atau lebih, maka permohonan diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.
4. Permohonan investasi baru tersebut diajukan sebanyak dua rangkap dengan menggunakan formulir Model 1/PMDN sebagai mana terdapat dalam lampiran I Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999;
5. Persetujuan atas permohonan investasi baru tersebut dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN), apabila permohonan investasi diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dengan tembusan kepada instansi terkait, yaitu:
  - a. Menteri Dalam Negeri;
  - b. Menteri yang membina bidang usaha investasi yang bersangkutan;
  - c. Menteri Keuangan;
  - d. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
  - e. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bappedal;
  - f. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (apabila ada kemitraan dengan usaha kecil);

- g. Gubernur Bank Indonesia;
  - h. Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan;
  - i. Direktur Jendral teknis yang bersangkutan;
  - j. Direktur Jendral Pajak;
  - k. Direktur Jendral Bea dan Cukai;
  - l. Direktur Jendral Hukum dan Perundang-Undangan;
  - m. Ketua BKPMMD yang bersangkutan;
  - n. Kepala Dinas Instansi Teknis Kabupaten/Kota terkait.
6. Apabila permohonan investasi baru diajukan kepada Ketua BKPMMD setempat, maka persetujuan atas permohonan tersebut dikeluarkan oleh Ketua BKPMMD untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN), disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait, yaitu :
- a. Meninves/Kepala BKPM;
  - b. Mendagri;
  - c. Direktur Hukum dan Perundang-undangan;
  - d. Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan;
  - e. Bank Indonesia setempat;
  - f. Kanwil Departemen teknis terkait;
  - g. Kanwil Dirjen Pajak setempat;
  - h. Kanwil Dirjen Bea dan Cukai setempat;



- i. Kanwil Badan Pertanahan Nasional setempat;
  - j. Kanwil Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah setempat (apabila ada kemitraan dengan Usaha Kecil);
  - k. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah setempat; Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Kabupaten/Kota lokasi kegiatan investasi yang bersangkutan.
7. Persetujuan atas permohonan investasi PMDN baru tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh hari) kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;
8. Apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal SP-PMDN dikeluarkan, tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata baik dalam bentuk administrasi maupun fisik, maka SP-PMDN tersebut akan batal dengan sendirinya.
- c. Prosedur dan Tata Cara Investasi dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA):**
- (1). Permohonan investasi baru dalam rangka PMA dapat diajukan oleh:
- a. Warga negara asing dan/atau Badan Hukum asing dan/atau perusahaan PMA; atau
  - b. Warga negara asing dan/atau Badan Hukum asing dan/atau perusahaan PMA bersama dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;

- (2). Permohonan investasi baru tersebut, diajukan kepada:
  - a. Meninves/Kepala BKPM;
  - b. Kepala Perwakilan RI setempat; atau
  - c. Ketua BKPMMD setempat.
- (3). Apabila permohonan investasi PMA baru berlokasi di 2 (dua) propinsi atau lebih, maka permohonan diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM;
- (4). Permohonan diajukan rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model I/PMA sebagaimana terdapat dalam lampiran SK. Meninves/Kepala BKPN No. 38/SK/1999;
- (5). Berdasarkan penilaian terhadap permohonan investasi, Meninves/Kepala BKPM atau menteri Luar Negeri cq. Kepala perwakilan RI setempat atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi cq. Ketua BKPMMD setempat, mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA), disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada:
  - a. Menteri Dalam Negeri;
  - b. Menteri yang membina bidang usaha investasi yang bersangkutan;
  - c. Menteri Keuangan;
  - d. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
  - e. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bappedal

- f. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (apabila ada kemitraan dengan usaha kecil);
  - g. Duta Besar/Kepala Perwakilan negara asal peserta asing di Indonesia;
  - h. Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara peserta asing;
  - i. Gubernur Bank Indonesia;
  - j. Gubernur Kepala Daerah Proponsi yang bersangkutan;
  - k. Direktur Jendral teknis yang bersangkutan;
  - l. Direktur Jendral Pajak;
  - m. Direktur Jendral Bea dan Cukai;
  - n. Direktur Jendral Hukum dan Perundang-Undangan;
  - o. Ketua BKPMMD setempat;
  - p. Kepala Dinas Instansi Teknis Kabupaten/Kota terkait.
- (6). Bagi surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Ketua BKPMMD setempat, tembusan SP-PMA ditambahkan kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM.
- (7). Bagi surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI setempat, tembusan SP-PMA ditambahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM;
- (8). Persetujuan SP-PMA diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar;

- (9). Bila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SP-PMA dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata baik dalam bentuk administrasi maupun fisik, maka SP-PMA akan batal dengan sendirinya.

**d. Posedur dan Tata Cara Khusus Bagi Bidang Usaha dan Kegiatan Usaha Tertentu**

**1. Prosedur dan Tata Cara Pertambangan di Luar Minyak dan Gas Bumi dalam Rangka PMDN**

- a. Permohonan investasi baru dalam rangka PMDN di bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi untuk golongan bahan galian strategis (termasuk pertambangan batu bara dengan luas wilayah sampai dengan 1.000 Ha) dan bahan galian vital diajukan dengan melampirkan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi atau Dirjen Pertambangan Umum atas nama Menteri, dan dilengkapi data-data yang diperlukan;
- b. Permohonan investasi baru dalam rangka PMDN di bidang pertambangan golongan bahan galian C, diajukan dengan melampirkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan dilengkapi data-data yang diperlukan;
- c. Permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan formulir Model I/PMDN yang contohnya terdapat dalam SK Meninves No. 38/SK/1999;

- d. Persetujuan atas permohonan yang diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, dalam bentuk SP-PMDN disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait. Sedangkan permohonan yang diajukan kepada Ketua BKPMD dikeluarkan oleh BKPMD dalam bentuk SP-BKPMD disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi yang terkait;
- e. Persetujuan tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;
- f. Bila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak SP-PMDN dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata, maka SP-PMDN tersebut akan batal dengan sendirinya.

**2. Ketentuan khusus bagi permohonan pertambangan batu bara untuk luas wilayah 1.000 Ha atau lebih.**

- a. Permohonan investasi batu bara dalam rangka PMDN dilakukan dengan Perjanjian Karya Batubara (PKP2B)
- b. Rancangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara disiapkan oleh Pemerintah RI yang dalam hal ini diwakili oleh Departemen Pertambangan dan Energi dengan calon investor;

- c. Berdasarkan PKP2B tersebut, Meninves/Kepala BKPM menyampaikan pendapat kepada Menteri Pertambangan dan Energi;
- d. Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah RI dan calon investor menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
- e. PKP2B yang telah ditandatangani oleh menteri Pertambangan dan Energi dan calon investor diperlakukan sama seperti Surat persetujuan PMDN yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM;
- f. Rencana investasi untuk pelaksanaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batubara beserta fasilitasnya secara bertahap diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dilampiri dengan rekomendasi Dirjen Pertambangan Umum.

### **3. Ketentuan Khusus Untuk Permohonan Pertambangan di Luar Minyak dan Gas Bumi dalam Rangka PMA.**

- a. Permohonan investasi baru dalam rangka PMA di bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi dilaksanakan dalam bentuk Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara calon investor dengan pemerintah RI yang rancangannya disiapkan Pemerintah RI dalam hal ini diwakili Departemen Pertambangan dan Energi bersama calon investor;

- b. Rancangan Kontrak Karya yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, disampaikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Meninves/Kepala BKPM;
- c. DPR RI dan Meninves/Kepala BKPM masing-masing menyampaikan pendapat kepada presiden RI atas Rancangan Kontrak Karya Pengusahaan pertambangan batubara tersebut;
- d. Atas dasar persetujuan Presiden RI, Menteri Pertambangan dan Energi menandatangani Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atas nama Pemerintah RI;
- e. Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diperlakukan sama seperti SP-PMA yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM;
- f. Rencana investasi untuk pelaksanaan Kontrak Karya atau perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara beserta fasilitasnya secara bertahap diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dilampiri dengan rekomendasi Dirjen Pertambangan Umum.

**e. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Pendirian Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing**

1. Pendirian Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing (KPWPA) di luar bidang keuangan, wajib memperoleh izin dari Meninves/Kepala BKPM;
2. Permohonan tersebut diajukan rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model KPWA yang terdapat dalam Lampiran 3 SK. Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 kepada Meninves/Kepala BKPM;
3. Izin pendirian KPWA dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, dan disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Izin dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagai berikut:
  - a. Menteri Keuangan;
  - b. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  - c. Menteri Tenaga Kerja;
  - d. Kantor Perwakilan RI di negara asal perusahaan asing yang bersangkutan;
  - e. Kedutaan/Perwakilan dari negara asal perusahaan asing di Jakarta.
4. Izin tersebut di terbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.



**f. Prosedur dan Tata Cara Pendirian Perusahaan Penyertaan Modal**

1. Permohonan pendirian perusahaan penyertaan modal dalam rangka PMA dan PMDN dapat diajukan oleh Badan Hukum dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia;
2. Permohonan tersebut diajukan rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir sebagaimana lampiran 4 SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD setempat;
3. Persetujuan Pendirian Perusahaan Penyertaan Modal dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini ketua BKPMD setempat dan disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat persetujuan dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;
4. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat persetujuan dikeluarkan, tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata, maka surat persetujuan tersebut akan batal dengan sendirinya.

**g. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Tetap**

1. Untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial perusahaan penanaman modal harus memiliki Izin Usaha Tetap (IUT), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi investor yang persetujuan investasinya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, permohonan untuk memperoleh IUT diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM;
  - b. Bagi investor yang persetujuan investasinya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD, permohonan diajukan kepada Ketua BKPMD;
  - c. Bagi investor yang persetujuan investasinya dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau diajukan kepada Ketua BKPMD;
  - d. Permohonan IUT bagi Investor a, b, dan c tersebut diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Permohonan IUT; sebagaimana terdapat dalam lampiran 5 SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999.
2. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima, maka IUT diterbitkan oleh instansi yang berwewang, yakni:
  - a. Bagi permohonan yang diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau nama menteri yang membidangi bidang usaha yang bersangkutan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) IUT,

disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait;

- b. Bagi permohonan yang diajukan kepada Ketua BKPM, IUT dikeluarkan oleh Ketua BKPM untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama menteri yang membidangi bidang usaha yang bersangkutan, untuk Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk SK IUT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi yang terkait;
- c. Bagi investor yang persetujuan investasinya dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI, IUT dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama menteri yang membidangi bidang usaha yang bersangkutan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) IUT, yang disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait;
- d. Bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri, Surat Persetujuan Penanaman Modal dinyatakan berlaku sebagai perizinan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial. Apabila perusahaan sudah berproduksi komersial, wajib membuat surat pernyataan Siap Berproduksi sebagaimana terdapat dalam lampiran 5.a SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999, dan menyampaikan ke BKPM atau BKPM. Berdasarkan Surat

Pernyataan Siap Berproduksi tersebut, selanjutnya BKPM atau BKPMD langsung menerbitkan IUT.

3. IUT berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak produksi komersial dimulai bagi perusahaan PMA dan bagi perusahaan PMDN adalah selama perusahaan memproduksi/beroperasi. Bagi perusahaan PMA yang melaksanakan perluasan usaha diberikan perpanjangan IUT dengan jangka waktu 30 tahun terhitung sejak berproduksi komersial proyek perluasan usaha dimulai.
4. Perusahaan PMA yang masa berlaku IUT nya akan berakhir, dapat mengajukan permohonan pembaharuan IUT bagi kegiatan usahanya, dengan menggunakan formulir permohonan IUT, sebanyak 2 (dua) rangkap diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dan/atau ketua BKPMD. Atas dasar permohonan tersebut Meninves/Kepala BKPM dan/atau ketua BKPMD mengeluarkan Keputusan Pembaharuan IUT dan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak IUT yang bersangkutan berakhir. Keputusan pembaharuan IUT tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

**h. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Perluasan Penanaman Modal:**

1. Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN diajukan oleh perusahaan PMA dan PMDN yang

telah memiliki IUT. Dalam hal jenis produksi berbeda dengan proyek sebelumnya atau lokasi perluasan usahanya berada dalam Kabupaten/ Kotamadya yang berbeda dengan proyek sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki IUT atas proyek sebelumnya;

2. Permohonan perluasan PMA dan PMDN dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, dan diajukan kepada :
  - a. Meninves/Kepala BKPM;
  - b. Ketua BKPMD setempat.
3. Permohonan perluasan PMA yang SP-PMA nya diterbitkan oleh Perwakilan RI diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD, dan untuk perizinan pelaksanaan yang diperlukan atas persetujuan perluasan tersebut diajukan kepada instansi di mana Surat Persetujuan Perluasan diterbitkan. Permohonan perluasan tersebut diajukan dengan menggunakan formulir Model II/PMDN contohnya terdapat dalam lampiran 6 SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999, dan perluasan PMA dengan menggunakan formulir Model II/PMA sebagaimana terdapat dalam lampiran 7 SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999;
4. Persetujuan perluasan penanaman modal dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini oleh Ketua BKPMD setempat atas nama

Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan (SP), disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait. Penerbitan Surat Persetujuan Perluasan dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;

5. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak SP Perluasan dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata, maka SP Perluasan tersebut batal dengan sendirinya.

#### **i. Prosedur dan Tata Cara Perubahan Investasi**

##### **1. Prosedur dan Perubahan Lokasi proyek:**

- a. Permohonan perubahan lokasi proyek ke propinsi lain bagi perusahaan PMDN/PMA yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM pada lokasi baru. Permohonan perluasan lokasi proyek dari Kabupaten/Kotamadya ke Kabupaten/Kotamadya dalam satu Propinsi bagi perusahaan PMDN/PMA wajib diajukan langsung kepada Ketua BKPM setempat. Permohonan tersebut diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan

formulir model III sebagaimana terdapat pada lampiran 8 SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999;

- b. Persetujuan perubahan lokasi proyek dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Pindah Lokasi disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait. Persetujuan tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;

## **2. Prosedur dan Tata Cara Perubahan Bidang Usaha dan Produksi:**

- a. Permohonan perubahan bidang usaha produksi perusahaan PMDN/PMA wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM, dan diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana terdapat dalam lampiran 8 SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999;
- b. Persetujuan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Bidang Usaha Produksi, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;

### **3. Prosedur dan Tata Cara Perubahan Penggunaan Kerja Tenaga Asing**

- a. Permohonan perubahan penggunaan tenaga kerja asing bagi perusahaan PMDN/PMA yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA, wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMMD, dan dibuat 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana terdapat dalam lampiran 8 SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999;
- b. Persetujuan perubahan penggunaan tenaga kerja asing tersebut dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini ketua BKPMMD dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Menggunakan Tenaga Kerja Asing, yang disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait. Surat persetujuan itu diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.



#### **4. Prosedur dan Tata Cara Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan.**

- a. Perusahaan PMDN/PMA yang mengadakan perubahan investasi dan sumber pembiayaan yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA wajib mengajukan permohonannya kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMMD. Perubahan itu adalah perubahan yang mengakibatkan perubahan fasilitas yang diperoleh dan/atau sumber pembiayaan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan. Permohonan dibuat 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III contoh sebagaimana terdapat dalam lampiran 8 SK Meninves/Kepala BKPM No 38/SK/1999;
- b. Persetujuan perubahan investasi dan sumber pembiayaan tersebut dikeluarkan oleh meninver /Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD dalam bentuk Surat Perubahan Persetujuan Investasi dan Sumber Pembiayaan, dan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait. Persetujuan itu diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;

## **5. Prosedur dan Tata Cara Perubahan Pemilikan Saham Perusahaan PMA**

- a. Permohonan perubahan kepemilikan saham bagi Perusahaan PMA yang Surat Persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD atau Kepala Perwakilan RI wajib mengajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD untuk memperoleh persetujuan. Permohonan tersebut diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model III contohnya sebagaimana terdapat dalam lampiran 8 SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999;
- b. Persetujuan permohonan kepemilikan saham dalam rangka PMA tersebut dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan, dan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait. Persetujuan itu diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima

## **6. Prosedur dan Tata Cara Perubahan Status Perusahaan PMA menjadi PMDN**

- a. Perusahaan PMA yang kepemilikan sahamnya menjadi milik peserta Indonesia dan perusahaan tersebut berubah statusnya menjadi PMDN, wajib memperoleh persetujuan dari Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM;D;
- b. Permohonan persetujuan perubahan status tersebut diajukan rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model IIIA contohnya sebagaimana terdapat dalam lampiran 9 SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999;
- c. Persetujuan perubahan status tersebut dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini ketua BKPM;D dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Status disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, dan diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

## **7. Prosedur dan Tata Cara Perubahan Status Perusahaan PMDN atau Non PMA/PMDN menjadi Perusahaan PMA**

- a. Perusahaan PMDN atau Non-PMA/PMDN yang telah sah berbadan hukum yang sahamnya akan dibeli oleh perusahaan PMA dan atau Badan Hukum Asing dan/atau Warga Negara

Asing, wajib mengajukan permohonan perubahan status menjadi PMA kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMMD;

- b. Pembelian saham perusahaan tersebut hanya dapat dilakukan apabila bidang usaha perusahaan yang sahamnya akan dibeli itu tidak dinyatakan tertutup bagi investasi yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing;
- c. Permohonan status menjadi PMA tersebut diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model IIIB contohnya sebagaimana terdapat dalam lampiran 10 SK. Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 ;
- d. Persetujuan dan permohonan perubahan status menjadi PMA dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD dalam bentuk Surat Persetujuan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, dan diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

## **8. Prosedur dan Tata Cara Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek PMA/PMDN**

- a. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek yang masa berlakunya akan berakhir bagi perusahaan PMA/PMDN yang belum berproduksi komersial, wajib memperoleh surat persetujuan dari Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD;
- b. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penyelesaian proyek berakhir dengan menggunakan formulir Model IIIC sebagaimana terdapat dalam lampiran 11 SK. Meninves/kepala BKPM No. 38/SK/1999. Permohonan tersebut diajukan 2 (dua) rangkap kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD;
- c. Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek tersebut dapat diajukan dalam waktu penyelesaian proyek tersebut sebagaimana tercantum dalam SP-PMA atau SP-PMDN akan berakhir dan telah ada kegiatan nyata baik dalam bentuk administrasi maupun dalam bentuk fisik;
- d. Persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian proyek tersebut dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini ketua BKPMD dalam bentuk Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek disampaikan kepada pemohon

dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, dan diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;

- e. Persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian proyek tersebut sekaligus juga memperpanjang jangka waktu pengimporan mesin-mesin/peralatan.

#### **9. Prosedur dan Tata Cara Penggabungan Perusahaan (Merger)**

- a. Perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha sebagai akibat terjadinya penggabungan perusahaan (merger), wajib memperoleh persetujuan Meninves/Kepala BKPM;
- b. Perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha maupun yang akan menggabung harus sudah mempunyai neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi tiga (tiga) tahun buku terakhir;
- c. Status penggabungan perusahaan (merger) ditentukan oleh status perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha:
  - 1. Apabila perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN dan setelah penggabungan perusahaan (merger) tidak ada warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perubahan PMA

sebagai pemegang saham, status perusahaan tersebut tetap PMDN;

2. Apabila dalam perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN dan setelah penggabungan perusahaan (merger) terdapat warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, maka status perusahaan tersebut menjadi PMA;
  3. Apabila perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMA, maka status perusahaan tersebut tetap PMA.
- d. Bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha setelah penggabungan perusahaan (merger) yang sebagian saham perusahaan dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA, tidak diizinkan memasuki kegiatan usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing;
- e. Apabila perusahaan yang akan menggabung masih mempunyai proyek dalam tahap pembangunan/konstruksi dimana sebagian mesin peralatan sudah diimpor, perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha terlebih dahulu harus

mengajukan permohonan perluasan bidang usaha yang masih dalam tahap kontruksi tersebut;

- f. Fasilitas perpajakan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan yang menggabung dan belum dimanfaatkan dinyatakan batal dan tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usahanya;
- g. Permohonan penggabungan perusahaan (merger) tersebut diajukan rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model III D sebagaimana terdapat dalam lampiran 12 SK. Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999, kepada Meninves/Kepala BKPM, dilengkapi dengan:
  - Rekaman akta pendirian dan perubahan masing-masing perusahaan yang bergabung;
  - Rekaman IUT bagi perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha, apabila belum memiliki IUT perlu dilengkapi dengan BAP oleh BKPM setempat;
  - Risalah RUPS tentang persetujuan untuk bergabung dari masing-masing perusahaan yang bergabung;
  - Rekaman LKPM periode terakhir untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang akan meneruskan kegiatan usaha.



#### **10. Prosedur dan Tata Cara Perubahan Nama Perusahaan**

- a. Perubahan nama perusahaan PMA/PMDN diberitahukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini ketua BKPM. Pemberitahuan tersebut diajukan 1 (satu) rangkap dengan dilampiri:
  1. Rekaman akte perubahan yang memuat perubahan nama perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan Departemen Kehakiman, atau
  2. Kesepakatan para pihak bagi perusahaan PMA yang belum mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman.
- b. Atas dasar pemberitahuan tertulis perubahan nama perusahaan tersebut, Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini Ketua BKPM mengeluarkan Surat Perubahan Nama Perusahaan kepada perusahaan tersebut dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, yang diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak laporan perubahan nama diterima secara lengkap dan benar.

#### **11. Prosedur dan Tata Cara Perubahan Bentuk/Pola Kemitraan dan/atau Mitra Khusus (bagi perusahaan yang dipersyaratkan Kemitraan dengan Usaha Kecil)**

- a. Perusahaan PMA/PMDN yang menanamkan modalnya di bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan dengan usaha kecil wajib mendapatkan persetujuan dari meninves/Kepala BKPM

atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA;

b. Perubahan bentuk/pola kemitraan dan/atau usaha yang dilakukan perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD. Pemberitahuan tersebut dibuat 1 (satu) rangkap dengan dilampiri:

1. Alasan perubahan bentuk pola kemitraan dan atau mitra usaha;
2. Perubahan kesepakatan/perjanjian kerja sama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil;
3. Akte perubahan atau risalah RUPS mengenai persyaratan usaha kecil yang baru sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham;
4. Surat pernyataan diatas materai, dari:
  - 1). Mitra usaha kecil yang baru, bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil;

- 2). Mitra usaha kecil yang lama, bahwa yang bersangkutan bersedia mengundurkan diri dari kemitraan usaha (khusus bagi kemitraan bukan dalam bentuk penyertaan modal)
- 3). Atas dasar pemberitahuan tertulis tersebut, Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD mengeluarkan Surat Perubahan Pola Kemitraan kepada perusahaan dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, yang diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak laporan perubahan pola kemitraan diterima secara lengkap dan benar.

**j. Prosedur dan Tata Cara Persetujuan dan Izin Pelaksanaan Investasi.**

**1. Prosedur dan Tata Cara Pengimporan Barang Modal**

- (1). Permohonan persetujuan pengimporan barang modal dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan:
  - a. PMA dan PMDN yang Surat Persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM;
  - b. PMA dan PMDN yang Surat Persetujuannya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD, diajukan kepada Ketua BKPMD;

- c. PMA yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMMD.
  - d. Permohonan persetujuan pengimporan barang modal tersebut, baik untuk proyek baru, perluasan atau diversifikasi diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model IV A/ Daftar Induk Barang Modal sebagaimana terdapat dalam lampiran 13 SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999.
- (2). Persetujuan pengimporan barang modal dengan fasilitas atas permohonan:
- a. pemohon, yang diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dikeluarkan oleh menonves/Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan, dalam bentuk SP Pabean Barang Modal dengan lampiran Daftar Induk barang Modal, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, Dirjen Instansi teknis dan ketua BKPMMD;
  - b. Permohonan yang diajukan kepada Ketua BKPMMD, dikeluarkan oleh Ketua BKPMMD untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Keuangan untuk Meninves/Kepala BKPM, dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Barang Modal dengan lampiran Daftar

Induk Barang Modal, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Meninves/Kepala BKPM, Kanwil Pajak, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai dan Kanwil Departemen teknis.

- c. Bagi perusahaan PMA dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan atau Ketua BKPMD untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Keuangan untuk Meninves/Kepala BKPM, dalam bentuk SP fasilitas Pabean Barang Modal dengan lampiran Daftar Induk Barang Modal disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Ditjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, Dirjen Instansi teknis, Kepala Perwakilan RI.
- (3). Persetujuan pengimporan barang modal tersebut diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;
- (4). Apabila barang modal (mesin-mesin/peralatan) yang telah diimpor tersebut dimuka akan dire-ekspor maka perusahaan harus mengajukan surat permohonan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD dan selanjutnya Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD mengeluarkan surat rekomendasi untuk dire-ekspor tersebut.

## **2. Prosedur dan Tata Cara Pengimporan Bahan Baku/Penolong**

(1). Permohonan persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan PMA/PMDN yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh:

a. Meninves/Kepala BKPM diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM;

b. Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM;

c. Kepala Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM.

Permohonan persetujuan pengimporan bahan baku/penolong tersebut untuk proyek baru, perluasan dan diversifikasi, diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model IV B/ Daftar Induk bahan Baku/Penolong sebagaimana terdapat dalam lampiran 14 SK Meninves/Kepala BKPM NO. 38/SK/1999.

(2). Persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan fasilitas atas permohonan si pemohon dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan atau Ketua BKPM untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Keuangan untuk Meninves/Kepala

BKPM, dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong dengan lampiran Daftar Induk Bahan Baku/Penolong, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, yang diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

- (3). Bagi perusahaan yang belum memiliki IUT, baik dalam rangka PMA maupun PMDN, diberikan fasilitas pengimporan bahan baku/penolong untuk kebutuhan 1 (satu) tahun sejak berakhirnya SP Pabean yang pertama;
- (4). Bagi perusahaan yang telah memiliki IUT, baik dalam rangka PMA maupun PMDN, diberikan fasilitas pengimporan bahan baku/penolong untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 2 (dua) tahun.

### **3. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)**

- (1). Perusahaan PMA ataupun PMDN yang akan melaksanakan sendiri pengimporan barang modal dan/atau bahan baku/penolong, wajib memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan yang Surat Persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, permohonan diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM;
  - b. Bagi perusahaan yang Surat Persetujuannya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM, permohonan diajukan kepada ketua BKPM;
  - c. Bagi perusahaan PMA yang Surat Persetujuan PMA nya dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan RI, permohonan diajukan kepada meninves/Kepala BKPM dan/atau kepada Ketua BKPM. Permohonan diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir APIT, sebagaimana terdapat dalam lampiran 15 SK. Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 .
- (2). Angka pengenal Impor Terbatas (APIT) dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau oleh Ketua BKPM untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) APIT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, dan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;



- (3). APIT berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan yang bersangkutan masih memproduksi;
- (4). Bagi perusahaan yang kegiatannya termasuk di bidang jasa perdagangan dan akan mengimpor barang-barang yang akan diperdagangkan, maka APIT yang telah dimiliki berlaku juga sebagai Angka Pengenal Impor Umum (APIU), dan apabila belum memiliki APIT, dapat mengajukan permohonan APIT yang sekaligus berlaku pula sebagai APIU;
- (5). Perusahaan PMA maupun PMDN wajib mengajukan permohonan kepada Meninves/Kepala BKPM dan/atau kepada Ketua BKPM setempat untuk setiap perubahan nama, alamat dan direksi perusahaan atau perubahan yang menandatangani dokumen impor, guna mendapatkan persetujuan perubahan APIT.

#### **4. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Izin Kerja Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.**

- (1). Perusahaan PMA atau PMDN yang akan mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warganegara Asing Pendatang (RPTK), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Permohonan untuk memperoleh RPTK bagi perusahaan yang Surat Persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM;
- b. Permohonan untuk memperoleh RPTK bagi perusahaan yang surat persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini ketua BKPMD diajukan kepada Ketua BKPMD;
- c. Permohonan untuk memperoleh RPTK bagi perusahaan yang surat persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh kantor Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dan/atau kepada Ketua BKPMD.

Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir RPTK dan berpedoman kepada ketentuan Departemen Tenaga Kerja dengan menggunakan formulir sebagaimana terdapat dalam lampiran 16 SK meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999.

- (2). Persetujuan RPTK dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja atau oleh Ketua BKPMD untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Tenaga Kerja untuk Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) RPTK, disampaikan

kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, dan diterbitkan selambat-lambatnya (empat) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

(3). Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) pada perusahaan PMA dan perusahaan PMDN serta Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing (KPWPA) yang sudah siap datang ke Indonesia wajib memiliki Visa Tinggal Terbatas (VITAS) yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI;

(4). Untuk mendapatkan VITAS tersebut perusahaan harus memiliki rekomendasi TA. 01 dari BKPM atau BKPMD, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Permohonan rekomendasi TA.01 bagi perusahaan yang SK-RPTK nya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM;
- b. Permohonan rekomendasi TA.01 bagi perusahaan yang SK-RPTK nya dikeluarkan oleh Ketua BKPMD, diajukan kepada Ketua BKPMD.

Permohonan tersebut diajukan 1 (satu) rangkap dengan menggunakan formulir Ppt. 2 sebagaimana terdapat dalam lampiran 17 SK Meninves/Kepala BKPM No 38/SK/1999.

(5). Rekomendasi Ta.01 atas permohonan yang diajukan kepada:

a. Meninves/Kepala BKPM dikeluarkan oleh Direktur Perizinan dan Fasilitas BKPM disampaikan kepada Dirjen Imigrasi;

b. Rekomendasi TA.01 atas permohonan yang diajukan kepada Ketua BKPM, dikeluarkan oleh Ketua BKPM disampaikan kepada Dirjen Imigrasi.

Rekomendasi tersebut diterbitkan selambat-lambatnya (empat) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

(6). Dirjen Imigrasi berdasarkan rekomendasi TA.01 tersebut memberitahukan kepada Perwakilan RI untuk mengeluarkan VITAS bagi TKWNAP yang bersangkutan;

(7). Setelah TKWNAP datang dengan VITAS, perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) kepada kantor Imigrasi setempat dengan menggunakan formulir KITAS dan melampirkan bukti kartu embarkasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(8). TKWNAP yang telah memperoleh VITAS dan akan bekerja di Indonesia wajib memperoleh IKTA, yang permohonannya diajukan oleh sponsor kepada Ketua

BKPMMD setempat atau kepada Meninves/Kepala BKPM untuk TKWNAP yang berlokasi lebih dari 1 (satu) propinsi atau bagi TKWNA, dengan menggunakan formulir Ppt. 2, sebagaimana terdapat dalam lampiran 17 SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999.

- (9). Persetujuan permohonan IKTA dikeluarkan oleh Ketua BKPMMD untuk Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja dalam bentuk SK-IKTA dan Buku Legitimasi, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat, dan persetujuan itu diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;
- (10). Bagi TKWNAP yang berkerja lebih dari 1 (satu) propinsi dan KPWA, SK-IKTA dan perpanjangannya diterbitkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja;
- (11). Permohonan perpanjangan IKTA diajukan kepada Ketua BKPMMD setempat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum IKTA- TKWNAP yang bersangkutan habis masa berlakunya;
- (12). TKWNAP di luar Direksi dan Komisaris yang telah bekerja selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di Indonesia harus keluar dari wilayah Indonesia dengan status *Exit Permit*

*Only* (EPO). Dan apabila TKWNAP dengan status EPO tersebut masih diperlukan oleh perusahaan, perusahaan sponsor wajib menempuh prosedur baru dengan mempergunakan rekomendasi TA.01 berdasarkan RPTK yang berlaku dilengkapi bukti EPO;

(13). Perusahaan PMA dan PMDN dapat mendatangkan TKWNAP yang akan digunakan sejak masa konstruksi (bukan erector) sampai ke masa operasional, dengan mengajukan permohonan kepada BKPMMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(14). TKWNAP yang digunakan oleh perusahaan sponsor maupun kontraktor hanya dalam masa konstruksi/pembangunan fisik pabrik (erector) termasuk pemasangan mesin-mesin, pengesahan RPTK dan permohonan IKTA diajukan ke Departemen Tenaga Kerja.

##### **5. Prosedur dan Tata Cara Investasi di Daerah Kawasan Berikat dan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)**

(1). Permohonan investasi baik untuk PMA maupun PMDN diajukan kepada penyelenggara Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Berikat dan diajukan kepada BP-KAPET bagi yang berlokasi di kawasan KAPET;

- (2). Penyelenggara Kawasan Berikat atau KAPET yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan, menilai permohonan proyek baru, perluasan dan perubahan dalam rangka PMDN serta memberikan persetujuan atas nama Meninves/Kepala BKPM;
- (3). Penyelenggara kawasan Berikat atau KAPET yang telah mendapat pelimpahan kewenangan menilai permohonan baru, perluasan dan perubahan dalam rangka PMA yang berlokasi di kawasan Berikat atau KAPET dan hasil penilaian permohonan tersebut disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Persetujuan (SP) melalui penyelenggara Kawasan Berikat atau KAPET;
- (4). Penyelenggara Kawasan Berikat atau KAPET yang telah mendapatkan pelimpahan atau kewenangan, menyelenggarakan penilaian permohonan izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang diperlukan dan mengeluarkan persetujuan atas permohonan tersebut untuk disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Persetujuan (SP) atau Surat Keputusan (SK).

## **2.2. Prosedur dan Tata Cara Perizinan Investasi PMA/PMDN di Nusa Tenggara Barat**

### **1. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Perizinan Investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi NTB.**

Perubahan kebijakan perizinan investasi pada tingkat nasional memberikan pengaruh dan implikasi pula pada pelaksanaan kebijakan perizinan investasi baik pada investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun investasi Penanaman Modal Asing (PMA).

Pengaruh perubahan kebijakan perizinan investasi tersebut tampak ketika pada masa berlakunya Surat Keputusan Menteri Penggerak Dana Investasi/Kepala BKPM No. 21/SK/1996, di mana Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah) tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal serta berbagai bentuk perizinan investasi lainnya. Sehingga, apabila ada investor atau pun calon investor baik untuk investasi PMDN maupun PMA yang akan menanamkan modalnya di daerah, maka investor yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Meninves/Kepala BKPM. Dalam hal ini Ketua BKPM Daerah akan meneruskan permohonan tersebut kepada Meninves/Ketua BKPM (di Jakarta).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku ketika itu, instansi yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan dan pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal



hanyalah instansi Pusat (dalam hal ini Meninves/Kepala BKPM). Instansi di daerah (BKPM Daerah) tidak mempunyai/memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan maupun menolak perizinan investasi. sehingga peranan dari BKPM Daerah hanyalah sebatas memberikan arahan pada investor maupun calon investor yang datang berkonsultasi.

Kewenangan dari BKPM Daerah untuk memberikan persetujuan fasilitas perizinan investasi di daerah diperoleh setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 30/SK/1998 - inipun masih sangat terbatas -, yang mana di dalam Keputusan Meninves/Kepala BKPM tersebut memberikan kewenangan kepada BKPM Daerah untuk menerbitkan persetujuan fasilitas perizinan investasi di daerah yakni untuk investasi PMDN dengan jumlah investasi tidak melebihi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan tidak terdapat unsur asing dalam modal perusahaan. Sedangkan untuk investasi lainnya, yakni investasi yang menggunakan fasilitas PMDN dengan jumlah investasi sampai dengan sepuluh milyar rupiah akan tetapi terdapat unsur asing dalam komposisi modal perusahaan, ataupun investasi PMDN yang jumlah investasinya di atas sepuluh milyar rupiah, dan juga investasi yang menggunakan fasilitas PMA, kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasinya, masih berada pada BKPM (pusat). Bahkan, untuk investasi yang menggunakan fasilitas PMA dengan jumlah

investasi lebih dari USD. 100.000.000,- (seratus juta dolar Amerika Serikat), harus mendapat persetujuan dari Presiden.

Setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden RI. Np. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, yang kemudian di tindak lanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 beserta pengaturan kebijakan perizinan investasi lainnya, maka kewenangan untuk mengeluarkan persetujuan, pemberian fasilitas dan perizinan investasi di daerah dilimpahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD). Dengan demikian, berdasarkan KEPMENINVES tersebut, tidak terkecuali BKPMMD Nusa Tenggara Barat berwenang untuk mengeluarkan persetujuan dan pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal baik untuk aplikasi investasi baru maupun perubahan investasi dan perluasan investasi. Oleh karena itu, apabila investor maupun calon investor bermaksud investasi (menanamkan modalnya) di daerah Nusa Tenggara Barat –kecuali di wilayah KAPET -, dapat langsung mengajukan permohonannya pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Diterbitkannya Keppres No. 117 Tahun 1999 yang kemudian ditindak lanjuti dengan SK MENINVES No. 37/ SK/ 1999 dan SK Meninves No. 38/SK/1999 merupakan suatu upaya reformasi di bidang perizinan investasi. Maksudnya tidak lain adalah untuk

memberikan kemudahan dan mempercepat pelayanan investasi baik dalam rangka PMDN maupun PMA serta sekaligus untuk memenuhi pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berkaitan dengan Prosedur dan Tata Cara perizinan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perizinan, adalah sebagai berikut:

Permohonan investasi diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Nusa Tenggara Barat, baik untuk investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun untuk investasi Penanaman Modal Asing (PMA).

- a. Permohonan investasi dalam rangka PMDN dapat diajukan oleh :  
 Perorangan; Perseroan Comandeter (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT), PT. Persero, Koperasi, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah.
- b. Permohonan investasi dalam rangka PMA dapat diajukan oleh :
  - Warga negara asing dan/atau Badan Hukum asing; atau
  - Warga negara asing dan/atau Badan Hukum Asing bersama Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia

Adapun tahapan-tahapan permohonan Surat Persetujuan Penanaman Modal (yang nantinya berlaku sebagai Izin Prinsip) dan

Pemberian fasilitas dan Perizinan Pelaksanaan Investasi, adalah sebagai berikut:

**1). Tahap Pertama : Permohonan Persetujuan Penanaman Modal**

Calon investor/investor menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Propinsi NTB berkas, yang berisi :

1. Surat Permohonan Penanaman Modal di atas kertas bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah), yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTB Cq. Ketua BKPM Propinsi NTB;
2. Isian formulir aplikasi Model I PMA (untuk investasi PMA) dan formulir aplikasi Model I PMDN (untuk investasi PMDN) di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Surat Permohonan Penanaman Modal dan Formulir aplikasi baik untuk PMDN maupun PMA tersebut di atas, harus disertai dan melampirkan :

- a. Bagi pemohon investasi Penanaman Modal Asing (PMA):
  - Bagi peserta asing: rekaman Akte Pendirian perusahaan atau Perubahannya beserta terjemahannya ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia (bagi Badan Hukum asing); bagi Warga Negara Asing (WNA) harus melampirkan rekaman Paspor yang masih berlaku.

- Bagi peserta Indonesia: rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya untuk PT atau Perum/Perusahaan Daerah; atau rekaman Anggaran Dasar (bagi koperasi), atau KTP untuk Perorangan; disertai pula dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - Uraian Kegiatan; yakni berisi proses produksi yang dilengkapi dengan bagan alur proses produksi serta harus mencantumkan jenis bahan baku/bahan baku penolong bagi industri; atau uraian mengenai kegiatan usaha bagi kegiatan usaha di bidang jasa;
  - Rancangan perjanjian usaha patungan; dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang diparaf oleh semua peserta, bagi usaha patungan dan untuk PMA yang 100 % modalnya dimiliki oleh badan Usaha Asing dan/atau Warga Negara Asing;
  - Surat Kuasa diatas kertas bermaterai apabila permohonan penanaman modal diwakilkan kepada pihak Indonesia dan penadatangan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon yang berwenang.
- b. Bagi pemohon investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN):

- Rekaman akte pendirian perusahaan; atau rekaman Anggaran dasar yang telah mendapatkan pengesahan; dan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan;
- Surat Kuasa diatas kertas bermaterai jika permohonan diwakilkan kepada pihak lain;
- Rekaman Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP);
- Uraian proses produksi yang dilengkapi dengan bagan alurnya serta jenis bahan baku/bahan baku penolong bagi kegiatan di bidang industri, dan/atau uraian kegiatan usaha bagi usaha bidang jasa.

Surat permohonan Penanaman Modal dibuat 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada BKPM Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat. Selanjutnya, bagian Kesekretariatan memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon investor. Jika telah lengkap, kemudian akan disampaikan kepada Ketua BKPM. Selanjutnya, setelah Ketua BKPM menerima permohonan investasi tersebut, kemudian akan mendisposisikan kepada Bidang Perizinan untuk selanjutnya diproses dan sekaligus juga dievaluasi apakah permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Buku Petunjuk Teknis Penanaman Modal. Di samping itu, diteliti juga apakah bidang usaha yang dimohon tersebut terbuka untuk

penanaman modal atau tidak seperti yang termuat di dalam Keppres No. 118 Tahun 2000 yang memperbaharui Keppres sebelumnya yakni Keppres No. 96 Tahun 1998.

Persyaratan lain yang juga turut diteliti apakah bidang usaha tersebut dipersyaratkan untuk mengadakan kemitraan dengan usaha kecil atau tidak. Jika, bidang usaha yang akan dimasuki ternyata merupakan bidang usaha dipersyaratkan untuk mengadakan kemitraan dengan Usaha Kecil, maka permohonan harus dilampiri :

- (1). Perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang di dalamnya memuat; nama dan alamat masing-masing pihak; pola kemitraan yang digunakan; hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada Usaha Kecil;
- (2). Akte Pendirian dan perubahannya atau Pisalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan tersebut dalam bentuk penyertaan saham;
- (3). Surat Pernyataan diatas materai dari Usaha kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kriteria usaha.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perizinan; Selama permohonan investasi tersebut di proses oleh Bidang Perizinan, BKPMD menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi yang

melibatkan unsur-unsur yang terkait dengan bidang/kegiatan investasi yang diajukan. Misalnya investasi yang dimohonkan di bidang Industri Pariwisata, maka dalam rapat-rapat kordinasi tersebut akan diundang dan dihadiri oleh unsur-unsur dari, antara lain : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), karena menyangkut dengan perizinan Tata Ruang; Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) karena menyangkut aspek lingkungan hidup; Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena berkaitan dengan penyediaan lahan (akomodasi tanah) dan unsur-unsur terkait lainnya.

Selanjutnya dikemukakan bahwa, setelah berlakunya Otonomi Daerah di Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 1999, rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh BKPMMD harus juga mengundang instansi-instansi terkait di daerah Kabupaten/Kota di mana kegiatan investasi dimaksud akan dilaksanakan. Lebih lanjut dikemukakan, jika kegiatan investasi tersebut dilaksanakan secara lintas kabupaten artinya dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota (sekurangnya dua Kabupaten/Kota), maka rapat-rapat koordinasi dihadiri oleh unsur-unsur instansi terkait dari masing-masing Kabupaten/Kota dimana investasi yang bersangkutan akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 UU No. 22 Tahun 1999, menentukan:

- (1). Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas



- Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya;
- (2). Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten/Daerah Kota;
  - (3). Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administratif mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.

Hal ini dilaksanakan karena penanganan kegiatan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa stuktur organisasi/kelembagaan yang menangani kegiatan investasi di Daerah Kabupaten/Kota, berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Stuktur kelembagaan yang menangani investasi di masing-masing Kabupaten/Kota, berturut-turut sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Lombok Barat stuktur kelembagaan yang menangani investasi adalah Badan Penanaman Modal dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPM LH), merupakan lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan PERDA No. 17 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok barat;
2. Di Kota Madya Mataram lembaga yang menangani penanaman modal berada di bawah Sekretariat Walikotamadya, Bagian Ekonomi (Sub Bagian Ekonomi), dibentuk berdasarkan PERDA No. 16 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Madya Mataram;

3. Di Kabupaten Lombok Tengah badan yang menangani penanaman modal adalah Kantor Badan Penanaman Modal dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPM LH) yang dibentuk berdasarkan PERDA No. 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
4. Di Kabupaten Lombok Timur badan yang menangani penanaman modal berada di bawah Assisten II Bidang Ekonomi, yakni Bagian Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup yang ditentukan berdasarkan Pasal 16 PERDA No. 10 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat DPR Kabupaten Lombok Timur;
5. Di Kabupaten Sumbawa badan yang menangani penanaman modal adalah Badan Penanaman Modal dan Pengendalian Dampak Lingkungan (BPM PDL) yang dibentuk berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 2000 Tentang pembentukan Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
6. Di Kabupaten Dompu badan yang menangani penanaman modal berdada di bawah Assisten Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian, Sub-bagian Penanaman Modal Kantor

Bupati Dompu yang dibentuk berdasarkan PERDA No. 5 Tahun 2000 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Kabupaten Dompu;

7. Di Kabupaten Bima, badan yang menangani penanaman modal adalah Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Kabupaten Bima yang dibentuk berdasarkan PERDA No. 13 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Bima.

Perkembangan rapat koordinasi yang membahas permohonan investasi tersebut di atas, dapat menyetujui atau pun menolak permohonan investasi jika tidak memenuhi persyaratan dan aturan-aturan yang berlaku. apabila hasil rapat dapat menyetujui permohonan investasi, maka BKPMMD akan membuat Nota Dinas yang ditujukan dan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTB. di dalam nota dinas tersebut dikemukakan hasil rapat koordinasi yang intinya permohonan investasi dapat diterima oleh semua pihak termasuk unsur masyarakat. Selanjutnya berdasarkan nota dinas yang dibuat oleh BKPMMD, Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTB menerbitkan Surat Persetujuan yang sebelumnya telah diparaf oleh Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Surat Persetujuan dari Gubernur tersebut dijadikan sebagai dasar bagi BKPMMD Propinsi NTB untuk menerbitkan Surat Persetujuan (SP) Penanaman Modal Baru yang

ditandatangani oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) atas nama Kepala BKPM, Gubernur Kepala Daerah Ub. Ketua BKPMMD. NTB.

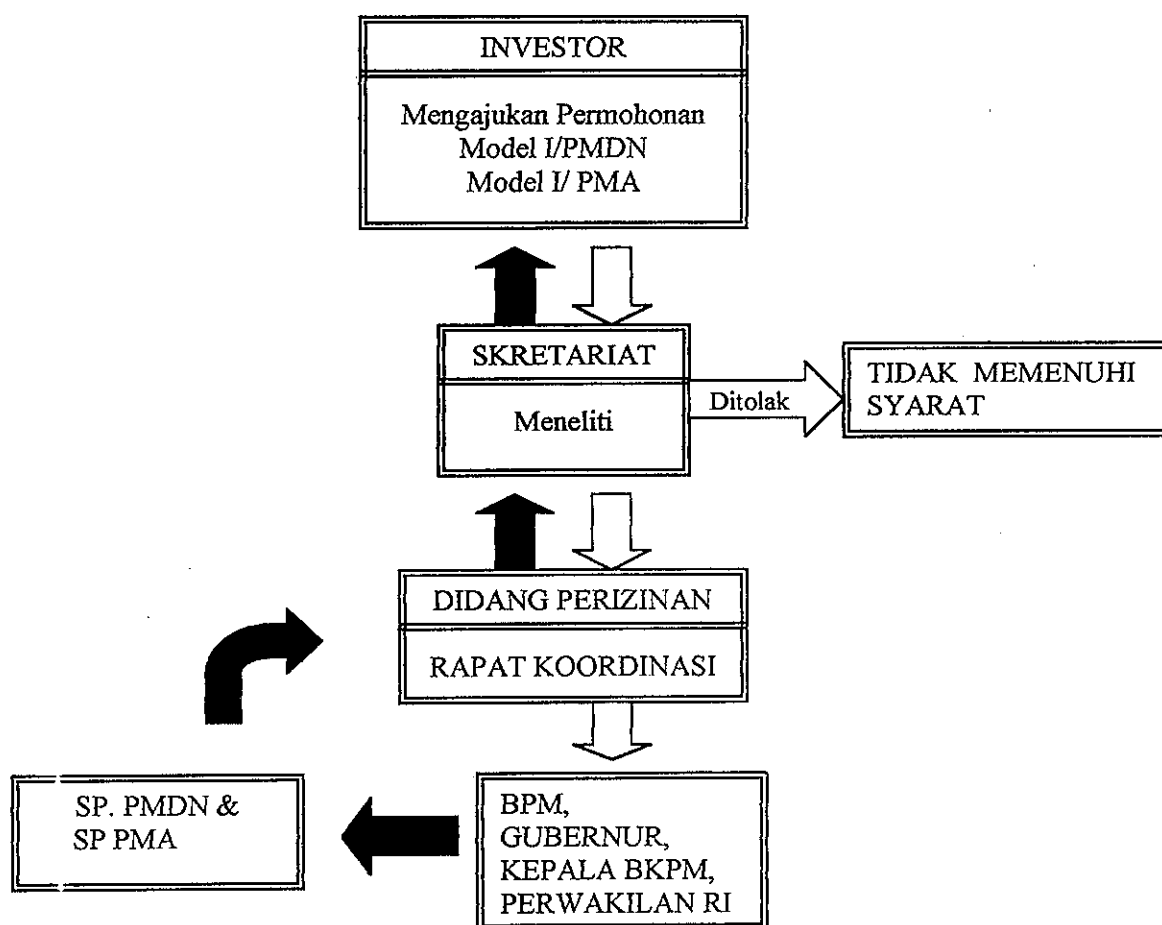
Setelah Surat Persetujuan (PMA/PMDN) ditandatangani dan diterbitkan oleh BKPMMD, maka Sekretariat mengirimkan Surat Persetujuan tersebut Kepada investor yang bersangkutan. Proses permohonan ini diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan telah diterima lengkap dan benar.

Untuk prosedur dan tata cara permohonan persetujuan perluasan investasi serta prosedur dan tata cara persetujuan perubahan investasi, dikemukakan oleh Kepala Bidang Perizinan Kantor BKPMMD Propinsi NTB, pada prinsipnya sama dengan prosedur dan tata cara permohonan persetujuan aplikasi baru. Hanya saja, untuk permohonan perluasan investasi menggunakan formulir model II dan harus melampirkan pula rekaman Izin Usaha Tetap. Proses penyelesaian permohonan tersebut adalah selama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejang permohonan diterima oleh BKPMMD secara lengkap dan benar.

Sedangkan prosedur dan tata cara perubahan investasi menggunakan formulir sesuai dengan jenis perubahan yang dilakukan, misalnya perubahan/ perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek, menggunakan formulir Model III C, untuk penggabungan perusahaan menggunakan formulir Model III D.

proses permohonan perubahan investasi diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima BKPM secara lengkap dan benar.

**Bagan : Prosedur Perizinan PMDN/PMA di BKPM Propinsi NTB.**



## **(2). Tahap Kedua: Prosedur Permohonan Izin-izin di Daerah**

Setelah investor memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Model I dari BKPM, langkah selanjutnya yang harus diselesaikan adalah mengajukan permohonan izin-izin di daerah yang berupa: Ijin Lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Undang Undang Gangguan (sering disebut dengan Izin HO) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di mana lokasi investasi akan dilaksanakan. izin-izin daerah dimaksud, sering juga dinamakan dengan izin pelaksanaan.

Adapun prosedur dan tata cara permohonan izin-izin daerah tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

- (1). Investor mengajukan permohonan izin-izin daerah (izin lokasi, IMB, Izin HO) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di mana investasi akan dilaksanakan di lingkungan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2). Pemerintah daerah Kabupaten/Kota kemudian memproses permohonan izin-izin tersebut dan setelah proses izin selesai dan diterbitkan, kemudian diserahkan kepada Pemohon (investor) dengan diberikan tembusan kepada Ketua BKPM Propinsi Nusa Tenggara Barat.

## **(3). Tahap Ketiga: Permohonan Persetujuan Fasilitas Pabean**

Setelah investor memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dan izin-izin di daerah, untuk dapat merealisasikan proyek

investasinya, investor masih harus menyelesaikan berbagai surat persetujuan pemberian fasilitas, yang sering dinamakan Fasilitas Pabean Barang Modal dan juga Fasilitas Pabean Bahan Baku/penolong.

Adapun prosedur dan tata cara permohonan Fasilitas Pabean ini adalah sebagai berikut:

(1). Permohonan Fasilitas Pabean Barang Modal:

- a. Investor PMA/PMDN menyampaikan berkas permohonan Fasilitas Pabean Barang Modal yang ditujukan kepada Cabang PT. Sucofindo dengan ditembuskan kepada Ketua BKPMD Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Berkas permohonan yang diajukan, terdiri dari:

- Surat Permohonan Fasilitas Pabean Barang Modal;
- Isian formulir Model IV/Daftar Induk Barang Modal;
- Rekaman surat persetujuan (SP) PMA/PMDN dan Perubahannya;
- Denah pabrik dan gambar tata letak mesin/ peralatan;
- Brosur /spesifikasi teknik mesin/peralatan;
- Uraian proses produksi;
- Perhitungan Kapasitas Produksi;
- Nomer Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPK);
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir.
- b. Setelah menerima berkas permohonan, PT. Sucofindo meneliti (melakukan verifikasi) permohonan tersebut dan hasilnya disampaikan kepada Ketua BKPMD Propinsi NTB.
- c. Persetujuan pengimporan Barang Modal dan Fasilitas Pabean diberikan oleh Ketua BKPMD Propinsi NTB atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTB berupa Surat Persetujuan Fasilitas Pabean Barang Modal yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlakunya SP PMA/PMDN. Surat Persetujuan Pabean Barang Modal ini diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(2). Prosedur Permohonan Fasilitas Bahan Baku/Penolong

- a. Investor PMA/PMDN menyampaikan berkas permohonan Fasilitas Bahan Baku/Penolong yang ditujukan kepada Cabang PT. Sucofindo dengan disertai tembusan kepada Ketua BKPMD NTB.

Berkas permohonan terdiri dari :

- Surat permohonan Fasilitas Pabean Bahan Baku/penolong;



- Isian Model IV/ Daftar Induk bahan Baku/Penolong;
  - Rekaman Surat Persetujuan (SP) PMA/PMDN dengan Perubahannya;
  - Perhitungan kebutuhan Bahan baku/Penolong yang akan diimpor untuk kebutuhan selama 2 (dua) tahun;
  - Nomer Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
  - Nomor Pakok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir.
- b. PT. Sucofindo meneliti (melakukan verifikasi) permohonan dimaksud dan hasilnya disampaikan kepada Ketua BKPMD Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- c. Setelah PT. Sucofindo melakukan verifikasi, dan hasilnya disampaikan kepada Ketua BKPMD NTB, kemudian Ketua BKPMD NTB. atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTB menerbitkan Surat Persetujuan Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong dengan dilampirkan Daftar Induk bahan Baku/Penolong dengan masa berlaku 2 (dua) tahun. Permohonan Surat Persetujuan (SP) Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong tersebut diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak perkas permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh BKPMD Propinsi NTB.

Pada tahap ini, investor yang menanamkan modalnya di Wilayah Propinsi NTB juga diwajibkan untuk mengajukan permohonan Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT) kepada BKPM, yang prosedurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Investor PMA/PMDN menyampaikan berkas permohonan APIT kepada BKPM Propinsi NTB, yang terdiri dari:
  - a). Surat Permohonan Penerbitan APIT;
  - b). Isian formulir APIT;
  - c). Kartu APIT yang telah ditandatangani oleh yang berhak dan dibubuhi stempel perusahaan;
  - d). Rekaman akte notaris terakhir mengenai susunan Direksi;
  - e). Rekaman NPWP;
  - f). Surat Kuasa di atas materai bagi penandatangan dokumen impor yang diwakilkan kepada yang berhak;
  - g). Pas Photo penandatangan dokumen APIT dengan ukuran 3 x 4 sejumlah 2 lembar;
  - h). Rekaman IKTA bagi WNA penandatangan dokumen impor.
- 2) APIT berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sejak ditetapkan selama perusahaan yang bersangkutan masih memproduksi;

- (1) Permohonan Tambahan APIT mengenai nomor, alamat dan direksi perusahaan atau yang akan dikuasakan menandatangani dokumen impor diajukan perusahaan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTB dan Ketua BKPMMD Propinsi NTB;
- (2) Permohonan APIT baru/APIT perubahan diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan APIT diterima secara lengkap dan benar oleh BKPMMD Propinsi NTB.

**(4) Tahap Empat: Permohonan Izin Usaha Tetap (IUT)**

Untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial, perusahaan penanaman modal harus telah memiliki Izin Usaha Tetap (IUT).

Adapun prosedur untuk memperoleh Ijin Usaha Tetap (IUT) di Propinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan dengan mengajukan permohonan ijin IUT yang dibuat rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir IUT oleh investor kepada BKPMMD Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bagian Kesekretariatan BKPMMD Propinsi NTB. Setelah surat permohonan diterima, Sekretariat BKPMMD akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan selanjutnya menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua BKPMMD Propinsi Nusa Tenggara Barat. Ketua BKPMMD kemudian mendisposisikan permohonan tersebut kepada

Bidang Pengawasan untuk dilakukan pengawasan di lapangan dan ditindak lanjuti dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah dibuatkan BAP, berkas permohonan beserta BAP nya kemudian diserahkan ke Bidang Perijinan untuk diproses lebih lanjut Surat Persetujuan Ijin Usaha Tetap. Setelah seluruh proses selesai, kemudian dilakukan penandatanganan Surat persetujuan Ijin Usaha Tetap (IUT) oleh Ketua BKPMD Propinsi NTB. Bagian terakhir, setelah diterbitkannya Surat Ijin Usaha Tetap tersebut, oleh Sekretariat BKPMD dikirim kepada Investor yang mengajukan permohonan. Permohonan IUT ini diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar oleh BKPMD Propinsi NTB.

#### **1. Prosedur dan Tata Cara Perizinan Investasi di Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu (BP-KAPET)**

Secara umum telah teridentifikasi bahwa biaya investasi pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih tinggi dibanding investasi pembangunan di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Hal ini disebabkan karena secara umum KTI memiliki kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana lebih rendah sehingga upaya pembangunannya memerlukan investasi yang jauh lebih mahal (*high cost investment*). Keadaan ini menyebabkan sangat sedikit investor yang mau menanamkan modalnya di KTI. Sebagai gambaran; sampai

bulan Juni 1995, KTI hanya menerima 15 % dari keseluruhan persetujuan investasi mega proyek PMDN dan hanya 9 % dari keseluruhan investasi mega proyek PMA. Oleh karena itu, guna menarik investor untuk mau menanamkan modalnya di KTI diperlukan insentif investasi yang cukup menarik.

Dalam rangka mendukung percepatan pengembangan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia melalui program KAPET Bima dan KAPET lainnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan hukum baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Keputusan-Keputusan Menteri terkait. Langkah ini ditempuh dalam rangka mendorong para pengusaha/investor baik lokal maupun asing untuk mau menanamkan modalnya di wilayah KAPET Bima. Adapun kebijakan hukum dimaksud diantaranya adalah Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor : 22/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Pengendalian Penanaman Modal di dalam KAPET Bima Kepada Ketua BP-KAPET Bima.

Di dalam Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 22/SK/1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Pengendalian Penanaman Modal di dalam kawasan KAPET Bima Kepada Ketua Badan Pengelola KAPET Bima ditentukan bahwa:

1. Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melimpahkan kewenangan penilaian atas permohonan, penerbitan dan pemberian Surat Persetujuan Penanaman Modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kepada Ketua Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP Kapet) Bima, bagi penanaman modal yang berlokasi di dalam KAPET Bima.
2. Persetujuan penanaman modal sebagaimana yang dimaksud meliputi penanaman modal baru, perluasan, dan perubahan-perubahannya serta penolakan terhadap penanaman modal.
3. Persetujuan penanaman modal dan penolakan atas permohonan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola KAPET Bima sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 adalah untuk dan atas nama Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Surat persetujuan penanaman modal dan penolakan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud, tembusannya disampaikan kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM, Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, instansi terkait dan Ketua Badan Koordinasi

- Penanaman Modal Daerah (BKPM) Propinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Pengelola KAPET Bima diberi kewenangan menerima, meminta kelengkapan data permohonan dan melakukan penilaian atas permohonan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19678 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang berlokasi di KAPET Bima.
  6. Hasil penilaian atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima, kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM untuk menyelesaikan lebih lanjut sesuai dengan tata cara permohonan penanaman modal yang berlaku, sehingga diterbitkannya Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPP Presiden) atau Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP PMA) oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM.
  7. Surat Pemeritahuan Persetujuan Presiden (SPP Presiden) dan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP PMA) disampaikan kepada pemohon melalui BP KAPET Bima.
  8. Permohonan penanaman modal baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri maupun dalam rangka penanaman Modal Asing yang berlokasi di KAPET Bima, diajukan kepada BP

KAPET Bima, dengan menggunakan bentuk permohonan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA yang berlaku.

9. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud, BP KAPET Bima berpedoman kepada Keputusan Presiden tentang Daftar Bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Bidang/Jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan Bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dari Departemen Teknis yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan.
10. Ijin-ijin pelaksanaan penanaman modal yang berlokasi di dalam KAPET Bima yang telah mendapatkan persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud, dikeluarkan oleh BP KAPET Bima atas dasar pelimpahan kewenangan.
11. Tembusan ijin pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada poin 10 disampaikan kepada Menteri Negara/Kepala BKPM, Menteri yang membina bidang usaha



penanaman modal yang bersangkutan, instansi terkait dan Ketua BKPMD Propinsi Nusa Tenggara Barat.

12. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal yang berlokasi di dalam KAPET Bima dilakukan oleh BP KAPET Bima, bersama-sama dengan BKPMD Propinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Dalam rangka melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, BP KAPET Bima berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM tentang Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang berlaku.
14. Ketua BP-KAPET Bima mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam KAPET Bima termasuk pencabutan izin-izin yang dikeluarkannya, kecuali untuk pencabutan surat Pemberitahuan Presiden untuk PMA dan Surat Persetujuan PMA.
15. BP-KAPET Bima menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang berlokasi di KAPET Bima kepada Menteri Negara Investasi/Ketua BKPM setiap 6 (enam) bulan, dan tembusan disampaikan kepada Ketua BKPMD Propinsi Nusa Tenggara Barat.

16. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas BP KAPET Bima, Menteri Negara Investasi/Ketua BKPM akan menugaskan 1 (satu) orang pejabat BKPM sebagai tenaga pembantu pada BP KAPET Bima.

### **3. Pengaruh Perubahan Kebijakan Investasi Terhadap Perkembangan Kegiatan Investasi**

Sejak diterbitkannya Keppres No. 117 tahun 1999 Tentang Prosedur dan Tata Cara Penanaman Modal, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya SK. Meninves/Kepala BKPM No. 37/SK/1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan SK. Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, maka akan memberikan peluang yang lebih besar kepada setiap daerah dalam memacu pertumbuhan investasi, sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Perubahan kebijakan investasi secara nasional khususnya berkaitan dengan Prosedur dan Tata Cara Perijinan investasi (penanaman modal) tentu memberikan pengaruh pada tingkat perkembangan investasi di daerah pada umumnya dan di Propinsi Nusa Tenggara Barat khususnya

### **3.1. Perkembangan Kegiatan Investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat.**

Guna Menjelaskan hasil penelitian yang berkaitan dengan perkembangan investasi PMA maupun PMDN di Nusa Tenggara Barat, disajikan beberapa buah data perkembangan investasi, baik sebelum berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah maupun data-data perkembangan investasi setelah berlakunya Otonomi Daerah, sebagai berikut :

#### **a. Perkembangan Investasi di Nusa Tenggara Barat Sebelum Berlaku Otonomi Daerah**

Tingkat perkembangan investasi sebelum berlakunya Otonomi Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat, disajikan satu buah data perkembangan kegiatan investasi terakhir sebelum diberlakukannya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yakni, data perkembangan investasi (penanaman modal) Tahun 1998.

Perusahaan yang melakukan investasi menggunakan fasilitas PMDN di Nusa Tenggara Barat berjumlah 83 perusahaan dengan rencana investasi Rp.2.561.23 milyar, rencana penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 23.199 orang. Tenaga Kerja Asing 240 orang. Realisasi investasi baru mencapai Rp. 732,01 milyar.

Realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 5029 orang dan Tenaga Kerja Asing 50 orang.

Perusahaan yang menggunakan fasilitas PMA berjumlah 42 perusahaan dengan rencana investasi \$ US. 3.735,492 juta. Rencana penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 8147 orang dan Tenaga Kerja Asing 362 orang. Realisasi investasi sudah mencapai \$ US. 1.414,481 juta, realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 5919 orang termasuk tenaga kerja tidak tetap dan Tenaga Kerja Asing 100 orang termasuk tenaga kerja tidak tetap.

Untuk lebih jelas tentang perkembangan investasi di Nusa Tenggara Barat Tahun 1998, dapat dilihat dalam Tabel 1, dibawah ini.

**Tabel 1: Perkembangan Investasi di NTB Tahun 1998**

No.	Fasilitas	Jmh.Pershn	Ren.Inves	Realisasi Invest	Renc .PTKI	Renc PTKA	Realisasi PTKI	Realisasi PTKA
1	PMDN	83	Rp 2.561,232 Milyar	Rp.732.005 ,828 Milyar	23.199 orang	240 Orang	5029 Orang	50 orang
2	P M A	42	\$ 3.735, 492 Juta	\$ 1.414,481 Juta	8147 Orang	362 Orang	5.919 Orang	100 Orang

**Sumber Data: BKPM Prop. Nusa Tenggara Barat**

**Keterangan:**

Fasilitas : PMA/PMDN

Jumlh Pershn : Jumlah Perusahaan

Renc, Inves : Rencana Investasi

Reaslisasi Invest : Jumlah investasi yang terealisasi dalam rupiah dan US Dollar

Renc. PTKI : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia

Renc. PTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Realisasi PTKI : Jumlah realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia

Realisasi PTKA : Jumlah realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Berdasarkan alokasi Investasi menurut sektor bidang usaha perusahaan PMDN/PMA di Nusa Tenggara Barat samapai dengan Tahun 1998, dapat dikelompokan menjadi menjadi 10 (sepuluh) sektor, yaitu :

1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan; 1 (satu) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 2,25 milyar dan realisasinya baru mencapai Rp.1,25 milyar;
2. Sektor Perikanan; 17 (tujuh belas) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 470,53 milyar, realisasinya sudah mencapai Rp. 123,29 milyar, dan 5 (lima) perusahaan PMA dengan rencana investasi \$ US. 16,28 juta dan realisasinya telah mencapai \$ US 9,24 juta;
3. Sektor Peternakan; 3 (tiga) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 53,01 milyar, realisasi mencapai 6,08 milyar dan Perusahaan PMA tidak ada;
4. Sektor Perkebunan; 2 (dua) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 15,24 milyar, realisasinya telah mencapai 13,23 milyar dan 2 (dua) perusahaan PMA dengan investasi \$ US.6.61 juta dan realisasinya mencapai \$ US. 4,14 juta;
5. Sektor Kehutanan; 1 (satu) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 1,77 milyar dan realisasinya mencapai Rp. 1.44 milyar, dan Perusahaan PMA tidak ada;

6. Sektor Pertambangan; 1 (satu) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 70 Milyar, realisasi mencapai Rp. 20 Milyar, dan 1 (satu) perusahaan PMA dengan rencana investasi \$ US. 2,275 juta, realisasi telah mencapai \$ US. 1.320,27 juta;
7. Sektor Industri; 5 (lima) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 32.721 milyar, realisasinya telah mencapai Rp. 8,40 milyar dan 4 (empat) perusahaan PMA dengan rencana investasi \$ US. 1,148 juta dan realisasinya baru mencapai \$ US. 0 (tidak ada realisasi)
8. Sektor Perhotelan; 8 (delapan) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 695.457.247 milyar, realisasi mencapai Rp. 466.909.910 dan 11 (sebelas) perusahaan PMA dengan rencana investasi \$ US .36.292 juta dan realisasinya telah mencapai \$ US. 36.661;
9. Sektor Pengangkutan; 4 (lima) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 28.844.500 milyar dan realisasi sejumlah Rp. 22..723.250 milyar; dan perusahaan PMA tidak ada;
10. Sektor Jasa Lainnya; 6 (enam) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 5.105.000 milyar, realisasinya baru mencapai Rp. 1.027.090 milyar, dan 11 (sebelas) perusahaan PMA dengan rencana investasi \$ US. 31,740 juta, dan realisasinya telah mencapai \$ US. 11.699.

Untuk lebih jelasnya, kondisi investasi yang dilakukan menurut bidang usaha oleh perusahaan PMDN maupun perusahaan PMA pada tahun 1998, dapat dilihat dalam Tabel 2.

**Tabel 2: Alokasi Investasi Menurut bidang Usaha Perusahaan PMDN/PMA Di Nusa Tenggara Barat Tahun 1998**

No.	Sektor	Perusahaan	Rencana Investasi	Realisasi Investasi
1	Pertanian Tanaman Pangan	PMDN 1	Rp. 2,25 Milyar	Rp. 1,25 M
		P.M.A -	-	-
2	Perikanan	PMDN 17	Rp. 470,53 M	Rp. 123,29 M
		PMA 5	US\$ 16,28 Juta	\$US 9,24 Juta
3	Pternakan	PMDN 3	Rp. 53,013 M	Rp. 6,08 M
		P.M.A -	-	-
4	Perkebunan	PMDN 2	Rp. 15,24 M	Rp. 13,23 M
		P.M.A 2	\$ US 6,61 Juta	\$US 4,14 Juta
5	Kehutanan	PMDN 1	Rp. 1.776 M	Rp. 1.441 M
		P.M.A -	-	-
6	Pertambangan	PMDN 1	Rp. 70 M	Rp. 20 M
		P.M.A 1	\$US. 2,28Juta	\$US. 1,32 Juta
7	Industri	PMDN 5	Rp. 32,721 M	Rp. 8,40 M
		P.M.A 4	\$US 1,148 Juta	\$ 0
8	Perhotelan	PMDN 8	Rp. 695.909 M	Rp. 36,661 M
		P.M.A 11	\$US. 36,29 Juta	\$US 36,66 Juta
9	Pengangkutan	PMDN 4	Rp. 28,844 M	Rp. 22,723 M
		P.M.A -	-	-
10	Jasa lain	PMDN 6	Rp. 5.105. M	Rp 1.027 M
		P.M.A 11	\$US. 31,740Juta	\$US. 11,67 Juta

Sumber data: BKPM Propinsi Nusa Tenggara Barat

**b. Perkembangan Investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat  
Setelah Berlaku Otonomi Daerah**

Tingkat perkembangan investasi setelah berlakunya Otonomi Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat, disajikan dua buah data yakni, perkembangan investasi Tahun 2001 dan Perkembangan investasi Tahun 2002.<sup>126</sup>

**1. Perkembangan Investasi PMA/PMDN di Propinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Desember 2001**

Perusahaan yang melakukan investasi menggunakan fasilitas PMDN di Nusa Tenggara Barat berjumlah 98 perusahaan dengan rencana investasi Rp. 3.385.38 milyar, rencana penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 25.109 orang. Tenaga Kerja Asing 259 orang. Realisasi investasi baru mencapai Rp. 828,67 milyar (24,48 %). Realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 5.296 orang (20,03 %) dan Tenaga Kerja Asing 14 orang (5,41%).

Perusahaan yang menggunakan fasilitas PMA berjumlah 84 perusahaan dengan rencana investasi \$ US. 5.206,28 juta. Rencana penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 22.095 orang dan Tenaga Kerja Asing 488 orang. Realisasi investasi sudah mencapai \$ US. 2.373,09 juta (45,58 %),

---

<sup>126</sup> Sumber Data Diperoleh Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, lihat Data Perkembangan Perusahaan PMA/PMDN tahun 2001-2002



realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 6.121 orang (27,70 %) termasuk Tenaga Kerja tidak tetap dan Tenaga Kerja Asing 218 orang (44,67 %) termasuk Tenaga Kerja tidak tetap.

Untuk lebih jelas tentang perkembangan investasi di Nusa Tenggara Barat Tahun 2001, dapat dilihat dalam Tabel 3, dibawah ini.

**Tabel 3: Perkembangan Investasi di NTB Tahun 2001**

No.	Fasilitas	Jmh.Pershn	Ren.Inves	Realisasi Invest	Renc .PTKI	Renc PTKA	Realisasi PTKI	Realisasi PTKA
1	PMDN	98	Rp3.385,38 Milyar	Rp.828,67 Milyar (24,48%)	25.109 Orang	250 Orang	5.296 Orang (20,03%)	14 (5,41%)
2	P M A	84	\$ 5.206,28 Juta	\$ 2.373,09 Juta (45,58%)	22.095 Orang	448 Orang	6.121 Orang (27,70%)	218 Orang (44,67%)

**Sumber Data: BKPM Prop. Nusa Tenggara Barat**

**Keterangan:**

Fasilitas : PMA/PMDN  
 Jumlh Pershn : Jumlah Perusahaan  
 Renc, Inves : Rencana Investasi  
 Realisasi Invest : Jumlah investasi yang terealisasi dalam rupiah dan US Dollar  
 Renc. PTKI : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia  
 Renc. PTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing  
 Realisasi PTKI : Jumlah realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia  
 Realisasi PTKA : Jumlah realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Berdasarkan alokasi Investasi menurut sektor bidang usaha perusahaan PMDN/PMA Tahun 2001 di Nusa Tenggara Barat dapat dikelompokkan menjadi menjadi 10 (sepuluh) sektor, yaitu :

1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan; 1 (satu) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 2,25 milyar dan realisasinya baru mencapai Rp. 0,125 milyar (5,61 %);

2. Sektor Perikanan; 19 (sembilan belas) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 481,71 milyar, realisasinya sudah mencapai Rp. 146,13 milyar (30,34 %), dan 5 (lima) perusahaan PMA dengan rencana investasi \$ US. 16,28 juta dan realisasinya telah mencapai \$ US 10,53 juta (64,68 %);
3. Sektor Peternakan; 3 (tiga) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 53,01 milyar, realisasi mencapai 6,06 milyar (11,43 %), dan Perusahaan PMA tidak ada;
4. Sektor Perkebunan; 4 (empat) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 35,17 milyar, realisasinya telah mencapai 14,51 milyar (41,26 %) dan 3 (tiga) perusahaan PMA dengan investasi \$ US.20,35 juta dan realisasinya mencapai \$ US. 66 juta (324,32 %);
5. Sektor Kehutanan; 1 (satu) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 1,77 milyar dan realisasinya mencapai Rp. 20,58 milyar (1.162,71 %), dan Perusahaan PMA tidak ada;
6. Sektor Pertambangan; 1 (satu) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 70 Milyar, realisasi mencapai Rp. 20 Milyar%) (28,57 %), dan 2 (dua) perusahaan PMA dengan rencana investasi \$ US. 2,275 juta, realisasi telah mencapai \$ US. 2,203,56 juta (96,86 %);

7. Sektor Industri; 13 (tiga belas) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 1.122,56 milyar, realisasinya telah mencapai Rp. 8,53 milyar (0,76 %); dan 9 (sembilan) perusahaan PMA dengan rencana investasi \$ US. 2,703,68 juta dan realisasinya baru mencapai \$ US. 0,34 Juta (0,013 %);
8. Sektor Perhotelan; 33 (tiga puluh tiga) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 1,629,310 milyar, realisasi mencapai Rp. 603,07 milyar (37,01 %), dan 33 (tiga puluh tiga) perusahaan PMA dengan rencana investasi \$ US.153,26 juta dan realisasinya telah mencapai \$ US. 57,08 juta (37,31 %);
9. Sektor Pengangkutan; 5 (lima) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 38,75 milyar dan realisasi sejumlah Rp. 23,07 milyar (59,54 %); dan perusahaan PMA tidak ada;
10. Sektor Jasa Lainnya; 18 (delapan belas) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 20,78 milyar, realisasinya baru mencapai Rp. 6,57 milyar (31,62 %), dan 32 (tiga puluh dua) perusahaan PMA dengan rencana investasi \$ US. 37,71 juta, dan realisasinya telah mencapai \$ US. 35,90 juta (95,20 %).

Untuk lebih jelasnya, mengenai perkembangan investasi berdasarkan sektor/bidang usaha sampai dengan Tahun 2001, dapat dilihat dalam Tabel 4.

**Tabel 4: Alokasi Investasi Menurut bidang Usaha Perusahaan PMDN/PMA Di Nusa Tenggara Barat Tahun 2001**

No.	Sektor	Perusahaan	Rencana Investasi	Realisasi Investasi
1	Pertanian Tanaman Pangan	PMDN 1 P.M.A -	Rp. 2,25 Milyar	Rp.0,125 M (5,61 %)
2	Perikanan	PMDN 19 PMA 5	Rp.481,71 Milyar \$ 16,28 Juta	Rp. 146,13 M (30,34%) \$ 10,53 Juta (64,68 %)
3	Peternakan	PMDN 3 P.M.A -	Rp.53, 01 M	Rp. 6,06 M (11,43 %)
4	Perkebunan	PMDN 4 P.M.A 3	Rp. 35,17 M \$ 20,35 Juta	Rp. 14,51 M (41,25 %) \$ 66 Juta (324,32 %)
5	Kehutanan	PMDN 1 P.M.A -	Rp. 1,77 M -	Rp. 20,58 M (1.162,71 %)
6	Pertambangan	PMDN 1 P.M.A 2	Rp. 70 M \$. 2,275 Juta	Rp. 20 M (28,57 %) \$. 2,203,56 (96,86 %)
7	Industri	PMDN 13 P.M.A 9	Rp. 1.122,56 M \$. 2,703,68 Juta	Rp. 8,53 M \$. 0,34(0,013%)
8	Perhotelan	PMDN 33 P.M.A 33	Rp. 1,629,310 M \$. 153,26 Juta	Rp. 603,07 M (37,01 %) \$.57,08 Juta (37,31 %)
9	Pengangkutan	PMDN 5 P.M.A -	Rp. 38,75 M -	Rp.23,07 M (59,54 %) -
10	Jasa lain	PMDN 18 P.M.A 32	Rp.20,78 M \$. 37,71 Juta	Rp.6,57 M (31,62 %) \$. 35,90 Juta (95,20 %)

Sumber data: BKPM Propinsi Nusa Tenggara Barat

Jika ditinjau dari minat Pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam rangka PMDN/PMA ternyata daerah yang paling banyak diminati dan menyerap investasi swasta adalah wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Lombok yaitu berturut-turut; Kabupaten Lombok Barat dengan 37 perusahaan PMDN dan 50 perusahaan PMA; kota Mataram dengan 14 perusahaan PMDN dan 12 perusahaan PMA; Kabupaten Lombok Tengah dengan 9 perusahaan PMDN dan 3 perusahaan PMA; Kabupaten Lombok Timur dengan dengan 11 perusahaan PMDN dan 8 perusahaan PMA.

Sedangkan untuk Kabupaten se Pulau Sumbawa didominasi oleh perusahaan PMDN yang terbanyak bergerak di sektor tambang emas, hotel, dan jasa-jasa lainnya, berturut-turut: kabupaten Sumbawawa 10 Perusahaan PMDN dan 8 Perusahaan PMA; Kabupaten Dompu dengan 9 Perusahaan PMDN dan 2 Perusahaan PMA dan kabupaten Bima dengan 2 Perusahaan PMDN dan 2 perusahaan PMA, dengan nilai investasi yang besar dan membuka lapangan pekerjaan, khususnya bagi Tenaga Kerja Indonesia.

**Tabel 5 : Jumlah perusahaan PMDN/PMA di NTB Per Kabupaten/Kota s/d Desember 2002**

No.	Perusahaan	Mataram	Kab. Looar	Kab. Loteng	Kab. Lotim	Kab. Sumabwa	Kab. Dompu	Kab. Bima
1	PMDN	14	36	9	11	10	9	2
2	P.M.A	12	50	3	8	18	2	2
	Jumlah	26	86	12	19	18	11	4

Sumber Data : BKPM Propinsi NTB

Jika dilihat dari Pelita ke Pelita hingga Propeda, bahwa perusahaan PMDN yang masuk di NTB sampai dengan semester I Tahun 2001 berjumlah 95 perusahaan dengan total investasi Rp. 3.330,11 milyar, dan pada semester ke II Tahun 2001, terjadi penambahan 3 perusahaan dengan investasi sebesar Rp. 55,27 milyar dan realisasi investasi bertambah sebesar Rp. 5,48 milyar, sehingga secara kumulatif rencana investasi PMDN berjumlah Rp. 3.385,38 milyar dan realisasi investasi sebesar Rp. 828,67 milyar (sampai dengan Desember 2001).

Sedangkan perusahaan PMA yang masuk di NTB sampai dengan semester I Tahun 2001 berjumlah 77 perusahaan dengan investasi sebesar USD.1,04 juta dan realisasi bertambah lagi sejumlah \$ US. 53 juta (sampai dengan Desember 2001). Sehingga secara kumulatif rencana investasi PMA sampai dengan semester ke II tahun 2001 berjumlah \$ US. 5.206,26 juta dan realisasi investasi menjadi sebesar \$ US. 2.373,09 juta (sampai Desember 2001).

## **2. Perkembangan Investasi PMA/PMDN di Propinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Desember 2002**

Perusahaan yang melakukan investasi menggunakan fasilitas PMDN di Nusa Tenggara Barat berjumlah 98 perusahaan dengan rencana investasi Rp. 3.434,79 milyar, rencana penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 25.112 orang. Tenaga Kerja Asing 260

orang. Investasi baru mencapai Rp. 859,79 milyar (25,03 %). Realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 4.891 orang (19,48 %) dan Tenaga Kerja Asing 15 orang (5,77%).

Perusahaan yang menggunakan fasilitas PMA berjumlah 104 perusahaan dengan rencana investasi USD. 5.619,94 juta. Rencana penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 22.911 orang dan Tenaga Kerja Asing 550 orang. Realisasi investasi sudah mencapai \$ US. 3.077,2 juta (54,76 %), realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 6.541 orang (28,55 %) termasuk Tenaga Kerja tidak tetap dan Tenaga Kerja Asing 206 orang (37,45 %) termasuk Tenaga Kerja tidak tetap. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam Tabel 6

**Tabel 6: Perkembangan Investasi di NTB Tahun 2002**

No.	Fasilitas	Jmh.Pershn	Ren.Inves	Realisasi Invest	Renc .PTKI	Renc PTKA	Realisasi PTKI	Realisasi PTKA
1	PMDN	98	Rp 3.434,79M	Rp. 859,79 Milyar (25,03%)	25.112 orang	260 Orang	4.891 orang (19,48 %)	15 orang (5,77%)
2	P M A	104	\$5.619,94 Juta	\$ 3.007,2 Juta (54,76 %)	22.911 Orang	550 orang	6.541 Orang (28,55%)	206 Orang (37,45%)

**Sumber Data: BKPM Prop. Nusa Tenggara Barat**

**Keterangan:**

Fasilitas : PMA/PMDN  
 Jumlh Pershn : Jumlah Perusahaan  
 Renc, Inves : Rencana Investasi  
 Reaslisasi Invest : Jumlah investasi yang terealisasi dalam rupiah dan US Dollar  
 Renc. PTKI : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia  
 Renc. PTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing  
 Realisasi PTKI : Jumlah realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia  
 Realisasi PTKA : Jumlah realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Berdasarkan alokasi Investasi menurut sektor bidang usaha perusahaan PMDN/PMA di Nusa Tenggara Barat Tahun 2002, dapat dikelompokkan menjadi menjadi 10 (sepuluh) sektor, yaitu :

1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan; 1 (satu) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 2,25 milyar dan realisasinya baru mencapai Rp. 0,125 milyar (5,61 %);
2. Sektor Perikanan; 19 (sembilan belas) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 481,71 milyar, realisasinya sudah mencapai Rp. 146,32 milyar (30,38 %), dan 7 (tujuh) perusahaan PMA dengan rencana investasi \$ US. 18,57 juta dan realisasinya telah mencapai \$ US 11,24 juta (60,53 %);
3. Sektor Peternakan; 3 (tiga) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 53,01 milyar, realisasi mencapai 6,06 milyar (11,43 %), dan Perusahaan PMA tidak ada;
4. Sektor Perkebunan; 4 (empat) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 35,17 milyar, realisasinya telah mencapai 14,51 milyar (41,26 %) dan 3 (tiga) perusahaan PMA dengan investasi \$ US.20,35 juta dan realisasinya mencapai \$ US. 66 juta (324,32 %);
5. Sektor Kehutanan; 1 (satu) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 1,77 milyar dan realisasinya mencapai Rp. 20,58 milyar (1.162,71 %), dan Perusahaan PMA tidak ada;



6. Sektor Pertambangan; 1 (satu) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 70 milyar, realisasi mencapai Rp. 20 milyar (28,57 %), dan 2 (dua) perusahaan PMA dengan rencana investasi \$ US. 2,275 juta, realisasi telah mencapai \$ US. 2,900,92 juta (127,51 %);
7. Sektor Industri; 13 (tiga belas) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 1.122,56 milyar, realisasinya telah mencapai Rp. 9,32 milyar (0,83 %); dan 9 (sembilan) perusahaan PMA dengan rencana investasi \$ US. 2,703,68 juta dan realisasinya baru mencapai \$ US. 0,55 (0,02 %);
8. Sektor Perhotelan; 33 (tiga puluh tiga) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 1,678,736 milyar, realisasi mencapai Rp. 632,76 milyar (37,69 %), dan 44 (empat puluh empat) perusahaan PMA dengan rencana investasi \$ US .562,02 juta dan realisasinya telah mencapai \$ US. 59,86 juta (10,658 %);
9. Sektor Pengangkutan; 5 (lima) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 38,75 milyar dan realisasi sejumlah Rp. 23,07 milyar (59,54 %); dan perusahaan PMA tidak ada;
10. Sektor Jasa Lainnya; 18 (delapan belas) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 20,78 milyar, realisasinya baru mencapai Rp. 6,97 milyar (33,54 %), dan 39 (tiga puluh sembilan)

perusahaan PMA dengan rencana investasi \$ US. 40,31 juta, dan realisasinya telah mencapai USD. 38,66 juta (95,91 %).

Untuk lebih jelasnya, perkembangan investasi menurut sektor/bidang usaha sampai dengan Tahun 2002, dapat dilihat dalam Tabel 7.

**Tabel 7: Alokasi Investasi Menurut bidang Usaha Perusahaan PMDN/PMA Di Nusa Tenggara Barat Tahun 2002**

No.	Sektor	Perusahaan	Rencana Investasi	Realisasi Investasi
1	Pertanian Tanaman Pangan	PMDN 1 P.M.A -	Rp. 2,25 Milyar -	Rp.0,125 M (5,61 %)
2	Perikanan	PMDN 19 PMA 7	Rp.481,71 Milyar \$ 18,57 Juta	Rp.146,32 M (30,38 %) \$ 11,24 Juta ( 60,53 %)
3	Peternakan	PMDN 3 P.M.A -	Rp. 53,01 M	Rp. 6,06 M ( 11,43 %)
4	Perkebunan	PMDN 4 P.M.A 3	Rp.35,17 M \$ 20,35 Juta	Rp. 14,51 M ( 41, 26 %) \$ 66 Juta ( 324,32 %)
5	Kehutanan	PMDN 1 P.M.A -	Rp.1, 77 M	Rp. 20,58 M ( 1.162,71 %)
6	Pertambangan	PMDN 1 P.M.A 2	Rp.70 M \$. 2,275 Juta	Rp. 20 M ( 28,57 %) \$.2.900,92 (127,51%)
7	Industri	PMDN 13 P.M.A 9	Rp.1,122,56 M \$. 2,703,68 Juta	Rp.9,32M (0,83 %) \$.0,55 Juta (0,02 %)
8	Perhotelan	PMDN 33 P.M.A 33	Rp.1.678,736 M \$.562,02 Juta	Rp. 632,76 M ( 37,69 %) \$ 59,86 Juta ( 10,658 %)
9	Pengangkutan	PMDN 5 P.M.A -	Rp. 38,37 M	Rp. 23,07 M ( 59,54 %)
10	Jasa lain	PMDN 18 P.M.A 39	Rp.20,78 M \$. 40,31 Juta	Rp 6,97 M ( 33,54 %) \$. 38,66 Juta (95,91 %)

Sumber data: BKPM Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jika ditinjau dari lokasi penanaman modal dalam rangka PMDN/PMA ternyata daerah yang paling banyak diminati dan menyerap investasi swasta adalah wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Lombok sebanyak 70 perusahaan PMDN dan 90 perusahaan PMA yaitu berturut-turut; Kabupaten Lombok Barat dengan 37 perusahaan PMDN dan 60 perusahaan PMA; Kota Mataram dengan 14 perusahaan PMDN dan 17 perusahaan PMA; Kabupaten Lombok Tengah dengan 9 perusahaan PMDN dan 3 perusahaan PMA; Kabupaten Lombok Timur dengan 10 perusahaan PMDN dan 10 perusahaan PMA.

Sedangkan untuk Kabupaten se Pulau Sumbawa sebanyak 28 perusahaan PMDN dan 14 perusahaan PMA yaitu berturut-turut Kabupaten Sumbawa dengan 13 (tiga belas) perusahaan PMDN dan 10 perusahaan PMA, Kabupaten Dompu dengan 11 perusahaan PMDN dan 2 perusahaan PMA dan Kabupaten Bima dengan 4 perusahaan PMDN dan 2 perusahaan PMA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 8 dibawah ini.

**Tabel 8 : Jumlah perusahaan PMDN/PMA di NTB Per Kabupaten/Kota s/d Desember 2002**

No.	Perusahaan	Mataram	Kab. Lobar	Kab. Loteng	Kab. Lotim	Kab. Sumabwa	Kab. Dompu	Kab. Bima
1	PMDN	14	37	9	10	13	11	4
2	P.M.A	17	60	3	10	10	2	2
	Jumlah	31	97	12	20	23	13	6

Sumber Data : BKPM Propinsi NTB

Jika dilihat secara komulatif sampai dengan periode 31 Desember Tahun 2002 bahwa perusahaan PMDN yang masuk di NTB sampai dengan Semester I (akhir juni) Tahun 2002 berjumlah 98 perusahaan dengan rencana investasi Rp. 3.434,79 milyar, pada semester ke II Tahun 2002 tidak terjadi penambahan SP/rencana investasi. sedangkan realisasi investasi bertambah sebesar Rp. 3,75 milyar, sehingga secara komulatif realisasi investasi sampai dengan Desember 2002 menjadi sebesar Rp. 859,74 milyar. Sedangkan perusahaan PMA yang masuk di NTB sampai dengan semester I (akhir Juni) Tahun 2002 berjumlah 95 perusahaan dengan rencana investasi sebesar \$ US.5.221,04 juta dan pada semester ke II Tahun 2002 bertambah lagi 9 perusahaan dengan rencana investasi sejumlah \$ US. 408,89 juta dan realisasi bertambah lagi sejumlah USD. 2,25 juta (sampai dengan Desember 2002).

Sehingga secara komulatif rencana investasi PMA sampai dengan semester ke II tahun 2002 berjumlah \$ US. 5.619,94 juta dan realisasi investasi menjadi sebesar \$ US. 3.077,24 juta (sampai Desember 2002).

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan 12 (dua belas) investor diketahui bahwa dengan telah terjadinya perubahan kebijakan investasi (penanaman modal), calon investor memperoleh manfaat

dan keuntungan berupa kemudahan-kemudahan dalam proses penyelesaian perijinan investasi (penanaman modal) di daerah.

### **3.2. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan Investasi di Nusa Tenggara Barat**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa kendala dalam kegiatan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan investasi di Nusa Tenggara Barat, secara umum adalah sebagai berikut :

1. Sulitnya beberapa perusahaan dalam memperoleh modal sebagai akibat adanya kebijaksanaan uang ketat dan terjadinya gejolak ekonomi yang disebabkan karena adanya dipresiasi rupiah yang memicu tingginya tingkat suku bunga bank akhir-akhir ini;
2. Beberapa perusahaan tidak lagi menunjukkan keseriusannya untuk berusaha di daerah karena menghadapi berbagai kendala intern maupun ekstern yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek, sehingga rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam feasibility studi tidak sesuai lagi dengan kenyataan pada realisasi proyek;
3. Kesulitan mendapatkan lahan strategis yang disebabkan karena tingginya harga tanah di daerah-daerah potensial khususnya di kawasan perkotaan;
4. Terdapat beberapa perusahaan yang telah mendapat persetujuan Penanam Modal, tetapi tidak membuka Kantor Cabang di

daerah, sehingga sulit dilakukan pemantauan sampai sejauh ini berkaitan dengan aktivitas yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam rangka realisasi proyek;

5. Sulitnya mendapatkan mitra usaha propesional di daerah yang disebabkan karena masih terbatasnya tingkat kemampuan menejerial dan permodalan yang dimiliki pengusaha setempat;
6. Masih kurangnya pemahaman investor tentang kebijaksanaan pemerintah dan prosedur perijinan di daerah untuk pelaksanaan kegiatan investasi;
7. Terdapat adanya beberapa pengusaha yang hanya bertujuan untuk spekulatif dengan berusaha mencari dan mendapatkan ijin dan membebaskan tanah di kawasan tertentu bukan dipergunakan untuk kepentingan usaha tetapi sengaja ditelantarkan beberapa waktu untuk menunggu kenaikan harga agar dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
8. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang menyebabkan keengganan para investor untuk menanamkan modalnya di daerah;
9. Masih kurang kondusifnya keamanan dan kenyamanan sehingga para enggan dan masih merasa khawatir untuk menanamkan modalnya di daerah.<sup>127)</sup>

---

<sup>127</sup> Sumber BKPM Propinsi Nusa Tenggara Barat, lihat Permasalahan yang dihadapi Dalam Rangka Penanaman Modal (PMA/PMDN)

Di samping terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan investasi sebagai mana tersebut di atas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala BKPD Propinsi NTB dikemukakan bahwa kendala yang masih dirasakan menghambat kegiatan investasi di NTB adalah terkait dengan sistem pelayanan perizinan investasi yang masih bersifat sektoral. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, selama ini BKPMD Propinsi hanya melaksanakan tugas-tugas koordinatif, artinya pelayanan berbagai perijinan yang mendukung kegiatan investasi dilaksanakan oleh dinas/instansi teknis yang terkait dengan sektor/bidang investasi. sehingga sistem pelayanan perizinan investasi yang bersifat satu atap (*one stop service*) sebagaimana diharapkan masih belum dapat diwujudkan. Permasalahan sistem pelayanan perizinan ini juga merupakan suatu kendala berarti dalam kegiatan investasi di NTB.

Kepala BKPM Theo F. Toemion mengakui, “salah satu pemicu memburuknya iklim investasi di Indonesia adalah adanya ego sektoral antar departemen. Hal itu tampak, misalnya, dalam pelaksanaan investasi satu atap yang kini Keppresnya mandek di Sekretariat Negara”.<sup>128)</sup>

---

<sup>128</sup> Lihat. Harian Jawa Pos, Kamis 19 Juni 2003 yang mana dikemukakan lebih lanjut oleh Theo Toemion bahwa Menko Perekonomian pernah menjanjikan Keppres tersebut selesai pada bulan Februari tahun ini. Namun, sampai sekarang, Keppres itu belum keluar. Dia menjelaskan dalam rancangan Keppres tersebut, diatur soal pelayanan penanaman modal satu atap. Baik yang dilaksanakan di pusat, propinsi, atau kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, BKPM akan melaksanakan pelayanan perizinan

## **B. Pembahasan**

### **1. Perubahan Kebijakan Investasi (Penanaman Modal) di Indonesia**

#### **1.1. Perubahan Kebijakan Investasi (penanaman modal) Sebelum Berlakunya Otonomi Daerah di Nusa Tenggara Barat**

Pembahasan mengenai perubahan Kebijakan Investasi, khususnya menyangkut tentang perubahan kebijakan investasi Pananaman Modal Asing sebelum diberlakukannya Otonomi Daerah, dapat diklasifikasikan kedalam dua perubahan yang dipandang cukup penting, yaitu Perubahan pada ketentuan kepemilikan saham dan perubahan terhadap ketentuan peralihan saham kepada pihak Indonesia. Serta, perubahan tentang jumlah minimum investasi yang dapat ditanamkan oleh perusahaan asing.

##### **a. Perubahan Ketentuan Kepemilikan Saham dan Peralihan Sahan kepada Pihak Indonesia**

Pembahasan tentang penanaman modal dan berbagai perubahan kebijakan investasi di Indonesia, terutama menyangkut beberapa perubahan penting yang berkaitan dengan ketentuan kepemilikan saham, ketantuan tentang peralihan saham kepada pihak Indonesia, dan ketentuan batas minimum investasi serta Prosedur dan Tata Cara Penanaman Modal,

---

penanaman modal yang telah ditetapkan, yakni melalui pelimpahan kewenangan dari menteri-menteri teknis terkait dengan penanaman modal. sedangkan jenis-jenis perizinan yang berdasarkan Undang Undang sektoral tidak bisa dilimpahkan, namun dilaksanakan dengan sistem pelayanan satu atap melalui penempatan pejabat-pejabat teknis terkait di BKPM.



harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanaman modal, yaitu:

1. Undang Undang Nomer 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomer 1 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2818 juncto perubahan dan tambahan berdasarkan Undang Undang Nomer 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomer 1946 Tambahan Lembaran Negara No. 2943); serta
2. Undang Undang Nomer 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomer 33, Tambahan Lembaran Negara Nomer 2583, juncto perubahan dan tambahan berdasarkan Undang Undang Nomer 12 Tahun 1970 (lembaran Negara Tahun 1970 Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Nomer 2944).

Sejak diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan berupa peraturan organik sebagai aturan pelaksanaan dari kedua undang-undang tersebut. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dalam bentuk; Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri maupun berupa Surat Keputusan Meninves/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), cenderung mengarah pada perubahan kebijakan kegiatan investasi di Indonesia.

Pada awalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan Indonesianisasi artinya bahwa, untuk investasi, khususnya Penanaman Modal Asing tidak lagi diperbolehkan melakukan penanaman modal dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) murni, di mana pihak asing menguasai/memiliki 100 % saham perusahaan. Jika pihak asing hendak melakukan investasi (menanamkan modalnya), harus dalam bentuk Perusahaan Modal Asing (PMA) patungan (*joint venture*) dengan pihak Indonesia. Selain itu, kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) atau pun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) harus memberikan porsi yang lebih banyak berpihak pada kepentingan nasional (domestik), baik dalam kepemilikan saham perusahaan maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Langkah yang ditempuh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan di bidang PMA sebagaimana disebutkan di atas, sesungguhnya lebih merupakan respon pemerintah terhadap kekhawatiran beberapa kalangan terhadap eksistensi atau keberadaan Penanaman Modal Asing yang dianggap dapat mengganggu dan dapat merugikan kepentingan nasional. Sebab, jika dicermati lebih jauh ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 ataupun Undang-Undang No. 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, tidak terdapat satu ketentuan pasal yang membatasi jumlah kepemilikan saham oleh

pihak asing dan tidak terdapat ketentuan pasal yang mengharuskan adanya usaha patungan (*joint venture*) antara pihak asing dan pihak Indonesia.

Di dalam ketentuan Pasal 23 ayat 1 UU No. 1 tahun 1967 hanya ditentukan bahwa” Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja sama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3”. Adanya kata “*dapat mengadakan kerjasama*” di dalam pasal tersebut, bukan berarti mengharuskan mengadakan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional.

Selanjutnya, dalam pasal 27 ayat 1, ditentukan: “Perusahaan tersebut pada pasal 3 (baca modal asing) yang seluruh modalnya adalah modal asing, wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif, setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbalan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Di dalam kurun waktu tahun 1980 – Tahun 1990, bersamaan dengan merosotnya harga minyak dan gas bumi di pasaran internasional, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan investasi khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) terutama berkaitan dengan kepemilikan saham perusahaan. Pada beberapa perubahan kebijakan tersebut, tampak adanya

kecenderungan yang memberikan kelonggaran kepada pihak asing. Kelonggaran yang diberikan kepada pihak asing tersebut terlihat misalnya Perusahaan PMA yang berlokasi di kawasan berikat dan mengekspor 100 % hasil produksinya dapat diberikan izin dengan penyertaan modal 50 % atau lebih tanpa adanya keharusan peningkatan saham nasional; dan bagi Perusahaan PMA yang sebagian yakni 65 % hasil produksinya (pada ketentuan sebelumnya 85 %) dan nilai investasi yang ditanamkan sebanyak 10.000.000,- US Dollar serta berlokasi di kawasan tertentu, kewajiban pengalihan saham dari pihak asing kepada pihak Indonesia, yang mana pada peraturan sebelumnya waktunya ditentukan 5 (lima) tahun menjadi, 10 (sepuluh tahun) pada peraturan yang baru. Pengalihan saham yang pada peraturan sebelumnya ditentukan 10 (sepuluh) tahun, menjadi 20 (dua puluh) tahun pada peraturan yang baru;

Sejalan dengan kondisi perekonomian yang semakin tidak menentu disebabkan oleh jatuhnya harga minyak dan gas bumi di pasaran dunia, tampaknya ketergantungan kepada pihak asing khususnya modal asing dirasakan semakin besar. Hal tersebut terlihat secara jelas dari inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam bidang PMA, yang mana pada kebijakan sebelumnya ditentukan bahwa pihak asing tidak diperbolehkan menguasai 100% saham perusahaan. Selain itu, Penanaman

Modal Asing harus dilakukan dengan usaha patungan (*joint venture*) antara pihak asing dengan pihak Indonesia (tidak boleh dengan PMA murni), Tetapi melalui Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992 yang mengatur persyaratan kepemilikan saham untuk PMA di Kawasan Indonesia Bagian Timur, investor asing diperbolehkan menguasai 100 % saham proyek (perusahaan) bagi perusahaan PMA dengan modal disetor minimal 50.000.000,- US Dollar tanpa harus menyertakan mitra nasional, kewajiban pengalihan saham kepada pihak Indonesia dilakukan 5 tahun setelah perusahaan berproduksi secara komersial dan itupun hanya disyaratkan 5 % selanjutnya ditingkatkan menjadi 20 % pada tahun ke 20. Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah, tampaknya untuk lebih menarik minat investor asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia, terutama di kawasan Bagian Timur Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tahun 1992, ternyata dalam pelaksanaanya mengalami banyak kendala, terutama berkaitan dengan ketentuan modal disetor minimal sebesar 50.000.000 US dollar dirasakan sebagai suatu persyaratan yang sangat memberatkan bagi investor asing. Jika kebijakan pemerintah yang sifatnya membatasi kebebasan investor asing ini tetap dipertahankan, maka sudah pasti akan berdampak pada menurunnya minat investor asing untuk melakukan kegiatan

investasi. Padahal, di satu sisi Indonesia sangat membutuhkan kehadiran modal asing dalam menunjang pembangunan nasional terutama pembangunan dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, PP No. 17 tahun 1992 tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1993 yang isinya memberikan kelonggaran kepemilikan saham asing pada PMA termasuk modal yang harus disediakan, juga mengurangi jenis perizinannya.

Kebutuhan akan kehadiran modal asing dalam menunjang pembangunan nasional tidak dapat di pungkiri dan sudah tidak mungkin untuk dielakkan. Kehadiran modal asing di Indonesia tidak lagi sebagai "*ornamen*" melainkan sudah cenderung menjadi "*pondamen*" pembangunan, artinya, kehadiran modal asing sangat diperlukan dan memegang peranan yang strategis. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan pembangunan dan dalam rangka mengembangkan iklim berusaha yang semakin mantap serta lebih menjamin kelangsungan investasi di Indonesia terutama PMA, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tampak lebih banyak berpihak kepada kehadiran Modal Asing. Seperti, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 yang kemudian ditindak lanjuti dengan SK. MENINVES No. 15 Tahun 1994.

Sangat perlu untuk disadari bahwa betapapun pentingnya penanaman modal, khususnya penanaman modal asing dalam mendukung upaya pembangunan, namun sesungguhnya upaya pembangunan harus dilaksanakan atas dasar kemampuan dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri. atau dengan kata lain, keberadaan penanaman modal asing dalam pembangunan hanyalah dijadikan sebagai pelengkap pembangunan, sehingga upaya pembangunan nasional tidak boleh tergantung kepada modal asing. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pertimbangan huruf (e) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing<sup>129</sup> bahwa dalam pada itu azas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi Rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri”.

#### **b. Perubahan Ketentuan Tentang Batas Minimum Investasi**

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, tidak diatur ketentuan tentang batas

---

<sup>129</sup> Lihat pada bagian Pertimbangan huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

minimum investasi yang harus ditanamkan oleh investasi (baca investor) asing di Indonesia

Barulah, pada tanggal 5 Mei 1989 pemerintah, dalam hal ini Ketua BKPM mengeluarkan Keputusan No. 09/SK/1989 tentang persyaratan investasi minimal PMA, di mana ditetapkan bahwa jumlah investasi dalam PMA minimal sebesar 250.000,- US dollar. Kemudian menyusul dikeluarkan SK Ketua 21/SK/1991 tanggal 27 Desember 1991 yang antara lain menetapkan bahwa :

1. Jumlah investasi dalam rangka PMA tidak boleh lebih kecil dari 1.000.000, US dollar;
2. Dengan persyaratan tertentu, seperti:
  - a. Padat karya dengan jumlah tenaga kerja langsung sekurang-kurangnya 50 orang;
  - b. Sekurang-kurangnya 65 % produksinya untuk di ekspor;
  - c. Menghasilkan bahan baku/penolong/barang setengah jadi/komponen untuk memenuhi kebutuhan industri lain;
  - d. Berlokasi di salah satu propinsi Bengkulu, Jambi, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Irian Jaya;

Apabila salah satu dari beberapa persyaratan di atas terpenuhi, maka Perusahaan Modal Asing dapat didirikan



dengan jumlah investasi sekurang-kurangnya 250.000,- US dollar.

3. Peserta Indonesia pada perusahaan PMA yang akan didirikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu - sebagaimana ditentukan dalam ayat (1)-, ditentukan bagi golongan ekonomi lemah dan koperasi.

Selanjutnya, pada tanggal 16 April 1992, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992 tentang persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan PMA, yang antara lain mengatur mengenai PMA di kawasan Indonesia Bagian Timur (IBT). Melalui ketentuan Peraturan Pemerintah ini, investor asing berhak menguasai 100% saham perusahaan/proyek setiap perusahaan PMA dengan modal disetor minimal 50.000.000,- US dollar, tanpa harus menyertakan mitra nasional. Peluang Indonesia memiliki saham baru diberikan pada tahun ke lima setelah produksi komersial dan itu pun hanya disyaratkan sebesar 5% dari saham proyek PMA dan selanjutnya ditingkatkan menjadi 20% pada tahun ke 20.

Maksud dikeluarkannya kebijakan yang menentukan batas minimum investasi yang boleh dilakukan oleh Perusahaan Modal Asing bertujuan untuk membatasi agar modal asing dilakukan pada usaha-usaha berskala besar dengan modal

minimal 1.000.000,- (satu juta) US Dollar atau dapat dilakukan dengan 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) US Dollar dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Selain membatasi masuknya Perusahaan Modal Asing pada bidang usaha yang berskala kecil, tujuan dari pembatasan jumlah minimum investasi pada perusahaan PMA adalah sekaligus untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan dalam rangka perlindungan kepada pengusaha nasional secara keseluruhan.

Selanjutnya, pada tanggal 29 Juli 1994 pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang dianggap sangat penting dan mendukung eksistensi PMA yakni Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 dan SK MENINVES No. 15 Tahun 1994 tersebut, oleh banyak kalangan dinilai sebagai suatu kebijakan yang liberal dan sangat berani, bahkan ada yang memandang bahwa peraturan pemerintah tersebut merupakan kebijakan yang kontroversial. Penilaian dan pandangan dari beberapa kalangan tersebut, tidak secara serta merta dapat dipersalahkan begitu saja. Sebab, jika diteliti dan di cermati secara mendalam, ternyata dalam ketentuan Peraturan pemerintah tersebut membuka dan memberikan kebebasan yang

sangat besar kepada pihak asing dalam kegiatan PMA. Dalam PP tersebut, tidak ada lagi pembatasan jumlah kepemilikan saham oleh pihak asing. Pihak asing boleh memiliki 100 % saham perusahaan; Selain itu, Pemerintah tidak lagi menentukan/mengatur kepada pihak asing dalam pengalihan saham kepada pihak Indonesia (sebab penjualan saham kepada pihak Indonesia harus berdasarkan kesepakatan); Perusahaan asing boleh masuk pada bidang-bidang yang tergolong penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dengan membentuk perusahaan patungan; tidak ada lagi batasan minimal jumlah investasi yang ditanamkan; hampir tidak ada kewajiban PMA untuk melakukan divestasi; Izin usaha untuk Perusahaan PMA diberikan selama 30 (tiga puluh) tahun sejak berproduksi komersial dan dapat diperpanjang kembali.

Jika dibandingkan beberapa kebijakan pemerintah yang mengatur tentang ketentuan batas minimum investasi di atas, terlihat adanya inkonsistensi pemerintah dalam hal tersebut. Di satu sisi, pemerintah bermaksud ingin membatasi kehadiran modal asing terutama pada bidang usaha yang berskala kecil dalam rangka memberikan perlindungan kepada pengusaha nasional dalam hal ini Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sedangkan, di sisi yang lain –demi kelangsungan pembangunan – sangat memerlukan kehadiran modal asing,

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994, sampai dengan saat ini tidak ada lagi ketentuan yang membatasi jumlah minimum maupun maksimum bagi investasi di Indonesia. Dengan kata lain, jika investor asing akan menanamkan modalnya di Indonesia, jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing ditetapkan sesuai dengan kelayakan ekonomi kegiatan usahanya. Untuk memberikan kemudahan kepada penanam modal, maka penentuan kelayakan ekonomi kegiatan usaha dan besarnya modal untuk investasi diserahkan sepenuhnya kepada penanam modal yang bersangkutan<sup>130)</sup>

## **2. Penerapan Perubahan Kebijakan Investasi Terkait dengan Prosedur dan Tata Cara Perizinan Investasi (Penanaman Modal)**

### **2.1. Penerapan Perubahan Kebijakan Investasi di Nusa Tenggara Barat**

Perubahan kebijakan investasi di tingkat nasional mempunyai pengaruh terhadap kegiatan investasi di daerah. Sebagaimana diperoleh melalui hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa perubahan kebijakan investasi lebih banyak terjadi pada investasi Penanaman Modal Asing. Selain terjadi perubahan sebagaimana

---

<sup>130</sup> Lihat Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 beserta penjelasannya.

tersebut di atas, perubahan kebijakan investasi juga terjadi pada prosedur dan tata cara perizinan investasi dan kelembagaan yang menangani kegiatan investasi.

Perubahan kebijakan investasi terkait dengan Prosedur dan Tata Cara investasi terjadi setelah diterbitkannya Keppres No. 117 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Keppres No. 97 Tahun 1993. Adapun dasar dan tujuan dikeluarkannya kebijakan tentang prosedur dan Tata Cara Penanaman Modal, tidak lain adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan investasi di Indonesia khususnya investasi yang dilakukan di daerah.

Perubahan kebijakan investasi yang terkait dengan prosedur dan tata cara penanaman modal sebagaimana ditentukan dalam Keppres No. 117 tahun 1999 ini, merupakan kebijakan yang telah lama dinantikan. Sebab, selama ini prosedur dan tata cara perizinan investasi, baik untuk kegiatan investasi di Pusat maupun di daerah harus diselesaikan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta. Sistem pelayanan kegiatan investasi yang bersifat sentralistik tersebut tentu akan berakibat pada pelayanan yang tidak efisien dan tidak jarang menyulitkan para calon investor. Sehingga, melalui Keppres No. 117 Tahun 1999 guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperbanyak pusat-pusat pelayanan investasi, Meninves/Kepala BKPM memberikan/melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan investasi dalam rangka PMDN

kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Sedangkan kewenangan pemberian persetujuan investasi dalam rangka PMA dilimpahkan Meninves/Kepala BKPM kepada Menteri Luar Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

Sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani investasi di Kabupaten dan Daerah Kota, khusus kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi diberikan pula pelimpahan wewenang pemberian izin pelaksanaan penanaman modal. Selanjutnya, untuk melaksanakan pelimpahan wewenang dalam rangka pemberian persetujuan investasi yang menggunakan fasilitas PMA dari Meninves, Menteri Luar Negeri menugaskan kepada Kepala Perwakilan RI dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua BKPM. Bagi investor yang mengajukan aplikasi melalui Perwakilan RI di luar negeri dan telah memperoleh Surat Persetujuan (SP) PMA dari Kepala Perwakilan RI, wajib mengajukan permohonan perizinan pelaksanaan investasi kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, jika investasi yang dimohonkan berlokasi di daerah.

Dengan terjadinya perubahan kebijakan prosedur dan tata cara investasi sebagaimana ditentukan dalam Keppres No. 117 Tahun 1999 yang berisi Pelimpahan kewenangan dari Meninves Kepala BKPM kepada Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Luar Negeri, maka investor/calon investor dapat mengajukan permohonan persetujuan investasi tidak hanya kepada Meninves/Kepala BKPM sebagaimana

praktek yang terjadi selama ini, melainkan dapat mengajukan permohonan persetujuan investasi kepada Perwakilan RI di luar negeri dan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Sedangkan untuk menerbitkan izin pelaksanaan investasi tidak hanya dapat dilakukan oleh Meninves/Kepala BKPM tetapi dapat diterbitkan juga oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah Propinsi melimpahkan kewenangan kepada Ketua BKPM Daerah Propinsi.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwa perubahan kebijakan investasi tidak hanya pada aspek-aspek mengenai kepemilikan saham, batas minimum investasi, jangka waktu investasi, tetapi meliputi juga prosedur dan tata cara investasi. Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, sekaligus sebagai upaya mempermudah pelayanan investasi di daerah dan di luar negeri, pemerintah telah pula melakukan perubahan terhadap fungsi dan kelembagaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Keppres No. 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres No. 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 113 Tahun 1998.

Substansi yang dipandang penting dari perubahan fungsi dan kelembagaan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana ditentukan melalui Keppres No. 120 Tahun 1999 adalah berkaitan dengan kebijakan Meninves/Kepala BKPM baik berdasarkan

kewenangannya sendiri maupun kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri-menteri yang membina bidang usaha dan Menteri lainnya, dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Selanjutnya Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua BKPMMD dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta harus tetap memperhatikan kesederhanaan, kemudahan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kegiatan investasi.

Perubahan terhadap fungsi dan kelembagaan yang menangani kegiatan investasi ini, terakhir kali diubah melalui Keputusan Presiden No. 171 tahun 1999 dengan diberi nama Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) merupakan Lembaga pemerintah Non-Departemen yang dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) mempunyai tugas membantu Presiden dalam melaksanakan pembangunan di bidang Penanaman Modal serta menyelenggarakan pembinaan, peningkatan kinerja dan lebih memberdayakan Badan Usaha Milik Negara.



Di samping dilakukan perubahan terhadap fungsi dan kelembagaan Badan Koordinasi Penanaman Modal di tingkat nasional dan guna penyesuaian terhadap perubahan tersebut serta memberikan pelayanan kegiatan investasi di daerah dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanganan investasi di daerah, pemerintah melakukan juga perubahan terhadap fungsi dan kelembagaan Badan Koordinasi penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah) melalui Keputusan Presiden No. 122 tahun 1999 tentang perubahan Keppres No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 116 Tahun 1998.

Tugas pokok dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana ditentukan dalam Keppres No. 122 Tahun 1999 adalah : Membantu Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan investasi; Memberikan persetujuan dan perizinan pelaksanaan investasi dalam rangka PMA dan PMDN di daerah sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan oleh Meninves/Kepala BKPM (sekarang BPM-BPUMN); serta Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi di daerah.

## **2.2. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Perizinan Investasi dengan Fasilitas PMA dan PMDN**

Pembahasan tentang Prosedur dan Tata Cara investasi baik menggunakan fasilitas PMA maupun PMDN mengacu pada Surat

Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

Di dalam ketentuan SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tersebut ditentukan mengenai beberapa hal yang menjadi kewajiban bagi investor untuk dapat memperoleh izin penanaman modal. Apabila calon investor akan melakukan investasi dengan menggunakan fasilitas PMDN maka calon investor yang bersangkutan (dapat dilakukan oleh : PT, CV, Firma, Koperasi, BUMN, BUMD dan/atau perorangan), wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada : Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM (sekarang BPM-PBUMN) atau kepada Ketua BKPMMD setempat di mana kegiatan investasi tersebut akan dilaksanakan dan apabila investasi yang dimohonkan izin tersebut berlokasi di dua propinsi maka permohonan diajukan kepada Meninves/kepala BKPM.

Sedangkan bagi investor yang akan melakukan investasi dengan menggunakan fasilitas PMA (dapat dilakukan oleh :Warga Negara Asing/Badan Hukum Asing dan/atau Perusahaan PMA; Warga Negara Asing/Badan Hukum Asing/ Perusahaan PMA bersama-sama dengan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia), wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada: Meninves/Kepala BKPM atau Kepala perwakilan RI di luar negeri atau dapat juga mengajukan permohonan kepada BKPMMD di tempat mana investasi akan dilaksanakan. Permohonan investasi yang diajukan oleh calon investor

terutama untuk investasi PMA, harus memperhatikan bidang-bidang usaha yang terbuka bagi Penanaman Modal Asing (Daftar Negarif Investasi).

Setelah calon investor mengajukan permohonan penanaman modal sebagaimana tersebut di atas, dan permohonan yang diajukan dipandang telah memenuhi persyaratan, maka akan diterbitkan Surat Persetujuan (SP) penanaman modal. Surat Persetujuan untuk PMDN dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi Cq. Ketua BKPM setempat. Sedangkan, Surat Persetujuan untuk investasi PMA dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, atau Menteri Luar Negeri Cq Kepala Perwakilan RI setempat, atau Gubernur Kepala Daerah Cq Ketua BKPM. Surat Persetujuan investasi yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Menteri Luar Negeri Cq. Kepala Perwakilan RI maupun oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Cq. Ketua BKPM, baik dalam rangka PMA maupun PMDN selanjutnya berlaku sebagai Izin Perinsip penanaman modal. Setelah memperoleh Surat persetujuan penanaman modal, investor harus telah merealisasikan proyek investasi dalam bentuk kegiatan nyata, baik dalam bentuk kegiatan administrasi maupun kegiatan fisik. Kegiatan administrasi, berupa: Izin lokasi, Izin Sewa Gudang (khusus bidang jasa), Surat Izin Pertambangan Daerah (SPID) atau Kuasa Pertambangan (khusus untuk usaha pertambangan); Membuka

rekening bank atas nama perusahaan; Surat Persetujuan Barang Modal dan/atau Angka Pengenal Impor terbatas (APIT) bagi perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin HO/ IUUG dan Akta Pendirian Perusahaan untuk perusahaan penyertaan modal. sedangkan kegiatan nyata dalam bentuk fisik, di antaranya adalah : Pembebasan lahan (untuk bidang industri dan untuk bidang usaha penyertaan modal/holding) sekurang kurangnya 25 % dari luas yang tercantum dalam Surat Persetujuan.

Apabila investor tidak menindak lanjuti Surat persetujuan Penanaman Modal dengan melakukan Kegiatan nyata, baik berupa kegiatan administrasi maupun kegiatan nyata sebagaimana di atas, maka dalam waktu 3 (tiga) tahun Surat Persetujuan Penanaman Modal tersebut akan batal dengan sendirinya.

Selanjutnya, setelah calon investor memperoleh Surat Persetujuan (SP) Penanaman Modal, maka untuk dapat melaksanakan kegiatan investasi, calon investor yang bersangkutan harus mengajukan permohonan Izin Pelaksanaan Investasi. Permohonan untuk mendapatkan izin dimaksud harus diajukan kepada : Meninves/kepala BKPM jika Surat Persetujuan penanaman modal dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Menteri Luar Negeri Cq. Kepala Perwakilan RI. dan/atau Ketua BKPMD bagi investor yang memperoleh Surat Persetujuan dari BKPMD setempat. Sedangkan untuk kegiatan investasi yang berlokasi di wilayah

KAPET, permohonan izin persetujuan dan izin pelaksanaan investasi diajukan dan dikeluarkan oleh Badan Pengelola (BP) KAPET setempat.

Persetujuan Fasilitas dan Izin Pelaksanaan Investasi (Penanaman Modal) yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM dan/atau BKPM, berupa: Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Fasilitas perpajakan atau Pengimporan Barang Modal; Persetujuan pemberian Fasilitas Bea Masuk atau Pengimporan Bahan Baku dan/atau bahan baku penolong (untuk keperluan industri); Persetujuan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan; Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT); Keputusan tentang Rencana penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing (RPTKA), Keputusan tentang Izin Kerja Warga Negara Asing Pendetang, Izin Usaha Tetap (IUT). Sedangkan, izin-izin pelaksanaan Investasi yang dikeluarkan oleh Daerah Kabupaten/Daerah Kota, terdiri dari : Izin Lokasi, Izin Undang Undang Gangguan (UUG/HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Prosedur dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal sebagaimana ditentukan dalam SK. Meninves No. 38 /SK/1999, selain mengatur tata cara perizinan baik dalam rangka investasi PMA maupun PMDN, mulai dari; Surat Persetujuan Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan Investasi, yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau BKPM maupun Izin-izin yang dikeluarkan oleh Daerah Kabupaten/Daerah Kota, mengatur pula Tata Cara berbagai perizinan

yang mendukung kegiatan investasi lainnya (yang secara lengkap dapat dilihat pada hasil penelitian) seperti :

1. Prosedur dan Tata Cara khusus bagi bidang usaha dan kegiatan tertentu, seperti : Prosedur dan Tata Cara Pertambangan di luar minyak dan gas bumi dalam rangka PMDN; Ketentuan khusus bagi permohonan pertambangan batu bara; ketentuan Khusus untuk permohonan Pertambangan di luar minyak dan gas bumi dalam rangka PMA; Prosedur dan Tata Cara permohonan pendirian kantor perwakilan wilayah Perusahaan Asing; Prosedur dan Tata CaraPendirian Perusahaan Penyertaan Modal;
2. Prosedur dan Tata Cara permohonan Izin Usaha Tetap (IUT);
3. Prosedur dan Tata Cara permohonan Perluasan Penanaman Modal;
4. Prosedur dan Tata Cara Perubahan Investasi: diantaranya menyangkut tentang Prosedur dan Perubahan Lokasi proyek; Prosedur dan Tata Cara Perubahan bidang Usaha dan produksi; Prosedur dan Tata CaraPerubahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Prosedur dan tata Cara Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan; Prosedur dan Tata Cara Perubahan Pemilikan Saham perusahaan PMA; Prosedur dan Tata Cara perubahan Status Perusahaan PMA menjadi PMDN; Prosedur dan Tata Cara perubahan status perusahaan PMDN atau Non PMA/PMDN menjadi perusahaan PMA; Prosedur dan Tata Cara Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek PMA/PMDN; Prosedur dan Tata Cara

Penggabungan Perusahaan (merger); Prosedur dan Tata Cara Perubahan Nama Perusahaan; Prosedur dan Tata Cara Perubahan Bentuk/Pola Kemitraan dan/atau Mitra Khusus (bagi perusahaan yang dipersyaratkan kemitraan dengan Usaha kecil);

5. Prosedur dan Tata Cara Persetujuan dan Izin Pelaksanaan Investasi, meliputi: prosedur dan Tata Pengimporan Barang Modal; Prosedur dan Tata Cara Pengimporan Bahan Baku/Penolong; Prosedur dan Tata Cara Permohonan Angka Pengenal Impor terbatas (APIT); Prosedur dan Tata Cara Permohonan Izin Kerja Terbatas Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing; Prosedur dan Tata Cara Investasi di Daerah Kawasan Berikat dan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;

### **2.3. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Perizinan Investasi PMA/PMDN di Nusa Tenggara Barat**

Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah Propinsi yang terdiri dari 6 (enam) Daerah Kabupaten, 1 (satu) Daerah Kota Madya dan 1 (satu) Daerah Kota Administratif. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, berturut-turut adalah :

1. Kabupaten Lombok Barat;
2. Kabupaten Lombok Tengah;
3. Kabupaten Lombok Timur;
4. Kabupaten Sumbawa;

5. Kabupaten Dompu;
6. Kabupaten Bima;
7. Kota Madya Mataram; dan
8. Kota Administratif Raba/Bima.

Dari keseluruhan Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah Kabupaten Bima berdasarkan Keppres No. 166 Tahun 1998, telah ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang wilayahnya selain meliputi wilayah Kabupaten Bima, termasuk juga wilayah Kabupaten Dompu. Oleh karenanya, terkait dengan pembahasan tentang Prosedur dan Tata Cara Permohonan Perizinan investasi di Nusa Tenggara Barat akan disinggung pula tentang Prosedur dan Tata Cara Permohonan Perizinan investasi di Wilayah KAPET. Namun demikian, uraian pembahasan tentang Prosedur dan Tata Cara permohonan Perizinan Investasi akan lebih dititik beratkan atau ditekankan pada pembahasan mengenai Tata Cara Permohonan Perizinan Investasi di luar wilayah KAPET yakni pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **1. Prosedur dan Tata Cara Perizinan Investasi pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi NTB.**

Setelah diterbitkannya Keppres No. 117 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993



tentang Tata Cara Penanaman Modal Dalam Pasal 1 A Keppres No.

117 Tahun 1999, ditentukan Bahwa :

- (1). Kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3), ayat (5) Huruf a, ayat (8) dan ayat (9) untuk permohonan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, dapat dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah propinsi;
- (2). Untuk Melaksanakan lebih lanjut pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

Selanjutnya, di dalam Pasal 2 Keppres No. 117 Tahun 1999

ditentukan:

- (1). Kewenangan Pemberian Persetujuan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 11 Tahun 1970, dilimpahkan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM kepada Menteri Luar Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
- (2). Khusus kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi diberikan pelimpahan wewenang pemberian perizinan pelaksanaan penanaman modal, sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani penanaman modal di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud di dalam kedua pasal dalam Keppres No. 117 tahun 1999 tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 37 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

Di dalam ketentuan Pasal 1 Kepmeninves/Kepala BKPM No. 37 Tahun 1999, menentukan:

- (1). Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Meninves/Kepala BKPM) melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
- (2). Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penanaman modal yang dilaksanakan dalam rangka undang Undang No. 1 tahun 1967 Tentang penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan undang Undang No. 11 tahun 1970 dan undang Undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1970.
- (3). Untuk melaksanakan Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden maupun Keputusan Meninver/Kepala BKPM tersebut di atas, menjadi landasan hukum yang kuat bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk memberikan Persetujuan dan Fasilitas serta menerbitkan Izin Pelaksanaan Investasi sesuai dengan Prosedur dan Tata Cara penanaman Modal sebagaimana di tentukan dalam SK. Meninves No. 38 Tahun 1999.

Berkaitan dengan Prosedur dan Tata Cara perizinan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat permohonan perizinan penanaman modal harus dilakukan melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh izin penanaman modal adalah sebagai berikut:

**Tahap Pertama : Permohonan Persetujuan Penanaman Modal**

Calon investor/investor harus mengajukan Surat Permohonan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTB Cq. Ketua BKPM Propinsi NTB dengan mengisi formulir aplikasi Model I PMA (untuk investasi PMA) dan formulir aplikasi Model I PMDN (untuk investasi PMDN)

Surat permohonan Penanaman Modal dibuat 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada BKPM Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat. Selanjutnya, bagian Kesekretariatan memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon investor. Jika telah lengkap, kemudian akan disampaikan kepada Ketua BKPM. Selanjutnya, setelah Ketua BKPM menerima permohonan investasi tersebut, kemudian akan mendisposisikan kepada Bidang Perizinan untuk selanjutnya diproses dan sekaligus dievaluasi apakah permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Buku Petunjuk Teknis Penanaman Modal. Di samping itu, diteliti juga apakah bidang usaha yang dimohon tersebut terbuka untuk penanaman modal atau tidak seperti yang termuat di dalam Keppres No. 118 Tahun 2000 yang memperbaharui Keppres sebelumnya yakni Keppres No. 96 Tahun 1998.

Selama permohonan investasi tersebut di proses oleh Bidang Perizinan, BKPMD menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan unsur-unsur yang terkait dengan bidang/kegiatan investasi yang diajukan. Misalnya investasi yang dimohonkan di bidang Industri Pariwisata, maka dalam rapat-rapat kordinasi tersebut akan diundang dan dihadiri oleh unsur-unsur dari, antara lain : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), karena menyangkut dengan persoalan Tata Ruang; Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) karena menyangkut aspek lingkungan hidup; Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena berkaitan dengan penyediaan lahan (akomodasi tanah) dan unsur-unsur terkait lainnya.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh BKPMD harus juga mengundang instansi-instansi terkait di daerah Kabupaten/Kota di mana kegiatan investasi dimaksud akan dilaksanakan. Jika, kegiatan investasi tersebut dilaksanakan secara Lintas kabupaten artinya dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota (sekurangnya dua Kabupaten/Kota), maka rapat-rapat koordinasi dihadiri oleh unsur-unsur instansi terkait dari masing-masing Kabupaten/Kota di mana investasi yang bersangkutan akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999, selengkapya, menentukan:

- (1). Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas

- Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya;
- (2). Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten/Daerah Kota;
  - (3). Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administratif mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.

Perkembangan rapat koordinasi yang membahas permohonan investasi tersebut di atas, dapat menyetujui atau pun menolak permohonan investasi jika tidak memenuhi persyaratan dan aturan-aturan yang berlaku. Apabila hasil rapat dapat menyetujui permohonan investasi, maka BKPMMD akan membuat Nota Dinas yang ditujukan dan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTB. Di dalam Nota Dinas tersebut dikemukakan hasil rapat koordinasi yang intinya permohonan investasi dapat diterima oleh semua pihak termasuk unsur masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Nota Dinas yang dibuat oleh BKPMMD, Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTB menerbitkan Surat Persetujuan yang sebelumnya telah diparaf oleh Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Surat Persetujuan dari Gubernur tersebut dijadikan sebagai dasar bagi BKPMMD Propinsi NTB untuk menerbitkan Surat Persetujuan (SP) Penanaman Modal Baru yang ditandatangani oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) atas nama Ketua BKPM, Gubernur Kepala Daerah Ub. Ketua BKPMMD. NTB.

Setelah Surat Persetujuan (PMA/PMDN) ditandatangani dan diterbitkan oleh BKPM, maka Sekretariat mengirimkan Surat Persetujuan tersebut Kepada investor yang bersangkutan. Proses permohonan ini diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan telah diterima lengkap dan benar.

Untuk prosedur dan tata cara permohonan persetujuan perluasan investasi serta prosedur dan tata cara persetujuan perubahan investasi, pada prinsipnya sama dengan prosedur dan tata cara permohonan persetujuan aplikasi baru. Hanya saja, untuk permohonan perluasan investasi menggunakan formulir model II dan harus melampirkan pula rekaman Izin Usaha Tetap. Proses penyelesaian permohonan tersebut adalah selama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh BKPM secara lengkap dan benar.

Sedangkan prosedur dan tata cara perubahan investasi menggunakan formulir sesuai dengan jenis perubahan yang dilakukan, misalnya perubahan/ perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek, menggunakan formulir Model III C, untuk penggabungan perusahaan (merger) menggunakan formulir Model III D. proses permohonan perubahan investasi diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima BKPM secara lengkap dan benar.

### **Tahap Kedua : Prosedur Permohonan Izin-izin di Daerah**

Setelah investor memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Model I dari BKPMD, langkah selanjutnya yang harus diselesaikan adalah mengajukan permohonan izin-izin di daerah yang berupa: Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Undang Undang Gangguan (sering disebut dengan Izin HO) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana lokasi investasi akan dilaksanakan. Izin-izin daerah dimaksud, sering juga dinamakan dengan izin pelaksanaan.

Adapun prosedur dan tata cara permohonan izin-izin daerah tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

- (1). Investor mengajukan permohonan izin-izin Daerah (izin lokasi, IMB, Izin HO) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di mana investasi akan dilaksanakan di lingkungan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2). Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kemudian memproses permohonan izin-izin tersebut dan setelah proses izin selesai dan diterbitkan, kemudian diserahkan kepada Pemohon (investor) dengan diberikan tembusan kepada Ketua BKPMD Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Dasar hukum dari kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan izin-izin daerah berupa izin lokasi, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin HO, di dalam lampiran

Kepmendagri No. 130 – 67 tahun 2002, di Bidang Penataan Ruang, huruf (C) mengenai pembangunan, disebutkan:<sup>131</sup> “Penyelenggaraan penataan ruang dan pengusaha investasi di dalam kawasan Kabupaten/Kota bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha”

### **Tahap Ketiga: Permohonan Persetujuan Fasilitas Pabean**

Setelah investor memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Izin-izin di daerah, untuk dapat merealisasikan proyek investasinya, investor masih harus menyelesaikan berbagai surat persetujuan pemberian fasilitas, yang sering dinamakan Fasilitas Pabean Barang Modal dan juga Fasilitas Pabean Bahan Baku/penolong.

Prosedur untuk mendapatkan Fasilitas Pabean Barang Modal dan Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong, yakni dengan mengajukan surat permohonan kepada Kantor Cabang Sucofindo dan ditembuskan kepada Ketua BKPM. Setelah menerima berkas permohonan, PT Sucofindo melakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut dan hasilnya disampaikan kepada Ketua BKPM.

Ketua BKPM Propinsi NTB atas nama Gubernur Kepala Daerah berdasarkan hasil verifikasi PT. Sucofindo, akan

---

<sup>131</sup> Lihat Surat sekretaris jendral Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. UM.01.03 –SJ/678 Tanggal 30 Agustus 2001



menerbitkan Persetujuan Pengimporan Barang Modal dan Fasilitas Pabean Bahan Baku Penolong. Fasilitas Pabean Barang Modal dan Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong dengan lampiran Daftar Induk Barang Modal mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlakunya Surat persetujuan PMA/PMDN.

#### **Tahap Keempat : Permohonan Izin Usaha Tetap (IUT)**

Untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial, perusahaan penanaman modal harus telah memiliki Izin Usaha Tetap (IUT).

Adapun prosedur untuk memperoleh Izin Usaha Tetap (IUT) di Propinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan dengan mengajukan permohonan izin IUT yang dibut rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir IUT oleh investor kepada BKPM Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bagian Kesekretariatan BKPM Propinsi NTB. Setelah surat permohonan diterima, Sekretariat BKPM akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan selanjutnya menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua BKPM Propinsi Nusa Tenggara Barat. Ketua BKPM kemudian mendisposisikan permohonan tersebut kepada Bidang Pengawasan untuk dilakukan pengawasan di lapangan dan ditindak lanjuti dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah dibuatkan BAP, berkas permohonan beserta BAP nya kemudian diserahkan ke Bidang Perizinan untuk diproses lebih lanjut Surat Persetujuan Izin

Usaha Tetap. Setelah seluruh proses selesai, kemudian dilakukan penandatanganan Surat persetujuan Izin Usaha tetap oleh Ketua BKPMD Propinsi NTB. Bagian terakhir, setelah diterbitkannya Surat Izin Usaha Tetap tersebut, oleh Sekretariat BKPMD dikirim kepada Investor yang mengajukan permohonan.

Jika diperhatikan secara seksama prosedur dan Tata Cara Penanaman Modal baik dalam rangka PMA maupun PMDN sebagaimana diatur dan ditentukan dalam SK Meninves No. 38 Tahun 1999 dan Tata Cara serta prosedur perizinan penanaman modal di Propinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan cukup sederhana dan tidak terlalu rumit. Sebab, seluruh proses perizinan yang mana diselesaikan melalui empat tahapan sebagaimana disebutkan di atas, tidak menghabiskan waktu yang terlalu lama. Tetapi yang sering terjadi dalam praktek justru sebaliknya, di mana proses penyelesaian perizinan investasi di daerah bisa memakan waktu berbulan-bulan. Kenyataan ini tidak jarang menjadi keluhan dari calon investor. Salah satu faktor yang menyebabkan penyelesaian perizinan investasi menjadi lama adalah belum dilaksanakan/diterapkan sistem pelayanan satu atap (*one stop service*).

Perlu diketengahkan di dalam pembahasan ini bahwa, diterbitkannya Keppres No. 117 Tahun 1999 yang kemudian ditindak lanjuti dengan SK MENINVES No. 37/ SK/ 1999 dan SK

Meninves No. 38/SK/1999 merupakan suatu upaya reformasi di bidang perizinan investasi. Maksudnya tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan dan mempercepat pelayanan investasi baik dalam rangka PMDN maupun PMA serta sekaligus untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa:

- (1). Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9;
- (2). Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, koperasi dan tenaga kerja.

Di dalam penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Undang Undang No. 22 Tahun 1999, dinyatakan bahwa:” dengan diberlakukannya undang-undang ini, pada dasarnya seluruh kewenangan sudah pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Oleh karena itu penyerahan kewenangan tidak perlu dilakukan secara aktif, tetapi dilakukan melalui pengakuan oleh pemerintah”

Sebagai tindak lanjut ketentuan penjelasan pasal 11 Ayat (1) Undang Undang No. 22 tahun 1999 dan ditindak lanjuti dengan Keppres Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130 – 67 Tahun 2002

Tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Jika ketentuan Pasal 11 ayat (1) beserta penjelasannya, dikaitkan juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130 – 67 Tahun 2002 di atas, maka Daerah Kabupaten/Kota sesungguhnya mempunyai kewenangan secara otonom untuk menyelenggarakan beberapa bidang pemerintahan (selain kewenangan yang dikecualikan untuk bidang-bidang pemerintahan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7), Salah satu dari beberapa kewenangan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota meliputi Bidang Penanaman Modal (Investasi).

Sesuai dengan Kepmendagri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tanggal 20 Februari 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota di bidang Penanaman Modal, berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional, BKPM Nomor : S – 35/DU5-BKPM/2001 Tanggal 24 April 2001, pengakuan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam bidang Penanaman Modal, tidak hanya terbatas pada bidang perizinan penanaman modal, tetapi meliputi kewenangan di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal sampai pada kewenangan pengendalian penanaman modal serta sistem informasi penanaman modal.

Di Bidang Kebijakan dan perencanaan Pengembangan penanaman modal, kewenangan Pemerintah kabupaten/Kota meliputi :

- a. Identifikasi potensi sumber daya Daerah Kabupaten/Kota yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi Daerah Kabupaten/Kota dan petunjuk (direktori) tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan;
- b. Identifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil, menengah dan besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan;
- c. Penyusunan program pengembangan penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Rencana Strategis Daerah (Renstrada) sesuai dengan Program pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten/Kota;
- d. Penetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Daftar Bidang-Bidang Usaha Unggulan/Prioritas;
- e. Penyiapan usaha bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA dan bidang-bidang usaha unggulan/Prioritas;
- f. Penyusunan propil-propil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;
- g. Penyusunan profil-profil investasi proyek kemitraan;

- h. Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah Kabupaten/Kota;
- i. Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah;
- j. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah Pusat dan Propinsi

Selain kewenangan di bidang kebijakan dan perencanaan penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Kota juga mempunyai kewenangan untuk melakukan promosi dan kerjasama baik dalam lingkup regional di kawasan ASEAN maupun promosi dan kerjasama penanaman modal yang lebih luas yang berskala internasional. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal dimaksud, berdasarkan Surat Edaran mendagri No. 130 – 67 Tahun 2002, meliputi:

- a. Penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik dalam maupun di luar negeri, seperti seminar, pameran, temu usaha dan lokakarya;
- b. Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak, antara lain: daftar peluang usaha dan propil proyek unggulan/prioritas, propil pengusaha daerah yang

potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal, dan dalam bentuk media elektronik, antara lain film, video, slide, CD ROOM, dan multimedia/Situs web;

- c. Kerjasama dengan propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- d. Pelaksanaan forum temu usaha dan penjadwalan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan;
- e. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. Pengiriman misi penanaman modal ke daerah lain dan ke luar negeri;
- g. Penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain atau dari luar negeri;
- h. Pelaksanaan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat;
- i. Penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama sub-regional di bidang penanaman modal seperti kerjasama *Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle (IMS-GT)*, *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*, *Brunei darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)*, dan *Australia-Indonesia Development Area (AIDA)*.

- j. Pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri di bidang penanaman modal kepada aparaturnya dan dunia usaha;
- k. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal yang belum ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi.

Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan promosi dan kerjasama internasional, baik di tingkat regional seperti ASEAN maupun di tingkat internasional, selain untuk mempromosikan dan mengembangkan potensi-potensi daerah di tingkat internasional, sekaligus juga untuk mengantisipasi era globalisasi dengan diberlakukannya perdagangan bebas sesuai dengan *World Trading Organization* (WTO) maupun AFTA

Di Bidang Pelayanan perizinan penanaman modal, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha/proyek selain yang menjadi kewenangan Propinsi dan Pusat;
- b. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;



- c. Pemberian perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi :
- 1). Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT);
  - 2). Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (IKTA) berdasarkan visa untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang keimigrasian;
  - 3). Izin Usaha Tetap /Izin Usaha Perluasan;
  - 4). Izin Lokasi;
  - 5). Sertifikat Hak-hak Atas Tanah;
  - 6). Izin Mendirikan Bangunan;
  - 7). Izin Undang-Undang Gangguan (HO).
- d. Pemberian perizinan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) khusus bagi tenaga kerja warga negara asing yang bekerja hanya pada 1 (satu) Kabupaten /Kota, angka 4), angka 5), angka 6), dan angka 7) berlaku juga untuk perusahaan PMA dan Perusahaan PMDN yang surat persetujuannya di keluarkan oleh Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM);
- e. Pemberian insentif khusus penanaman modal yang menjadi kewenangannya;
- f. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pelayanan perizinan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang

tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi.

Sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bidang Pengendalian Penanaman Modal, meliputi:

- a. Pemantauan perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang berada di wilayahnya;
- b. Pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal yang berada di wilayahnya;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya;
- d. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota;
- e. Penyelesaian permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal yang berada di wilayahnya;
- f. Penyusunan laporan perkembangan seluruh persetujuan dan realisasi penanaman modal di daerahnya secara berkala;
- g. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pengendalian penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah Pusat.

Selain beberapa kewenangan sebagaimana telah disebutkan, Pemerintah Kabupaten/Kota masih memiliki kewenangan yang

berkaitan dengan sistem informasi penanaman modal. Di Bidang sistem informasi penanaman modal, meliputi:

- a. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM);
- b. Pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi proyek PMDN dan PMA;
- c. Pemutakhiran data dan informasi penanaman modal daerah.

Jika diperhatikan, kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tanggal 20 Februari 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota di bidang Penanaman Modal tersebut diatas, ternyata kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bidang investasi cukup luas, tidak hanya terbatas pada Bidang pelayanan pemberian perizinan saja. Tetapi meliputi juga bidang-bidang Kebijakan perencanaan Pengembangan Penanaman Modal, bidang promosi dan kerjasama internasional, bidang pengendalian penanaman modal, serta bidang sistem informasi penanaman modal.

Dengan demikian, daerah mempunyai kewenangan untuk membuat perencanaan pengembangan penanaman modal di daerah

melalui kebijakan-kebijakan di daerah sepanjang tidak bertentangan kebijakan penanaman modal secara nasional.

Dalam konteks sistem perundang-undangan, kewenangan daerah untuk membuat peraturan perundang-undangan, tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan ataupun keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional, karena peraturan perundang-undangan di tingkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan kepentingan umum. Dalam rumusan ketentuan Pasal 70 UU No. 22 Tahun 1999 dengan tegas disebutkan bahwa “Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”<sup>132</sup>)

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam hasil penelitian bahwa, prosedur dan tata cara investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat, baik untuk investasi Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri, pelaksanaan dan penyelesaian perizinannya masih ditangani oleh BKPMD Propinsi NTB dan

---

<sup>132</sup> Lihat Undang Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh masing-masing Daerah Kabupaten/Kota, meskipun di Daerah Kabupaten/Kota telah dibentuk badan yang secara khusus menangani kegiatan investasi dan telah pula ada pengakuan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah di utarakan secara terperinci, khususnya dalam bidang penanaman modal seperti tersebut di atas.

Dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara Barat setelah Otonomi Daerah diberlakukan secara efektif, hanya satu kabupaten yang telah melaksanakan/mengeluarkan perizinan investasi yakni Kabupaten Lombok Tengah, itu pun baru hanya mengeluarkan satu buah perizinan untuk investasi PMDN di bidang usaha air minum dalam kemasan atas nama PT. Naga Hijau.<sup>133</sup>

Belum dilaksanakanya kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagaimana pengakuan kewenangan khususnya dalam bidang penanaman modal di atas, disebabkan karena masing-masing atau sebagian besar pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat tidak proaktif dan kurang mempunyai inisiatif untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana telah dimiliki dan diakui tersebut. Sehingga, khususnya pelayanan perizinan penanaman modal di Propinsi Nusa Tenggara Barat

---

<sup>133</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubsi Perizinan Investasi baru dan Perubahan Investasi. Kantor Badan Penanaman Modal Propinsi Nusa Tenggara Barat

masih diselenggarakan oleh badan Koordinasi penanaman Modal Daerah Propinsi.

## **2. Prosedur dan Tata Cara Perizinan Investasi di Wilayah KAPET Bima**

Dalam rangka mendukung percepatan pengembangan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Keppres No. 166 tahun 1998 wilayah Kabupaten Bima yang meliputi wilayah Babupaten Dompu, telah ditetapkan sebagai wilayah Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET).

Pemerintah (pusat) telah mengeluarkan beberapa kebijakan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Keputusan-Keputusan Menteri terkait, dalam rangka mendorong para pengusaha/investor baik lokal maupun asing agar mau menanamkan modalnya di wilayah KAPET Bima.

Adapun kebijakan dimaksud diantaranya adalah Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor : 22/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Pengendalian Penanaman Modal di dalam KAPET Bima Kepada Ketua BP-KAPET Bima.

Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Pengendalian Penanaman Modal di dalam wilayah

KAPET Bima Kepada Ketua Badan Pengelola KAPET dengan demikian Prosedur dan Tatacara Perizinan investasi di wilayah KAPET berbeda dengan Prosedur dan Tata Cara Perizinan investasi di BKPM Propinsi NTB.

Adapun Prosedur dan Tata Cara Perizinan investasi di wilayah KAPET Bima, adalah sebagai berikut:

Calon investor/investor harus mengajukan surat permohonan penanaman modal baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri maupun dalam rangka penanaman Modal Asing yang berlokasi kepada Ketua Badan Pengelola KAPET Bima, dengan menggunakan bentuk permohonan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka PMDN dan PMA .

Badan Pengelola KAPET melakukan penelitian terhadap permohonan dimaksud menyangkut kelengkapan data permohonan dan melakukan penilaian atas permohonan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang di ajukan oleh calon investor. Penelitian dan penilaian permohonan berpedoman kepada Keputusan Presiden tentang Daftar Bidang-Bidang Usaha Yang

Tertutup Bagi Penanaman Modal, Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar dengan syarat Kemitraan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dari Departemen Teknis yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan.

Apabila permohonan penanaman modal dinilai telah memenuhi persyaratan, maka Ketua BP KAPET atas nama Menteri Investasi/Kepala BKPM menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal, dan disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima, kepada pemohon yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM, menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, instansi terkait dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Persetujuan penanaman modal sebagaimana yang dimaksud meliputi penanaman modal baru, perluasan, dan perubahan-perubahannya serta penolakan terhadap penanaman modal.

Sebagai tindak lanjut dari Persetujuan Penanaman Modal baik dalam rangka PMA maupun PMDN sebagaimana tersebut di atas, Badan pengelola (BP) KAPET menerbitkan Izin-izin



pelaksanaan penanaman modal yang berlokasi di dalam KAPET Bima atas dasar pelimpahan kewenangan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM. Izin pelaksanaan penanaman modal dimaksud, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara/Kepala BKPM, menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, instansi terkait dan Ketua BKPMD Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Selain pelimpahan kewenangan dalam bidang perizinan, Menteri Investasi/Kepala BKPM juga melimpahkan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal yang berlokasi di dalam KAPET Bima, dan dilakukan oleh BP KAPET Bima, bersama-sama dengan BKPMD Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, BP KAPET Bima berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM tentang Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang berlaku.

Sebagai konsekwensi dari pelimpahan wewenang pengawasan dan evaluasi kegiatan investasi tersebut, Ketua BP-KAPET Bima mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam KAPET

Bima termasuk pencabutan izin-izin yang dikeluarkannya, kecuali untuk pencabutan surat Pemberitahuan Presiden untuk PMA dan Surat Persetujuan PMA.

BP-KAPET Bima menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang berlokasi di KAPET Bima kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM setiap 6 (enam) bulan, dan tembusan disampaikan kepada Ketua BKPMD Propinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas BP KAPET Bima, Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM menugaskan 1 (satu) orang pejabat BKPM sebagai tenaga pembantu pada BP KAPET Bima.

### **3. Analisis Terhadap Pengaruh Perubahan Kebijakan Investasi Terhadap Perkembangan Kegiatan Investasi**

#### **3.1. Tingkat Perkembangan Investasi di Nusa Tenggara Barat**

##### **a. Perkembangan Kegiatan Investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat Sebelum dan Setelah berlaku Otonomi Daerah**

Jika di perbandingkan kondisi perkembangan kegiatan investasi sebelum berlakunya Otonomi Daerah dan perkembangan kegiatan investasi setelah diberlakukannya Otonomi Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat, ternyata menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi (signifikan).

Sebelum diberlakukannya Otonomi Daerah, berdasarkan data perkembangan terakhir investasi Tahun 1998, jumlah

perusahaan yang melakukan investasi dengan fasilitas PMDN sebanyak 83 perusahaan, dengan rencana investasi sebesar Rp. 2.561,23 milyar, rencana penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 23.199 orang. Tenaga Kerja Asing 240 orang. Realisasi investasi baru mencapai Rp. 732,01 milyar. Realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 5029 orang dan Tenaga Kerja Asing 50 orang.

Perusahaan yang menggunakan fasilitas PMA berjumlah 42 perusahaan dengan rencana investasi USD. 3.735,492 juta. Rencana penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 8147 orang dan Tenaga Kerja Asing 362 orang. Realisasi investasi sudah mencapai USD. 1.414,481 juta, realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 5919 orang termasuk Tenaga Kerja tidak tetap dan Tenaga Kerja Asing 100 orang termasuk Tenaga Kerja tidak tetap.

Sedangkan, pada awal diberlakukannya Otonomi Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan data perkembangan investasi (penanaman modal) Tahun 2001, diketahui bahwa:

Perusahaan yang melakukan investasi menggunakan fasilitas PMDN di Nusa Tenggara Barat berjumlah 98 perusahaan dengan rencana investasi Rp. 3.385.38 milyar, rencana penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 25.109 orang. Tenaga Kerja Asing 259 orang. Realisasi investasi baru mencapai Rp. 828,67 milyar (24,48 %). Realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 5.296 orang (20,03 %) dan Tenaga Kerja Asing 14 orang (5,41%).

Perusahaan yang menggunakan fasilitas PMA berjumlah 84 perusahaan dengan rencana investasi USD. 5.206,28 juta. Rencana penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 22.095 orang dan Tenaga Kerja Asing 488 orang. Realisasi investasi sudah mencapai USD. 2.373,09 juta (45,58 %), realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 6.121 orang (27,70 %) termasuk Tenaga Kerja tidak tetap dan Tenaga Kerja Asing 218 orang (44,67 %) termasuk Tenaga Kerja tidak tetap.

Dengan demikian, terjadi peningkatan pada:

1. Jumlah perusahaan yang melakukan investasi yang menggunakan fasilitas PMDN sebanyak 15 perusahaan dan perusahaan dengan Fasilitas PMA sebanyak 42 perusahaan;
2. Jumlah rencana investasi untuk perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN, sejumlah Rp. 824,15 milyar, dan perusahaan dengan fasilitas PMA sejumlah \$US. 1,470,79 juta;
3. Jumlah realisasi investasi, untuk perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN, sejumlah Rp. 96,66 milyar, dan perusahaan dengan fasilitas PMA sejumlah \$US. 958,61 juta;
4. Rencana penggunaan Tenaga Kerja Indonesia, untuk perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN sebanyak 1910 orang, dan perusahaan dengan fasilitas PMA sebanyak 13.948 orang;

5. Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing, untuk perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN sebanyak 19 orang dan perusahaan dengan fasilitas PMA sebanyak 86 orang;
6. Realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia, untuk perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN sebanyak 267 orang dan perusahaan dengan fasilitas PMA sebanyak 202 orang;
7. Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN mengalami penurunan sebanyak 36 orang dan perusahaan dengan fasilitas PMA terdapat peningkatan sebanyak 118 orang.

Untuk lebih jelasnya, jumlah perkembangan investasi sebelum dan setelah diberlakukannya Otonomi Daerah di Propinsi Nusa tenggara barat, dapat dilihat dalam Tabel 9, dibawah ini:

**Tabel 9 : Tingkat Perkembangan Investasi sebelum dan setelah diberlakukannya Otonomi Daerah di Propinsi NTB.**

No.	Perkembangan	Fasilitas	Th. 1998	Th. 2001	Jumlah
1	Jumlah Perusahaan	PMDN	83	98	15
		PMA	42	84	42
2.	Renvana Investasi	PMDN	Rp.2.561,23 M	Rp. 3.385,38 M	Rp. 824,15 M
		PMA	\$US.3.735,49 J t	\$US.5.206,28 J t	\$US.1.470,79 Jt
3.	Realisasi Investasi	PMDN	Rp. 732,01 M	Rp. 828,67 M	Rp. 96,66 M
		PMA	\$US. 1.414,48 Jt	\$US.2.373,04 J t	\$US. 958,61 Jt
4	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia	PMDN	23.199 orang	25.109 orang	1.910 orang
		PMA	8.147 orang	22.095 orang	13.948 orang
5.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	PMDN	240 orang	259 orang	19 orang
		PMA	362 orang	448 orang	86 orang
6.	Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia	PMDN	5.29 Orang	5.296 orang	267 orang
		PMA	5.919 orang	6.121 orang	202 orang
7.	Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	PMDN	50 orang	14 orang	- 36
		PMA	100 orang	218 orang	118 orang

Data: diolah

**b. Tingkat Perkembangan investasi menurut sektor bidang usaha Perusahaan PMA/PMDN sebelum dan setelah berlakunya Otonomi Daerah.**

Sebelum diberlakukannya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, data investasi berdasarkan alokasi Investasi menurut sektor bidang usaha perusahaan PMDN/PMA di Nusa Tenggara Barat samapai dengan Tahun 1998, dapat dikelompokkan menjadi menjadi 10 (sepuluh) sektor, yaitu :

1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan; 1 (satu) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 2,25 milyar dan realisasinya baru mencapai Rp.1,25 milyar;
2. Sektor Perikanan; 17 (tujuh belas) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 470,53 milyar, realisasinya sudah mencapai Rp. 123,29 milyar, dan 5 (lima) perusahaan PMA dengan rencana investasi USD. 16,28 juta dan realisasinya telah mencapai USD 9,24 juta;
3. Sektor Peternakan; 3 (tiga) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 53,01 milyar, realisasi mencapai 6,08 milyar dan Perusahaan PMA tidak ada;
4. Sektor Perkebunan; 2 (dua) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 15,24 milyar, realisasinya telah mencapai 13,23 milyar dan 2 (dua) perusahaan PMA dengan investasi USD.6.61 juta dan realisasinya mencapai USD. 4,14 juta;
5. Sektor Kehutanan; 1 (satu) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 1,77 milyar dan realisasinya mencapai Rp. 1.44 milyar, dan Perusahaan PMA tidak ada;
6. Sektor Pertambangan; 1 (satu) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 70 Milyar, realisasi mencapai Rp. 20 Milyar, dan 1 (satu) perusahaan PMA dengan rencana investasi USD. 2,275 juta, realisasi telah mencapai USD. 1.320,27 juta;

7. Sektor Industri; 5 (lima) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 32.721 milyar, realisasinya telah mencapai Rp. 8,40 milyar dan 4 (empat) perusahaan PMA dengan rencana investasi USD. 1,148 juta dan realisasinya baru mencapai USD. 0;
8. Sektor Perhotelan; 8 (delapan) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 695.457.247 milyar, realisasi mencapai Rp. 466.909.910 dan 11 (sebelas) perusahaan PMA dengan rencana investasi USD.36.292 juta dan realisasinya telah mencapai USD. 36.661;
9. Sektor Pengangkutan; 4 (lima) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 28.844.500 milyar dan realisasi sejumlah Rp. 22.723.250 milyar; dan perusahaan PMA tidak ada;
10. Sektor Jasa Lainnya; 6 (enam) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 5.105.000 milyar, realisasinya baru mencapai Rp. 1.027.090 milyar, dan 11 (sebelas) perusahaan PMA dengan rencana investasi USD. 31,740 juta, dan realisasinya telah mencapai USD. 11.699.

Sedangkan pada awal diberlakukannya Otonomi Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan data perkembangan investasi (penanaman modal), berdasarkan alokasi Investasi menurut sektor bidang usaha perusahaan PMDN/PMA Tahun 2001 di Nusa



Tenggara Barat dapat dikelompokkan menjadi menjadi 10 (sepuluh) sektor, yaitu :

1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan; 1 (satu) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 2,25 milyar dan realisasinya baru mencapai Rp. 0,125 milyar (5,61 %);
2. Sektor Perikanan; 19 (sembilan belas) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 481,71 milyar, realisasinya sudah mencapai Rp. 146,13 milyar (30,34 %), dan 5 (lima) perusahaan PMA dengan rencana investasi USD. 16,28 juta dan realisasinya telah mencapai USD 10,53 juta (64,68 %);
3. Sektor Peternakan; 3 (tiga) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 53,01 milyar, realisasi mencapai 6,06 milyar (11,43 %), dan Perusahaan PMA tidak ada;
4. Sektor Perkebunan; 4 (empat) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 35,17 milyar, realisasinya telah mencapai 14,51 milyar (41,26 %) dan 3 (tiga) perusahaan PMA dengan investasi USD.20,35 juta dan realisasinya mencapai USD. 66 juta (324,32 %);
5. Sektor Kehutanan; 1 (satu) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 1,77 milyar dan realisasinya mencapai Rp. 20,58 milyar (1.162,71 %), dan Perusahaan PMA tidak ada;
6. Sektor Pertambangan; 1 (satu) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 70 Milyar, realisasi mencapai Rp. 20 Milyar%) (28,57

- %), dan 2 (dua) perusahaan PMA dengan rencana investasi USD. 2,275 juta, realisasi telah mencapai USD. 2,203,56 juta (96,86 %);
7. Sektor Industri; 13 (tiga belas) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 1.122,56 milyar, realisasinya telah mencapai Rp. 8,53 milyar (0,76 %); dan 9 (sembilan) perusahaan PMA dengan rencana investasi USD. 2,703,68 juta dan realisasinya baru mencapai USD. 0,34 Juta (0,013 %);
8. Sektor Perhotelan; 33 (tiga puluh tiga) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 1,629,310 milyar, realisasi mencapai Rp. 603,07 milyar (37,01 %), dan 33 (tiga puluh tiga) perusahaan PMA dengan rencana investasi USD. 153,26 juta dan realisasinya telah mencapai USD. 57,08 juta (37,31 %);
9. Sektor Pengangkutan; 5 (lima) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 38,75 milyar dan realisasi sejumlah Rp. 23,07 milyar (59,54 %); dan perusahaan PMA tidak ada;
10. Sektor Jasa Lainnya; 18 (delapan belas) perusahaan PMDN dengan rencana investasi Rp. 20,78 milyar, realisasinya baru mencapai Rp. 6,57 milyar (31,62 %), dan 32 (tiga puluh dua) perusahaan PMA dengan rencana investasi USD. 37,71 juta, dan realisasinya telah mencapai USD. 35,90 juta (95,20 %).

Jika data tentang tingkat perkembangan investasi menurut sektor dan bidang usaha sebelum diberlakukannya Otonomi Daerah, dibandingkan dengan data investasi menurut bidang usaha

dan sektor setelah diberlakukannya Otonomi Daerah, maka dapat diketahui perkembangan sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan: tidak mengalami peningkatan;
2. Sektor perikanan: terdapat peningkatan 2 (dua) buah perusahaan PMDN dan terjadi peningkatan pula pada: baik rencana investasi sebesar Rp. 11,18 milyar dan realisasi investasi sebesar Rp. 32,04 milyar. Sedangkan untuk perusahaan PMA, tidak terjadi peningkatan baik pada jumlah perusahaan dan rencana investasi, tetapi terjadi peningkatan pada realisasi ivestasi sebesar \$US 1,29 juta;
3. Sektor Peternakan: tidak terjadi peningkatan baik pada jumlah perusahaan maupun rencana investasi, justru terjadi penurunan pada realisasi investasi sebesar Rp. 0,02 milyar;
4. Sektor Perkebunan: terjadi peningkatan pada jumlah perusahaan sebanyak 2 (dua) perusahaan PMDN dengan peningkatan rencana investasi sebesar Rp. 19,93 milyar dan peningkatan pada realisasi investasi sebesar Rp. 1,28 milyar. Sedangkan untuk perusahaan PMA terjadi peningkatan jumlah perusahaan sebanyak 1 (satu) perusahaan dan peningkatan pada rencana investasi sebesar \$US 13,74 juta, serta peningkatan pada realisasi investasi sebesar \$US, 61,68 juta;

5. Sektor Kehutanan: tidak terjadi peningkatan baik pada jumlah perusahaan maupun pada rencana investasi, tetapi terjadi peningkatan pada realisasi jumlah investasi sebesar Rp 5,59 milyar;
6. Sektor Pertambangan: tidak terjadi peningkatan pada; baik jumlah perusahaan PMDN maupun rencana investasi dan realisasi investasi. Tetapi terjadi peningkatan pada jumlah perusahaan PMA sebanyak 1 (satu) perusahaan dan peningkatan realisasi investasi sebesar \$US. 0,88 juta;
7. Sektor Industri: terjadi peningkatan pada jumlah perusahaan PMDN sebanyak 8 (delapan) perusahaan dengan peningkatan rencana investasi sebesar Rp. 79,54 milyar dan peningkatan realisasi investasi sebesar Rp. 0,13 milyar. Sedangkan pada perusahaan PMA, terjadi peningkatan sebanyak 5 (lima) perusahaan dengan peningkatan rencana investasi sebesar \$US. 1,56 dan peningkatan realisasi investasi sebesar \$US. 0,34 juta;
8. Sektor Perhotelan: terjadi peningkatan pada jumlah perusahaan PMDN sebanyak 25 (dua puluh lima) perusahaan dengan peningkatan rencana jumlah investasi sebesar Rp. 933,40 milyar dan peningkatan realisasi investasi sebesar Rp. 566,46 milyar. Sedangkan, untuk perusahaan PMA terjadi peningkatan jumlah perusahaan sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan, dengan peningkatan rencana investasi sebesar \$US. 26,67 juta

dan peningkatan realisasi jumlah investasi sebesar \$US. 20,42 juta;

9. Sektor Pengangkutan: terjadi peningkatan pada jumlah perusahaan PMDN sebanyak 1 (satu) perusahaan, dengan peningkatan jumlah rencana investasi sebesar Rp. 9,91 milyar dan peningkatan realisasi jumlah investasi sebesar Rp. 0,65 milyar;
10. Sektor Jasa-jasa lain: terjadi peningkatan pada jumlah perusahaan PMDN sebanyak 12 (dua belas) perusahaan, dengan peningkatan jumlah rencana investasi sebesar Rp. 15,68 milyar dan peningkatan realisasi jumlah investasi Rp. 5,55 milyar. Sedangkan untuk perusahaan PMA terjadi peningkatan jumlah perusahaan sebanyak 21 (dua puluh satu) perusahaan dengan peningkatan jumlah rencana investasi sebesar \$US. 5,97 juta dan peningkatan realisasi jumlah investasi sebesar Rp. 24,23 juta.

Untuk lebih jelasnya, tingkat perkembangan investasi menurut Sektor dan bidang Usaha baik untuk perusahaan PMDN maupun perusahaan PMA sebelum dan setelah diberlakukannya Otonomi Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat, dapat dilihat dalam tabel 10

**Tabel 10 : Tingkat Perkembangan Investasi menurut Bidang Usaha/Sektor sebelum dan setelah Otonomi Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat.**

No.	Bidang usaha/Sektor	Fasilitas	Perusahaan	Rencana Investasi	Realisasi Investasi
1.	Pertanian Tanaman Pangan	PMDN	0	0	0
		P.M.A	0	0	0
2	Perikanan	PMDN	2	Rp.11,18 M	Rp32,24 M
		P.M.A.	0	0	\$US.1,29 Juta
3	Peternakan	PMDN	0	9	- Rp.0,02 M
		P.M.A	0	0	0
4	Perkebunan	PMDN	2	Rp.19,83 M	Rp. 1,28 M
		P.M.A	1	\$US. 13,74 J t	\$US.61,68 Jt
5	Kehutanan	PMDN	0	0	Rp. 5,59 M
		P.M.A	0	0	0
6	Pertambangan	PMDN	0	0	0
		P.M.A	1	0	\$US. 0,88 J t
7	Indusstri	PMDN	8	Rp. 79,54 M	Rp. 0,13 M
		P.M.A	5	\$US. 1,56 J t	\$US. 9,34 J t
8	Perhotelan	PMDN	25	Rp. 999,40 M	Rp. 566,45 M
		P.M.A	22	\$US. 26,67 J t	\$US.20,42 J t.
9	Pengangkutan	PMDN	1	Rp. 9,91 M	Rp. 0,65 M
		P.M.A	0	0	0
10	Jasa-jasa lain	PMDN	12	Rp. 15,88 M	Rp.5,55 M
		P.M.A	21	\$US. 5,97 J t	\$US. 24,23 J t

Sumber Data : Diolah

#### **b. Perkembangan Kegiatan Investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat Setelah Berlaku Otonomi Daerah**

Secara umum dapat dikemukakan bahwa tingkat perkembangan investasi baik investasi PMA maupun PMDN di Propinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2001 sampai Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Perusahaan yang melakukan investasi dengan menggunakan fasilitas PMDN pada Tahun 2001 berjumlah 98 perusahaan dan pada Tahun 2002 tetap berjumlah 98 perusahaan, berarti tidak terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan investasi.

Rencana investasi dari 98 jumlah perusahaan pada Tahun 2001 sejumlah Rp. 3.385.38 milyar dan realisasinya baru mencapai 828,67 milyar (24,48%). Sedangkan rencana investasi pada Tahun 2002 sejumlah Rp. 3.434.79 milyar dan realisasinya mencapai Rp.859,79 milyar (25,03 %). Jika dibandingkan jumlah rencana investasi dan jumlah investasi yang terealisasi pada Tahun 2001 dan 2002, terdapat peningkatan, yakni jumlah rencana investasi sebesar Rp. 1.049,41 milyar dan terdapat peningkatan jumlah realisasi investasi sebesar Rp. 31,12 milyar (0,55 %).

Rencana penggunaan Tenaga Kerja dari keseluruhan investasi pada Tahun 2001; untuk Tenaga Kerja Indonesia sejumlah 25.109 orang dan Tenaga Kerja Asing sebanyak 259 dan realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2001 sejumlah 5.296 orang (20,03%), sedangkan realisasi untuk Tenaga Kerja Asing realisasinya mencapai 14 orang (5,41%). Jika dibandingkan dengan rencana penggunaan Tenaga Kerja pada Tahun 2002, untuk Tenaga Kerja Indonesia sejumlah 25.112 orang dan Tenaga Kerja Asing sejumlah 260 orang, serta realisasi penggunaan Tenaga Kerja pada Tahun 2002, untuk Tenaga kerja Indonesia sejumlah 5.296 orang

(20,03 %) dan realisasi Tenaga Kerja Asing sejumlah 15 orang (5,77 %). Jika dibandingkan rencana penggunaan tenaga kerja, realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia dan realisasi penggunaan Tenaga Kerja Asing dari keseluruhan investasi pada Tahun 2001 dan Tahun 2002, maka untuk rencana penggunaan Tenaga Kerja Indonesia terdapat peningkatan sejumlah 3 orang, dan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing terdapat peningkatan 1 (satu) orang. Sedangkan untuk realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia terdapat penurunan yang cukup signifikan sejumlah 405 orang (0,55 %) dan realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing terdapat peningkatan 1 (satu) orang (0,36 %)

Perusahaan yang melakukan investasi dengan menggunakan fasilitas PMA pada Tahun 2001 berjumlah 84 perusahaan dengan rencana investasi sebesar USD. 5.206,28 juta, dibandingkan dengan jumlah perusahaan PMA pada Tahun 2002 berjumlah 104 perusahaan dengan rencana investasi sebesar USD. 5.619,94. Jika dibandingkan jumlah perusahaan PMA yang melakukan investasi pada Tahun 2001 dengan perusahaan PMA yang melakukan investasi Tahun 2002 terdapat peningkatan sejumlah 20 perusahaan. Sedangkan, untuk rencana jumlah investasi terdapat peningkatan sejumlah USD. 413,66 juta.

Rencana investasi dari 84 jumlah perusahaan pada Tahun 2001 sejumlah USD. 5.206,28 juta dan realisasinya sudah



mencapai USD. 2.373,09 juta (45,58 %). Sedangkan rencana investasi pada Tahun 2002 sejumlah USD. 5.619,94 juta dan realisasinya sudah mencapai USD. 3.077,2 juta (54,76 %). Jika dibandingkan jumlah rencana investasi dan jumlah investasi yang terealisasi pada Tahun 2001 dan 2002, terdapat peningkatan, yakni jumlah rencana investasi sebesar USD. 413,66 dan terdapat peningkatan jumlah realisasi investasi sebesar USD 704,11 juta (9,18 %).

Rencana penggunaan Tenaga Kerja dari keseluruhan investasi pada Tahun 2001; untuk Tenaga Kerja Indonesia sejumlah 22.095 orang dan Tenaga Kerja Asing sebanyak 488 dan realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2001 sejumlah 6.121 orang (27,70 %), sedangkan realisasi untuk Tenaga Kerja Asing realisasinya mencapai 218 orang (44,67%). Jika dibandingkan dengan rencana penggunaan Tenaga Kerja pada Tahun 2002, untuk Tenaga Kerja Indonesia sejumlah 22.911 orang dan Tenaga Kerja Asing sejumlah 550 orang, serta realisasi penggunaan Tenaga Kerja pada Tahun 2002, untuk Tenaga kerja Indonesia sejumlah 6.541 orang (28,55%) dan realisasi Tenaga Kerja Asing sejumlah 218 orang (44,67 %). Jika dibandingkan rencana penggunaan tenaga kerja, realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia dan realisasi penggunaan Tenaga Kerja Asing dari keseluruhan investasi pada Tahun 2001 dan Tahun 2002, maka untuk rencana

penggunaan Tenaga Kerja Indonesia terdapat peningkatan sejumlah 816 orang, dan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing terdapat peningkatan 62 (enam puluh dua) orang. Sedangkan untuk realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia terdapat peningkatan sejumlah 420 orang (0,85 %) dan realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing terdapat penurunan 12 orang (7,22 %)

Untuk lebih jelasnya, Tingkat perkembangan investasi dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2002, dapat dilihat dalam Tabel 11 dibawah ini:

**Tabel 11 : Tingkat Perkembangan Investasi dari Tahun 2001 s/d Tahun 2002 di Propinsi Nusa Tenggara Barat**

No.	Fasilitas	Jumlah Perusahaan	Rencana Investasi	Realisasi Investasi	Pencana PTKI dan PTKA	Realisasi PTKI dan PTKA
1.	PMDN	0	Rp. 1.049,41 Milyar	Rp. 31,12 Milyar	PTKI 3 orang	PTKI – 405 orang
					PTKA 1 orang	PTKA 1 orang
2.	P.M.A	20	\$US. 413,66 Juta	\$US. 704,11 Juta	PTKI 816 orang	PTKI 420 orang
					PTKA 62 orang	PTKA 12 orang

Sumber Data : Diolah

Sedangkan, Perkembangan Investasi berdasarkan alokasi investasi menurut sektor bidang usaha perusahaan PMDN/PMA di Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2002, adalah sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan: tidak terdapat perkembangan investasi dari Tahun 2001 sampai 2002;

2. Sektor Perikanan: Tidak terdapat peningkatan jumlah perusahaan maupun rencana jumlah investasi. Tetapi, terdapat peningkatan jumlah realisasi investasi pada Tahun 2002 sebesar Rp. 19 milyar (0,04%). Di samping peningkatan jumlah realisasi investasi, terdapat pula peningkatan pada jumlah perusahaan PMA yang menanamkan modalnya, yakni 2 (dua) buah perusahaan dengan peningkatan rencana investasi pada Tahun 2002 sebesar USD. 2,29 juta, realisasi investasi jika dilihat dari jumlah meningkat sebesar USD. 0, 71 juta, tetapi menurun dari segi prosentase sebesar (4,15 %);
3. Sektor Peternakan : baik dari jumlah perusahaan, rencana investasi maupun rencana investasi tidak terjadi peningkatan;
4. Sektor Perkebunan; tidak terjadi Peningkatan
5. Sektor Kehutanan; tidak terjadi peningkatan
6. Sektor Pertambangan: Tidak terjadi peningkatan pada jumlah perusahaan yang melakukan investasi baik investasi PMA maupun PMDN, dan rencana jumlah investasi. tetapi, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada realisasi jumlah investasi pada perusahaan PMA sebesar USD. 697,36 (30,65 %);
7. Sektor Industri: Tidak terjadi peningkatan pada jumlah perusahaan baik PMA maupun PMDN dan tidak pula terjadi peningkatan pada jumlah rencana investasi. Tetapi, terjadi

peningkatan pada realisasi jumlah investasi oleh perusahaan PMDN sebesar Rp. 79 milyar (0,07 %), dan terjadi pula peningkatan pada realisasi jumlah investasi oleh perusahaan PMA sebesar USD. 0,21 juta (0.007 %);

8. Sektor Perhotelan: Tidak terjadi peningkatan pada jumlah perusahaan PMDN. Tetapi, terjadi peningkatan pada jumlah rencana investasi sebesar Rp. 49,426 milyar dan terjadi peningkatan pada jumlah realisasi investasi sebesar Rp. 29,69 (0,68 %). Peningkatan juga terjadi pada jumlah perusahaan PMA yang melakukan investasi yakni 13 perusahaan, dan rencana investasi meningkat sebesar USD. 408.76 juta. Selain itu, terjadi juga peningkatan pada realisasi jumlah investasi sebesar USD. 2,78 juta.
9. Sektor Pengangkutan : Tidak terjadi peningkatan dan tidak ada perusahaan PMA;
10. Sektor Jasa lainnya: tidak terjadi peningkatan baik pada jumlah perusahaan PMDN maupun rencana jumlah investasi. tetapi, terjadi peningkatan pada realisasi jumlah investasi pada perusahaan PMDN sebesar Rp. 0.4 milyar (1,92 %);

Untuk lebih jelasnya, Tingkat perkembangan investasi berdasarkan bidang /sektor dari tahun 2002 – 2002 ,dapat dilihat dalam Tabel 12 dibawah ini.

**Tabel 12 : Tingkat Perkembangan Investasi berdasarkan Bidang/Sektor di NTB dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2002**

No.	Bidang/Sektor	Fasilitas	Perusahaan	Rencana Investasi	Realisasi Investasi
1.	Pertanian Tananan Pangan	PMDN	0	0	0
		P.M.A	0	0	0
2.	Pertanian	PMDN	0	0	Rp. 19 M
		P.M.A	2	\$US. 2,29 J t	\$US.0,71 J t
3.	Peternakan	PMDN	0	0	0
		P.M.A	0	0	0
4.	Perkebunan	PMDN	0	0	0
		P.M.A	0	0	0
5.	Kehutanan	PMDN	0	0	0
		P.M.A	0	0	0
6.	Pertambangan	PMDN	0	0	0
		P.M.A	0	0	\$US. 697,36 Juta
7.	Industri	PMDN	0	0	Rp. 79 M
		P.M.A	0	0	\$US. 0,21 J t
8.	Perhotelan	PMDN	0	Rp. 49,426 M	Rp. 29,69 M
		P.M.A	13	\$US.408,76 Jt	\$US.2,78 J t
9.	Pengangkutan	PMDN	0	0	0
		P.M.A	0	0	0
10.	Jasa lainnya	PMDN	0	0	Rp. 0,4 M
		PMA	0	0	0

**Data : Diolah**

Jika diperhatikan tabel diatas maka tampak bahwa perkembangan inveatsi berdasarkan bidang/sector usaha dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2002 terjadi perkembangan jumlah rencana dan realisasi investasi yang sangat signifikan pada sektor/bidang perhotelan.

Perubahan kebijakan investasi sebenarnya mempunyai pengaruh positif pada perkembangan investasi baik secara nasional maupun investasi di daerah, khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya perubahan kebijakan investasi khususnya dalam prosedur dan tata cara investasi setelah dilakukan pelimpahan wewenang perizinan dari Meninves/Kepala BKPM kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi telah memberikan keuntungan-keuntungan kepada para investor, dimana pengurusan perizinan investasi tidak lagi dilakukan di Jakarta – memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit -, tetapi penyelesaian/pengurusan perizinan cukup dilakukan di tingkat Daerah baik di Daerah Kabupaten/Kota, maupun Daerah Propinsi untuk investasi yang dilakukan di dua Kabupaten/Kota atau lebih. Apabila akhir-akhir ini jumlah investasi tidak meningkat secara positif dan signifikan, bukan disebabkan karena tidak berpengaruhnya perubahan kebijakan investasi, tetapi lebih dikarenakan oleh faktor situasi keamanan nasional yang belum kondusif, sehingga menyebabkan investor (terutama investor asing) selalu merasa khawatir dan kurang berminat menamamkan investasinya di Indonesia. Di samping itu, faktor ketidak-pastian hukum di Indonesia turut memberikan kontribusi pada terhadap menurunnya tingkat investasi di Indonesia.

### 3.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Investasi di Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil penelitian mengenai beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan investasi di Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah dikemukakan dan dipaparkan sebelumnya, maka dari beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan investasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor:

#### 1. Faktor Investor/perusahaan

Yang termasuk dalam faktor ini, adalah :

- a. Kesulitan permodalan yang dialami oleh para investor atau perusahaan yang akan melakukan investasi, sebagai akibat adanya kebijaksanaan uang ketat dan terjadinya gejolak ekonomi yang disebabkan karena adanya dipresiasi rupiah yang memicu tingginya tingkat suku bunga bank akhir-akhir ini;
- b. Investor /beberapa perusahaan tidak lagi menunjukkan keseriusannya untuk berusaha di daerah karena menghadapi berbagai kendala intern maupun ekstern yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek, sehingga rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam *feasibility studi* tidak sesuai lagi dengan kenyataan pada realisasi proyek, kendala yang bersifat internal bisa berupa kesulitan permodalan sebagai akibat kebijaksanaan uang ketat, atau tingginya bunga bank sebagaimana disebutkan diatas, sedangkan kendala yang bersifat eksternal

- dapat saja berupa kondisi-kondisi ekonomi, sosial-budaya, keamanan yang tidak lagi mendukung iklim investasi;
- c. Investor/ perusahaan kesulitan untuk mendapatkan lahan strategis yang disebabkan karena tingginya harga tanah di daerah-daerah potensial khususnya di kawasan perkotaan;
  - d. Terdapat beberapa investor/perusahaan yang telah mendapat persetujuan Penanaman Modal, tetapi tidak membuka Kantor Cabang di daerah, sehingga sulit dilakukan pemantauan sampai sejauh ini berkaitan dengan aktivitas yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam rangka realisasi proyek;
  - e. Kesulitan yang dialami investor/perusahaan untuk mendapatkan mitra usaha profesional di daerah. Hal ini disebabkan, karena masih terbatasnya tingkat kemampuan manajerial dan permodalan yang dimiliki pengusaha setempat;
  - f. Masih kurangnya pemahaman investor tentang kebijaksanaan pemerintah dan prosedur perizinan di daerah untuk pelaksanaan kegiatan investasi;
  - g. Terdapat adanya beberapa investor/pengusaha yang hanya bertujuan untuk spekulatif dengan berusaha mencari dan mendapatkan izin dan membebaskan tanah di kawasan tertentu bukan dipergunakan untuk kepentingan usaha tetapi sengaja ditelantarkan beberapa waktu untuk menunggu kenaikan harga agar dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;



## **2. Faktor infrastruktur**

Faktor infrastruktur ini berupa kurangnya sarana dan prasarana pendukung, seperti: kondisi jalan dan/atau jembatan yang kurang memadai, fasilitas bongkar/muat pelabuhan yang sangat terbatas, fasilitas listrik yang sangat terbatas, jarak antara tempat lokasi proyek (investasi) dengan sarana pendukung cukup jauh sehingga menyulitkan transportasi dan komunikasi. Semua kendala ini menyebabkan keengganan para investor untuk menanamkan modalnya di daerah khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Barat;

## **3. Faktor Keamanan**

Masih kurang kondusifnya keamanan dan kenyamanan yang mendukung iklim investasi, seperti sering terjadinya gangguan sosial, baik berupa kerusuhan-kerusuhan masal maupun unjuk rasa-unjuk rasa yang mengarah kepada anarkisme (kekerasan sosial), sehingga faktor ini menyebabkan para investor (terutama investor asing) enggan dan masih merasa khawatir untuk menanamkan modalnya di daerah, termasuk juga di Propinsi Nusa Tenggara Barat

## **4. Faktor Mental Aparat Birokrasi**

Mental dari aparat birokrasi sering kali juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan investasi. Kecenderungan terjadinya praktek-praktek KKN dan pungutan tidak resmi dengan cara sengaja memperlambat dan mempersulit penyelesaian perizinan

dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam kegiatan investasi juga menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan investasi di daerah tidak terkecuali di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Di samping terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan investasi sebagai mana tersebut di atas, khususnya terkait dengan kurangnya pemahaman investor tentang kebijaksanaan pemerintah dan prosedur perizinan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Nusa Tenggara Barat dikemukakan bahwa kendala yang masih dirasakan menghambat kegiatan investasi di NTB adalah terkait dengan sistem pelayanan perizinan investasi yang masih bersifat sektoral. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, selama ini Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi hanya melaksanakan tugas-tugas koordinatif, artinya pelayanan berbagai perizinan yang mendukung kegiatan investasi dilaksanakan oleh dinas/instansi teknis yang terkait dengan sektor/bidang investasi. sehingga sistem pelayanan perizinan investasi yang bersifat satu atap (*one stop service*) sebagaimana diharapkan untuk memperlancar dan mengembangkan kegiatan investasi masih belum dapat diwujudkan. Permasalahan sistem pelayanan perizinan ini juga merupakan suatu kendala berarti dalam kegiatan investasi di NTB.

Berkaitan dengan upaya menciptakan sistem pelayanan perizinan investasi yang bersifat satu atap tersebut, sebagaimana telah diakui oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal bahwa di dalam uraian sebelumnya, “salah satu pemicu memburuknya iklim investasi di Indonesia adalah adanya ego sektoral antar Departemen.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab-bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari penulisan Tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan kebijakan investasi sejak di berlakukannya Undang Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No, 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah dilakukan beberapa kali perubahan. Perubahan kebijakan investasi dilakukan melalui perubahan dan penyempurnaan Undang Undang;; Perubahan dan/atau penyempurnaan berbagai Peraturan Pemerintah; Perubahan dan/atau penyempurnaan berbagai Keputusan Presiden serta Perubahan dan/atau penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, perubahan kebijakan investasi lebih ditekankan pada perubahan Prosedur dan Tata Cara Penanaman Modal, yakni dengan diterbitkannya KEPPRES No. 117 Tahun 1999, kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan MENINVES/Kepala BKPM No. 37 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian

Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan Surat Keputusan MENINVES/Kepala BKPM No. 38 Tahun 1999 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. Tujuan dari pelimpahan kewenangan pemberian Persetujuan, Pemberian Fasilitas dan Perizinan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam rangka Otonomi Daerah dan untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan Penanaman modal di daerah.

2. Penerapan perubahan kebijakan investasi terjadi pada Prosedur dan Tata Cara Perizinan Investasi dalam rangka PMDN dan PMA. Untuk permohonan persetujuan investasi dapat diajukan kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM dan atau Menteri Luar Negeri Cq. Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan/atau kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Sedangkan, untuk pemberian Fasilitas dan Penerbitan Izin Pelaksanaan Penanaman Modal menjadi kewenangan dari Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas dasar pelimpahan kewenangan dari Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM berdasarkan SK MENINVES/Kepala BKPM No. 37 Tahun 1999.

Setelah berlakunya Otonomi Daerah khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Persetujuan Penanaman Modal, Izin Pemberian Fasilitas dan Pelaksanaan Penanaman Modal dapat diberikan/dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi, lebih lanjut Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sepanjang badan yang menangani kegiatan investasi di Daerah Kabupaten/Kota belum terbentuk. Berarti, setelah badan yang menangani investasi di Daerah Kabupaten/Kota terbentuk, maka Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Pemberian Fasilitas dan Pelaksanaan Penanaman Modal dapat dikeluarkan oleh Ketua Badan yang menangani Penanaman Modal di Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan ini dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang No. 22 Tahun 1999 dan diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130 – 37 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota Dan Daftar Kewenangan Kabupaten Kota Dan Kota Perbidang Dari Departemen/LPND.

3. Perubahan kebijakan investasi terutama perubahan tentang Prosedur dan Tata Cara Perizinan investasi setelah berlakunya Otonomi Daerah, telah memberikan keuntungan-keuntungan pada investor yang akan menanamkan modalnya di daerah khususnya di NTB, karena pengurusan perizinan investasi di daerah tidak lagi diselesaikan melalui BKPM Jakarta, tetapi cukup diselesaikan di daerah sehingga tidak memakan waktu dan biaya yang besar. Di samping itu

perubahan kebijakan prosedur dan tata cara penanaman modal telah memberikan pengaruh positif dan sangat signifikan pada tingkat perkembangan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat, baik pada peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan investasi; jumlah rencana investasi, maupun jumlah realisasi investasi.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat, disebabkan karena berbagai faktor. Faktor (1). Faktor dari Investor, di antaranya berupa: (a). Kesulitan permodalan; (b). Investor /beberapa perusahaan tidak memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan investasi di daerah; (c). Investor/ perusahaan kesulitan untuk mendapatkan lahan strategis untuk investasi; (d). Kesulitan yang dialami investor/perusahaan untuk mendapatkan mitra usaha profesional di daerah; (2). Faktor infrastruktur: Faktor infrastruktur ini berupa kurangnya sarana dan prasarana pendukung, seperti: kondisi jalan dan/atau jembatan yang kurang memadai, fasilitas bongkar/muat pelabuhan yang sangat terbatas, fasilitas listrik yang sangat terbatas, jarak antara tempat lokasi proyek (investasi) dengan sarana pendukung cukup jauh sehingga menyulitkan transportasi dan komunikasi. (3). Faktor Keamanan: Berupa, masih kurang kondusifnya keamanan dan kenyamanan yang mendukung iklim investasi. (4). Faktor Mental Aparat Birokrasi: Mental dari aparat birokrasi sering kali juga menjadi kendala dalam

pelaksanaan kegiatan investasi. Kecenderungan terjadinya praktek-praktek KKN dan pungutan tidak resmi dalam penyelesaian perizinan investasi.

Kendala lain yang masih dirasakan sebagai penghambat kegiatan investasi di NTB adalah terkait dengan sistem pelayanan perizinan investasi yang masih bersifat sektoral. Sehingga sistem pelayanan perizinan investasi yang bersifat satu atap (*one stop service*) sebagaimana diharapkan untuk memperlancar dan mengembangkan kegiatan investasi masih belum dapat diwujudkan. Permasalahan sistem pelayanan perizinan ini juga merupakan suatu kendala berarti dalam kegiatan investasi di NTB.

## **B. S a r a n**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan dalam penulisan Tesis ini, maka disarankan:

1. Pelayanan Prosedur dan perizinan investasi baik di tingkat nasional maupun di Propinsi Nusa Tenggara Barat hendaknya dilakukan dengan Sistem Pelayanan Satu Atap (*One Stop Service*) untuk memudahkan investor dan memotong rantai birokrasi;
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum menjalankan kewenangan pemerintahan dalam bidang investasi, agar lebih proaktif dan berinisiatif menterjemahkan kebijakan investasi dengan mengimplementasikannya dalam bentuk Peraturan Daerah dan kebijakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1998, *Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasinya*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Abdurrachman, A, 1992, *Enseklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Adolf, Huala, 1998, *Hukum Ekonomi Internasional*, cetekan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amirizal, 1999, *Hukum Bisnis Risalah Teori Dan Praktek*, Djambatan, Jakarta.
- Anoraga Panji, (I), 1995, *Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Anoraga, Panji, Nanik Widiyanti, 1992, *Pasar Modal : Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan*, Reinika Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1994, *BUMN Swasta dan Koperasi*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Arief Sidharta, Bernard, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Arsyad, Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus (I), 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum*, Semarang, 1999
- Basri, Faisal, 2002, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Erlangga, Jakarta
- Bintang, Sanusi & Dahkan, 2000, *Pokok- Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burton Simatupang, Richard, 1996 *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta
- Damanhuri, Didin, 1996, *Ekonomi Politik Alternatif Agenda Reformasi Abad 21*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Djumhana, Muhammad, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1999, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Dunn, N William, (disunting oleh Dr. Muhadjir Darwin), 2001, *Analisis Kebijakan Publik*, PT. Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.
- Dunning, Jhon H. 1972, *International Investment*, Penguin Books
- Deno Kamelus, 1998, *Fungsi Hukum Terhadap Ekonomi Di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana UNAIR, Surabaya.
- ELIPS, 1997, *Kamus Hukum Ekonomi*, Edisi Pertama, Proyek ELIPS, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Aplikasi*, Yayasan Asah-Asih, Malang, 1990
- Fuady, Munir, 1996. (I), *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Gautama, Sudargo, 1983, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung.
- Hadjon, Philipus. M, (et. Al.) *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamid, Edy Suandi, 2001, *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri dan Ilayu-Isyu Ekonomi Politik Indonesia*, Ekonomi, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1974. *Masalah-masalah dalam Joint Ventures antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, (II), 1998, *Undang-Undang Anti Monopoli Dalam Hukum Ekonomi Yang Berwawasan keseimbangan Kepentingan Menuju pada Sistem Ekonomi Yang Sehat, Naskah Diskusi Panel: reformasi Hukum Ekonomi*, FH Janabadra, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1972, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binacipta Bandung.
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN

- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1978, (I), *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Untag, Semarang.
- Hutagalung, Arie Sukanti, 1995, *Beberapa Alternatif Kerjasama Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perdagangan Di Atas Tanah Pemerintah Daerah*, *Majalah Hukum Trisakti*, No. 19 / Th. XX / Juli.
- Imawan, Riswanda, dkk, 1990, *Dampak Pembangunan Nasional Terhadap Peningkatan Kemampuan Daerah*, Laporan Penelitian, PAU, Studi Sosial, UGM, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, cetakan ke III, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Karseno, Arief Ramlan, dan Arti Adjie, 2001, *Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Kelembagaan di Indonesia*, UUP AMP, Yogyakarta
- Kartadjoemena, H.S, 1995, *Dunia Usaha dan Joint Venture Beberapa Catatan Mengenai Masalah Kebijaksanaan*, Makalah disampaikan Pada Seminar II PSHD – FHUI, Jakarta
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Kartasaputra, G. dkk. 1985, *Manajemen Pemanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta.
- Keraf, Corys, 1982, *Eksposisi dan Deskripsi*, Nusa Indah, Flores,.
- \_\_\_\_\_, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Nusa Indah, Flores, 1993
- \_\_\_\_\_, 1994, *Diksi dan Gaya Bahasa, Sari Retorika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- \_\_\_\_\_, *Eksposisi, Komposisi*, Gramedia Widiaswara Indonesia, Jakarta,
- Koetin, E.A, 1993, *Analisis Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2000, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPM, yogyakarta

- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2000, *Indonesia Menapak Abad 21, Kajian Ekonomi Politik*, Millinium Publisir, Jakarta.
- Mahfud, M.D, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Makalah dalam Penataran Penelitian Hukum Normatif, Unair, 11 – 12 Juni 1997
- Moleong, Lexy J, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994
- Mubyarto, 2001, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Muhadjir, 1996, Noeny, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raka Sarasin, Jogjakarta.
- Mulya Lubis, T. dan Buxbaum, Richard M, 1986, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara-Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Munansa K.H, 1993, *Istilah Ekonomi dan Pasar Modal*, Media Cipta, Jakarta
- Naisbitt, Jhon 1994, *Global Paradox (alih bahasa Drs. Budijanto)*, Binapura Aksara, Jakarta.
- Nasution. S, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Napitupulu, R.P, *Hubungan GATT 1994, APEC dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994*, Makalah Seminar 2 Hari, Pusat Kajian Hukum, Jakarta 9 Desember 1994
- Nugroho, Riant, 2000, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Jakarta
- Pandjaitan, Haloman, 1995/1996, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Perubahan / Penyempurnaan Undang-Undang Penanaman Modal Asing*, BPHN, Jakarta.
- Panglaykim, 1981, *Perusahaan Nasional dalam Bisnis Internasional*, CSIS, Jakarta.
- Pratikno, 1991, *Perumusan Pola Hubungan Pusat – Daerah dalam Rangka Realisasi Otonomi Daerah (Laporan Penelitian – Conten Analisis)*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sospol, UGM, Yogyakarta.

Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2001, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Untuk Tesis*, Semarang,

\_\_\_\_\_, 2001, *Pedoman Penulisan Tesis*, Semarang,

Pujirahayu Esmi Warassih, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan, FH. Undip, Semarang.

Purwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1980

Putra, Fadillah, 2001, *Paradigma Kritis dalam Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rajaguguk Erman, (I), 1995 *Hukum Investasi I*, Tanpa penerbit, Jakarta.

\_\_\_\_\_, (II), 1985, *Indonesianisasi Saham*, Bina Aksara, Jakarta.

\_\_\_\_\_, Bahan Kuliah: *Hukum Investasi*, Fakultas Hukum, UI tanpa tahun

Rahardjo, Satjipto, 1991, (I), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

\_\_\_\_\_, 1990, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Angkasa, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1985, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, CV. Sinar Baru, Bandung.

Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra, IB, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidartha, 1989 *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, CV Remaja Karya, Bandung

Rasyid, Ryaas, 2000, *Prospek Otonomi, dalam Otonomi atau Federasi*, Harian Umum Suara pembaharuan dan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA IV)

Riwu Kaho, Josef, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Ritzer, George, Penyadur: 1992, Alimandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Sjahrir, 1994, *Ekonomi Indonesia dalam Prespektif Bisnis*, PT. Jurnalis Aksara Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Analisis Bursa Efek*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Salim Agus (penyunting), 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba)*.PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Saleh, Ismail, *Hukum dan Ekonomi*, 1990, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sambutan Pengarahan Menteri Penggerak Dana Investasi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Pada *Seminar Pelaksanaan PP No. 20 Tahun 1994 dan SK Meninves No. 15 Tahun 1994 serta Rencana Pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal* di Jakarta Tanggal 8 – 9 Desember 1994
- Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Sarundajang, 1999, *Arus Balik kekuasaan Pusat ke Daerah*, Sinar harapan, Jakarta
- Sasono, Adi, 1999, *Memperkokoh Ekonomi Rakyat Menuju Indonesia Baru*, Sintesis IV, No. 29
- Simatupang, Richard Burton, 1996, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1988, *Penelitian Hukum Normatif Suatu I'injauaun Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, IND-HICCCO, Jakarta.
- Soebagjo, Felix O. Oktober 1990, *Deregulasi Kepastian Hukum dan Usaha Memantapkan Iklim Investasi*, Jurnal: Hukum dan Pembangunan No. 5/Th.XX.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta..
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum*, Remaja Karya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif*, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 5/Th 1988, halaman 13 – 23.
- \_\_\_\_\_, *Teori-Teori Dalam Ilmu Hukum*, dalam Majalah Masalah-masalah Hukum No. 1 Th. 1989, Halaman 32 – 39.

- \_\_\_\_\_, *Fungsi Teori Dalam Penelitian Empiris* dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 7 Tahun 1991, Halaman 21 – 26.
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum, No. 9 Tahun 1991, halaman 44 – 50.
- \_\_\_\_\_, *Peran Metodologi Penelitian Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 5 Th. 1992, halaman 32 – 40.
- \_\_\_\_\_, *“Grounded Research” Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 9 Tahun 1993, halaman 28 - 37
- Suara Pembaharuan, 2001, *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Suhartono, Irawan, 1999, *Metode Penelitian Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Sukardi, 1998, *Kebijakan Penanaman Modal Asing Terhadap Pembangunan Di Indonesia*, Jurnal Yuridika, FH UNAIR Surabaya No. 1 & 2 Th. XIII, Januari-April.
- Sumantoro (I), 1987, *Kegiatan Perusahaan Multinasional Problem Politik hukum dan Ekonomi Dalam pembangunan Nasional*, Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (III), 1984, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal Dan Pasar Modal (problems Of Investment In Equities and In Securities*, Bina Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1986, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengalihan Teknologi dalam Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Ekonomi*, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Suni, Ismail, dan Rocmat, Ridioro, 1976, *Tinjauan dan Pembahasan Atas UUPMA dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Susanto, I.S, Tanya L. Bernard, 2000, *Wajah Hukum di Era Reformasi, Kumpulan karya Ilmiah Menyambut 70 tahun Prof. Dr Satjipto Rahardjo*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Thaib, Dahlan & Mia Karmila, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, FH. UI, Yogyakarta.
- Usman, Marzuki, 1995, *ABC Pasar Modal*, Kerjasama Antara Institut Bankir Indonesia dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jakarta.
- Wibisono, Cristanto, 2001, *Otonomi: Politik atau Ekonomi*, dikutip dari buku *Buku Otonomi Daerah: Peluangdan Tantangan*, Suara pembaharuan, Jakarta
- Widjojo, A.W, 1995, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, Rajawali Press, Jakarta.
- Wijaya, Rai, IG., 2000, *Penanaman Modal, Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan dalam Rangka PMA dan PMDN*, Pradnya Paramita, Jakarta.

#### **Perundang-undangan.**

- Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 (Tap. MPR No. IV/MPR/1999)
- Undang-Undang No. 1 Th. 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.
- Undang-Undang No. 11 Th. 1970 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Th. 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.
- Undang-Undang No. 6 Th. 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Daerah Propinsi
- Peraturan Pemerintah No. 40 Th. 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Th. 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.



Peraturan Pemerintah No. 20 Th. 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal.

Keputusan Presiden No. 115 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal.

Keputusan Presiden No. 117 Tahun 1999 Tentang Perubahan kedua Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal.

Keputusan Presiden No. 121 tahun 1999 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No. 183 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 116 Tahun 1998.

Keputusan Presiden No. 122 tahun 1999 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

SK. Menteri Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 15 / SK / 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal.

SK. Meninves/Kepala BKPM No. 17/SK/1994 tentang Pemilikan Saham dalam Rangka PMA

SK. Meninves/Kepala BKPM No. 37/SK/ 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Penanaman Modal kepada Gubernur kepala Daerah Propinsi.

SK. Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/ 1999 tentang Prosedur dan Tata Cara Penanaman Modal

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130 – 67 Tahun 2002 tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND.